

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
BERKELANJUTAN DI KOTA BATU**
(Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik
di Kota Batu)

Tesis

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister



Oleh:

INNEKE MEILIA FADLINA
NIM. 116030111111008

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KEKHUSUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**

Lembar Pengesahan

TESIS

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
DI KOTA BATU**

(Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu)

Oleh :

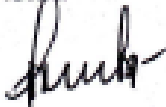
INNEKE MEILIA FADLINA

NIM : 116030111111008

telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 15 Januari 2013
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Ketua



Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
NIP. 19610905 198601 1 002

Anggota



Dr. M. Saleh Soeaidy, MA
NIP. 19540212 198103 1 008

Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik



Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, PhD.
NIP. 19670217 199103 1 000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya




Prof. Dr. Sumartono, MS

NIP. 19540916 198212 1 001

JUDUL TESIS:

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KOTA BATU
(Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu)

Nama Mahasiswa : INNEKE MEILIA FADLINA
NIM : 116030111111008
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Minat : Perencanaan Pembangunan Daerah

KOMISI PEMBIMBING:

Ketua : Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
Anggota : Dr. M. Saleh Soeaidy, MA

TIM DOSEN PENGUJI:

Dosen Penguji I : Dr. Sarwono, M.Si
Dosen Penguji II : Dr. Imam Hanafi, M.Si

Tanggal Ujian : 15 Januari 2013

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 15 Januari 2013

Mahasiswa,



Nama : INNEKE MEILIA FADLINA
NIM : 116030111111008
PS : Magister Ilmu Administrasi Publik
PPSUB

RIWAYAT HIDUP

Inneke Meilia Fadlina, lahir di Malang pada tanggal 29 Mei 1980. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dengan ayah Sofyani (Alm) dan Ibu Rini Pratiwi. Pendidikan dasar dimulai dari SDN Pagentan 05 Singosari, Malang; SMPN 05 Malang dan SMUN 02 Malang. Pada tahun 1999 melanjutkan studi pada Program Studi Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2011 menempuh studi Magister Ilmu Administrasi Publik kekhususan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pengalaman kerja sebagai staf Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sejak tahun 2005 sampai sekarang.

Malang, Januari 2013
Penulis,

Inneke Meilia Fadlina

*“Allah telah menurunkan air dari langit untuk dijadikan sebagai sumber kehidupan di bumi, kemudian ditumbuhkanNya dengan air itu tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi berwarna kekuning-kuningan dan kering dan kemudian dijadikanNya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada keadaan yang demikian itu benar-benar sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal”
(Az-zumar: 21)*

*Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang tercinta:
“Abah” Sofjani (Alm) dan “Mama” Rini Pratiwi
Atas segala panjatan doa dan kasih sayang yang tak pernah putus oleh waktu
“Bapak” Sujarwo dan “Ibu” Minarsih (Almh)
Untuk pengorbanan dan kerja keras selama hidup demi kebahagiaan putra dan putri
“Suamiku” Widjang Suseno
Untuk pengertian, dukungan dan kesabarannya
“Anak-anakku” tersayang, Keisha Naila Imtiyaz dan Rafif Atha Arjuna
Semangat dan cinta dalam hidupku*

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Selesainya tesis ini merupakan salah satu pencapaian penuh perjuangan bagi penulis dan hanya dengan pertolongan-Nya serta dukungan dari berbagai pihak tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku ketua komisi pembimbing dan Dr. Saleh Soeaidy, MA, selaku anggota komisi pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan kerendahan hati serta kesabaran dalam memberikan bimbingan, ilmu, arahan, motivasi dan inspirasi bagi penulisan tesis ini;
2. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana BAPPENAS beserta seluruh staf, atas fasilitas dan kesempatan beasiswa yang diberikan kepada penulis;
3. Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan izin dan fasilitas selama proses perkuliahan di FIA-UB;
4. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Publik, beserta para dosen pengajar Program Magister Ilmu Administrasi Publik kekhususan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Dr. Sarwono, M.Si dan Dr. Imam Hanafi, M.Si yang telah berkenan untuk menjadi dosen penguji serta memberikan saran demi lebih baiknya tesis ini;
6. Jajaran Pemerintah Daerah Kota Batu yang telah memberikan kesempatan tugas belajar kepada penulis;

7. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu beserta pejabat struktural baik yang masih aktif maupun yang bertugas pada SKPD lain, khususnya Agung Supriadi, SP; para PPL, serta semua pihak yang telah bersedia menjadi informan selama dilakukannya penelitian;
8. Teman-teman TM-VIII tahun 2011 Magister Ilmu Administrasi FIA-UB atas kebersamaan dalam senang dan susah. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada suamiku, Widjang Suseno, SP serta kedua buah hatiku Keisha Naila Imtiyaz dan Raffif Atha Arjuna, atas segala dukungan dan pengertiannya kepada penulis selama menempuh studi di Program MIA-FIA UB. Juga kepada orang tua penulis, yang telah memberikan doa restu dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Malang, Januari 2013
Penulis

Inneke Meilia Fadlina

RINGKASAN

Inneke Meilia Fadlina, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2012. Perencanaan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Kota Batu (Kajian Tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu). Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, Anggota : Dr. Saleh Soeaidy, MA.

Pengembangan pertanian organik merupakan perwujudan nyata dari upaya pemerintah Kota Batu, Propinsi Jawa Timur dalam mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan. Hal ini ditempuh sebagai langkah untuk mengatasi dampak negatif penerapan teknologi pertanian konvensional pada aspek ekonomi petani, sosial dan lingkungan. Upaya pembangunan tidak lepas dari kegiatan perencanaan sebagai proses awal pelaksanaan pembangunan. Suatu perencanaan yang baik diharapkan memberi peluang terselenggaranya upaya pembangunan dengan lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: 1) perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu; 2) *stakeholder* dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu; 3) strategi perencanaan untuk mewujudkan keberlanjutan pengembangan pertanian organik di Kota Batu; 4) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perencanaan pengembangan pertanian organik didasari oleh adanya permasalahan penurunan daya dukung tanah pada lahan pertanian serta tingginya tingkat pemakaian pestisida oleh petani yang ditunjukkan adanya residu pestisida pada tanah dan produk hortikultura. Didukung oleh potensi SDA dan SDM yang dimiliki, maka dirancang upaya pengembangan pertanian organik dengan menentukan strategi yang berpijak pada permasalahan serta kondisi tujuan yang diharapkan, yaitu mewujudkan pertanian organik dengan konsep agrowisata di Kota Batu. Perencanaan dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratis, *top down* dan *bottom up*, serta partisipasi.
2. Perencanaan yang dilakukan telah melibatkan *stakeholder* utama sebagai penerima manfaat kegiatan (petani, kelompok tani); *stakeholder* penunjang yang berperan sebagai perantara dan pendukung proses penyampaian kegiatan (Dinas Pertanian dan Kehutanan, perguruan tinggi, aparat desa, PPL, POPT, praktisi organik, media massa); serta *stakeholder* kunci yang berperan sebagai penentu kebijakan yang menunjang kelancaran terlaksananya kegiatan (Walikota dan anggota DPRD). Masih ada *stakeholder* yang belum dilibatkan dalam perencanaan, dan mekanisme koordinasi yang dilakukan belum mampu memberikan komitmen yang kuat diantara pihak-pihak yang terlibat.
3. Ditinjau dari prinsip interaktif pada perencanaan, maka perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu belum ideal karena hanya memenuhi prinsip partisipatif dan prinsip kesinambungan, adapun prinsip holistik tidak terpenuhi. Strategi yang ditempuh agar pertanian organik dapat berkelanjutan

4. adalah dengan membentuk kawasan organik di beberapa desa sebagai *pilot project*. Namun demikian perencanaan kawasan organik yang dilakukan lebih mengutamakan penguatan sektor hulu (produksi organik) dan belum mengintegrasikan penguatan di sektor hilir (pasca panen, pemasaran).
5. Faktor pendukung adalah: a) dukungan SDA Kota Batu; b) potensi ekonomi, c) dukungan sosial kemasyarakatan: kesediaan petani, d) dukungan pemerintah Kota Batu; e) dukungan kelembagaan: keberadaan kelompok tani dan gapoktan; dan f) faktor pendukung lainnya seperti potensi peternakan dan dukungan media massa. Adapun faktor pendukung eksternal meliputi wisatawan yang mengunjungi Kota Batu, lokasi perguruan tinggi yang cukup dekat dari Kota Batu, peraturan nasional yang mendukung penerapan pertanian organik, sumber dana dari luar Kota Batu, serta adanya lembaga sertifikasi organik. Sedangkan faktor yang menghambat meliputi: a) kendala teknis di lapangan; b) kendala sumber daya terutama pola pikir petani yang cenderung konvensional; c) kendala administrasi yaitu tidak ada dokumen rencana teknis, kurangnya koordinasi, tidak ada penganggaran honorarium tim pelaksana teknis pada kegiatan pengembangan kawasan pertanian organik.

Rekomendasi yang dapat disampaikan bahwa perencanaan pembangunan pertanian berkelanjutan dapat diwujudkan melalui pengembangan pertanian organik di suatu daerah. Perencanaan yang dilakukan harus terpadu dan menyeluruh (holistik) dengan mempertimbangkan keterkaitan sektor hulu-hilir secara berkesinambungan. Penguatan sektor hulu dan hilir dilakukan secara bersama-sama dari mulai perencanaan, dengan dikoordinir oleh sektor terkait dalam satu payung perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi antar *stakeholder* akan lebih efektif apabila melibatkan pihak manajemen puncak di tingkat pemerintahan kota, meliputi Walikota dan pimpinan SKPD terkait serta ditetapkan melalui SK oleh Walikota. Pendekatan kawasan merupakan salah satu alternatif strategi yang tepat dalam pengembangan pertanian organik. Bagi pemerintah Kota Batu disarankan untuk melanjutkan kegiatan pengembangan pada kawasan organik yang sudah dibentuk dengan fokus memperkuat motivasi petani yang telah muncul, melanjutkan pendampingan petani kearah kemandirian dan merintis pemasaran yang pada perencanaan sebelumnya belum dilakukan. Perencanaan hendaknya disusun secara cermat dengan memperhitungkan kebutuhan biaya, waktu pencapaian target, keterpaduan subsidi input dan subsidi output, indikator keberhasilan yang terukur dan diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan yang ditetapkan secara legal.

Kata kunci: kawasan, pembangunan pertanian berkelanjutan, perencanaan, pertanian organik

SUMMARY

Inneke Meilia Fadlina, Post Graduate Program, Faculty of Administrative Sciences, University of Brawijaya, 2013. *Sustainable Agricultural Development Planning in Batu (Study on Development of Organic Farming in Batu)*. Commission Advisor, Chairman: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, Members: Dr. Soeaidy Saleh, MA.

The development of organic farming is a real manifestation of the government's efforts in Batu, East Java in achieving sustainable agricultural development. It is under taken as a measure to overcome the negative impact of the application of conventional agricultural technologies on the economic aspects of farmers, social and environmental. Development efforts cannot be separated from the activities of the planning process as the beginning of the development. Good planning efforts are expected to provide opportunities to better development.

This study aims to describe and analyze: 1) planning development of organic farming in Batu, 2) stakeholders in the planning of the development of organic farming in Batu, 3) planning strategies to realize sustainable development of organic farming in Batu, 4) supporting and inhibiting factors in the development planning of organic farming in Batu. The research method uses a descriptive qualitative approach. Data sources are from informants and documents. Data collection techniques are interviews, documentation and observation. Data is analyzed using an interactive model.

The results shows that:

- 1. The development planning of organic farming is based on the capacity of the soil problems on farms as well as high levels of pesticide use by farmers demonstrated by pesticide residues in soil and horticultural products. Powered by the potential of natural resources and human resources, it is designed efforts to develop organic agriculture by determining a strategy grounded in the problems and conditions of the expected goal, namely to realize organic farming with the concept of agro tourism in Batu. Planning is done through political, technocratic, top-down and bottom-up, and participation.*
- 2. The planning has involved major stakeholders as beneficiaries of the activities (farmers, farmer groups); supporting stakeholders having roles as intermediary and supporting the delivery of act supporting activities (Department of Agriculture and Forestry, college, village, PPL, POPT, organic practitioners, the media), as well as key stakeholders who play a role as a determinant of policies that support the smooth implementation of the activities (the Mayor and members of parliament). There are still stakeholders that have not been involved in the planning.*
- 3. Judging from the interactive principles to the planning, the development planning of organic farming in Batu is not ideal because it only meets the principles of participatory and sustainable principles, while the holistic principles are not met. The strategy pursued in order to be sustainable organic agriculture is to form organic in some rural areas as pilot projects. However, the planning area does prefer to strengthen the upstream sector (organic production) and not to integrate the reinforcement in the downstream (post-harvest, marketing).*
- 4. Supporting factors are: a) potential of natural resources in Batu, b) economic*

potential, c) social support: the willingness of farmers, d) government support; e) institutional support: the existence of farmer groups and gapoktan, and f) other supporting factors such as media support. The external support factors include tourists visiting Batu, college location quite close to Batu, national regulations that support the implementation of organic farming, the source of funds from outside, and the presence of organic certification bodies. While the inhibiting factors includes: a) technical problems in the field, b) resource constraints, especially the mindset of farmers tend to be conventional, c) administrative constraints: no documents for technical planning, lack of coordination, no budgeting honorarium of technical implementation team.

Recommendations proposed are the planning of sustainable agricultural development can be realized through the development of organic farming in the region. The planning should be integrated and comprehensive (holistic) taking into account the upstream-downstream linkages continuously. Strengthening the upstream and downstream sectors together from initial planning which is coordinated by the relevant sectors under one umbrella of regional development planning. Regional approach (cluster) is an alternative appropriate strategy in the development of organic agriculture. For Batu advised to continue the development of the organic cluster which has been established focusing on strengthening the motivation of farmers that have appeared, to continue assisting farmers towards independence, and pioneering marketing which has not been done in the previous planning. Planning should be drafted carefully to take into account the needs of cost, time achievement of targets, measurable indicators of success, and embodied in a set of legal planning documents.

Keywords: cluster, organic farming, planning, sustainable agriculture development

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perencanaan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Kota Batu (Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu)”.

Dalam tulisan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu, *stakeholder* dalam perencanaan, strategi untuk mewujudkan keberlanjutan pengembangan pertanian organik di Kota Batu, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan serta menjadi masukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

Malang, Januari 2013
Penulis

Inneke Meilia Fadlina

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| IDENTITAS PENGUJI | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| RIWAYAT HIDUP | vi |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vii |
| RINGKASAN | ix |
| SUMMARY | xi |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| DAFTAR ISTILAH | xix |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Masalah Penelitian | 16 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 16 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 16 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 18 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 18 |
| 2.2 Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan..... | 30 |
| 2.2.1 Administrasi Publik | 30 |
| 2.2.2 Administrasi Pembangunan..... | 32 |
| 2.2.2.1 Administrasi untuk Pembangunan | 34 |
| 2.3 Perencanaan Pembangunan | 37 |
| 2.3.1 Pengertian dan manfaat Perencanaan Pembangunan | 37 |
| 2.3.1 Jenis Perencanaan Pembangunan | 40 |
| 2.3.2 Proses Perencanaan Pembangunan | 43 |
| 2.4 Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)..... | 46 |
| 2.4.1 Pengertian dan ciri umum PPD | 46 |
| 2.4.2 Faktor-faktor dalam PPD | 49 |
| 2.5 Perencanaan Strategis..... | 52 |
| 2.6 Keterkaitan PPD dan Perencanaan Strategis..... | 55 |
| 2.7 Pembangunan Pertanian Berkelanjutan..... | 57 |
| 2.7.1 Pembangunan Berkelanjutan | 57 |
| 2.7.2 Pembangunan Pertanian Berkelanjutan | 62 |
| 2.7.2.1 Konsep Pertanian Organik..... | 66 |
| 2.8 <i>Stakeholder</i> pertanian organik | 75 |
| 2.9 Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu | 78 |
| | |
| BAB III. ANALISIS SOSIAL SETING PENELITIAN | 81 |
| 3.1 Gambaran Umum Kota Batu | 81 |
| 3.1.1 Kondisi administrasi, geografi dan demografi Kota Batu..... | 81 |
| 3.1.2 Potensi pengembangan wilayah | 83 |

| | |
|--|-----|
| 3.1.3 Profil sektor pertanian Kota Batu | 91 |
| 3.2 Visi dan Misi Kota Batu | 91 |
| 3.3 Profil Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu | 93 |
| 3.3.1 Struktur organisasi..... | 93 |
| 3.3.2 Profil kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu . | 96 |
| 3.4 Analisis | 97 |
| | |
| BAB IV. METODE PENELITIAN | 99 |
| 4.1 Jenis Penelitian | 99 |
| 4.2 Fokus Penelitian..... | 99 |
| 4.3 Penetapan Lokasi dan Situs Penelitian | 100 |
| 4.4 Sumber Data | 101 |
| 4.5 Pengumpulan Data..... | 103 |
| 4.6 Teknik Analisis Data..... | 106 |
| 4.7 Keabsahan Data | 108 |
| | |
| BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN | 111 |
| 5.1 Hasil Penelitian | 111 |
| 5.1.1 Perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu | 111 |
| 5.1.1.1 Deskripsi upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu..... | 111 |
| 5.1.1.2 Tinjauan keadaan | 116 |
| 5.1.1.3 Penetapan tujuan dan strategi..... | 146 |
| 5.1.1.4 Mekanisme / tahap perencanaan..... | 154 |
| 5.1.1.5 Pendekatan perencanaan | 172 |
| 5.1.2 <i>Stakeholder</i> perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu | 178 |
| 5.1.2.1 Identifikasi <i>stakeholder</i> | 179 |
| 5.1.2.1 Peran <i>stakeholder</i> | 183 |
| 5.1.3 Strategi untuk mewujudkan keberlanjutan perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu | 189 |
| 5.1.3.1 Penerapan prinsip interaktif dalam rencana pengembangan pertanian organik..... | 190 |
| 5.1.3.2 Strategi untuk mewujudkan keberlanjutan pertanian organik di Kota Batu..... | 195 |
| 5.1.4 Faktor-faktor pendukung dan penghambat perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu | 202 |
| 5.1.4.1 Faktor Pendukung | 202 |
| 5.1.4.2 Faktor Penghambat | 215 |
| 5.2 Pembahasan | 228 |
| 5.2.1 Perencanaan Pengembangan Pertanian organik di Kota Batu..... | 228 |
| 5.2.1.1 Deskripsi upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu..... | 230 |
| 5.2.1.2 Tinjauan keadaan | 237 |
| 5.2.1.3 Penetapan tujuan dan strategi..... | 247 |
| 5.2.1.4 Mekanisme / tahap perencanaan..... | 251 |

| | |
|---|-----|
| 5.2.1.5 Pendekatan perencanaan | 259 |
| 5.2.2 <i>Stakeholder</i> perencanaan pengembangan Pertanian organik di Kota Batu | 268 |
| 5.2.2.1 Identifikasi <i>stakeholder</i> | 268 |
| 5.2.2.1 Peran <i>stakeholder</i> | 273 |
| 5.2.3 Strategi untuk mewujudkan keberlanjutan perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu | 282 |
| 5.2.3.1 Penerapan prinsip interaktif dalam rencana pengembangan pertanian organik..... | 282 |
| 5.2.3.2 Strategi untuk mewujudkan keberlanjutan pertanian organik di Kota Batu | 290 |
| 5.2.4 Faktor-faktor pendukung dan penghambat perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu | 299 |
| 5.2.4.1 Faktor Pendukung | 299 |
| 5.2.4.2 Faktor Penghambat | 305 |
| 5.2.5 Rekomendasi rencana pengembangan pertanian Organik di Kota Batu | 311 |
| BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 6.1 Kesimpulan | 319 |
| 6.2 Saran | 324 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 326 |

DAFTAR TABEL

| No. | Uraian | Halaman |
|------|--|---------|
| 1.1 | Beberapa kasus keracunan pestisida di Indonesia..... | 6 |
| 1.2 | Hasil analisis residu pestisida dalam buah & sayuran di Kota Batu | 12 |
| 2.1 | Pemetaan hasil penelitian terdahulu | 27 |
| 2.2 | Perbedaan antara pertanian konvensional dan pertanian organik..... | 70 |
| 2.3 | Fungsi dan pelaksana pengembangan pertanian organik secara Nasional..... | 76 |
| 3.1 | Penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha | 83 |
| 3.2 | <i>Location Quotient</i> (LQ) PDRB atas harga konstan Kota Batu terhadap Propinsi Jawa Timur tahun 2007-2010 | 84 |
| 3.3 | <i>Shift Share</i> PDRB atas harga konstan Kota Batu terhadap Propinsi Jawa Timur tahun 2007-2010..... | 85 |
| 3.4 | <i>Shift share</i> PDRB atas harga konstan sub sektor pertanian Kota Batu terhadap Propinsi Jawa Timur Tahun 2007-2010 | 86 |
| 3.5 | Pemanfaatan lahan pertanian Kota Batu Tahun 2011 | 89 |
| 5.1 | Sebaran titik sample pengujian tanah | 119 |
| 5.2 | Rata-rata residu pestisida dalam tanah pada lahan tanaman sayur, buah, dan pangan di Kota Batu | 120 |
| 5.3 | Hasil analisa tanah di Kota Batu | 121 |
| 5.4 | Konsentrasi POPs dan OCs di Kota Batu tahun 2010..... | 123 |
| 5.5 | Kriteria mutu air berdasarkan PP No. 82 tahun 2001 | 124 |
| 5.6 | Data produksi hortikultura unggulan di Kota Batu tahun 2011 | 132 |
| 5.7 | Data kelompok tani di Kota Batu tahun 2011 | 136 |
| 5.8 | Pelaku usaha organik di Jawa Timur..... | 140 |
| 5.9 | Jumlah temak di Kota Batu tahun 2011 | 144 |
| 5.10 | Produksi pupuk organik di Kota Batu Tahun 2011..... | 144 |
| 5.11 | Gerakan penerapan teknologi di Kota Batu..... | 145 |
| 5.12 | Kegiatan pendukung pengembangan pertanian organik di Kota Batu tahun 2011 | 152 |
| 5.13 | Jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian Organik Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu..... | 161 |
| 5.14 | Susunan tim pelaksana teknis pengembangan kawasan organik Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu tahun 2011 | 182 |
| 5.15 | Sebaran Tanaman Pangan dan Hortikultura Unggulan di Kota Batu | 244 |
| 5.16 | Kelompok <i>Stakeholder</i> dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu | 269 |
| 5.17 | <i>Stakeholder</i> dalam perencanaan pengembangan pertanian organik..... | 279 |

DAFTAR GAMBAR

| No. | Uraian | Halaman |
|-----|---|---------|
| 3.1 | Penggunaan Lahan Tiap Kecamatan di Kota Batu | 89 |
| 3.2 | Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu | 95 |
| 4.1 | Komponen Analisis Data Model Interaktif..... | 107 |
| 5.1 | Rata-rata Residu Pestisida dalam Tanah pada Lahan Tanaman Sayur, Buah dan Pangan di Kota Batu | 120 |
| 5.2 | Penyerahan Bantuan Sarana Produksi Organik berupa Bibit oleh Walikota Batu kepada Perwakilan Petani..... | 169 |
| 5.3 | Sosialisasi Pengembangan Kawasan Hortikultura di Desa Sumberejo, Kec. Batu | 177 |
| 5.4 | Walikota Batu beserta perwakilan anggota DPRD hadir dalam acara panen perdana dan <i>launching</i> Kawasan Pertanian Organik Desa Torongrejo Kec. Junrejo | 181 |
| 5.5 | Lokasi penanaman sayur organik di Desa Torongrejo | 218 |
| 5.6 | Alur Penentuan Alokasi Kegiatan Pendukung Pengembangan Pertanian Organik | 256 |
| 5.7 | Diagram Alir Kegiatan dalam Rencana Pembentukan Kawasan Pertanian Organik di Kota Batu | 257 |
| 5.8 | Mekanisme Koordinasi dalam Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu | 280 |

DAFTAR ISTILAH

| | | |
|------------------------|---|--|
| ADD | : | Alokasi Dana Desa |
| Gapoktan | : | Gabungan Kelompok Tani |
| GAP | : | <i>Good Agricultural Practices</i> , merupakan panduan budidaya tanaman untuk menghasilkan produk bermutu yang intinya menerapkan teknologi ramah lingkungan serta prinsip penelusuran balik (<i>traceability</i>) melalui pencatatan riwayat budidaya tanaman |
| Kawasan organik | : | Ruang geografis yang didelineasi oleh batas imajiner ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis pertanian organik |
| OCs | : | Senyawa pestisida dalam bentuk <i>organochlorins</i> , merupakan zat pencemar yang bersifat kronis dan bersifat racun (misalnya DDT dan turunannya) |
| OPT | : | Organisme Pengganggu Tanaman (hama atau penyakit) |
| POPT | : | Pengendali OPT, yaitu petugas dibawah lingkup Dinas Pertanian Propinsi yang ditugaskan bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk mengamati perkembangan OPT di masing-masing wilayah dan melakukan koordinasi tindakan pengendalian |
| POPs | : | <i>Persistent Organic Pollutant</i> , merupakan senyawa kimia organik yang bersifat toksik dan dapat bertahan lama di lingkungan (persisten) |
| Pertanian konvensional | : | Metode produksi pertanian yang dicirikan banyak menggunakan masukan (saprodi) kimia sintetik/buat-an, baik pupuk, pestisida, dan zat pengatur tumbuh |
| Pertanian organik | : | metode produksi yang mengatur lahan pertanian dan lingkungannya sebagai satu sistem dengan fokus meningkatkan kesehatan ekosistem pertanian, berasaskan daur ulang hara secara hayati |
| PPL | : | Petugas Penyuluh Lapangan |
| Renstra | : | Rencana Strategis |
| RPJMD | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |

- RPJPD : Rencana Jangka Panjang Daerah
- Saprodi : Sarana produksi (pupuk, bibit, dll)
- SL : Sekolah Lapang, merupakan metode pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga membuka kesempatan belajar selebar-lebarnya kepada petani agar mampu berinteraksi dengan realita secara langsung, serta menemukan sendiri ilmu dan prinsip yang terkandung di dalamnya. Lahan sawah dan lingkungannya (ekologi) menjadi tempat belajar dari pengalaman yang diperoleh dilapangan
- SLPHT : Sekolah Lapang dengan materi khusus Pengendalian Hama Terpadu
- SOP : *Standard Operating Procedure*, yaitu petunjuk teknis standar penerapan teknologi budidaya yang spesifik komoditas, lokasi serta teknologi untuk menghasilkan produk sesuai dengan target produksi dan mutu yang diharapkan
- Stakeholder* : Pemangku kepentingan, yaitu siapa saja (individu atau kelompok) yang memberi dampak atau terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia secara lahir dan batin. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui berbagai program kegiatan pembangunan di segala bidang di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberi kontribusi penting bagi pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Melalui undang-undang tersebut sistem pemerintahan yang sebelumnya lebih bersifat sentralistis bergeser sehingga bobot pembangunan didesentralisasikan ke pemerintahan kota dan kabupaten, dengan harapan efisiensi dan kualitas pembangunan nasional akan semakin meningkat. Asumsi yang mendasari hal ini adalah dengan menggeser bobot pembangunan ke daerah, maka proses pembangunan akan semakin dekat dengan masyarakat dan lingkungan sehingga pengambilan keputusan tentang strategi pembangunan dan pelaksanaannya akan lebih sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat (Pasaribu, 2005:2).

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi, diterbitkan pula Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Inti dari undang-undang tersebut adalah memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana pembangunan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhannya. Disisi lain, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, mengharuskan pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian daerah, dalam hal ini kota maupun kabupaten diharapkan mampu untuk menyusun suatu rencana pembangunan yang sesuai dengan kondisi daerah dengan didukung keleluasaan dalam mengalokasikan anggaran pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan yang hasilnya akan digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dalam melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi, kekhasan serta potensi unggulan daerah yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan potensi daerah tersebut baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan perencanaan, pembangunan akan dapat berjalan dengan lebih teratur dan terarah (Arief, 2008).

Sebagaimana negara dunia ketiga lainnya, basis perekonomian di Indonesia adalah sektor pertanian, sehingga pembangunan yang diupayakan di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Pola pembangunan pertanian yang diterapkan selama kurang lebih empat dasawarsa mengikuti arus pembangunan pertumbuhan ekonomi yang cenderung

menekankan pada pemacuan pertumbuhan produksi, serta peran pemerintah dan swasta yang dominan. Masyarakat petani hanya berperan sebagai objek, bukan sebagai subjek pembangunan. Sektor pertanian juga tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi ekonomi nasional, tetapi sebagai penyangga untuk menyukseskan industrialisasi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Sebagai penyangga, sektor pertanian berperan untuk mendongkrak produksi pangan dalam negeri secara cepat dan tidak berisiko secara politik. Pola tersebut kini sudah usang, bahkan menimbulkan dampak negatif serta memicu konflik akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, sehingga pola alternatif perlu diajukan (Saptana dan Ashari, 2007: 123).

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, masih banyak persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat. Kondisi pertanian di Indonesia saat ini mengalami berbagai masalah sebagai dampak kegiatan pertanian di era lampau yang juga kita kenal dengan 'revolusi hijau'. Budaya yang diwariskan oleh penerapan program revolusi hijau telah mengakibatkan ketergantungan petani terhadap bibit impor, zat pengatur tumbuh, pupuk dan pestisida kimia yang notabene harganya tidak dapat dikatakan murah sehingga berakibat pada tingginya biaya usaha tani. Hal ini tidak selaras dengan harga jual produk pertanian yang biasanya dihargai rendah di tingkat petani.

Bukti-bukti di lapangan menunjukkan bahwa praktek pertanian yang eksploitatif tersebut juga menyebabkan peningkatan degradasi tanah yang akhirnya menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas sumberdaya pertanian itu sendiri, serta berimbas buruk bagi petani. Salah satu contoh kasus

sebagaimana terjadi di Kota Batu, Jawa Timur, yaitu menurunnya produksi komoditas hortikultura seperti buah dan sayuran hingga mencapai 50 %. Satu hektar lahan wortel yang sebelumnya mampu menghasilkan 20 ton, saat ini hanya menghasilkan 10 ton. Sedangkan produksi buah apel yang menjadi ikon Kota Batu turun dari 10 ton menjadi 5 ton tiap hektarnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan menurunnya kualitas tanah baik dari segi kesuburan maupun struktur tanah yang semakin padat akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, selain juga serangan hama pada tanaman apel. Permasalahan tersebut membuat petani apel ada yang mengalihfungsikan lahannya, mulai menjadi bangunan rumah hingga menjadi lahan tebu, akibatnya keberadaan buah apel sebagai ikon Kota Batu semakin susut. Sedangkan petani Kubis di Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, Batu banyak yang melakukan tindakan ekstrim, yaitu membunuh kubis yang siap panen dengan alasan biaya panen yang tidak sebanding dengan harga jual dipasaran saat panen. Penggunaan pupuk kimia juga menyebabkan biaya produksi yang tinggi, sehingga walaupun petani untung maka nilainya tidak besar (Jawa Pos, 2012).

Selain masalah degradasi lahan, tumbuh pula kekhawatiran tentang pengaruh bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan usahatani pada keamanan dan kualitas pangan (*food safety and quality*), kesehatan manusia dan hewan, serta kualitas lingkungan. Terkait dengan keamanan dan kualitas pangan, penggunaan bahan kimia sintetis yang berlebihan dalam produksi pertanian justru menurunkan kualitas pangan hasil pertanian itu sendiri sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Karena itu, banyak kasus produk pertanian Indonesia yang ditolak di pasar internasional karena mengandung pestisida di

atas Batas Minimum Residu (BMR) yang ditetapkan negara tujuan ekspor (Kementrian Pertanian RI, 2011).

Dari perspektif sempit, pilihan penggunaan pestisida kimia oleh petani dianggap menguntungkan karena efeknya yang nyata dalam mengatasi serangan hama dan penyakit tanaman. Namun secara luas residu pestisida kimia merupakan ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dalam jangka pendek pestisida sangat efektif untuk membunuh hama, namun beberapa Tahun kemudian daya bunuhnya akan menurun. Banyak hama menjadi resisten terhadap bahan kimia tertentu karena pemakaian pestisida yang berlebihan. Sekitar Tahun 1980 FAO menduga terdapat sekitar 430 spesies hama resisten (Salikin, 2003: 27). Petani yang mengaplikasikan pestisida juga terancam dampak negatif pestisida karena menghirup udara beracun dan mengkonsumsi hasil panen atau air minum yang terkontaminasi bahan pestisida. Kasus-kasus keracunan pestisida yang menimpa masyarakat di beberapa daerah di Indonesia ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai landasan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam banyak peraturan terkait pelaksanaan pembangunan, diantaranya UUD 1945, Undang-undang Lingkungan Hidup, maupun Undang-undang tentang Penataan Ruang. Konsep pembangunan berkelanjutan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tidak merugikan kebutuhan generasi di masa datang. Resiko dan konsekuensi setiap pembangunan hendaknya tidak semuanya diwariskan kepada generasi mendatang, melainkan dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi berikutnya. Dalam mencapai *sustainability* atau keberlanjutan yang dimaksud juga

memperhatikan integrasi dan keseimbangan tiga dimensi utama keberlanjutan, yaitu dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial budaya.

Tabel 1.1 Beberapa kasus keracunan pestisida di Indonesia

| Waktu | Kasus | Korban |
|------------|--|--|
| 28-8-1982 | Di desa Plaeng, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah: keracunan makanan yang ternyata mengandung DDT pada acara selamatan | 12 orang meninggal |
| 6-10-1982 | PT Sibelac Sleman: karyawan keracunan makanan karena alat semprot pestisida disimpan di dapur masak | 155 orang dirawat di rumah sakit |
| 1983 | Di desa transmigrasi Banjar, Menggala, Lampung Utara: penduduk keracunan makanan akibat menanak nasi tercampur racun tikus Di Tulungagung, Jatim: keracunan makanan yang tercemar pestisida | 20 orang meninggal 20 orang meninggal, 25 Orang dirawat |
| 1985 | Di Desa Cicadas, Jawa Barat: warga (kebanyakan anak-anak) keracunan makanan yang tercemar DDT | 25 orang meninggal |
| April 1993 | Di Kecamatan Simalanga, Aceh Utara: warga keracunan jamur tiram yang tercemar pestisida | 1 orang meninggal, 6 orang dirawat |
| 23-5-1993 | Di Sukoharjo, Jawa Tengah: keluarga Trisno keracunan kacang panjang yang mengandung residu pestisida | 1 orang meninggal, 9 orang dirawat |

Sumber: Sulaeman A. dalam Salikin (2003: 28).

Perubahan lingkungan strategis berupa globalisasi ekonomi, otonomi daerah, perubahan preferensi konsumen, dan kelestarian lingkungan menuntut adanya perubahan termasuk pada pola pembangunan pertanian. Globalisasi ekonomi menyebabkan makin terintegrasinya berbagai aspek perekonomian suatu negara dengan perekonomian dunia, serta meningkatnya persaingan baik antarpelaku agribisnis maupun antar negara. Dewasa ini konsumen tidak lagi membeli komoditas, tetapi membeli produk dengan atribut yang lebih lengkap. Karena itulah dibutuhkan paradigma baru pembangunan, baik mengenai arah, strategi maupun kebijakan, agar berbagai masalah yang muncul dapat

dipecahkan tanpa menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Berbagai permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan pembangunan pertanian selama ini memberi pelajaran bagi para perencana dan pelaksana pembangunan untuk merubah orientasi pembangunan kearah pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Pada dasarnya pembangunan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani secara luas, melalui peningkatan produksi pertanian (baik secara kuantitas maupun kualitas), dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan pertanian dilakukan secara seimbang dan disesuaikan dengan daya dukung ekosistem sehingga kontinuitas produksi dapat dipertahankan dalam jangka panjang, dengan menekan tingkat kerusakan lingkungan sekecil mungkin. Adigium sistem pertanian berkelanjutan antara lain *better environment, better farming, and better living* (Salikin, 2003: 15-16). Sedangkan pertanian organik merupakan salah satu bentuk atau model perwujudan sistem pertanian berkelanjutan sebagaimana dijelaskan oleh Salikin (2003: 51) bahwa sistem pertanian berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan menggunakan empat macam model, yaitu sistem pertanian organik (ramah lingkungan), sistem pertanian terpadu, sistem pertanian masukan luar rendah, dan sistem pengendalian hama terpadu.

Pertanian organik dianggap mampu menjawab tantangan globalisasi dan tren permintaan konsumen maupun pasar dunia yang berkembang saat ini yang mulai sangat peduli terhadap produk-produk bebas residu kimia, ramah lingkungan dan menyehatkan (Apriantono, 2007). Sebagai perbandingan,

beberapa negara maju seperti Australia, Italia, Amerika Serikat dan Cina juga mengarahkan upaya pembangunan pertanian mereka menuju pertanian organik (Muslim, 2010). Hal ini menggambarkan betapa pertanian organik telah menunjukkan eksistensinya di tingkat dunia.

Upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan terus mengalami perkembangan, salah satunya yang terbaru dan banyak dibahas pada Konferensi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil adalah "*Green Economy*" atau gerakan ekonomi hijau. Peters and Britez (2009: 17-18) mengungkapkan bahwa ekonomi hijau berdasar pada organisasi prinsip-prinsip ekologi itu sendiri, meliputi perlindungan keragaman, peningkatan jaringan, dan mengakui pentingnya aset alam terbarukan. Sistem pertanian organik berlandaskan pada prinsip pemanfaatan secara optimal kemampuan alam dalam memproduksi hasil-hasil pertanian, Hal ini rupanya sesuai dengan ciri dari ekonomi hijau sehingga dapat dikatakan bahwa pertanian organik juga merupakan salah satu bentuk nyata ekonomi hijau.

Keseriusan pemerintah terhadap perkembangan pertanian ramah lingkungan di Indonesia telah ditunjukkan melalui penancangan program 'Go Organik 2010' pada awal Tahun 2000, dengan visi menjadikan Indonesia sebagai produsen pangan organik terbesar di dunia (Departemen Pertanian RI, 2007). Namun hingga kini pencapaian pertanian organik maupun pertanian ramah lingkungan secara nasional masih sangat minim. Hal-hal teknis seperti kondisi dan luas wilayah pertanian berorientasi ramah lingkungan yang masih kecil di lingkungan pertanian non-organik (konvensional), tingkat kontaminasi air, keterbatasan sarana produksi (misalnya ketersediaan pupuk dan pestisida organik), serta keterbatasan pengetahuan teknologi ramah lingkungan menjadi

kendala dalam upaya pengembangan pertanian organik ramah lingkungan. Selain itu perubahan konsep berpikir dan kesadaran di kalangan petani tentang pentingnya dan kemanfaatan pertanian organik merupakan hal dasar yang diperlukan mengingat petani adalah tokoh utama dalam suksesnya perkembangan pertanian organik di Indonesia.

Meskipun terdapat kendala, pengembangan pertanian organik di Indonesia bukan tidak mungkin diwujudkan. Beberapa pengalaman terkait keberhasilan penerapan pertanian organik hendaknya memberi semangat untuk melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan pertanian organik di Indonesia. Penerapan pertanian organik juga mendorong petani untuk kreatif dan mandiri. Hal ini telah dibuktikan melalui pengalaman seorang petani muda di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sebagaimana dilaporkan oleh Agustinus Handoko melalui Kompas.com (2009). Kegigihan Ujang dalam merintis pertanian organik didesanya berkontribusi pada peningkatan pendapatannya dibandingkan petani lain yang bertani secara konvensional. Dalam satu musim tanam Ujang mampu memperoleh penghasilan sebesar Rp. 12.068.000,- atau Rp. 3.000.000,- per bulan, lebih tinggi dari pendapatan petani konvensional yang hanya mendapat pemasukan sebesar Rp. 2.000.000 selama satu musim tanam, atau Rp. 500.000,- setiap bulan. Peningkatan pemasukan tersebut disebabkan rendahnya biaya produksi pertanian organik karena pupuk merupakan buatan sendiri dengan memanfaatkan kompos dan kotoran ternak, juga didukung harga gabah padi organik yang lebih tinggi, yaitu Rp. 2.400 untuk gabah basah organik sedangkan gabah hasil bertani secara konvensional dihargai Rp. 2000,-. Keberhasilan Ujang tersebut memotivasi petani lain disekitarnya untuk ikut menerapkan pertanian organik.

Pengembangan pertanian organik juga ditempuh sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan daerah oleh pemerintah daerah Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara. Hal ini sebagaimana diulas oleh Warastri melalui Harian Kompas, Edisi 21 Mei 2012. Pengembangan pertanian organik di Tapanuli Utara diawali di Kecamatan Siborong-borong yang memiliki potensi cukup besar, meliputi kesesuaian suhu dan ketinggian yang memadai untuk pertumbuhan sayuran, kondisi tanah yang masih alami dan belum terkontaminasi pestisida. Sejauh ini produk pertanian organik yang dihasilkan selalu habis, bahkan kurang. Permintaan yang tinggi salah satunya disebabkan produk yang dihasilkan selalu terjamin kualitasnya. Setiap produk diberi label yang memberi informasi tentang lokasi sayuran tersebut ditanam. Semua perlakuan yang diberikan kepada tanaman juga dapat dilacak melalui kartu lahan. Dengan demikian konsumen tahu apa yang ia makan.

Kota Batu Propinsi Jawa Timur sudah lama dikenal sebagai daerah wisata berbasis pertanian. Sebagai kota wisata yang berbasis pertanian maka pengembangan sektor pertanian menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kota Batu. Dengan topografi wilayah bergunung dan berbukit, Kota Batu merupakan daerah yang sangat cocok untuk pertumbuhan komoditas hortikultura, seperti sayur mayur dataran tinggi, buah-buahan sampai dengan tanaman hias. Sehingga tidak mengherankan apabila komoditas hortikultura mendominasi produk pertanian di Kota Batu dan terus dilakukan upaya-upaya untuk pengembangannya, baik oleh pemerintah maupun petani secara mandiri.

Pembangunan pertanian dengan produk tanaman pangan dan hortikultura dalam persepektif paradigma baru tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan produksi komoditas saja tapi terkait juga dengan isu-isu strategis

dalam pembangunan pertanian yang lebih luas di Kota Batu seperti tingginya biaya usahatani; penurunan kualitas tanah dan lingkungan; daya saing, mutu dan akses pasar produk pertanian; keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana produksi pertanian; tingginya tingkat residu pada produk pertanian serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pertanian terkait dengan penguasaan teknologi pertanian tepat guna dan ramah lingkungan.

Produk hortikultura yang menjadi produk unggulan Kota Batu harus mampu bertahan sebagai ciri khas daerah, karenanya peningkatan daya saing melalui perbaikan kualitas dan kuantitas menjadi suatu keharusan. Sementara ini aplikasi pestisida pada komoditas hortikultura masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar petani di Kota Batu dalam upaya pengendalian serangan hama dan penyakit. Hasil penelitian survei residu pestisida yang dilakukan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya pada tahun 2009 menunjukkan hampir seluruh petani menggunakan pestisida sebagai sarana pengendalian hama maupun penyakit dengan metode aplikasi yang tidak sesuai prosedur sehingga berakibat pada tingginya dosis residu yang ada di dalam tanah maupun tanaman. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian residu pestisida pada hasil pertanian di Kota Batu sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Untuk mendukung program pengembangan pertanian organik secara nasional serta sebagai upaya pemecahan masalah terkait isu-isu strategis yang berkembang termasuk degradasi lahan dan tingginya pemakaian pestisida di Kota Batu, maka kebijakan pembangunan pertanian baik tanaman pangan maupun hortikultura di Kota Batu saat ini diarahkan menuju pada penerapan sistem pertanian organik (*go organic*). Gaung pertanian organik di Kota Batu

sendiri dipertegas dengan *launching* program pengembangan kawasan organik dan slogan “Batu Go Organik” yang dilaksanakan di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu pada tanggal 10 Januari 2012 (Suara Media Nasional, 2012). Upaya menuju pertanian organik di Kota Batu tersebut juga mendapat apresiasi positif dari akademisi. Prof. M. Munir, guru besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Unibraw sebagaimana disampaikan melalui harian Jawa Pos (2012) menyatakan bahwa:

“Secara SDA yang dimiliki Kota Batu memang cocok untuk dikembangkan menjadi pertanian organik. Bahkan bukan tidak mungkin nantinya berkembang menjadi sebuah kawasan yang bisa dijual sebagai potensi pariwisata. Tanah di Batu itu memiliki struktur lapisan yang gembur. Ini mendukung untuk pengembangan pertanian organik”.

Tabel 1.2 Hasil analisis residu pestisida dalam buah dan sayuran di Kota Batu

| No | Asal Sample | Bahan Aktif | | | | |
|----|----------------------------|-------------|--------------|---------|---------|-----------------|
| | | Profenofos | Cypermethrin | DDD | DDE | Batas MRL (ppm) |
| 1 | Apel Manalagi Tulungrejo | - | - | 0,92188 | - | 0,05 |
| 2 | Apel Manalagi Sbr. Brantas | - | - | 0,22610 | - | 0,05 |
| 3 | Apel Manalagi Punten | - | - | 0,58333 | - | 0,05 |
| 4 | Apel Manalagi Bulukerto | - | - | 1,19531 | - | 0,05 |
| 5 | Apel Ana Sumber Brantas | - | - | - | 0,55145 | 0,05 |
| 6 | Kentang Sbr. Brantas | - | - | 1,15104 | - | 0,1 |
| 7 | Kentang Tulungrejo | - | - | 0,80990 | - | 0,1 |
| 8 | Kubis Punten | - | 0,29899 | - | - | 1 |
| 9 | Kubis Sumber Brantas | 1,95714 | - | - | - | 1 |
| 10 | Kubis Tulungrejo | - | - | 0,80990 | - | 0,1 |
| 11 | Kubis Pandarejo | - | - | 0,07813 | - | 0,1 |
| 12 | Wortel Bulukerto | - | 0,23053 | - | - | 0,05 |
| 13 | Wortel Sumber Brantas | - | - | - | 0,39222 | 0,1 |
| 14 | Wortel Tulungrejo | - | - | - | 0,17560 | 0,1 |
| 15 | Wortel Pandanrejo | - | - | - | 0,26726 | 0,1 |
| 16 | Wortel Punten | - | - | 0,66580 | - | 0,1 |
| 17 | Bawang Merah Tulungrejo | - | - | - | 0,26946 | 0,1 |
| 18 | Bawang Merah Punten | - | - | - | 0,24934 | 0,1 |
| 19 | Bawang Merah Pandanrejo | - | - | - | 0,17222 | 0,1 |
| 20 | Bawang Merah Bulukerto | 0,23429 | - | - | - | 1 |

Keterangan: MLR (Maximum Residu Limit)

Sumber: Laporan Akhir Pengujian Hasil Pertanian terhadap Residu Pestisida Di Kota Batu, Kerjasama Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (2009: 14).

Pengembangan pertanian organik di Kota Batu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelestarian lingkungan, menarik investasi, serta menunjang sektor pariwisata yang menjadi andalan utama pendapatan asli daerah. *Launching* pengembangan kawasan pertanian organik merupakan langkah awal dalam tujuan jangka panjang terwujudnya pertanian organik di Kota Batu. Wacana kedepan kawasan pertanian organik yang telah terbentuk diarahkan sebagai obyek wisata alternatif untuk mendukung Kota Batu sebagai kota pariwisata berbasis pertanian (agrowisata).

Pengembangan pertanian organik merupakan perwujudan nyata dari upaya pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, idealnya diperlukan suatu perencanaan yang hasilnya berguna sebagai acuan atau pedoman bagi pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi dari sumber pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu terdapat beberapa hal dalam perencanaan pembangunan pertanian berkelanjutan terkait dengan pengembangan pertanian organik. Pertama, kebijakan pengembangan pertanian organik di Kota Batu tertuang pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2007-2012. Adapun rencana aksi pertanian organik sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman teknis dan peta jalan dalam pelaksanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu sampai penelitian ini disusun belum ada. Sedangkan kegiatan yang terkait dengan realisasi rencana pengembangan pertanian organik di Kota Batu mulai gencar dilakukan sekitar tiga tahun terakhir.

Proses pembangunan secara berencana tidak selalu harus menggunakan suatu rencana formil. Namun demikian, suatu perencanaan yang baik akan

sangat membantu suatu pembangunan berencana. Perkembangan dalam praktek dan ilmu perencanaan menyatakan bahwa proses perencanaan itu sendiri harus terdiri dari formulasi rencana dan implementasinya (Tjokroamidjojo, 1995: 31-33). Penjelasan tersebut menekankan pentingnya suatu dokumen rencana yang mampu menjelaskan secara gamblang tujuan, bagaimana, kapan dan oleh siapa rencana tersebut dilaksanakan. Singkatnya rencana yang baik harus mudah untuk dipahami dan diterapkan di lapangan sehingga mempermudah tercapainya tujuan.

Suatu rencana pembangunan ditujukan untuk perbaikan suatu kondisi yang meliputi berbagai atribut pembangunan baik secara fisik maupun non fisik seperti masyarakat. Kartasasmita (1997: 51-52) menjelaskan beberapa sumber yang menjadi sebab kegagalan perencanaan. Salah satunya adalah karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaan yang disebabkan ketidak siapan aparat pelaksana serta tidak adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi sehingga tidak mendukung rencana tersebut. Hal ini menjelaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak yang terkait dengan suatu rencana pembangunan (*stakeholder*) dalam proses perencanaan pembangunan tersebut. Keterlibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan akan menimbulkan rasa memiliki dan dukungan terhadap realisasi suatu rencana. Pentingnya keterlibatan *stakeholder* tersebut juga menjadi perhatian dalam penelitian Zandstra and Herman van Keulen (2008), yaitu dalam proses perencanaan pengembangan hortikultura organik di Belanda, skenario yang dibuat secara *top down* didiskusikan dengan *stakeholder* sehingga dihasilkan modifikasi skenario berdasarkan partisipasi *stakeholder*. Hal ini dilakukan untuk mengeksplorasi pendapat dan kepentingan berbagai pihak demi mendapatkan komitmen dari

stakeholder agar keberlanjutan pengembangan hortikultura organik di Belanda dapat dicapai.

Upaya pembangunan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya diharapkan dapat berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan yang diperoleh masyarakat. Keberlanjutan dalam perencanaan dapat diwujudkan melalui perencanaan ideal sebagaimana dijelaskan oleh Gharajedaghi dan Ackoff dalam Kartasasmita (1997: 52), bahwa perencanaan ideal (yang disebutnya sebagai *interactive planning*) hendaknya memenuhi tiga prinsip, yaitu prinsip partisipatif, kesinambungan dan holistik. Prinsip kesinambungan menunjukkan perencanaan tidak berhenti dalam satu tahap, tetapi berlanjut meliputi evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.

Perencanaan pembangunan disusun untuk mengatasi berbagai faktor yang membatasi keberhasilan perencanaan, serta untuk mengoptimalkan berbagai sumberdaya agar efektif, efisien dan tepat dalam upaya mencapai tujuan yang direncanakan. Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pembangunan pertanian termasuk pula dalam perencanaannya, maka perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam perencanaan baik secara internal maupun eksternal, misalnya dari aspek hukum, sumberdaya atau koordinasi yang dilakukan.

Berdasarkan permasalahan dan hal-hal penting terkait dengan perencanaan pembangunan sebagaimana telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perencanaan pembangunan pertanian berkelanjutan di Kota Batu yang dalam penelitian ini dikaji melalui perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu.

1.2 Masalah penelitian

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu?
2. Bagaimanakah peran stakeholder dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu?
3. Bagaimanakah strategi untuk mewujudkan keberlanjutan perencanaan pengembangan pertanian organik tersebut?
4. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu
2. Mendeskripsikan dan menganalisis peran *stakeholder* dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu
3. Mendeskripsikan dan menganalisis strategi untuk mewujudkan keberlanjutan perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu
4. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu.

1.4 Manfaat penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam administrasi publik, khususnya pemahaman yang terkait dengan perencanaan pengembangan pertanian organik
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kota Batu dalam perencanaan pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pengembangan pertanian organik selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang perencanaan pembangunan, pembangunan pertanian dan pembangunan pertanian berkelanjutan yang dilakukan melalui berbagai model pendekatan, termasuk diantaranya melalui penerapan pertanian organik. Adapun aspek yang dikaji beragam baik dari segi perencanaan, teknis penerapan di lapangan, maupun pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Berikut merupakan gambaran singkat penelitian terdahulu yang diharapkan dapat memberi kontribusi bagi penelitian ini:

Penelitian oleh Ni Komang Yustitia Dewi yang dilakukan pada tahun 2010, dengan judul “ Evaluasi Perencanaan Penataan Kawasan Pasca Galian Pasir (Galian C) Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat” (Studi Kasus di Kabupaten Klungkung-Bali). Melalui penelitian ini diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat yang juga merupakan aspek lain dalam pembangunan berkelanjutan diwujudkan dalam bentuk kompensasi melalui pelatihan-pelatihan oleh dinas terkait. Kompensasi yang dimaksud adalah bagi tenaga kerja yang menganggur akibat penutupan Galian C diberikan pelatihan keterampilan agar bisa bekerja di bidang lain maupun membuka usaha sendiri. Dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal terkait dengan pendanaan serta kepastian hukum. Dalam hal pendanaan, perencanaan penataan kawasan pasca Galian C menjadi daerah wisata memerlukan dana

yang sangat besar. Sedangkan belum ditetapkannya RDTR (Rencana Desain Tata Ruang) kawasan pasca Galian C ke dalam Peraturan Bupati menyebabkan kepastian hukum belum jelas dalam pengembangan kawasan mengakibatkan investor belum bersedia untuk menanamkan modal.

Penelitian dengan judul “Perencanaan Pembangunan Kawasan Minapolitan Kabupaten Malang (Studi di Desa Sukoanyar, Kecamatan Wajak)”. Penelitian ini dilakukan oleh Hartanti pada tahun 2010. Pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang dilaksanakan dengan maksud mengolah potensi perikanan di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Malang, menanggulangi pengangguran dan mengentas kemiskinan, mengendalikan tingkat urbanisasi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang merupakan perpaduan antara perencanaan *top down* yang dibuat dan ditetapkan dari pusat melalui Departemen Kelautan dan Perikanan, dan perencanaan *bottom up* oleh pemerintah Kabupaten Malang yang diwujudkan dalam bentuk pembuatan *masterplan* minapolitan. Penelitian ini juga menyoroti keterlibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan pembangunan kawasan minapolitan, yang terdiri dari perguruan tinggi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masyarakat pembudidaya ikan, bupati, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Faktor-faktor pendukung dalam perencanaan tersebut antara lain: dasar hukum, dukungan SKPD, potensi budidaya ikan, potensi sumber air, tenaga kerja, adanya jalan lingkar timur dan selatan untuk kemudahan jalur pemasaran, peluang pasar di luar Malang dan dukungan pemerintah pusat. Sedangkan faktor penghambat antara lain: keterbatasan dana, teknologi budidaya ikan, pencurian ikan, petani kurang

modal, irigasi yang tidak bagus, produksi ikan berlebih, serta musim yang tidak tepat dan wabah penyakit. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk melakukan dan melengkapi dokumen studi kelayakan yang merupakan persyaratan pendukung suatu perencanaan pembangunan fasilitas baru agar tidak terjadi resiko kerugian, serta memudahkan dalam pelaksanaan dan pengendalian suatu rencana.

Penelitian Margaretha Blom-Zandstra and Herman Van Keulen (2008), dengan judul "*Innovative Concepts towards Sustainability in Organic Horticulture: Testing a Participatory Technology Design*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pertanian hortikultura organik di Belanda yang dianggap telah tidak sesuai dengan standar keberlanjutan karena kontribusinya yang cukup tinggi terhadap polusi lingkungan, penurunan sumber daya alam dan keberlangsungan ekonomi marginal. Karena itu diperlukan suatu transisi menuju agroekosistem yang lebih berkelanjutan untuk mempertahankan posisi kompetitif Belanda di tingkat Internasional. Melalui penelitian ini dirumuskan beberapa rancangan skenario pengembangan hortikultura organik yang dilakukan melalui pendekatan *top down* dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial dan tujuan ekologi jangka panjang dari pembangunan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya rancangan skenario tersebut didiskusikan dengan berbagai *stakeholder* untuk mengeksplorasi pendapat dan kepentingan berbagai pihak demi mendapatkan komitmen dari *stakeholder* terkait, sehingga pada akhirnya ditemukan modifikasi skenario pengembangan hortikultura organik di Belanda berdasarkan partisipasi *stakeholder* (pendekatan *bottom-up*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing *stake holder* memiliki perspektif yang berbeda terhadap skenario dan harus didekati dengan cara tertentu untuk mendapatkan komitmen. Pihak

pengusaha tidak terinspirasi oleh tujuan jangka panjang tanpa kejelasan keuntungan jangka pendek. Karenanya untuk memperoleh komitmen pengusaha maka tujuan jangka panjang pemerintah harus dijabarkan dalam serangkaian langkah jangka pendek yang merupakan bagian dalam realisasi tujuan jangka panjang. Sedangkan petani di Belanda dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu *“cost price grower”*, dan *“added value grower”*. Adanya klasifikasi tersebut mempengaruhi model skenario pengembangan hortikultura organik, yaitu kelompok pertama lebih tertarik untuk mengembangkan skenario yang berorientasi pada produksi, sedangkan kelompok kedua lebih menanggapi tren saat ini tentang diversifikasi dan integrasi pertanian organik dengan bidang lain misalnya pariwisata, kesehatan, dll, sehingga produksi menjadi tujuan sekunder.

Penelitian Saptana dan Ashari (2007) dengan judul “Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Kemitraan Usaha” menjelaskan bahwa pembangunan sektor pertanian pada masa lampau lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini telah menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dimasa mendatang maka diperlukan reorientasi paradigma pembangunan, baik dari segi arah, strategi maupun kebijakan. Paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan dapat menjadi solusi alternatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Untuk mendukung upaya ini diperlukan konsolidasi kelembagaan yang mantap, baik ditingkat petani, pihak swasta maupun pemerintah melalui suatu strategi kemitraan.

Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pengembangan kemitraan usaha agribisnis hanya akan berhasil jika dilakukan secara partisipatif, yaitu melibatkan seluruh pelaku agribisnis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Dengan cara ini diharapkan dapat tercapai stabilitas dan kontinuitas produksi, pendapatan, dan kesinambungan usaha. Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha agribisnis mampu memberikan manfaat, antara lain: 1) meningkatkan produksi pertanian secara moderat, stabil, dan berkesinambungan; 2) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; 3) mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di pedesaan; 4) meningkatkan pemerataan dan keadilan sosial; 5) menciptakan kerja dan lapangan berusaha; 6) meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan lingkungan; 7) meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan petani dan pelaku agribisnis; serta 8) melestarikan kualitas lingkungan untuk mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa saran operasional dalam pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha agribisnis adalah: 1) revitalisasi kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani; 2) pengaturan produksi berdasarkan permintaan pasar melalui perencanaan pola tanam dan kemitraan usaha yang mandiri; 3) pemilihan komoditas berdasarkan permintaan pasar dan potensi sumber daya alam; 4) pengembangan kelembagaan kemitraan usaha agribisnis sesuai kondisi setempat untuk menjamin keterpaduan produk dan pelaku agribisnis; serta 5) pengembangan hasil dari pendekatan komoditas ke arah pengembangan produk berkualitas didukung strategi promosi, teknologi, dan fasilitasi pemerintah.

Penelitian Peter Tandisau dan Herniwati (2009) dengan judul “ Prospek Pengembangan Pertanian Organik di Sulawesi Selatan”. Strategi pengembangan sistem pertanian organik dalam jangka pendek di Sulawesi Selatan di arahkan ke daerah-daerah yang masih mempertahankan sistem pertanian lokal-tradisional (daerah pegunungan, pedalaman). Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas unggulan daerah seperti antara lain kopi arabika, padi-padi lokal bermutu baik, tanaman rempah dan obat serta sayuran dan buah-buahan. Sistem integrasi tanaman-ternak juga merupakan pilihan untuk dikembangkan kedepan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah perlu mendorong terbentuknya lembaga sertifikasi produk pertanian organik yang dibutuhkan (yang belum ada). Disamping itu pembentukan, pengembangan, dan penguatan lembaga-lembaga pendukung seperti kelompok tani, penyuluh, lembaga pemasaran perlu persiapan dan pembenahan. Diperlukan kegiatan sosialisasi untuk memberi pemahaman dan bekal tentang makna dan manfaat pertanian organik kepada masyarakat produsen (petani), konsumen (pengguna), pedagang, pemerintah daerah, penyuluh serta pelaku pertanian dan institusi terkait lainnya.

Penelitian oleh Suwanto (2008) dengan judul “Analisis Pengembangan Pertanian Organik di Kabupaten Magelang (Studi Kasus di Kecamatan Sawangan)”, memberikan hasil sebagai berikut :

1. Pengembangan pertanian organik di Kec. Sawangan mengalami beberapa kendala yaitu :
 - Kendala terkait dengan rendahnya kualitas SDM dalam hal pengetahuan dan penerapan pertanian organik, meliputi : pertanian organik dipandang sebagai sistem pertanian yang merepotkan, keterampilan petani masih

kurang, dan persepsi yang berbeda mengenai hasil; kurangnya kejujuran dalam penerapan prinsip pertanian organik;

- Kendala teknis pelaksanaan pertanian organik, meliputi : petani mengalami saat kritis pada permulaan penerapan budidaya organik, lahan pertanian organik belum terlindungi;
 - Kendala terkait kebijakan pemerintah, meliputi : pembangunan pertanian belum terintegrasi dengan pembangunan perternakan, kegagalan menjaga kepercayaan pasar dan dukungan pemerintah yang dirasa masih kurang (pendampingan pemerintah kurang sehingga petani sering dimanfaatkan oleh LSM yang mengakui petani tersebut sebagai binaannya demi keuntungan pribadi)
2. Dari kendala yang ditemukan tersebut maka kebijakan pengembangan yang disarankan meliputi perluasan lahan bekerjasama dengan pelanggan tetap untuk menjamin pasokan, pemberian insentif atau kompensasi bagi para petani yang melaksanakan pertanian organik untuk pertamakalinya, bekerjasama dengan kelompok tani semi organik untuk melakukan budidaya secara organik, pembuatan demplot / percontohan pertanian organik, mengintegrasikan bidang pertanian dan peternakan, pelatihan peningkatan ketrampilan SDM misalnya pelatihan pengolahan dan pembuatan pupuk dan pestisida alami dengan memanfaatkan potensi lokal.
3. Perencanaan yang matang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian program pertanian organik di Kabupaten Magelang.

Penelitian Gopal Naik dan Vishnuprasad Nagadevara (2010), dengan judul "*Spatial Clusters in Organic Farming (A Case Study of Pulses Cultivation in Karnataka)*". Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pendekatan

kawasan/klaster dalam produksi organik membantu mengoptimalkan keunggulan kompetitif yang potensial di bidang pertanian; serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pembentukan klaster dalam pertanian organik. Faktor ekonomi dalam produksi organik seringkali menjadi hambatan utama dalam kesediaan petani untuk menerapkan pertanian organik. Hal ini terkait dengan adanya penurunan hasil pada masa konversi, pasar yang terpisah, serta mahal biaya untuk sertifikasi. Kesulitan-kesulitan ini dapat diatasi secara efektif melalui konsep klaster atau kawasan, dengan melibatkan banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang beroperasi di daerah tersebut sebagai pemain kunci. Pemerintah diharapkan bertindak sebagai fasilitator. Dari sudut pandang ilmu daerah, pertanian organik tampaknya berada di bawah pengaruh "*centripetal forces*" yang cenderung berkonsentrasi dan mendorong kegiatan ekonomi dalam bentuk aglomerasi ekonomi atau klaster ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi organik pada satu kawasan/klaster memungkinkan dilakukan kontrol kualitas output yang lebih baik serta mengurangi biaya sertifikasi. Dengan pengembangan klaster pertanian organik, biaya yang berkaitan dengan sertifikasi dan kegiatan pengolahan lainnya akan menyebar keseluruh petani di dalam klaster, selanjutnya jika semua petani pada klaster tersebut menerapkan praktek pertanian organik maka residu kimia anorganik dan dari waktu ke waktu akan menghilang dan menyebabkan realisasi harga yang lebih tinggi untuk output yang diproduksi secara organik. Pendekatan klaster juga memungkinkan petani dengan lahan yang kecil untuk menerapkan pertanian organik. Hal ini berbeda dengan kondisi di luar klaster yang hanya memungkinkan petani dengan luas lahan besar yang dapat melakukan pertanian organik. Contoh klaster yang dikembangkan di India memilih tanaman kacang-

kacangan karena memiliki sifat ekonomis yaitu diproduksi di daerah yang luas di daerah kering di India dengan tujuan utama untuk penjualan, bukan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga petani. Meningkatnya kuantitas produksi produk organik akan menghasilkan lebih banyak permintaan. Keberadaan klaster didukung kualitas yang terjamin melalui sertifikasi juga menjadi pertimbangan bagi pedagang dan pengguna dari tempat yang jauh untuk keputusan pembelian mereka. Dengan demikian melalui penelitian ini dapat disimpulkan mengenai pentingnya mengembangkan pendekatan cluster untuk keberhasilan pertanian organik.

Penelitian Crtomir Rozman, Karmen Pazek, Jernej Prisenk, Andrej Skraba, dan Mirojub Kljajic (2012) dengan judul "*System Dynamics Model for Policy Scenarios of Organic Farming Development*". Penelitian ini menyajikan model sistem dinamika pengembangan pertanian organik untuk mendukung pengambilan keputusan. Model ini digunakan untuk mensimulasikan beberapa skenario kebijakan yang memungkinkan penilaian skenario kebijakan tersebut sehubungan dengan pengembangan pertanian organik, dan dampaknya terhadap parameter ekonomi dan lingkungan dari produksi produk organik di Slovenia.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa konversi atau masa peralihan untuk pertanian organik bergantung pada subsidi yang menyediakan sumber utama konversi dari pertanian konvensional ke pertanian organik. Namun demikian subsidi bukan satu-satunya pendorong dalam sistem, melainkan yang lebih penting adalah kegiatan-kegiatan lain yang bersifat mempromosikan/mensosialisasikan pertanian organik. Strategi yang layak untuk mencapai konversi menuju pertanian organik secara lengkap harus

mempertimbangkan umpan balik antara sumber daya, jumlah peternakan organik, dan tindakan lain yang mendukung. Terdapat hubungan yang kuat terkait keterpaduan antara pertanian organik dan dukungan peternakan organik.

Tabel. 2.1 Pemetaan hasil penelitian terdahulu

| No | Nama/ Tahun/ Judul | Hasil penelitian | Kontribusi bagi penelitian ini |
|----|---|---|---|
| 1. | Ni Komang Yustitia Dewi/2010/ Evaluasi Perencanaan Penataan Kawasan Pasca Galian Pasir (Galian C) Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat” (Studi Kasus di Kabupaten Klungkung-Bali) | <ul style="list-style-type: none"> - Aspek lain dari keberlanjutan adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pemberian pelatihan keterampilan oleh dinas terkait - Pentingnya kepastian hukum untuk menarik investasi | - Sebagai bahan masukan tentang pertimbangan aspek pemberdayaan sebagai strategi keberlanjutan pembangunan |
| 2. | Hartanti/2010/ Perencanaan Pembangunan Kawasan Minapolitan Kabupaten Malang (Studi di Desa Sukoanyar, Kec. Wajak) | <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang merupakan perpaduan antara perencanaan <i>top down</i> dari pusat melalui Departemen Kelautan dan Perikanan, dan perencanaan <i>bottom up</i> oleh pemerintah Kabupaten Malang yang diwujudkan dalam bentuk pembuatan <i>masterplan</i> minapolitan - <i>Stakeholder</i> yang berperan dalam perencanaan tersebut meliputi perguruan tinggi, SKPD, pembudidaya ikan, Bupati dan DPRD. Bupati dan DPRD merupakan <i>stakeholder</i> yang mempunyai pengaruh kekuasaan dan legitimasi yang bekerjasama sebagai pucuk pimpinan dalam membuat suatu keputusan kebijakan. | Memberi masukan bahwa dalam upaya pembangunan wilayah perlu adanya dokumen perencanaan yang secara teknis menjabarkan arah pelaksanaan kegiatan. Selain itu peran <i>stakeholder</i> banyak berpengaruh dalam keberlanjutan pelaksanaan rencana kegiatan. |
| 3. | Margaretha Blom Zandstra and Herman van Keulen /2008/ <i>Innovative Concepts towards Sustainability in Organic Horticulture: Testing a Participatory</i> | - Skenario pengembangan hortikultura organik berkelanjutan di Belanda dirancang melalui pendekatan <i>top down</i> , yang dilanjutkan komunikasi dengan | Memberi gambaran perbandingan model pengembangan hortikultura organik di Belanda, serta pentingnya peran |

| No | Nama/ Tahun/ Judul | Hasil penelitian | Kontribusi bagi penelitian ini |
|----|---|---|---|
| | <i>Technology Design.</i> | <p><i>stakeholder</i> sehingga dihasilkan modifikasi skenario pengembangan yang telah menyertakan aspirasi <i>stakeholder</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap <i>stakeholder</i> memiliki perspektif berbeda pada skenario pembangunan dan masing-masing harus didekati dengan cara berbeda untuk mendapatkan komitmen - Perilaku pengusaha dapat dipengaruhi dengan mencocokkan tujuan jangka panjang dengan kepentingan jangka pendek | dan komitmen <i>stakeholder</i> untuk keberlanjutan pengembangan pertanian organik |
| 4. | Saptana dan Ashari /2007/ Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Kemitraan Usaha” | <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mendukung upaya pembangunan pertanian berkelanjutan diperlukan konsolidasi kelembagaan yang mantap baik ditingkat petani, swasta maupun pemerintah melalui suatu strategi kemitraan yang akan berhasil jika dilaksanakan secara partisipatif, yaitu melibatkan seluruh pelaku agribisnis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. | <ul style="list-style-type: none"> - Mendukung latar belakang pentingnya pembangunan pertanian berkelanjutan - Sebagai masukan bahwa upaya pembangunan pertanian berkelanjutan dapat ditempuh melalui program kemitraan yang melibatkan partisipasi seluruh pelaku agribisnis |
| 5. | Peter Tandisau dan Herniwati/2009/ Prospek Pengembangan Pertanian Organik di Sulawesi Selatan | Strategi pengembangan sistem pertanian organik dalam jangka pendek di arahkan ke daerah-daerah yang masih mempertahankan sistem pertanian lokal – tradisional, dilakukan mengarah pada integrasi pertanian-peternakan, pembentukan lembaga sertifikasi produk,serta aktif memberikan pengetahuan tentang pertanian organik kepada masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan maupun demplot. | Memberi masukan tentang strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan pertanian organik, termasuk perlunya dibentuk lembaga sertifikasi produk organik |

| No | Nama/ Tahun/ Judul | Hasil penelitian | Kontribusi bagi penelitian ini |
|----|--|---|--|
| 6. | Suwantoro (2008), "Analisis Pengembangan Pertanian Organik di Kabupaten Magelang (Studi Kasus di Kecamatan Sawangan)" | <ul style="list-style-type: none"> - Kendala pelaksanaan pertanian organik di Kab. Magelang meliputi 1) faktor kualitas SDM terkait rendahnya pengetahuan petani tentang pertanian organik, kurang paham pada teknologi pertanian organik, perbedaan persepsi tentang hasil, kurang jujur dalam bertani organik; 2) kendala teknis terkait masa kritis fase transisi; 3) kendala kebijakan yaitu tidak ada integrasi antara bidang pertanian dan peternakan, kurangnya pendampingan oleh pemerintah - Kebijakan yang dibuat diharapkan diarahkan untuk mengatasi kendala di lapangan - Perlunya perencanaan dalam pelaksanaan budidaya organik | Memberikan masukan tentang kendala dalam pelaksanaan pertanian organik serta peran pemerintah yang dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya pertanian organik |
| 7. | Gopal Naik dan Vishnuprasad Nagadevara (2010), " <i>Spatial Clusters in Organic Farming (A Case Study of Pulses Cultivation in Kartanaka)</i> ". | <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan kawasan/klaster memungkinkan kontrol kualitas output yang lebih baik, mempermudah pasar, mengurangi biaya sertifikasi untuk penerapan pertanian organik di India - Pemilihan komoditas yang dikembangkan pada klaster pertanian organik adalah yang mempunyai nilai ekonomis/unggulan (<i>competitive advantage</i>) | Memberi masukan tentang pendekatan klaster/kawasan dalam strategi pengembangan pertanian organik |
| 8 | Crtomir Rozman, Karmen Pazek, Jernej Prisenk, Andrej Skraba, dan Mirojub Kljajic (2012) dengan judul " <i>System Dynamics Model for Policy Scenarios of Organic Farming Development</i> ". | <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dalam strategi pengembangan pertanian organik dapat dilakukan melalui analisis model sistem dinamika - Berdasarkan model tersebut strategi yang dipilih harus mempertimbangkan umpan balik antara sumber daya, jumlah peternakan organik, dan tindakan lain yang mendukung terutama terkait dengan promosi/sosialisasi pertanian organik | Memberi masukan tentang strategi yang dapat ditempuh dalam pengembangan pertanian organik, yaitu dukungan peternakan dan promosi/sosialisasi pertanian organik |

2.2 Administrasi publik dan administrasi pembangunan

2.2.1 Administrasi publik

Administrasi telah didefinisikan oleh banyak ahli. Beberapa definisi yang menjelaskan administrasi secara umum dikutip oleh Syafii (2006: 13-16), yaitu: Menurut Herbert A. Simon, "*administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals*" (administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu). Pengertian administrasi selanjutnya disampaikan oleh Liang Gie, bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi pada prinsipnya mengandung arti proses kegiatan kerja sama, dilakukan oleh banyak orang, untuk mencapai tujuan. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik dinyatakan sebagai administrasi publik.

Selanjutnya Tjokroamidjojo (1995: 4) menjelaskan bahwa segenap proses penyelenggaraan usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu dalam hal tujuan tersebut adalah tujuan negara/pemerintahan maka menjadi lingkup wilayah ilmu administrasi negara. Proses kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut harus didasarkan pada rasionalitas. Hal ini ditekankan oleh Waldo (1986: 35) yang menjelaskan bahwa inti dari administrasi publik adalah rangkaian tindakan yang rasional, yaitu didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dipertimbangkan secara teliti untuk merealisasikan tujuan tertentu.

Perkembangan pemikiran dalam ilmu administrasi terus berkembang. Menurut Kartasasmita (1997:24), perkembangan yang cukup mendasar telah terjadi dengan munculnya kebijaksanaan publik sebagai paradigma administrasi publik. Didalamnya tercakup perumusan kebijaksanaan, teknik analisis kebijaksanaan, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijaksanaan. Hal ini rupanya senada dengan penjelasan Tjokroamidjojo (1995:3) bahwa administrasi publik memiliki tiga fungsi dasar, yaitu:

1. Formulasi /perumusan kebijaksanaan, terdiri dari empat subfungsi, yaitu: a) kebijaksanaan berasal dari analisa yang baik atas keadaan-keadaan yang nyata; b) perumusan kebijaksanaan harus meliputi usaha untuk memproyeksikan kenyataan sekarang dalam keadaan-keadaan nanti/masa depan dengan cara melakukan perkiraan (*forecast*) dari perkembangan yang mungkin terjadi, serta dalam penyusunan berbagai alternatif langkah kegiatan yang mungkin dilalui; c) supaya suatu program strategi dan taktik kegiatan yang berdasar pada poin a dan b dapat disusun; d) pengambilan keputusan, dengan kata lain bagian ini disebut juga perencanaan.
2. Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi yang meliputi: a) organisasi; b) keuangan; c) kepegawaian; d) sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen administrasi tersebut.
3. Penggunaan dinamika administrasi. Unsur-unsur dinamik administrasi meliputi pimpinan, koordinasi, pengawasan dan komunikasi.

Tugas administrasi publik di negara yang sedang membangun mencakup tugas umum administrasi untuk publik dan tugas pembangunan. Administrasi publik dapat berperan positif dalam mengawal pembangunan suatu negara

sampai pada tujuan yang dicita-citakan. Dengan kata lain, administrasi publik bukan saja berurusan dengan cara-cara yang efisien untuk melakukan proses pembangunan, melainkan juga mempunyai kemampuan dalam menentukan tujuan dari proses pembangunan itu sendiri, terutama dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif sebagai wujud dari penjaminan hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Hal ini berimplikasi pada pentingnya perhatian dan komitmen negara terhadap kepentingan publik yang jika dilaksanakan dengan baik diharapkan dapat mewujudkan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan dunia, pemikiran tentang administrasi publik mengalami perkembangan baik di negara maju dengan berbagai gerakan pembaharuan maupun di negara-negara berkembang sebagai administrasi pembangunan (Kartasmita, 1995:24).

2.2.2 Administrasi pembangunan

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil demi mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan dapat diartikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas/perbaikan dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagian, 2009: 4). Pembangunan secara lebih luas disampaikan oleh Suryono (2004) merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan perannya secara wajar yakni

sebagai obyek dan subyek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras, dinamis; kedalam mampu menciptakan keseimbangan.

Perkembangan makna pembangunan terutama di negara dunia ketiga ditelusuri melalui ukuran-ukuran pembangunan oleh Budiman dalam bukunya "Teori Pembangunan Dunia Ketiga" (2000: 2-15), yaitu berdasarkan: a) kekayaan rata-rata; b) pemerataan; c) kualitas kehidupan; d) kerusakan lingkungan; e) keadilan sosial dan kesinambungan/keberlanjutan. Dengan demikian, konsep pembangunan menjadi semakin kompleks, tidak hanya terbatas pada masalah pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga meliputi masalah sosial dan lingkungan.

Administrasi pembangunan sendiri selanjutnya diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa (Tjokroamidjojo, 1995: 13). Siagian (2009: 4-5) memberi gambaran bahwa fokus dari administrasi pembangunan adalah penyelenggaraan seluruh kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan suatu negara. Dengan demikian batasan tentang administrasi pembangunan menurut Siagian adalah sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam pencapaian tujuan akhirnya.

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata sosial, politik dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif karena

menyangkut upaya mengadakan perubahan-perubahan sosial. Dalam upaya itu administrasi pembangunan terlibat dalam pengalokasian sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan (Katz dalam Kartasasmita, 1995: 35). Adapun ruang lingkup administrasi pembangunan meliputi dua fungsi, yaitu:

1. Penyempurnaan administrasi negara atau disebut juga sebagai pembangunan administrasi (*the development of administration*), yaitu melakukan usaha penyempurnaan di bidang organisasi dan kelembagaan, kepegawaian, tata kerja dan pengurusan sarana administrasi lainnya.
2. Administrasi untuk pembangunan, yaitu administrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (*the administration of development*) (Tjokroamidjojo, 1995: 14-17)

Berdasar uraian tersebut dapat diketahui bahwa administrasi pembangunan merupakan administrasi publik yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan, dalam arti untuk keperluan keberhasilan pembangunan, yang meliputi administrasi untuk perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Lebih lanjut, administrasi pembangunan merupakan administrasi publik yang diarahkan untuk penyempurnaan administrasi negara agar berkemampuan mendukung proses pembangunan. Tugas pokok dalam administrasi pembangunan adalah perencanaan pembangunan yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan program-program pembangunan, khususnya di negara berkembang.

2.2.2.1 Administrasi untuk Pembangunan (*Administration of Development*)

Kartasasmita (1997: 47-48) menjelaskan untuk mengkaji administrasi bisa dari segi komponen, kegiatan, maupun prosesnya. Namun untuk dasar

pemahaman secara mudah, ditemukan dua aspek mengenai administrasi, yaitu manajemen dan organisasi. Untuk membahas administrasi terkait dengan pembangunan lebih tepat menggunakan pendekatan manajemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah administrasi bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan. Studi mengenai manajemen banyak mengalami perkembangan, namun teori pokoknya tidak berubah yaitu minimal ada tiga kegiatan besar yang dilakukan oleh manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Menurut Tjokroamidjojo (1995: 14-17) administrasi untuk pembangunan meliputi dua fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijaksanaan dan program-program pembangunan.

Seringkali kebijaksanaan dan program-program dirumuskan dalam suatu rencana pembangunan, atau dalam suatu kerangka kebijaksanaan dan program-program yang konsisten. Rangkaian proses perumusan kebijaksanaan maupun program-program pembangunan termasuk dalam wilayah administrasi, sedangkan substansi dan perumusan kebijaksanaan maupun program-program tersebut menjadi wilayah disiplin ilmu lain yang bersangkutan untuk mengolah dan menganalisisnya. Siagian (2009:154-155) menjelaskan bahwa penyusunan program kerja selain untuk mempermudah operasionalisasinya juga merupakan upaya untuk memungkinkan pelaksanaan rencana secara efisien dan efektif sehingga menuntut semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan baik didalam maupun diluar aparatur pemerintahan harus melakukan kegiatan tersebut.

2. Pelaksanaan kebijaksanaan dan program pembangunan secara efektif.

Pelaksanaan kebijakan maupun program-program pembangunan secara efektif memerlukan penyusunan instrumen-instrumen administrasi yang baik. Dengan demikian dalam hal ini perlu diperhatikan dua hal, yaitu pertama terkait dengan kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan fungsi administrator sebagai unsur pembaharu; kedua, terkait dengan pengendalian atau pengurusan yang baik dari administrasi fungsional seperti kepegawaian dan pembiayaan pembangunan sebagai sarana pencapaian tujuan kebijaksanaan dan program-program pembangunan. Tercapainya suatu tujuan pembangunan tidak dapat hanya dibebankan kepada salah satu pihak, misalnya dari hasil kegiatan pemerintah saja, karenanya salah satu hal penting lainnya dalam administrasi pembangunan adalah membangun partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, perlu dukungan dan kerjasama banyak pihak dalam suksesnya suatu proses pembangunan meliputi andil pemerintah dan masyarakat.

Tjokroamidjojo (1995: 54-68) juga menjelaskan tentang aspek-aspek yang saling mempengaruhi administrasi pembangunan, yang meliputi: 1) aspek politik; 2) aspek ekonomi; 3) aspek sosial budaya; 4) aspek perkembangan ilmu, teknologi dan lingkungan fisik; serta 5) aspek institusional. Aspek-aspek tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan administrasi pembangunan dalam rangka proses pembangunan, juga terkait dengan peran pemerintah sebagai salah satu aktor dalam pembangunan. Siagian (2009: 142-150) menyatakan bahwa pemerintah tetap memainkan peran yang dominan dalam proses pembangunan nasional baik selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan tentunya sebagai pelaksana dari suatu kegiatan pembangunan tertentu.

Pengetahuan dan pemahaman terkait administrasi pembangunan secara menyeluruh menjadi penting bagi perencana, pelaku dan pelaksana pembangunan. Hal ini penting agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berlangsung terus-menerus atau berkelanjutan mengingat kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang relatif dan terus berkembang.

2.3 Perencanaan pembangunan

2.3.1 Pengertian dan manfaat perencanaan pembangunan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain. Terdapat banyak definisi tentang perencanaan yang terlihat berbeda pada beberapa literatur. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang, perbedaan fokus penelitian, dan perbedaan luasnya bidang yang tercakup dalam perencanaan itu sendiri. Setiap orang yang menyusun rencana berarti menetapkan sejumlah langkah ke depan dalam pikirannya, yang harus menuju ke arah suatu hasil tertentu. Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (Kartasamita, 1997:48).

Tarigan (2004:3) mengemukakan suatu definisi perencanaan yang lebih luas dan kompleks terkait dengan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan dan seringkali berperan cukup besar dalam keberhasilan suatu rencana kegiatan, sebagai berikut:

“Perencanaan adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *noncontrollable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran”.

Selanjutnya Conyers and Hills (1990:3) memberikan definisi perencanaan sebagai “*as a continuous process which involves decisions, or choices, about alternative ways of using available resources, with the aim of achieving particular goals at some time in the future*” (suatu proses berkesinambungan yang melibatkan keputusan atau pilihan tentang cara-cara alternatif menggunakan sumber daya yang tersedia, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang). Perencanaan yang dimaksudkan dalam dua pengertian tersebut terkait dengan perencanaan ekonomi ataupun perencanaan pembangunan yang berfokus pada bagaimana mengalokasikan sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien. Dari beberapa definisi tersebut dapat diurai unsur-unsur yang menjadi ciri dari perencanaan, yaitu:

1. Merencanakan berarti memilih, yaitu memilih tujuan, prioritas kegiatan atau memilih alternatif program;
2. Perencanaan sebagai suatu cara pengalokasian sumber daya. Hal ini karena adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia;
3. Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan, dengan kata lain bahwa perencanaan diwujudkan dalam bentuk peramalan dan penjadwalan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses dalam memilih dan menentukan tujuan untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menyusun cara atau strategi dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada demi mewujudkan tujuan perbaikan dimasa datang. Tujuan perbaikan di masa depan mengidentifikasi pada pembangunan yang merupakan salah satu tugas pemerintah/negara dalam administrasi publik. Demi mewujudkan pembangunan yang terarah dan bertanggung jawab serta mempermudah pencapaian tujuan pembangunan,

maka perencanaan pembangunan menjadi satu hal yang penting untuk diselenggarakan.

Perencanaan pembangunan terkait dengan perencanaan yang dipakai pemerintah atau badan-badan lainnya untuk mengatasi masalah perubahan ekonomi dan masalah sosial pada umumnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Waterson dalam Conyers (1991:6) sebagai berikut:

“Negara terlibat dalam hal perencanaan pembangunan bila pemerintah yang bersangkutan sedang melaksanakan bentuk-bentuk usaha yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran serta berjalan terus-menerus guna meningkatkan tingkat perekonomian dan kemajuan sosial, sehingga pada akhirnya mampu merubah keadaan yang dianggap sebagai mengatasi rintangan tersebut guna pencapaian tujuan termaksud”.

Riyadi dan Bratakusumah (2004: 7) menjelaskan pengertian perencanaan pembangunan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu: 1) tujuan akhir yang dikehendaki; 2) sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif); 3) jangka waktu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut; 4) masalah-masalah yang dihadapi; 5) modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; 6) kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya; 7) orang, organisasi, atau badan pelaksananya; 8) mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya (Kartasasmita, 1997: 49).

Dengan melaksanakan suatu perencanaan dengan baik diharapkan dapat diperoleh manfaat maupun fungsi dari kegiatan perencanaan. Fungsi perencanaan antara lain untuk menetapkan arah dan strategi serta titik awal kegiatan supaya dapat membimbing dan memperoleh ukuran yang digunakan dalam pengawasan agar tercegah pemborosan waktu dan faktor produksi lainnya (Syafiie, 2006: 75).

2.3.2 Jenis perencanaan pembangunan

Perencanaan dapat dibedakan pada teori yang mendasarinya. Perkembangan dalam ilmu perencanaan menunjukkan bahwa perencanaan membutuhkan kontribusi disiplin ilmu lain sebagai modal *observing* sekaligus media penjelas, seperti ilmu sosial, matematika, lingkungan, *civil engineering*, arsitektur dan lain-lain. Penyerapan substansi metode dari disiplin ilmu lain sering disebut sebagai *substantive theory* atau dalam teori perencanaan dikenal dengan *theory in planning*. Sementara teori perencanaan disebut sebagai teori prosedural atau *theory of planning*. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Faludi (1976: 3) bahwa dalam diskusi mengenai teori perencanaan, ada dua teori besar di dalamnya, yaitu teori prosedural dan teori substantif. Teori prosedural dapat dianggap sebagai cara perencana memahami diri sendiri dan cara mereka bekerja sebagai perencana. Sedangkan teori substantif membantu perencana memahami wilayah perencanaan.

Teori prosedural berhubungan dengan teori yang membahas tentang cara atau teknik perencanaan sehingga kualitas rencana yang dihasilkan sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan kata lain, teori prosedural ini berkaitan dengan metodologi perencanaan. Terdapat banyak metode perencanaan yang merupakan bagian dari teori prosedural, misalnya saja perencanaan jangka

panjang, perencanaan komprehensif, perencanaan strategis, serta perencanaan partisipatif. Adapun teori substansif lebih merujuk pada bidang perhatian atau substansi bidang yang sedang direncanakan. Perencanaan yang baik seharusnya mempertimbangkan kedua teori perencanaan tersebut, baik teori prosedural maupun teori substantif karena perencanaan yang baik tidak mungkin dilakukan dengan mengabaikan esensi dari persoalan yang dibahas. Oleh karena itu, baik teori prosedural maupun teori substantif bersifat saling melengkapi (Muluk, 2007). Diharapkan kedua teori tersebut akan membentuk suatu kolaborasi yang oleh Faludi (1976: 7) disebut sebagai perencanaan efektif.

Perencanaan pembangunan dibedakan pula menjadi berbagai jenis perencanaan berdasar materi perencanaan, jangka waktu, kewenangan institusi yang terlibat, jalur koordinasi, serta keterlibatan masyarakat. Beberapa jenis perencanaan yang terkait dengan kajian penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a. *Top down dan bottom up planning*

Pembedaan perencanaan dari jenis ini adalah kewenangan dari institusi yang terlibat. Kedua model perencanaan tersebut hanya berlaku jika terdapat beberapa tingkat pemerintahan atau beberapa jenjang jabatan di perusahaan yang masing-masing tingkatan diberi wewenang untuk melakukan perencanaan. Perencanaan model *top-down* adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan berada pada institusi yang lebih tinggi, dan institusi perencana pada level lebih rendah harus menerima arahan dari institusi yang lebih tinggi. Rencana dari institusi yang lebih tinggi tersebut harus dijadikan bagian rencana dari institusi yang lebih rendah. Sedangkan perencanaan *bottom-up* apabila kewenangan utama dalam perencanaan berada pada

institusi yang lebih rendah, dimana intitusi yang lebih tinggi harus menerima usulan yang diajukan oleh tingkat yang lebih rendah (Tarigan, 2004: 16)

b. Perencanaan partisipatif

Perencanaan partisipatif merupakan model perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Selanjutnya Abe (2002:84) mengidentifikasi dua bentuk perencanaan partisipatif yaitu (1) langsung, melibatkan masyarakat dan (2) tidak langsung, masyarakat memberikan mandat kepada wakil yang dipilihnya.

c. Perencanaan sektoral dan perencanaan regional (wilayah)

Perencanaan pembangunan baik secara nasional maupun daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral memfokuskan perhatiannya pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut dan mengelompokkan kegiatan ekonomi menurut sektor-sektor sejenis. Sedangkan pendekatan regional melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang suatu wilayah. Pendekatan wilayah memungkinkan untuk melihat dan memperhatikan potensi SDA, SDM, teknologi, letak geografis, dan lainnya dari suatu daerah, kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kerjasama antar daerah untuk saling mendukung demi memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Paduan antara pendekatan wilayah dan pendekatan sektoral sangat penting karena masing-masing mempunyai kemampuan dalam menyukseskan suatu pembangunan (Iryanto, 2006: 94-96).

Dalam prakteknya memungkinkan adanya kombinasi dari beberapa jenis perencanaan. Rencana tidak muncul begitu saja, tetapi memerlukan suatu pemikiran mendalam tentang berbagai hal secara komprehensif dan

berkesinambungan. Karena itu penting bagi seorang perencana untuk memahami proses penyusunan rencana pembangunan.

2.3.2 Proses perencanaan pembangunan

Penyusunan rencana memiliki tahapan yang sistematis sebagaimana dikemukakan oleh Kunarjo (2002: 71) sebagai berikut:

- a) Tahap pertama, melakukan penelitian tentang potensi SDA, SDM serta kelembagaan yang tersedia
- b) Tahap kedua, menentukan tujuan dan sasaran perencanaan
- c) Tahap ketiga, menjabarkan tujuan ke sasaran dalam program dan kebijakan di tingkat makro.
- d) Tahap keempat, menyusun kebijakan secara lebih rinci mengenai apa dan siapa yang melaksanakan, serta kapan.
- e) Tahap kelima, melaksanakan apa yang direncanakan.
- f) Tahap keenam, melakukan penilaian terhadap program, proyek dan kebijakan yang sedang berjalan.
- f) Tahap ketujuh, apabila diperlukan melakukan revisi dan menyesuaikan dengan perencanaan program yang benar.
- g) Tahap kedelapan; mengidentifikasi dan menginformasikan keberhasilan maupun kegagalan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan berikutnya.

Sedangkan proses perencanaan yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1987: 57) meliputi:

1. Penyusunan rencana, terdiri dari kegiatan tinjauan keadaan, baik sebelum memulai suatu rencana (*review before take off*) maupun tinjauan terhadap pelaksanaan rencana sebelumnya (*review of performance*). Kegiatan

tinjauan keadaan, masalah dan potensi memerlukan sekali bahan-bahan statistik dan hasil-hasil penelitian. Bahkan kelemahan dibidang ini merupakan kelemahan kegiatan perencanaan; perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana (*forecasting*); penetapan tujuan rencana (*plan objectives*); pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana; identifikasi kebijakan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana; pengambilan keputusan sebagai persetujuan atas suatu rencana.

2. Penyusunan program rencana yang dilakukan melalui perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu
3. Pelaksanaan rencana (*implementasi*)
4. Pengawasan pelaksanaan rencana
5. Evaluasi untuk membantu kegiatan pengawasan, dilakukan melalui suatu tinjauan yang berjalan secara terus menerus.

Perencanaan dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan (siklus), melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk menghubungkan tujuan dengan rancangan program atau kegiatan dan memastikan bahwa hal-hal yang diperoleh selama pelaksanaan program atau kegiatan tersebut menjadi masukan bagi tahap selanjutnya. Berkenaan dengan hal tersebut Riyadi dan Deddy (2004: 13-14) menjelaskan mengenai aspek ruang dan waktu dalam perencanaan, bahwa perencanaan pembangunan sebagai tahapan dalam proses pembangunan memiliki keterkaitan dengan tahapan berikutnya sehingga membutuhkan *timing* yang jelas dan tepat.

Proses perencanaan juga disampaikan oleh Wrihatnolo dan Riant, 2006: 59) menyebutkan berbagai langkah-langkah terstruktur yang dimulai dari pengumpulan data, pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan,

pemantauan dan evaluasi hasil, pelaporan, analisis dampak hingga diawali lagi dari pengumpulan data dan seterusnya sebagai suatu siklus. Langkah-langkah tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan pembangunan. Yang harus dicatat bahwa berbagai macam tahapan tersebut saling terkait satu sama lain. Hal ini mempunyai implikasi bukan saja pada urutan yang harus dilalui tetapi juga teknik yang digunakan pada masing-masing tahap dan struktur organisasi tempat keseluruhan proses dilaksanakan. Orang-orang yang terlibat pada masing-masing tahap juga harus saling melakukan komunikasi/koordinasi Conyers dan Hills, (1990:74)

Pada tahun 2004 diterbitkan Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara nasional maupun di daerah. Menurut undang-undang tersebut proses perencanaan pembangunan dilakukan dengan memenuhi beberapa pendekatan, yaitu:

1. Politik, bermakna bahwa pemilihan langsung kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi kepala daerah dalam RPJM
2. Teknokratis, bahwa perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Partisipatif, bermakna bahwa proses penyusunan perencanaan daerah perlu dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4. Perencanaan *top down* dan *bottom-up*, bahwa proses penyusunan rencana juga memperhatikan aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan.

Perencanaan pembangunan di Indonesia dilaksanakan secara nasional melalui perencanaan oleh pemerintah pusat serta perencanaan pembangunan di daerah oleh pemerintah daerah. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah diharapkan mampu memberikan hasil pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan potensi, kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah tersebut. Perkembangan sistem administrasi pemerintahan di Indonesia semakin mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan adanya kebijakan desentralisasi sehingga memungkinkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2.4 Perencanaan pembangunan daerah

2.4.1 Pengertian dan ciri utama perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan apabila dihubungkan dengan suatu daerah sebagai area pembangunan maka dapat diperoleh pengertian perencanaan pembangunan daerah seperti dijelaskan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2004:7), sebagai berikut:

“Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas.”

Perencanaan pembangunan daerah sejatinya merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Juga merupakan manifestasi dari perumusan kepentingan lokal dalam memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri

dalam kerangka otonomi daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan mengoptimalkan penggunaan potensi daerah sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Ciri-ciri utama perencanaan pembangunan daerah menurut Syafrudin (1993:47-55) meliputi:

1. Logis dan strategis.

Perencanaan dibuat berdasarkan pola dasar pembangunan yang bersifat umum dan berlaku jangka panjang bagi daerah yang bersangkutan. Penyusunan dan pelaksanaan rencana dapat dijabarkan secara berjenjang dalam rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan.

Untuk memenuhi ciri tersebut perencanaan harus melakukan beberapa langkah utama sebagai awal/pendahuluan perencanaan, yaitu: 1) melakukan usaha pengumpulan, pencarian informasi dan data-data mengenai daerah serta masyarakat di wilayah rencana; 2) analisa terhadap kondisi, kebutuhan dan potensi pembangunan yang ada di daerah untuk keperluan masa kini maupun jangka waktu beberapa tahun mendatang; 3) menentukan tujuan dan sasaran pembangunan secara keseluruhan bagi daerah tersebut; 4) merumuskan pola dasar pembangunan daerah untuk memenuhi tujuan jangka panjang.

2. Mengutamakan perencanaan tata ruang dan tata guna tanah

Perencanaan tata ruang dan tata guna tanah harus dijamin agar seluruh bidang tanah yang ada dalam suatu daerah dimanfaatkan sebaik mungkin guna mencapai tujuan yang membawa faedah optimal bagi penduduk dalam batas daerah tersebut. Pemanfaatan tanah untuk berbagai aspek kehidupan hendaknya ditempatkan pada lokasi dan posisi yang cukup optimal dan

fungsional (strategis) dalam kaitan satu sama lain, misalnya lokasi untuk lahan pertanian, prasarana transportasi, sarana sosial dan sebagainya.

3. Mampu menampung adanya hubungan ketergantungan antar sektor

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah melalui program-program pembangunan perlu adanya pendekatan multi sektoral karena adanya hubungan saling terkait antara sektor yang satu dengan sektor lainnya. Dengan demikian perlu adanya suatu mekanisme dalam pengaturan tanggung jawab atas perencanaan lintas sektoral bagi suatu daerah untuk menjamin sinkronisasi, kesesuaian dan keseimbangan program-program yang dilaksanakan oleh berbagai sektor dalam suatu daerah.

4. Menggunakan pendekatan sistem

Perencanaan, penyusunan program dan anggaran merupakan komponen-komponen yang tidak bisa dipisahkan dari sistem secara keseluruhan. Karena itu instansi-instansi yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tersebut baik instansi perencana maupun instansi penyusunan anggaran lintas sektoral harus menjalin kerjasama guna mensinkronkan kegiatan mereka.

Selanjutnya Kuncoro (2004: 6) menambahkan bahwa perencanaan pembangunan daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah, dimana daerah melakukan perencanaan berdasarkan informasi yang detil menyangkut sumberdaya, permasalahan, dan potensi daerah setempat. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu sistem perencanaan yang dipergunakan untuk mengatur alokasi sumber daya yang terbatas pada suatu daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Adapun daerah sebagai wilayah perencanaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan pendapat Syafrudin (1993:43-47), sebagai berikut:

- a. Daerah administratif, yaitu daerah perencanaan yang dilaksanakan dalam batas-batas unit daerah seperti propinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa atau kelurahan sebagai unit administratif terkecil.
- b. Daerah-daerah yang terkait dalam satu sistem, yaitu beberapa daerah yang memiliki ciri ekologis yang relevan atau ciri-ciri lain yang saling menunjang sehingga menjadi satu wilayah perencanaan yang logis, biasanya membentang secara geografis, misalnya Daerah Aliran Sungai (DAS).
- c. Daerah perencanaan startegis, disebut strategis sebab dianggap penting untuk memusatkan pembangunan pada daerah tersebut karena memiliki potensi pembangunan yang cukup besar (SDA, SDM), atau bisa juga pada daerah tersebut mendesak untuk dilakukan pembangunan, misalnya mayoritas penduduk yang tinggal hidup di bawah garis kemiskinan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang rumit karena memiliki kompleksitas terkait dengan wilayah dan pengelolaan komunitas. Karena itu dalam prosesnya perlu untuk memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

2.4.1 Faktor-faktor dalam perencanaan pembangunan daerah

Pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak sepenuhnya menjamin bahwa suatu program atau kegiatan pembangunan yang direncanakan akan selalu lancar dalam pelaksanaan di lapangan. Secara umum, dapat dikemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program perencanaan pembangunan daerah dengan merujuk pada faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan seperti dijelaskan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2004: 16-39) yang meliputi:

- 1) Faktor lingkungan: faktor lingkungan ini bisa berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal), yang mencakup sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Faktor eksternal biasanya datang dari wilayah tetangga atau pengaruh global yang berkembang dalam lingkup nasional maupun internasional. Sedangkan faktor internal, merupakan pengaruh yang datang dari dalam wilayah perencanaan sendiri
- 2) Faktor Sumberdaya Manusia: faktor sumberdaya manusia merupakan motor penggerak perencanaan dan pelaksanaannya, yang mempengaruhi kualitas perencanaan yang dihasilkan. SDM yang tepat dan berkualitas lebih memungkinkan untuk menghasilkan kualitas perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik juga lebih memungkinkan dapat diimplementasikan dalam program-program pembangunan. Seorang perencana pembangunan daerah harus turun ke lapangan guna melakukan observasi dan penelitian untuk menjangkau informasi, melihat fakta, dan menyerap aspirasi/kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat, dan juga memahami kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, baik lokal/daerah maupun nasional. Sehingga terdapat enam hal pokok yang perlu dimiliki oleh seorang perencana pembangunan daerah, yaitu:
 - a) Mengetahui wilayah perencanaan dengan berbagai permasalahannya
 - b) Memahami adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat intersektoral, heterogen, dan bervariasi
 - c) Memadukan kepentingan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat
 - d) Merumuskan rencana aksi (*action plan*) dari hasil perencanaannya (*operational design*)
 - e) Melaksanakan rencana aksi tersebut
 - f) Melakukan evaluasi perencanaan

- 3) Faktor sistem yang digunakan: aturan atau kebijakan yang digunakan oleh daerah tertentu sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan, yang bisa menyangkut prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, atau pengesahan
- 4) Faktor perkembangan ilmu dan teknologi: faktor ilmu pengetahuan dapat berpengaruh dari segi peralatan dan berbagai teknik serta pendekatan yang lebih maju. Selain itu letak dan kondisi geografis wilayah juga menentukan penggunaan metode, teknik, dan peralatan perencanaan, serta yang terpenting adalah sejauh mana SDM perencananya mampu mengimprovisasi perkembangan tersebut secara optimal
- 5) Faktor pendanaan: merupakan faktor yang harus ada untuk membiayai sebuah aktivitas, termasuk dalam perencanaan pembangunan. Kepastian adanya sumber dana dapat memberikan jaminan akan terlaksananya perencanaan tersebut, yaitu mulai dari berapa jumlah yang dibutuhkan (anggaran), dari mana sumber pendanaannya dan bagaimana sistem pengelolaannya.

Disamping faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, penting juga adanya keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan di suatu daerah (*stakeholder*). Pentingnya keterlibatan *stakeholder*/pemangku kepentingan baik masyarakat maupun organisasi, terkait dengan partisipasi dan komitmen mereka dalam realisasi dan keberlanjutan rencana. Conyers (1992: 154) menjelaskan bahwa pentingnya melibatkan masyarakat (partisipasi) dalam proses perencanaan adalah pertama untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya maka program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua untuk

meningkatkan kepercayaan pada program atau proyek pembangunan yang akan dilaksanakan; ketiga memunculkan rasa memiliki terhadap proyek tersebut; keempat bahwa partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat.

2.5 Perencanaan strategis

Upaya pembangunan tidak lepas dengan kondisi sosial yang terus berkembang dan senantiasa mengalami perubahan. Perubahan terjadi dari segi kondisi ekonomi, politik, sosial masyarakat dan lingkungan yang memungkinkan munculnya berbagai permasalahan yang semakin kompleks dengan intensitas semakin tinggi. Dirgantoro (2004: 7-9) menjelaskan bahwa pada taraf permasalahan semakin kompleks dengan intensitas semakin tinggi memerlukan kebutuhan adanya suatu pola atau model yang lebih terstruktur dan sistematis yang dapat membantu para pembuat keputusan untuk secara lebih sederhana memandang dan menganalisis permasalahan serta merumuskan suatu strategi yang paling *applicable* dan mampu memberikan hasil terbaik, yang dikenal sebagai manajemen strategis.

Manajemen strategis didefinisikan secara sederhana oleh Dirgantoro (2004:9-11), yaitu bagaimana keputusan yang bersifat strategis dibuat dan bagaimana mengimplementasikannya. Secara garis besar manajemen strategis dibentuk oleh tiga elemen, yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai (melalui penetapan visi, misi dan tujuan), perubahan lingkungan yang harus diantisipasi (sehingga diperlukan suatu analisa lingkungan baik internal maupun eksternal), serta strategi (meliputi formulasi, implementasi, dan pengendalian). Formulasi strategi inilah yang biasanya disebut dengan perencanaan strategis (Rangkuti, 2005: 8). Dengan demikian pada dasarnya perencanaan strategis merupakan salah satu fungsi dari manajemen strategis.

Sebagai sebuah instrument/fungsi manajemen, perencanaan strategis membantu organisasi menjalankan tugasnya dengan baik melalui pemfokusan sumberdaya organisasi, menjamin elemen organisasi bekerja menuju sasaran yang sama, menilai dan menyesuaikan arah organisasi dalam merespon sebuah perubahan lingkungan. Untuk kepentingan jangka pendek, perencanaan strategis merupakan sebuah usaha yang disiplin untuk memproduksi keputusan dan aksi fundamental yang akan mempertajam dan memberikan panduan bagi organisasi terhadap apa yang akan dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan dengan berfokus pada masa depan (Wilopo, 2006: 10). Pendapat mengenai definisi perencanaan strategis dikemukakan pula oleh beberapa ahli. Olsen dan Eadie dalam Bryson (2007: 4) menjelaskan bahwa perencanaan strategis merupakan upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Sedangkan Allison dan Kaye (2005: 1) mendefinisikan perencanaan strategis sebagai suatu sistem sistemik yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan diantara *stakeholder* utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis meliputi kegiatan perumusan tindakan-tindakan penting sebagai panduan organisasi serta upaya membangun keterlibatan *stakeholder* dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Untuk dapat merumuskan keputusan penting mengenai tindakan/prioritas yang akan dilakukan organisasi dalam suatu rencana strategis maka perencanaan strategis harus dilandaskan dari pemikiran strategis, yaitu suatu pemikiran yang mengarah pada *perspektif*, bersifat *intuitif* atau perasaan tentang

harapan dan mimpi di masa depan. Morrisey (1997: 2) menjelaskan definisi pemikiran strategis sebagai berikut:

“Pemikiran strategis individual mencakup penerapan pertimbangan berdasarkan pengalaman untuk menentukan arah di masa depan. Pemikiran strategis organisasional adalah koordinasi pikiran-pikiran kreatif menjadi suatu *perspektif* bersama yang memungkinkan organisasi melangkah ke masa depan dengan suatu sikap untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan”.

Hasil dari pemikiran strategis mencakup keputusan-keputusan berkaitan dengan nilai-nilai strategis, visi, misi dan strategi organisasi. Dengan kata lain pemikiran strategis membentuk dasar bagi pengambilan keputusan strategis. Tanpa dasar pemikiran strategis, keputusan dan tindakan yang diambil mungkin akan terpecah dan tidak sejalan dengan kondisi organisasi dalam jangka panjang (Morrisey, 1997: 4). Dengan demikian dapat dipahami bahwa keputusan strategis merupakan keputusan mendasar yang spesifik serta secara langsung dapat mempengaruhi dan mengarahkan kepada aktivitas-aktivitas organisasi, berdasarkan penilaian pada tujuan, pemahaman lingkungan terutama kekuatan yang mendukung pencapaian tujuan, serta kreatifitas dalam pengembangan respon kekuatan yang dimiliki.

Dalam merumuskan perencanaan strategis, ada beberapa prinsip-prinsip umum perencanaan strategis, yaitu:

1. “Perencanaan strategis harus bersifat antisipatif terhadap berbagai permasalahan yang ada di masa depan dengan mempertimbangkan kondisi masa sekarang untuk mengatasinya;
2. Perencanaan strategis harus berorientasi pada pencapaian hasil dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi sebagai rel yang harus dijalankan secara konsisten;
3. Perencanaan strategis harus menggambarkan apa yang ingin di capai di masa depan oleh suatu organisasi ke arah peningkatan produktivitas kerja;
4. Perencanaan strategis harus memperhitungkan kemampuan internal dan kondisi eksternal;
5. Harus ada komitmen dan konsensus untuk melaksanakannya secara konsisten sebagai hasil proses pengambilan keputusan bersama;

6. Harus mencerminkan prioritas tindakan dalam upaya pencapaian hasil secara optimal;
7. Perencanaan strategis dalam prosesnya harus mempertimbangkan input-input dari *stakeholders* atau *clients groups*;
8. Harus memperhitungkan aspek keuangan untuk melaksanakannya;
9. Harus dapat diukur hasilnya". (Riyadi dan Bratakusumah, 2004: 291).

Adapun proses perencanaan strategis meliputi: 1) memprakasai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis; 2) mengidentifikasi mandate strategis; 3) memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi; 4) menilai lingkungan eksternal; 5) menilai lingkungan internal; 6) mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi; 7) merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu; 8) menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan (Bryson, 2007: 55). Perencanaan strategis bersifat spesifik dan mengarah pada penentuan strategi untuk mencapai tujuan berdasarkan kesepakatan *stakeholder*. Karena itu perencanaan strategis sering digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan baik secara nasional maupun di daerah.

2.6 Keterkaitan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan strategis

Perencanaan pembangunan daerah dapat dimaknai sebagai kegiatan yang mengatur upaya pembangunan dengan berbagai kondisi dan permasalahan yang ada di suatu daerah. Daerah sebagai wilayah perencanaan terdiri dari berbagai komponen pembangunan meliputi sumber daya alam dan manusia, organisasi pemerintah, serta komunitas masyarakat. Kegiatan perencanaan pembangunan daerah menjadi tidak mudah karena dihadapkan pada berbagai permasalahan dari keadaan di daerah tersebut sehingga membutuhkan kerjasama antar anggota perencana maupun antar institusional/sektor.

Beberapa ciri umum perencanaan pembangunan adalah: logis dan strategis dalam arti dilakukan atas dasar pemahaman lingkungan perencanaan secara keseluruhan; kebijakan bersifat makro; serta mampu menampung adanya hubungan ketergantungan antar sektor. Adapun proses penyusunan rencana pembangunan meliputi pula upaya pemilihan strategi pembangunan yang pada prinsipnya memerlukan kajian secara lebih spesifik melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam mengkaji dan menganalisis perumusan rencana, serta untuk mendukung keberhasilan pelaksanaannya. Hal ini perlu dilakukan mengingat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan oleh berbagai komponen di daerah meliputi organisasi-organisasi pemerintah dan masyarakat. Karena kebijakan yang dihasilkan dari perencanaan pembangunan bersifat makro maka diperlukan penjabaran kebijakan tersebut pada rencana yang lebih mengarah pada program prioritas serta melibatkan *stakeholder*. Keseluruhan hal tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan strategis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan membutuhkan perencanaan strategis dalam hal menjabarkan program pembangunan secara lebih spesifik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah, termasuk didalamnya membangun partisipasi dan koordinasi diantara *stakeholder* baik antar sektor maupun dengan masyarakat .

Perencanaan strategis mencakup seluruh komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan lagi menjadi Rencana Operasional (Renop), berisi program-program operasional termasuk proyek-proyek dengan sasaran jangka pendek. Penetapan renstra dan renop harus melibatkan manajemen puncak karena sifatnya sangat mendasar dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi, untuk

mewujudkan, mempertahankan dan mengembangkan eksistensi jangka pendek maupun jangka panjangnya. Pengimplementasian strategi dalam program-program termasuk proyek-proyek untuk mencapai sasarannya dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen yang lain mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan kontrol (Nawawi, 2005: 150-153). Perencanaan strategis juga menjadi media koordinasi dari berbagai *stakeholder* dalam kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memudahkan pencapaian konsesus tentang sasaran dan strategi serta penggunaan sumber daya.

Pada penelitian ini Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sebagai organisasi pemerintah memiliki tugas untuk melakukan perencanaan pembangunan bidang pertanian di Kota Batu. Kebijakan makro pembangunan pertanian yang tertuang dalam RPJP dan RPJM Kota Batu dijabarkan secara lebih spesifik pada Renstra dan Renja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Salah satu kebijakan strategis bidang pertanian yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu tahun 2007-2012 adalah pengembangan pertanian organik ramah lingkungan. Dengan demikian kajian dalam penelitian ini memadukan konsep perencanaan pembangunan dan perencanaan strategis dalam bidang pengembangan pertanian organik di Kota Batu.

2.7 Pembangunan pertanian berkelanjutan

2.7.1 Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dirumuskan pada akhir tahun 1980-an sebagai respon terhadap strategi pembangunan sebelumnya yang terfokus pada tujuan pertumbuhan ekonomi tinggi. Strategi pembangunan tersebut telah terbukti menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun

kualitas lingkungan hidup. Kenyataan yang terjadi bahwa pembangunan yang ditempuh selama ini telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan pembangunan itu sendiri (Redclift dalam Hidayat, 2007: 47).

Definisi pembangunan berkelanjutan yang paling dikenal adalah yang dikemukakan oleh Brundlandt, yaitu “...*development which meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*” (pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri). Pengertian ini mengandung ajaran moral keadilan antar generasi, yang juga dipahami sebagai asas pokok dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan. Intinya kita tidak boleh membiarkan kebutuhan generasi sekarang tak terpenuhi, tetapi dalam pemenuhan tersebut juga tidak boleh menjadikan generasi yang akan datang kehilangan kesempatannya. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) kesetaraan dan keadilan sosial; 2) pendekatan yang holistik; 3) apresiasi keanekaragaman; 4) bervisi jangka panjang (Soegijoko, 2005: 2-3).

Konsep pembangunan berkelanjutan telah dibicarakan dalam berbagai perundingan tingkat dunia sejak tahun 1980-an. Salah satunya adalah KTT Bumi yang lebih dikenal sebagai *World Summit on Sustainable Development-WSSD* di Johannesburg Tahun 2002. Pertemuan ini menghasilkan suatu rencana yang dikenal sebagai *Johannesburg Plan of Implementastion-JPOI* yang memberikan penekanan pentingnya: 1) pengentasan kemiskinan, membantu dan menolong masyarakat yang sekarang ini tidak mampu memenuhi kebutuhannya, apalagi

untuk generasi yang akan datang; 2) pengendalian pola produksi dan konsumsi untuk menjamin keamanan pasokan dan konsumsi masa depan; 3) pengelolaan sumberdaya alam terutama yang menjadi basis perkembangan sosial ekonomi agar berkelanjutan. Seiring dengan pelaksanaan WSSD tersebut diselenggarakan pula Forum Pemerintah Daerah (FPD) oleh beberapa wakil kota dan pemerintah daerah dari berbagai negara. Menurut FPD, pemerintah daerah mempunyai peranan penting sebagai katalis pembangunan yang mendorong terjadinya interaksi antara pelaku pembangunan. Pemerintah daerahlah yang mengkatalisasi reaksi positif sehingga terbangun kemitraan antara pemimpin komunitas, pelaku usaha dan masyarakat sipil lainnya menuju perkembangan kehidupan yang berkelanjutan. Intinya pemerintah daerahlah yang berhadapan dengan masalah dan potensi nyata yang berkembang di masyarakat (Kuswartojo, 2005: 10-11).

Pengertian pembangunan berkelanjutan juga disampaikan oleh Soemarwoto dalam Sugandhy dan Rustam Hakim (2007: 21) sebagai berikut:

“...perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya”.

Secara implisit, definisi tersebut mengandung pengertian strategi bagi pembangunan berkelanjutan, yaitu: a) berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial dan ekonomi; b) memperhatikan batas-batas ekologi dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil; c) perlunya campur tangan pemerintah, dukungan dan kerja sama dunia usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya; d)

perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara yurisdiksi politik terkait dalam pengembangan energi bagi kebutuhan hidup; e) bergantung pada pendidikan, perencanaan, dan proses politik yang terinformasikan, terbuka, dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen; f) mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi. Strategi tersebut tidak lain merupakan penjabaran tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang menekankan perlunya koordinasi dan integrasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam setiap pembangunan nasional dengan pendekatan kependudukan, pembangunan, dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Sugandhy dan Rustam Hakim, 2007: 21-23).

Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi acuan bagi pembangunan di banyak negara. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa penerapan pembangunan berkelanjutan memerlukan keterpaduan dalam tiga hal, yaitu: 1) antar sektor pembangunan; 2) aktor/pelaksana; 3) kebijakan, komitmen dan pengawasan oleh berbagai level pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai di daerah. Belanda misalnya, untuk mengatasi polusi pertanian dibuat inovasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan dapat diterima oleh masyarakat. Pembangunan pertanian dievaluasi dan diintegrasikan dengan kebijakan pengelolaan alam, manajemen air, perencanaan ruang dan perumahan, yang diwujudkan melalui pembangunan pedesaan menjadi area yang multi fungsi. Cina membentuk sebuah badan koordinasi antar instansi berdasarkan banyaknya masalah yang berkembang sebagai akibat kurangnya koordinasi lintas sektoral. Sedangkan di Italia mekanisme pengawasan diperkuat pada berbagai level pemerintahan dengan porsi peran dan tanggung jawab

berbeda dan jelas pada masing-masing level pemerintahan. Hal ini juga diterapkan di beberapa negara lain seperti Belanda, Ghana, dan Perancis (Breton *et al.*, 2007: 433-532).

Keberhasilan upaya pembangunan berkelanjutan dapat diketahui melalui indikator pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada tujuan pembangunan berkelanjutan dilihat dari aspek sosial ekonomi dan layanan masyarakat, aspek lingkungan meliputi pengelolaan limbah, pengelolaan sumber daya alam, dan pengelolaan sumber daya tanah. Indikator dari aspek sosial ekonomi dan layanan masyarakat misalnya berkurangnya kemiskinan, perubahan pola konsumsi, pengelolaan dan peningkatan kesehatan, dinamika kependudukan, pengembangan perumahan dan pemukiman, sistem perdagangan global neraca ekonomi dan lingkungan terpadu. Sedangkan indikator dari aspek lingkungan meliputi perlindungan terhadap atmosfer dan limbah beracun, pengelolaan hutan, pengembangan pertanian dan pedesaan, pengelolaan sumber daya air dan konservasi keanekaragaman hayati (Pitono, tanpa tahun: 100-101).

Pertemuan tingkat dunia telah dilaksanakan beberapa kali untuk membahas perkembangan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada tanggal 20-22 Juni 2012 di Rio de Janeiro, Brazil dan menghasilkan beberapa indikator untuk mengukur pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang pada dasarnya sama dan memperkuat hasil pertemuan-pertemuan sebelumnya yaitu menekankan perbaikan melalui pembangunan berkelanjutan pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan.

Konsep pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan landasan yang tepat dalam merencanakan

suatu pembangunan. Dengan demikian arah pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk pula pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian.

2.7.2 Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Pembangunan pertanian di Indonesia pada masa lalu mengikuti gerakan “Revolusi Hijau” dengan memasyarakatkan teknologi yang dikenal dengan “Panca Usaha Tani” meliputi: a) pemilihan benih unggul; b) pemupukan; c) pengairan; d) pemberantasan hama, penyakit dan gulma; serta e) penanganan pasca panen. Teknologi tersebut lebih menitikberatkan pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan mendorong penggunaan bahan-bahan kimia baik pupuk dan pestisida dengan jumlah semakin tinggi, bibit unggul hibrida maupun hasil rekayasa genetika serta penggunaan zat pengatur tumbuh sintetis. Arah pembangunan pertanian mulai bergeser setelah munculnya berbagai dampak penggunaan sarana produksi kimiawi yang mengakibatkan gangguan keseimbangan baik terhadap penurunan kesuburan tanah dan lingkungan, maupun produktivitas tanaman dan kesehatan manusia. Era reformasi memberikan harapan-harapan baru bagi sektor pertanian. Jargon *back to nature*, gerakan kembali ke desa, dan jargon lainnya menyemarakkan pergulatan sektor pertanian dalam mendapatkan tempat dalam era keterbukaan. Usaha untuk mereposisi sektor pertanian menjadi landasan utama pembangunan nasional diakomodasi pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan antara lain, UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; UU Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang; serta UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Arifin dalam Azis (2011) menyebutkan ada tiga dimensi penting dalam pembangunan pertanian, yaitu: pertumbuhan pertanian, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, konsistensi pertumbuhan merupakan syarat wajib bagi Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan tidak boleh mengganggu basis sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang sangat vital yang merupakan suatu keharusan dalam visi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Keterlibatan dan partisipasi seluruh komponen bangsa yaitu masyarakat politik kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), masyarakat bisnis (petani, koperasi, pengusaha), masyarakat madani (perguruan tinggi, lembaga riset, LSM, tokoh masyarakat dll) sangat diperlukan untuk mewujudkan pertanian yang tangguh dan berdaya saing.

Paradigma baru pembangunan pertanian diarahkan menuju pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) yang merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada sektor pertanian. Paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan bertumpu pada kemampuan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraannya dengan kemampuan sendiri dan dirumuskan melalui peningkatan kualitas dan profesionalitas sumberdaya manusia tani sebagai pelaku aktif pembangunan (Soemarno, 2004).

A. Filosofi

Filosofi pertanian berkelanjutan berisi suatu ajakan moral untuk berbuat kebajikan pada lingkungan sumber daya alam dengan mempertimbangkan tiga

aspek sebagai berikut: 1) Kesadaran Lingkungan (*Ecologically Sound*), sistem budidaya pertanian tidak boleh menyimpang dari sistem ekologis yang ada. Keseimbangan adalah indikator adanya harmonisasi dari sistem ekologis yang mekanismenya dikendalikan hukum alam. Misalnya penggunaan pestisida kimia pada sistem ekologi persawahan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam karena terbunuhnya organisme non-hama; 2) Bernilai Ekonomis (*Economic Valueable*), sistem budidaya pertanian harus mengacu pada pertimbangan untung rugi, baik bagi diri sendiri dan orang lain, untuk jangka pendek dan jangka panjang, serta bagi organisme dalam sistem ekologi maupun di luar sistem ekologi; 3) Berwatak Sosial atau Kemasyarakatan (*Socially Just*), sistem pertanian harus selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat di sekitarnya (Salikin, 2003: 6-7).

Kata *sustainable* mengandung dua makna, yaitu *maintenance* dan *prolong*. Artinya pertanian berkelanjutan harus mampu merawat atau menjaga untuk jangka waktu yang panjang. Libunao dalam Salikin (2003: 11) menyatakan bahwa paling tidak terdapat delapan ciri spesifik agar suatu pertanian dikatakan berkelanjutan, meliputi: 1) bernuansa ekologi; 2) berjiwa sosial; 3) bernilai ekonomis; 4) berbasis ilmu holistik; 5) berketepatan teknik; 6) berketepatan budaya; 7) dinamis; 8) peduli keseimbangan gender.

B. Tujuan dan Strategi

Secara umum pembangunan pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang dapat dicapai melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi, memprioritaskan kecukupan pangan, meningkatkan pengembangan sumber daya manusia,

memberdayakan dan memerdekakan petani, menjaga stabilitas lingkungan (aman, bersih, seimbang, diperbarui), dan memfokuskan tujuan produktifitas untuk jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu pendekatan pertanian berkelanjutan yang bersifat proaktif, berdasarkan pengalaman, dan partisipatif (Salikin, 2003: 15).

Secara singkat Hidayat (2007: 49), menyatakan bahwa dalam pembangunan pertanian berkelanjutan mengandung tiga aspek penting, yaitu:

1. Mengutamakan tumbuhnya inisiatif kreatif dari masyarakat petani sehingga kelangsungan pembangunan itu dapat dipertahankan;
2. Adanya perangkat atau institusi pendukung yang memadai sehingga memberi peluang yang besar kepada masyarakat petani untuk menerapkan teknologi berwawasan lingkungan;
3. Semua aktivitas itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapat masyarakat petani, tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan khususnya sumberdaya lahan dan air.

Upaya penerapan dan pengembangan pertanian berkelanjutan memerlukan langkah-langkah yang sistematis, bertahap dan menyeluruh. Sugito (2002: 8) menjelaskan langkah-langkah dimaksud sebagai berikut: 1) studi dasar terhadap keadaan biofisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, teknik budidaya yang telah dilakukan petani, sarana prasarana yang tersedia dan peluang pasar; 2) rakitan teknologi budidaya dan pasca panen; 3) penyiapan tenaga pembimbing/penyuluh; 4) transfer teknologi; dan 5) penyediaan sarana dan prasarana. Adapun indikator keberhasilan pertanian berkelanjutan sebagaimana dijelaskan oleh Hrubovack *et al.* dalam Agustina (2011: 12) terdiri dari beberapa hal, yaitu:

1. Indikator yang berhubungan dengan penyediaan pangan untuk saat ini dan mendatang pada harga yang terjangkau oleh konsumen, antara lain: produktivitas pertanian, erosi tanah, dan kuantitas air bawah tanah (*ground water*),
2. Indikator yang berhubungan dengan dampak lingkungan yang berkaitan dengan produksi pertanian, antara lain: kualitas air permukaan, kualitas

ground water dan laju konversi lahan basah (*waterland conversion rates*).

Selanjutnya untuk melaksanakan pertanian berkelanjutan dapat ditempuh menggunakan empat macam model sistem pertanian, yaitu sistem pertanian organik, sistem pertanian terpadu, sistem pertanian masukan luar rendah, dan sistem pengendalian hama terpadu (Salikin, 2003: 51). Model-model pertanian tersebut memiliki keterkaitan dengan pembangunan berkelanjutan karena menerapkan teknologi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berkelanjutan. Teknologi yang digunakan dalam pertanian berkelanjutan disebut dengan *Green Technology* atau Teknologi Hijau, yaitu bentuk aplikasi ilmu atau teknologi yang ditujukan untuk memperbaiki hubungan antara teknologi yang melibatkan manusia dan dampaknya terhadap lingkungan (Hrubovcak *et al* dalam Agustina, 2011: 10). Pertanian organik sebagai salah satu bentuk kegiatan pertanian yang berlandaskan pada prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan juga menerapkan teknologi hijau dalam rangka mewujudkan tujuan utama pertanian berkelanjutan yaitu kesehatan lingkungan dan manusia, menguntungkan secara ekonomi serta kesetimbangan sosial dan ekonomi.

2.7.2.1 Konsep Pertanian Organik

A. Pengertian, prinsip, dan manfaat pertanian organik

Pertanian organik dijabarkan sebagai sebuah metode produksi yang mengatur lahan pertanian dan lingkungannya sebagai satu sistem dengan fokus meningkatkan kesehatan ekosistem pertanian dimana lahan tersebut berada (Liu, 2007). Pertanian organik mempunyai ciri utama bekerja selaras dengan alam untuk mencukupi kebutuhan pangan sehat bagi umat manusia. Pertanian organik dapat pula diasumsikan sebagai suatu sistem produksi pertanian berasaskan daur ulang hara secara hayati yang dapat dilakukan melalui sarana

limbah tanaman dan ternak, serta limbah lainnya yang mampu memperbaiki status kesuburan dan struktur tanah. Hal ini disebut sebagai hukum pengembalian (*low of return*) yang berarti suatu sistem untuk mengembalikan semua jenis bahan organik ke dalam tanah, dalam bentuk limbah tanaman maupun ternak dengan tujuan selanjutnya memberi makanan pada tanaman (Sutanto, 2006: 193). Hal ini sangat berbeda dengan pertanian modern yang penuh dengan campur tangan dan rancangan manusia menggunakan teknologi untuk mengeksploitasi alam demi kepentingan jangka pendek dan mengesampingkan dampak negatif yang timbul, misalnya dengan pemberian pupuk atau pestisida kimia sintetis dalam bentuk yang dapat segera diserap tanaman. Singkatnya, pertanian organik dirancang sebagai sebuah sistem usaha tani yang mengikuti prinsip-prinsip alam dalam membangun keseimbangan agroekosistem agar bermanfaat bagi seluruh komponen alam (tanah, air, udara) dan makhluk hidup yang ada (termasuk organisme pengganggu tanaman) serta menyediakan bahan yang sehat khususnya pangan bagi kebutuhan manusia (Daryanto, 2006: 129-130).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa makna dari pertanian organik adalah usaha budidaya pertanian yang holistik dan terpadu dengan mengoptimalkan kesehatan dan produktifitas agroekosistem secara alami, memperhatikan kelestarian lingkungan melalui pengoptimalan pemanfaatan sumberdaya alam dan penggunaan masukan secara arif demi keberlanjutan lingkungan hidup secara keseluruhan dan menghasilkan bahan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penerapan pertanian organik berpegang pada empat prinsip dasar yang disusun sebagai normatif atau etika dalam pertanian organik. IFOAM (2009),

menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan pertanian organik berisi tentang sumbangan yang dapat diberikan pertanian organik bagi dunia, dan merupakan sebuah visi untuk meningkatkan keseluruhan aspek pertanian secara global. Keempat prinsip pertanian organik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prinsip kesehatan; pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Secara khusus, pertanian organik dimaksudkan untuk menghasilkan makanan bermutu tinggi dan bergizi yang mendukung pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan. Mengingat hal tersebut, maka harus dihindari penggunaan pupuk, pestisida kimia, obat-obatan bagi hewan dan bahan aditif makanan yang dapat berefek merugikan kesehatan.
- b. Prinsip ekologi; pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologi. Bahan-bahan asupan seperti pupuk kimia dan zat pengatur tumbuh sebaiknya dikurangi, kesuburan dan produktivitas tanah ditingkatkan dan dipelihara dengan menambahkan residu tanaman, pupuk kandang, dan batuan mineral alami, serta penanaman legum dan rotasi tanaman.
- c. Prinsip keadilan; pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Keadilan dicirikan dengan kesetaraan, saling menghormati, berkeadilan dan pengelolaan dunia secara bersama, baik antar manusia maupun hubungannya dengan makhluk hidup yang lain. Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus

membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan seperti petani, pekerja, pemroses, penyalur, pedagang dan konsumen.

- d. Prinsip perlindungan; pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang, generasi mendatang dan lingkungan hidup. Para pelaku pertanian organik didorong untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas, tetapi tidak boleh membahayakan kesehatan dan kesejahteraannya. Prinsip ini menyatakan bahwa pencegahan dan tanggung jawab merupakan hal mendasar dalam pengelolaan, pengembangan dan pemilihan teknologi pertanian organik. Ilmu pengetahuan diperlukan untuk menjamin bahwa pertanian organik bersifat menyehatkan, aman dan ramah lingkungan. Pertanian organik harus mampu mencegah terjadinya resiko merugikan dengan menerapkan teknologi tepat guna dan menolak teknologi yang tidak dapat diramalkan akibatnya, seperti bibit hasil rekayasa genetika. Segala keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai dan kebutuhan dari semua aspek yang mungkin dapat terkena dampaknya, melalui proses-proses yang transparan dan partisipatif, termasuk dalam hal ini perlindungan konsumen melalui sertifikasi pangan organik.

Dalam menerapkan rakitan teknik budidaya pertanian organik hendaknya meliputi persyaratan yang meliputi : 1) mendukung kemandirian petani dalam menyediakan saprodi; 2) memperhatikan prinsip keseimbangan dan keterpaduan serta optimalisasi; 3) mudah aplikasinya dan murah; 4) aman bagi kesehatan manusia dan makhluk lain serta lingkungan; 5) keuntungan optimal (Agustina. *et al*, 2003). Pertanian organik tidak hanya mengajak untuk mempedulikan

perbaikan diri manusia secara fisik terkait dengan kesehatan jasmani, tetapi lebih lanjut juga menyetujui perbaikan moral manusia untuk lebih arif dan menghargai arti keberadaan alam semesta. Keunggulan produk organik tidak hanya pada produk yang dihasilkan bebas residu dan aman dikonsumsi, tetapi juga pada proses produksinya yang menerapkan kaidah prinsip pertanian organik.

Perbedaan antara pertanian konvensional dan pertanian organik secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perbedaan antara pertanian konvensional dan pertanian organik

| Aspek | Konvensional | Organik |
|--|---|--|
| Daya potensi dari luar (bahan baku fosil) | Mengurangi ketergantungan karena alasan ekonomi | Kurang ketergantungan terhadap aspek filosofi, lingkungan dan alasan ekonomi |
| Kesehatan Produsen dan Konsumen | Dianggap sebagai bagian dari pemasaran | Bagian integral dari sistem, salah satu alasan untuk melaksanakan kegiatan |
| Kesehatan lingkungan | Didalam mengelola kesehatan lingkungan merupakan bagian system yang perlu diefisienkan, untuk dilindungi sebagai sumber daya yang penting | Didalam mengelola kesehatan lingkungan merupakan bagian integral suatu sistem, untuk dilindungi dan ditingkatkan kualitasnya |
| Identitas produk | Branding/identitas merek dagang untuk pemasaran dan perdagangan | <i>Intrinsic values</i> sebagai bagian dari identitas produk, misalnya: lingkungan, kesehatan konsumen dan komunitas, nilai nutrisi (kandungan nutrisi tertentu, antioksidan, tidak ada bahan pencemar, dll) |
| Kualitas produk | Optimal | Maksimal |
| Tujuan akhir | Memaksimalkan keuntungan | Mengoptimalkan semua manfaat sistem dan alasan-alasan operasional |

Sumber: Agustina (2011: 43)

Melalui penerapan pertanian organik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat umum sebagaimana penjelasan oleh Departemen Pertanian (2007: 8-15) dalam *roadmap* pengembangan pertanian organik tahun 2008-2015 sebagai berikut:

1. Bagi kesehatan: menghasilkan makanan yang cukup, aman dan bergizi sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat; menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani, karena petani akan terhindar dari paparan (*exposure*) polusi yang diakibatkan oleh digunakannya bahan kimia sintetis dalam produksi pertanian; meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, karena pemanfaatan limbah pertanian (sisa tanaman dan kotoran ternak sebagai pupuk organik) dan meminimalkan masukan kimia sintetis
2. Bagi lingkungan: menjaga dan meningkatkan kualitas tanah karena praktek budidaya yang membantu menjaga sifat fisik, biologi dan kimia tanah (penggunaan bahan organik, rotasi tanaman, dll); menjaga kualitas air dari residu pupuk dan pestisida kimia; menjaga kualitas udara; menciptakan keanekaragaman hayati
3. Bagi perekonomian masyarakat, dapat memberi manfaat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui: meningkatkan pendapatan petani sebagai akibat dari biaya produksi yang lebih relatif lebih rendah dari budidaya pertanian konvensional, dan harga produk organik seringkali lebih mahal; meningkatkan daya saing produk pertanian melalui tingkat residu kimia yang rendah pada produk, sehingga memberi nilai lebih bagi produk; menciptakan lapangan kerja baru dan keharmonisan kehidupan sosial di pedesaan (industri kompos, membangun kerjasama petani-peternak).

B. Permasalahan dan keterpaduan dalam pengembangan pertanian organik

Pengembangan pertanian organik di Indonesia menghadapi beberapa tantangan terkait dengan pemahaman konsep dasar serta teknis pelaksanaan di lapang. Sutanto (2006: 195) menjelaskan bahwa sampai saat ini masih

berkembang pemahaman yang salah mengenai pertanian organik, yaitu terkait dengan biaya yang mahal, memerlukan banyak tenaga kerja, kembali pada sistem pertanian tradisional, serta produksinya rendah. Beberapa kendala teknis yang dihadapi berupa ketersediaan bahan organik yang terbatas dan takarannya harus banyak, transportasi mahal karena bahan bersifat ruah, persaingan dengan kepentingan lain dalam memperoleh sisa tanaman dan limbah organik, serta tidak adanya bonus produk pertanian organik. Berikutnya Agustina *et.al.* (2002: viii) menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam memasyarakatkan pertanian organik cukup besar karena memutar pola panjang, pola pikir di dalam pembangunan pertanian, yaitu merubah pola pertanian sarat bahan kimia sintetis menjadi pertanian alami. Hal ini memerlukan ketepatan berbagai aspek dalam teknik budidaya, aplikasi sertifikasi, teknik sosialisasi dan cara pemasarannya.

Sistem pertanian organik merupakan sistem produksi yang bersifat kompleks dan membutuhkan keterpaduan baik pada tingkat internasional, nasional, regional maupun tingkat rumah tangga petani. Keterpaduan juga diperlukan dari tingkat paket teknologi (saprodi, produksi dan pengolahan hasil), alih teknologi, sistem pemasaran, kebijakan, sikap konsumen dan pengusaha. Agustina (2002: 72-77) menjelaskan keterpaduan antar komponen atau sub sistem dalam sistem pertanian organik sebagai berikut:

a. Tingkat internasional

Ditinjau dari sisi permintaan terhadap produk organik secara kuantitatif di tingkat global/dunia yang diperkirakan mencapai 20 % per tahun membawa dampak pangsa pasar dunia untuk produk pertanian organik. Jika pasarnya jelas dan nilai ekonominya baik maka akan memacu minat petani untuk membudidayakan tanamannya tertentu secara organik di Indonesia seperti produk

hortikultura (buah dan sayur) serta tanaman perkebunan (kopi). Tata aturan tentang sertifikasi pupuk dan produk organik pada tingkat internasional (misalnya CODEX) akan menentukan kualitas mutu produk organik yang dipasarkan terutama untuk ekspor.

b. Tingkat sistem nasional

Arahan di tingkat pusat perlu ditindaklanjuti di tingkat daerah. Pencanangan terwujudnya Indonesia sebagai salah satu produsen pangan organik di dunia perlu dukungan konkrit dari berbagai lembaga di daerah. Di tingkat pusat/nasional sangat dibutuhkan kelembagaan yang melayani informasi pasar, sistem peringatan dini yang disusun berdasarkan hasil dari merespon situasi global, terutama untuk komoditi yang berpeluang ekspor. Keterpaduan di tingkat pusat diperlukan misalnya antara kementerian pertanian dengan kementerian perdagangan, perikanan, peternakan, kehutanan dan bidang lain yang relevan. Peran lain yang juga penting ditangani dalam skala nasional adalah produksi, pemasaran, dan sertifikasi.

c. Tingkat sistem daerah

Arahan dan dukungan di tingkat daerah baik yang dicanangkan oleh Gubernur, Bupati, Walikota maupun pejabat lainnya di daerah akan berpengaruh terhadap perluasan lahan pertanian organik maupun kebijakan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan untuk ditanami tanaman bahan organik. Kebijakan ini dibutuhkan mengingat tanaman untuk pupuk hijau tersebut mudah tumbuh. Teknis penanganannya dapat bekerjasama dengan masyarakat umum atau siswa dan mahasiswa peduli pertanian organik. Dukungan dari pemerintah daerah juga diperlukan dalam bentuk dana, peralatan di lapang, serta jaringan

informasi yang menyangkut aspek pemasaran, teknik produksi, maupun sertifikasi untuk diteruskan kepada pengguna.

d. Tingkat sistem sub-daerah (kecamatan, desa)

Kerjasama di tingkat kecamatan/desa sangat dibutuhkan dan dapat direalisasikan dalam bentuk kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk koperasi, kerjasama petani dengan pihak-pihak yang relevan, kelompok tani atau antar kelompok tani. Pada tingkat ini juga dapat difasilitasi terbentuknya pasar di kebun kelompok tani dalam bentuk wisata kebun. Perlu juga dimotivasi pembentukan lembaga-lembaga peduli pertanian organik yang dibentuk antara pakar, petani, penyuluh, pengusaha dan pejabat di tingkat daerah untuk wadah koordinasi dan tukar pengalaman dalam penerapan pertanian organik. Intinya semua *stakeholder* yang terkait harus memiliki komitmen yang sama dalam mensosialisasikan pertanian organik yaitu berorientasi untuk memberikan kelancaran bagi siapa saja yang mengaplikasikan pertanian organik secara murni.

e. Tingkat *farming system* dan *farm household system*

Farm household system (FHS) atau sistem usaha yang dilakukan petani dengan komponen meliputi rumah tangga, *far*/lahan usaha yang dimiliki, dan *off farm*/lahan usaha bukan miliknya. Sedangkan *farming system* adalah sekumpulan FHS yang masuk di dalam satu ranah rekomendasi yang sama. Contoh keterpaduan di tingkat ini dapat secara sederhana berupa sistem lahan-tanaman, atau kompleks seperti sistem lahan-tanaman-ternak-ikan. Keterpaduan di tingkat ini bertujuan untuk: 1) terdapat keberlanjutan dalam suplai unsur hara melalui pupuk organik *in situ*; 2) usaha tani terpadu yang memadukan antara tanaman, ternak, ikan; 3) sistem tanam ganda, baik untuk memproduksi dalam

bentuk panen segar dan berbagai olahan maupun suplai pupuk organik dan pestisida organik.

2.8 Stakeholder pengembangan pertanian organik

Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah siapa saja yang memberi dampak atau terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Setiap kelompok memiliki sumber daya dan kebutuhan masing-masing yang sedapat mungkin terwakili dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan (Gonsavales dalam Iqbal, 2007: 90). Secara garis besar Crosby dalam Iqbal (2007:90) membedakan *stakeholder* dalam tiga kelompok, yaitu: 1) *stakeholder* utama, yakni yang menerima dampak positif atau negatif (diluar kerelaan) dari suatu kegiatan; 2) *stakeholder* penunjang, yaitu yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan; 3) *stakeholder* kunci, yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan.

Identifikasi *stakeholder* yang dilanjutkan dengan analisisnya bermanfaat untuk mengetahui komunitas atau kelompok masyarakat yang terkena pengaruh (dampak) paling banyak dari suatu kegiatan, juga bermanfaat dalam menentukan prioritas mengenai komunitas yang dibutuhkan dalam perencanaan dan implementasi kegiatan serta manfaat pembangunan bagi mereka. Bryson (2007: 119) menjelaskan bahwa tujuan utama dari analisis *stakeholder* adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat tentang para pemain di dalam gelanggang itu.

Upaya pengembangan dan pemasyarakatan pertanian organik tidak dapat dibebankan pada satu lembaga saja, namun memerlukan kerjasama para *stakeholder* yang relevan. Masing-masing *stakeholder* memiliki fungsi dan peran

dalam pengembangan pertanian organik secara terpadu seperti dijelaskan oleh Sutanto (2006: 197-198) pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Fungsi dan pelaksana pengembangan pertanian organik secara nasional

| No | Fungsi | Aktor/Pelaksana |
|----|---------------------|--|
| 1 | Produksi | Petani, kelompok tani |
| 2 | Pengolahan Hasil | Industri Rumah Tangga, Koperasi, Agroindustri/perusahaan swasta |
| 3 | Pemasaran | Pemasaran dari pintu ke pintu, pasar tradisional, swalayan, konsumen organik, LSM |
| 4 | Informasi | Pendampingan petani-peneliti, LSM organik, Universitas dan Lembaga Penelitian, Media massa |
| 5 | Promosi | LSM organik, konsumen produk organik, media massa, toko produk organik |
| 6 | Penelitian | Produsen dan Pengolahan produk organik, LSM organik, universitas dan lembaga penelitian |
| 7 | Pendidikan | LSM organik dan peduli lingkungan, Sekolah dasar dan menengah, akademi dan universitas |
| 8 | Pendampingan petani | Antar petani organik, LSM organik, pola kemitraan, PPL |
| 9 | Pengawasan | Lembaga pemerintah, LSM organik dan peduli lingkungan, sektor swasta |
| 10 | Koordinasi | Pemerintah pusat/antar departemen, pemerintah daerah, LSM organik |
| 11 | Penyusunan normatif | LSM organik (internal), pemerintah (peraturan), Lembaga dunia (FAO,WHO, UNESCO) |
| 12 | Pendanaan | Hasil penjualan lembaga swadaya, Individu/BUMN/swasta, pemerintah, sektor perbankan |
| 13 | Kebijakan | Pemerintah, DPR, LSM organik dan peduli lingkungan, Konsumen |

Sumber: Sutanto (2006: 197-198)

Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas para pakar saja tetapi melibatkan *stakeholder* yang relevan meliputi petani, pengusaha, masyarakat konsumen, peneliti, penyuluh, dan pemerintah. Petani memiliki posisi penting karena merupakan ujung tombak pelaksanaan di lapang, karena itu perlu dilakukan kerjasama dengan peneliti dan penyuluh untuk memperlancar transfer teknologi yang diperlukan. Adapun peran peneliti adalah mengembangkan

rakitan teknologi budidaya pertanian organik dengan mempertimbangkan keterpaduan dan spesifik lokasi sehingga mudah diterapkan oleh petani. Dalam hal ini kerjasama yang baik antara masyarakat, kelompok tani, peneliti, penyuluh, serta penentu kebijakan yaitu pemerintah. Disisi lain pengusaha dan konsumen yang menghargai produk organik diperlukan dalam menyampaikan informasi pasar. Sedangkan pemerintah diperlukan perannya sebagai fasilitator, dinamisator, serta regulator. Peran konkrit pemerintah daerah diantaranya dapat diwujudkan melalui fasilitasi terbentuknya kawasan pertanian organik, membantu penyediaan saprodi organik, bersama petani dan pengusaha membentuk pusat-pusat pertanian organik di tingkat kecamatan, serta menetapkan aturan bila terjadi konflik di masa transisi antara petani organik dan petani konvensional (Agustina *et.al.*, 2002: viii). Dengan demikian secara umum pengembangan pertanian organik melibatkan *stakeholder* yang dapat dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah pada berbagai wilayah administrasi dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa.

Pelibatan ketiga komponen *stakeholder* tersebut mendukung penerapan konsep *governance* yang dijelaskan oleh Widodo (2007:107-120) sebagai pengelolaan pemerintahan yang tidak hanya melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga peran swasta dan masyarakat.. Menurut UNDP yang dikutip Indradi (2007:76), ada tiga unsur utama dalam penyelenggaraan *governance* yaitu: (1). *State*, mempunyai tugas untuk mewujudkan pembangunan manusia berkelanjutan melalui peran pemerintah dalam mengintegrasikan masalah social, ekonomi dan melindungi lingkungan, melindungi kerentanan masyarakat, menciptakan komitmen politik mengenai restrukturisasi ekonomi, sosial, dan politik, menyediakan infra struktur, desentralisasi dan demokratisasi pemerintah,

memperkuat financial dan kapasitas pemerintah lokal, kota dan metropolitan. (2). *Private Sector*, sector swasta telah memainkan peran penting dalam pembangunan melalui pendekatan pasar. (3). *Civil Society*, terdiri dari individual maupun kelompok yang berinteraksi secara social, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun non formal.

Negara sebagai salah satu dari pilar *governance* adalah semua unsur pemerintahan termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Unsur swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sektor informalnya. Sedangkan masyarakat meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain. Namun demikian dari ketiga pilar tadi, pemerintah menjadi bagian utama dalam mewujudkan *Good Governance* (kepemerintahan yang baik) sebagai katalisator, fasilitator dan fungsi administratif dalam pembangunan. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat besar dalam rangka mengatur dan memfasilitasi mekanisme pasar yang ada.

2.9. Pengembangan pertanian organik di Kota Batu

Visi Kota Batu memberi makna bagi eksistensi sektor pertanian dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya serta mendorong kreatifitas dan inovasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya, yang tidak lain merupakan penjabaran dari prinsip dari pembangunan berkelanjutan. Di bidang pertanian, pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui pengembangan pertanian ramah lingkungan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2007-2012. Pengembangan pertanian ramah lingkungan dilakukan melalui penerapan sistem pertanian organik secara

bertahap di Kota Batu. Sistem pertanian organik merupakan model pertanian yang dianggap tepat untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan karena selain memberikan keuntungan kepada petani, masyarakat Kota Batu juga memperoleh manfaat dari penerapan pertanian organik, antara lain membuka lapangan kerja produsen atau perdagangan pupuk dan pestisida organik, serta lingkungan hidup menjadi lebih aman.

Pemilihan penerapan pertanian organik di Kota Batu tidak lepas dari adanya masalah pertanian di Kota Batu yang muncul sebagai akibat dari cara bertani secara konvensional dengan ciri penggunaan pupuk maupun pestisida kimia secara intensif. Dampak yang paling nyata adalah penurunan kualitas tanah yang menyebabkan turunnya produksi dan produktivitas tanaman apel secara drastis. Buah yang menjadi ikon Kota Batu tersebut semakin terpuruk, produk yang dihasilkan tidak optimal dengan kualitas ukuran buah semakin kecil. Dampak lain yang tak kalah memprihatinkan adalah ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida buatan pabrik. Minimnya pengetahuan penggunaan pupuk dan pestisida ditambah sikap petani yang tidak sabar menyebabkan kesalahan dalam pengaplikasian bahan kimia tersebut yang tidak memperhatikan aturan pakai. Akibatnya biaya usaha tani menjadi sangat mahal yang seringkali tidak sepadan dengan hasil panen yang didapatkan. Selain itu produk yang dihasilkan mengandung residu pestisida cukup tinggi dan kelestarian lingkungan terancam.

Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Kota Batu berupaya mengatasi masalah-masalah tersebut diatas dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penanggung jawab pembangunan di bidang pertanian dan menjamin kepuasan masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah

pertanian. Salah satu terobosan strategis yang digunakan untuk menumbuhkan kembali produk-produk unggulan Kota Batu adalah penerapan dan pengembangan pertanian menuju pertanian organik (*Go Organic*). Pertanian organik merupakan sistem produksi pertanian yang terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan kesehatan dan produktifitas agroekosistem secara alami sehingga menghasilkan bahan pangan yang cukup, berkualitas dan berkelanjutan.

Praktek budidaya pertanian secara organik pada tahap awal (transisi) membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini berkaitan dengan penurunan hasil yang biasanya terjadi sebagai dampak pengurangan pupuk kimia. Selain itu kondisi tanah yang telah mengalami penurunan kualitas memerlukan perbaikan melalui pemberian pupuk organik dalam jumlah yang cukup besar, dan tentunya memerlukan biaya yang besar pula. Berkaitan dengan hal tersebut maka peran pemerintah dalam memfasilitasi sarana prasarana pendukung sangat diperlukan. Sarana produksi yang diberikan dapat berupa pupuk organik, alat pengolah pupuk organik, bantuan bibit dan pestisida nabati. Selain itu pembangunan infrastruktur seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani juga dianggap penting untuk mendukung pembangunan pertanian termasuk didalamnya pengembangan pertanian organik di Kota Batu.

Untuk mewujudkan pertanian organik memerlukan cukup banyak waktu yaitu minimal sekitar 5 tahun. Perlu adanya komitmen bersama dan kerjasama baik dari pemerintah, pengusaha, dan masyarakat umumnya terutama petani. Pengembangan pertanian organik diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Batu secara umum, terutama taraf hidup petani.

BAB III

ANALISIS SETING SOSIAL PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Batu

3.1.1 Kondisi administrasi, geografi dan demografi Kota Batu

Kota Batu ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Sebelum menjadi daerah otonom, Kota Batu merupakan kota administratif bagian dari wilayah Kabupaten Malang. Dengan menjadi daerah otonom maka diharapkan Kota Batu dapat melakukan kegiatan pembangunan serta menggali potensi yang ada secara lebih intensif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Batu merupakan salah satu ikon pariwisata di Jawa Timur yang terletak sekitar 100 km ke arah Selatan Kota Surabaya, atau di sebelah Barat Laut Kota Malang. Secara geografis Kota Batu berada pada posisi $122^{\circ}17',10,90''$ - $122^{\circ}57',00,00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44',55,11''$ - $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Batu adalah $199,0872 \text{ km}^2$ atau sekitar 0,42 persen dari luas total Propinsi Jawa Timur. Secara administrasi Kota Batu terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu seluas $45,458 \text{ km}^2$; Kecamatan Junrejo seluas $25,650 \text{ km}^2$; dan Kecamatan Bumiaji dengan luas wilayah $127,979 \text{ km}^2$. Adapun batas wilayah Kota Batu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Kota Batu secara topografi merupakan daerah dataran tinggi yang terbagi dalam tiga bentuk dataran, yaitu wilayah datar sampai berombak, berombak sampai berbukit, dan bentuk berbukit sampai bergunung. Variasi ketinggian antara 600 sampai dengan 1.700 m dpl. Sebagai daerah yang berada di dataran tinggi maka Kota Batu memiliki hawa yang sejuk dengan suhu minimum antara 18-24 °C dan suhu maksimum 28-32 °C dengan kelembaban udara sekitar 75-98 %.

Kota Batu merupakan wilayah yang subur dan sesuai untuk kegiatan pertanian. Hal ini didukung oleh jenis tanah yang merupakan endapan dari sederetan gunung api yang mengelilinginya dan aktif pada masa lampau. Jenis tanah didominasi oleh tanah Andisol yang merupakan jenis tanah paling subur seluas 6.231,12 ha, dan tanah Kambisol yang merupakan jenis tanah cukup subur seluas 3.026,37 ha. Kemiringan lahan bervariasi terbagi menjadi empat kategori yaitu kemiringan 0-8° merupakan kawasan yang layak untuk kegiatan budidaya pertanian hortikultura dan tanaman pangan selain kegiatan pemukiman; kemiringan 8-15° merupakan kawasan yang layak untuk dikembangkan pertanian perkebunan; kemiringan 15-40° sebagian besar merupakan kawasan yang dikembangkan untuk hutan produksi; dan kemiringan di atas 40° merupakan kawasan hutan lindung mutlak.

Hidrologi Kota Batu dibedakan menjadi tiga jenis yaitu air permukaan, air tanah, dan sumber mata air. Sampai tahun 2011 telah diinventarisasi sebanyak 138 sumber mata air yang digunakan untuk berbagai keperluan masyarakat, termasuk keperluan PDAM Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat maka perkembangan jumlah penduduk di Kota Batu juga tumbuh relatif cepat yang didukung oleh

banyaknya pendatang dari luar Kota Batu. Dalam kurun waktu satu tahun jumlah penduduk Kota Batu meningkat sebanyak 4.439 jiwa dari total 207.490 jiwa pada tahun 2009 menjadi 211.929 jiwa pada tahun 2010, yang terdiri dari 106.844 laki-laki dan 105.085 perempuan.

Data Badan Pusat Statistik Kota Batu sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa dari total jumlah penduduk di Kota Batu usia sepuluh tahun ke atas yang bekerja sebanyak 93.096 jiwa, maka sekitar 36,53 % penduduk atau 34.011 orang bekerja di sektor pertanian. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Batu masih menjadikan sektor pertanian termasuk didalamnya perikanan dan peternakan sebagai sektor yang menjanjikan untuk dijadikan mata pencaharian utama dikarenakan sumber daya alamnya yang masih sangat potensial untuk dikembangkan.

Tabel 3.1 Penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha

| No | Pekerjaan Utama | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Pertanian | 23.792 | 10.219 | 34.011 |
| 2 | Penggalian | 277 | 49 | 326 |
| 3 | Industri | 4.269 | 3.257 | 7.526 |
| 4 | Listrik dan Air Bersih | 112 | 36 | 148 |
| 5 | Konstruksi | 7.217 | 197 | 7.414 |
| 6 | Perdagangan | 11.655 | 11.218 | 22.873 |
| 7 | Transportasi & Konmunikasi | 3.511 | 333 | 3.844 |
| 8 | Keuangan | 919 | 521 | 1.440 |
| 9 | Jasa dan Lain-lain | 8.353 | 7.161 | 15.514 |
| Kota Batu | | 60.105 | 32.991 | 93.096 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu, Batu dalam Angka 2011

3.1.2 Potensi pengembangan wilayah

Struktur perekonomian Kota Batu pada rentang waktu tahun 2007-2010 menunjukkan bahwa sektor pertanian, sektor jasa, sektor perdagangan hotel dan restoran merupakan sektor basis/pemimpin (*leading sector*). Hal ini memberi arti

bahwa sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batu. Kondisi demikian dapat dilihat melalui nilai rata-rata *Location Quotient* (LQ) pada sektor tersebut lebih dari 1 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2. Dengan demikian pada dasarnya Kota Batu memiliki potensi dan peluang yang dapat menyerap tenaga kerja dan mendatangkan tambahan pendapatan asli daerah (PAD) meliputi potensi pengembangan wisata dan pertanian.

Tabel 3.2 *Location Quotient* (LQ) PDRB atas harga konstan Kota Batu terhadap Propinsi Jawa Timur tahun 2007-2010

| SEKTOR | LQ Th. 2007 | LQ Th. 2008 | LQ Th. 2009 | LQ Th. 2010 | RATA-RATA LQ |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Pertanian | 1,298162195 | 1,324438358 | 1,330188731 | 1,376165415 | 1,332238675 |
| Pertambangan dan Penggalian | 0,109057917 | 0,10573181 | 0,102776427 | 0,100020617 | 0,104396692 |
| Industri Pengolahan | 0,278159493 | 0,281059304 | 0,284013229 | 0,287727138 | 0,282739791 |
| Listrik dan Air Bersih | 1,032912703 | 1,080150509 | 1,126947836 | 1,149967792 | 1,09749471 |
| Bangunan | 0,423330943 | 0,455958801 | 0,476792369 | 0,49881787 | 0,463724996 |
| Perdagangan Hotel dan Restoran | 1,594401192 | 1,555079513 | 1,542984589 | 1,483700601 | 1,544041474 |
| Pengangkutan dan Komunikasi | 0,556192764 | 0,545163099 | 0,508832003 | 0,494268437 | 0,526114076 |
| Keuangan, Persewaan | 0,852897731 | 0,836354647 | 0,834308498 | 0,826291701 | 0,837463144 |
| Jasa-jasa | 1,511201105 | 1,538393125 | 1,551761107 | 1,616529389 | 1,554471181 |

Sumber: BPS Kota Batu (data diolah)

Lebih lanjut komponen analisis *shift share* pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran menunjukkan komponen pertumbuhan nasional (Nij) berkontribusi positif pada PDRB sebesar 45.89. Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai efek positif yang berarti pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh relatif lebih cepat dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat propinsi. Adapun pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai efek negatif, dimana pertumbuhan PDRB di Kota Batu sebesar -29.28 yang

berarti daya saing sektor tersebut lebih rendah dibandingkan dengan daya saing sektor yang sama di wilayah propinsi Jawa Timur sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3. Hal ini memberikan tantangan bagi pemerintah daerah Kota Batu untuk menyusun perencanaan dan strategi pembangunan yang mampu meningkatkan daya saing dan memenangkan kompetisi sektor perdagangan hotel dan restoran dengan daerah lain di Propinsi Jawa Timur.

Tabel 3.3 *Shift Share* PDRB atas harga konstan Kota Batu terhadap Propinsi Jawa Timur tahun 2007-2010

| SEKTOR | <i>National share</i> (Nij) | <i>Industrial mix</i> (Mij) | <i>Competitive Potision</i> | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | (Cij) | Peringkat |
| Pertanian | 45.892,1117 | -22.415,1910 | 24.337,3293 | 1 |
| Pertambangan dan Penggalian | 500,2309 | 239,0509 | -193,4718 | 6 |
| Industri Pengolahan | 16.297,5497 | -5.905,6326 | 6.248,5330 | 3 |
| Listrik dan Air Bersih | 3.212.8062 | -1.044,3224 | 2.811,8261 | 5 |
| Bangunan | 3,074,8611 | -738,9023 | 3.985,612 | 4 |
| Perdagangan Hotel dan Restoran | 101.198,3259 | 41,186.8471 | -29.278,9630 | 9 |
| Pengangkutan dan Komunikasi | 7.765,2312 | 7.001,3536 | -4.839,3149 | 8 |
| Keuangan, Persewaan | 9.838,6777 | 1.774,7350 | -222,9628 | 7 |
| Jasa-jasa | 29.831,6167 | -2.173.8665 | 18.,93,3198 | 2 |

Sumber: BPS Kota Batu (data diolah)

Dari segi kompetisi maka sektor pertanian memiliki peluang yang paling tinggi untuk dikembangkan. Permintaan produk pertanian di wilayah Jawa Timur sangat memungkinkan untuk dipenuhi oleh Kota Batu. Namun demikian tingkat pertumbuhan yang lebih rendah pada sektor pertanian jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan sektor pertanian propinsi (ditunjukkan oleh nilai Mij = -22.415,19), mengindikasikan perlunya upaya-upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian maupun pendukung sektor pertanian lainnya (peternakan, perikanan, dll) agar dapat memenuhi peluang kebutuhan komoditas pertanian paling tidak untuk wilayah propinsi Jawa Timur.

Jika dianalisis lebih jauh pada komponen pendukung sektor pertanian, maka komoditas penghasil bahan makanan, peternakan, tanaman perkebunan dan perikanan memiliki peluang positif untuk mendukung sektor pertanian (ditunjukkan oleh nilai Cij berturut-turut 24.078,3; 2.229,20; 88,56; dan 22,29). Namun demikian komponen pendukung sektor pertanian perlu untuk diupayakan peningkatan produksi pada masing-masing komponen (ditunjukkan oleh nilai Mij negatif). Untuk wilayah Kota Batu, komoditas pertanian bahan makanan unggulan yang berpotensi dikembangkan adalah produk hortikultura meliputi sayur, buah dan tanaman hias. Perhitungan *shift share* sub sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 *Shift share* PDRB atas harga konstan sub sektor pertanian Kota Batu terhadap Propinsi Jawa Timur Tahun 2007-2010

| SEKTOR | National share Nij | Industrial mix Mij | Competitive Position | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| | | | Cij | Peringkat |
| Pertanian | 45.892,1117 | -22.415,1910 | 24.337,3293 | |
| - Tanaman Bahan Makanan | 39.489,6373 | -22.023,3674 | 24.078,3001 | 1 |
| - Tanaman Perkebunan | 242,1658 | -163,1126 | 88,1568 | 3 |
| - Peternakan | 5.991,5306 | -2.254,4223 | 2.229,2018 | 2 |
| - Kehutanan | 101,0094 | 80,5921 | -120,3215 | 5 |
| - Perikanan | 67,7686 | -15,1636 | 22,2850 | 4 |

Sumber: BPS Kota Batu (data diolah)

Kesimpulan dari hasil analisis LQ dan *shift-share* adalah bahwa pembangunan di Kota Batu perlu diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor yang mempunyai peluang kompetisi dan sektor yang memberikan kontribusi besar pada PDRB, yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang diwujudkan melalui pengembangan pariwisata. Hal ini tentu diperlukan untuk memperkuat sektor tersebut dalam perekonomian di tingkat propinsi dan nasional, salah satunya melalui kolaborasi sektor pertanian dan

pariwisata. Citra Kota Batu sebagai agropolitan telah terbentuk secara alami. Potensi daerah di bidang pariwisata dan pertanian menjadi komoditi andalan yang kompetitif dan menjadikan sektor agrowisata atau pariwisata pertanian menjadi salah satu pilihan untuk dikembangkan di Kota Batu. Pengembangan Kota Batu sebagai kota wisata berbasis pertanian dicanangkan oleh Pemerintah Kota Batu pada tahun 2007-2012 memperoleh respon positif dari masyarakat. Secara umum masyarakat Kota Batu telah lama berinteraksi dengan lingkungan kehidupan yang mengambil manfaat dari lahan pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan dan jasa pariwisata. Adanya usaha-usaha untuk mengembangkan sektor pariwisata dan pertanian tersebut bukan hal baru bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi.

Agrowisata di Kota Batu memiliki potensi kuat yang didukung dengan keadaan alam dan lingkungan yang kondusif. Akan tetapi masih perlu dilakukan pengembangan sarana dan prasarana lebih lanjut secara optimal dengan tetap memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. Pada umumnya obyek wisata di Kota Batu menampilkan potensi pertanian yang sekaligus dapat dibeli pengunjung sebagai oleh-oleh seperti berbagai produk sayuran dataran tinggi (kentang, kubis, wortel, kembang kol), berbagai jenis tanaman hias, bunga potong, serta buah-buahan (apel, jeruk, strawberry). Selain itu produk olahan pangan berbahan dasar apel dan produk hortikultura lain juga menjadi salah satu pilihan utama yang banyak diminati pengunjung sebagai oleh-oleh. Beberapa obyek wisata berbasis pertanian di Kota Batu antara lain:

- Tanaman hias di sepanjang Jl. Bukit Berbunga Desa Sidomulyo
- Wisata Ikan (kolam dan kuliner) di Pasar Benih Ikan (PBI) Desa Sidomulyo
- Wisata Selecta dengan pedagang buah dan bunga serta pangan olahan

- Wisata hutan rakyat dan pemandian air panas di Cangar, Desa Sumberbrantas
- Wisata bunga potong (krisan) di PT. Inggulaut, Desa Tulungrejo
- Wisata bunga potong (mawar) di Desa Gunungsari
- Wisata petik apel, jambu biji dan strawberry di Kusuma Agrowisata Batu
- Wisata desa ternak sapi perah di Desa Oro-oro Ombo

3.1.3 Profil sektor pertanian Kota Batu

Sektor pertanian merupakan salah satu *leading sector* pembangunan di Kota Batu. Besarnya tenaga kerja yang ditampung oleh sektor pertanian menjadikannya sebagai sektor strategis dalam menyokong pembangunan terkait dengan sumber daya yang dapat dimanfaatkan melalui pembangunan pertanian. Sektor pertanian di Kota Batu mencakup pertanian secara kompleks meliputi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, pengolahan hasil pertanian, serta kehutanan dan perkebunan.

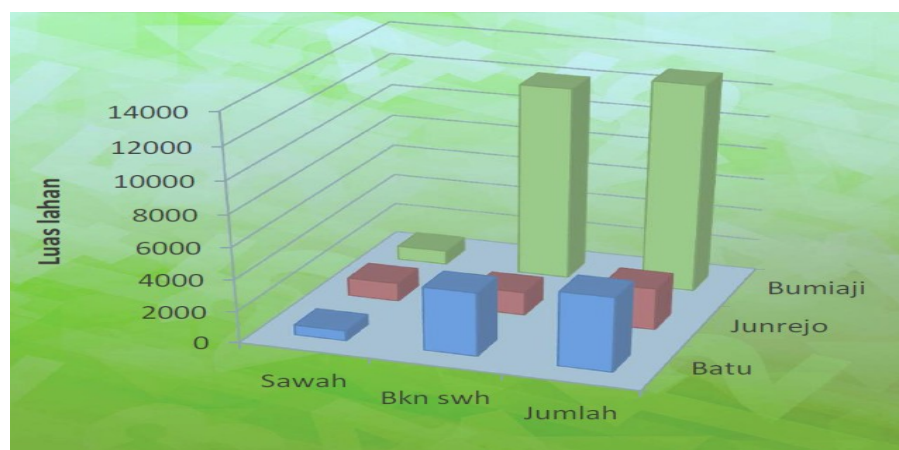
Pemanfaatan lahan pertanian di Kota Batu menurut jenis pengairannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu lahan beririgasi (sawah) dan lahan tidak beririgasi (bukan sawah). Lahan beririgasi atau sawah dibagi menjadi sawah teknis, sawah setengah teknis, sawah sederhana, dan sawah irigasi desa/non PU seperti dapat dilihat pada Tabel 3.5. Dari tabel tersebut diketahui bahwa luas lahan bukan sawah di Kota Batu lebih banyak, yaitu sekitar 3.937,09 ha dibandingkan dengan lahan sawah seluas 2.436 ha. Secara lebih jelas komposisi lahan sawah dan bukan sawah ditampilkan oleh Gambar 3.1. Lahan sawah yang ada di Kota Batu lebih banyak dikembangkan untuk tanaman hortikultura seperti sayuran dataran tinggi, bunga, dan buah sedangkan sebagian kecil untuk tanaman pangan dan palawija. Untuk lahan pertanian bukan sawah paling banyak ditanami tanaman buah seperti apel yang merupakan ikon Kota Batu

meskipun pada tahun-tahun terakhir ini banyak tanaman yang sudah tua dan produktivitasnya makin menurun. Penurunan produksi pada beberapa komoditas pertanian disebabkan pula karena pergantian pola musim, menurunnya tingkat kesuburan tanah pada lahan pertanian, belum optimalnya sistem penyuluhan, serta terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang kurang terkendali.

Tabel 3.5 Pemanfaatan lahan pertanian Kota Batu Tahun 2011

| No | Kecamatan | Sawah Teknis (Ha) | Sawah ½ Teknis (Ha) | Sawah Sederhana (Ha) | Sawah Irigasi Desa/Non PU (Ha) | Total Sawah (Ha) | Lahan Bukan Sawah (Ha) |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Batu | 431 | 145 | 0 | 7 | 583 | 979,15 |
| 2. | Junrejo | 813 | 216 | 0 | 10 | 1.039 | 528,25 |
| 3. | Bumiaji | 649 | 152 | 13 | 0 | 814 | 2.429,69 |
| Kota Batu | | 1.893 | 513 | 13 | 17 | 2.436 | 3.937,09 |

Sumber: Laporan Tahun 2011 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu



Gambar 3.1 Penggunaan Lahan Tiap Kecamatan di Kota Batu
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu, Batu dalam Angka 2011)

Komoditas yang banyak dihasilkan oleh Kota Batu adalah produk hortikultura meliputi sayuran, buah dan tanaman hias. Prioritas pengembangan

komoditas hortikultura adalah pada komoditas unggulan yang mengacu pada pangsa pasar, keunggulan kompetitif, nilai ekonomi, sebaran wilayah produksi dan kesesuaian agroekosistem. Peningkatan produksi hortikultura diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, bahan baku industri dan peningkatan ekspor. Dengan demikian peningkatan produksi, mutu dan daya saing produk merupakan kegiatan utama yang dibarengi dengan upaya pengembangan pasar dan promosi. Kegiatan pengembangan produksi hortikultura di Kota Batu telah memberikan dampak positif pada penumbuhan ekonomi regional dan penyediaan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan petani/pelaku usaha. Berdasarkan potensi tersebut maka rencana tata ruang dan wilayah juga mengatur pola pembangunan pertanian dari segi tata ruang menjadi beberapa kawasan sentra pengembangan pertanian meliputi:

- Kawasan sentra produksi sayuran yang terletak di sebagian besar wilayah Kecamatan Bumiaji seperti Desa Sumberbrantas dan Desa Tulungrejo; Desa Sumberejo, Kecamatan Batu; Desa Junrejo dan Torongrejo Kecamatan Junrejo
- Kawasan sentra produksi bunga/tanaman hias yang memusat di Desa Sidomulyo, Desa Gunungsari, Desa Tulungrejo, dan Desa Punten
- Kawasan sentra produksi buah yang memusat di Desa Tulungrejo, Desa Bulukerto, dan Desa Pandanrejo
- Kawasan sentra produksi tanaman pangan di Desa Pendem
- Kawasan agropolitan yang diarahkan pada bagian Utara wilayah Kota Batu, yaitu meliputi sembilan desa di wilayah Kecamatan Bumiaji

Pada sub sektor peternakan secara umum dapat dibedakan menjadi ternak besar, ternak kecil, unggas dan perikanan. Ternak besar meliputi sapi

potong dan sapi perah, kerbau serta kuda. Ternak kecil terdiri dari kambing, domba dan kelinci. Adapun unggas terdiri dari itik, entog, namun lebih didominasi oleh ayam pedaging dan ayam petelur. Sedangkan untuk kawasan perikanan pada dasarnya tersebar mengikuti potensi sumber daya air. Konsentrasi kawasan perikanan di Kota Batu berada di Desa Sidomulyo dan Desa Punten.

Di bidang kehutanan, Kota batu memiliki sumber daya hutan seluas 11.227 Ha atau meliputi sekitar 56,4 % dari luas wilayah Kota Batu. Kondisi sumberdaya hutan tersebut secara umum mengalami degradasi fungsi yang disebabkan penjarahan, perambahan, dan kebakaran yang merupakan tantangan sendiri bagi pemerintah Kota Batu.

3.2 Visi dan Misi Kota Batu

Arah dan tujuan pembangunan Kota Batu dijabarkan melalui visi dan misi Kota Batu dalam RPJMD periode pembangunan tahun 2007-2012. Visi Kota Batu adalah "Kota Batu sebagai sentra pariwisata berbasis pertanian didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya serta pemerintahan yang kreatif, inovatif dan bersih bagi seluruh rakyat yang dijiwai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa". Visi tersebut selanjutnya berusaha diwujudkan melalui delapan misi yaitu:

1. Menjamin berlangsungnya kehidupan keagamaan yang didasari oleh toleransi antar umat beragama, dimana masing-masing agama mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan pembinaan umat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah secara proporsional, sehingga Kota Batu mengejawantah menjadi kota religius serta terciptanya tata kehidupan sosial yang beretika.
2. Mendayagunakan secara optimal dan terkendali sumber-sumber daya daerah,

baik Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Budaya (SDB) sebagai unsur-unsur internal untuk penopang upaya pengembangan Kota Batu ke depan (2007 - 2012).

3. Mengoptimalkan masuknya investasi ke Kota Batu, baik yang berasal dari pemerintah, swasta nasional ataupun swasta asing untuk beragam bidang usaha yang potensial dan prospektif sebagai sumber daya eksternal bagi penunjang sumber daya internal.
4. Merevitalisasi aparatur pemerintah dan menjalankan roda Pemerintahan Daerah, yang didasari oleh sikap maupun tindakan kreatif dan inovatif serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), guna mengoptimalkan pelayanan publik
5. Meningkatkan peran Kota Batu sebagai kota pertanian (agropolitan), khususnya untuk jenis tanaman sayur, buah dan bunga, serta menguatnya perdagangan hasil pertanian dan industri pertanian (*agro-industry*) yang diperhitungkan baik pada tingkat regional (Jawa Timur) maupun tingkat nasional guna memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian.
6. Meningkatkan posisi dan peran Kota Batu dari kota wisata menjadi sentra wisata yang diperhitungkan di tingkat regional, bahkan nasional, dengan melakukan penambahan ragam obyek dan atraksi wisata, yang didukung oleh sarana dan prasarana serta unsur penunjang wisata yang memadai dengan sebaran yang relatif merata di penjuru wilayah Kota Batu guna memperluas lapangan pekerjaan dalam rangka mengatasi pengangguran dan meningkatkan pendapatan warga maupun PAD Kota Batu yang berbasis pariwisata.
7. Pengembangan sektor fisik berkenaan dengan perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas, serta penataan tata ruang

secara menyeluruh untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas layanan publik;

8. Menciptakan kehidupan politik di Kota Batu yang demokratis, dimana aspirasi masyarakat terakomodasi dalam penyusunan program pembangunan maupun proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hajat hidup dan kepentingan rakyat banyak, dengan topangan kehidupan kepartaian yang sehat, kuat serta kontributif terhadap masyarakat, yang difasilitasi secara memadai oleh pemerintah daerah.

3.3 Profil Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

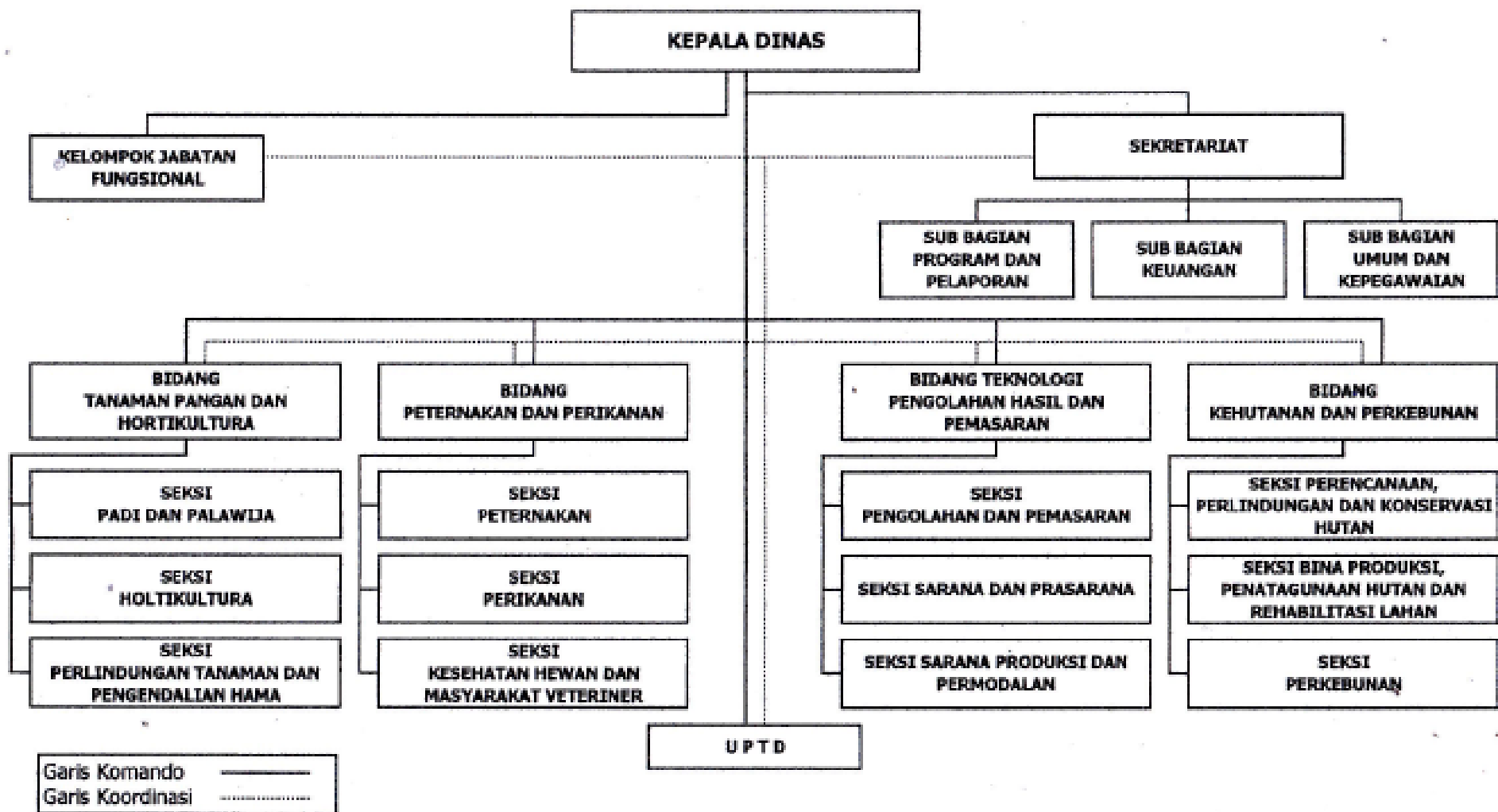
3.3.1. Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu, maka Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota batu adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
- b. Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah
- c. Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah:
 - Perumusan kebijakan dan perencanaan program penyelenggaraan di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan

- Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan kepala daerah
 - Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan penyuluh
 - Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin dan pembinaan usaha
 - Pengelolaan administrasi umum Dinas Pertanian dan Kehutanan yang meliputi ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian
 - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pertanian dan kehutanan
 - Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah
- d. Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu terdiri dari:
- Kepala Dinas
 - Sekretariat
 - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Bidang Peternakan dan Perikanan
 - Bidang Teknologi Pengolahan Hasil dan Pemasaran
 - Bidang Kehutanan
 - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu secara lebih lengkap ditampilkan pada Gambar 3.2



Gambar 3.2 Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu
(Sumber: Laporan Akhir Tahun 2011 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu)

3.3.2 Profil kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan pertanian kepada kepala daerah yang meliputi :

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja dalam bidang pertanian (meliputi pertanian, peternakan, perikanan) dan kehutanan;
2. Mampu melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang pembangunan pertanian dan kehutanan antar instansi terkait dan pihak-pihak terkait;
3. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian dan kehutanan
4. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan pertanian dan kehutanan

Rencana Strategis Kota Batu tahun 2007-2012 menyebutkan beberapa isu strategis di bidang pertanian antara lain :

1. Intensifikasi budidaya pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna
2. Pengembangan produk unggulan pertanian spesifik lokal
3. Pengembangan pertanian organik, usaha tani ramah lingkungan
4. Pembangunan rehabilitasi prasarana dan sarana produksi
5. Pengembangan sistem informasi manajemen pertanian
6. Pemanfaatan pekarangan untuk usaha pertanian
7. Perlindungan dan pelestarian alam

Mengingat isu strategis sangat penting untuk menjawab tantangan dan permasalahan mendasar Kota Batu yaitu pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pembangunan wilayah maka proyek pengungkit tersebut saat ini dalam proses pelaksanaan (*on going*) yang diharapkan tetap dilanjutkan dalam kerangka pembangunan Kota Batu.

3.4 Analisis

Kota Batu dikenal sebagai daerah wisata dan penghasil produk pertanian. Hal ini tidak terlepas dari potensi alam Kota Batu yaitu terletak di dataran tinggi sehingga memiliki hawa sejuk dengan pemandangan pegunungan yang indah dan merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan Kota Batu. Posisi pada dataran tinggi dengan suhu minimum antara 18-24⁰C, suhu maksimum 28-32⁰C dan kelembaban udara sekitar 75-98% sangat sesuai untuk pertumbuhan komoditas hortikultura dataran tinggi, seperti sayuran, buah dan tanaman hias. Potensi yang tinggi dalam hal pariwisata dan pertanian menjadikan dua sektor tersebut menjadi unggulan dalam mendukung struktur perekonomian Kota Batu melalui kontribusinya terhadap PDRB Kota Batu. Meskipun kontribusi PDRB sektor pertanian tidak sebesar sektor perdagangan, hotel dan restoran yang notabene mendukung sektor pariwisata, namun sektor pertanian memiliki fungsi strategis karena mampu menampung luapan tenaga kerja. Karenanya pembangunan sektor pertanian mutlak diperlukan, dan perpaduan pembangunan pada kedua sektor tersebut secara bersama-sama diharapkan mampu bersinergi mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nyata pada berbagai sektor pendukungnya.

Disisi lain pengembangan pertanian dengan produk tanaman pangan dan hortikultura dalam perspektif paradigma baru tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan produksi komoditas saja tapi terkait juga dengan isu-isu strategis pertanian yang lebih luas seperti mutu, daya saing, akses pasar dan keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini merupakan suatu keterkaitan yaitu peningkatan produksi harus diikuti dengan peningkatan mutu untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Kota Batu terhadap produk dari luar Kota Batu serta produk dari luar negeri yang banyak membanjiri pasar. Seiring semakin tingginya tingkat ke-

pedulian masyarakat terhadap kesehatan, menuntut dihasilkannya produk pertanian yang bebas residu pestisida dan ramah lingkungan. Hal ini berarti membuka peluang di masa yang akan datang pada pengembangan budidaya tanaman secara organik untuk menghasilkan produk bermutu, aman dikonsumsi, ramah lingkungan dan mendukung tumbuhnya alternatif wisata di Kota Batu.

Sebuah permasalahan klasik tentang pertanian di Indonesia yang juga terjadi di Kota Batu yaitu tingginya biaya usaha tani dengan menghasilkan produk yang murah di pasaran. Biaya usaha tani yang tinggi tersebut disebabkan antara lain mahalnya harga komponen utama dari usaha pertanian seperti bibit, pupuk dan pestisida. Selain itu dampak negatif penggunaan pestisida dan pupuk buatan telah tampak melalui penurunan kualitas lahan di beberapa kawasan pertanian di Kota Batu. Salah satu solusi yang dianggap tepat menjawab permasalahan keamanan produk pertanian, tingginya biaya usaha tani, serta degradasi lahan adalah dengan penerapan sistem pertanian organik. Dengan demikian untuk selanjutnya pembangunan pertanian di Kota Batu diarahkan pada pengembangan pertanian organik, yang salah satunya dilakukan melalui pembentukan kawasan sentra produksi hortikultura organik dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pelestarian lingkungan, pembangunan pertanian berkelanjutan, menarik investasi, serta menunjang sektor pariwisata yang menjadi andalan utama pendapatan asli daerah melalui agrowisata. Selain itu dengan menerapkan pertanian organik yang ramah lingkungan berarti Kota Batu turut andil dalam upaya dunia untuk mengembangkan pola pembangunan berkelanjutan, serta turut bertanggung jawab pada peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan demi keberlangsungan sumber daya sebagai bekal bagi generasi yang akan datang.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang obyek kajian. Sugiyono (2009: 22-23) menyatakan bahwa penelitian kualitatif cocok diterapkan untuk meneliti masalah yang belum jelas, untuk mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, serta meneliti sejarah perkembangan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi terhadap suatu objek dan berperan aktif dalam suatu interaksi sosial dalam rangka memperoleh informasi secara mendalam. Dengan demikian melalui pendekatan kualitatif tersebut peneliti berharap dapat melacak kronologis perencanaan pengembangan pertanian organik sebagai wujud pertanian berkelanjutan di Kota Batu melalui observasi dan hasil wawancara yang dilakukan.

4.2 Fokus penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan maka disusun fokus penelitian yang berguna membatasi pokok bahasan yang dikaji. Dengan penetapan fokus yang jelas, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang akan dibuang. Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan fokus penelitian dapat berkembang sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang fleksibel, mengikuti pola *empirical inductive* dengan asumsi bahwa hasil akhir dari pengumpulan data di lapanganlah yang mampu mencerminkan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan dengan mengacu pada masalah penelitian, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu, meliputi:
 - a. Deskripsi upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu
 - b. Tinjauan keadaan
 - c. Penetapan tujuan dan strategi
 - d. Tahap/mekanisme perencanaan
 - e. Pendekatan perencanaan
2. Peran stakeholder dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu, yang meliputi:
 - a. Identifikasi stakeholder
 - b. Peran stakeholder
3. Strategi untuk mewujudkan keberlanjutan rencana pengembangan pertanian organik di Kota Batu, meliputi:
 - a. Penerapan prinsip perencanaan interaktif dalam perencanaan pengembangan pertanian organik
 - b. Pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan keberlanjutan pertanian organik
4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu, meliputi:
 - a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat

4.3 Penetapan Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

Langkah awal dalam usaha memasuki lapangan ialah memilih lokasi situasi sosial. Setiap situasi sosial mengandung unsur tempat, pelaku dan

kegiatan. Sesuai dengan topik yang diangkat pada penelitian ini, maka lokasi yang dipilih menjadi obyek penelitian adalah Kota Batu, dengan situs penelitian adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani di Kawasan Pengembangan Pertanian Organik, serta organisasi atau pihak lain yang terkait dengan perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Kota Batu sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Potensi Kota Batu dengan kondisi alamiah sebagai daerah berbasis pertanian dan mayoritas penduduknya bergantung secara ekonomi pada sektor pertanian
2. Salah satu kebijakan dari program pembangunan pertanian di Kota Batu adalah pengembangan pertanian organik
3. Ciri khas Kota Batu sebagai kota wisata berbasis pertanian menuntut dihasilkannya produk pertanian bermutu yang ramah lingkungan dan aman dikonsumsi
4. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka unit pelaksana yang berkaitan langsung dan memegang peranan penuh dalam upaya perencanaan pembangunan pertanian di Kota Batu adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan.

4.4 Sumber Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sugiyono (2007: 62) menjelaskan bahwa yang dimaksud sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui wawancara, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang terkait dan paham dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu, dan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan tersebut (sumber data primer) selanjutnya disebut data primer.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait fokus penelitian maka informan ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) pada tahap awal dan dalam pengembangannya dilakukan *snow ball*, artinya setelah memasuki lapangan penelitian, peneliti menghubungi informan tertentu untuk meminta keterangan, kemudian akan terus berkembang ke informan lainnya yang terkait dengan fokus penelitian sampai diperoleh data dan informasi yang lengkap dan menunjukkan tingkat kejenuhan informasi.

Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yang dinilai mengetahui, menguasai, dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Berdasarkan informasi *key informan*, ditindaklanjuti dengan menetapkan informan berikutnya. Beberapa informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.
2. Mantan Kasie. Hortikultura Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu
3. Staf pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pertanian organik pada di lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu
3. Petani atau Kelompok Tani yang menjadi sasaran pengembangan pertanian organik

4. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) desa Sumberejo, desa Torongrejo, Desa Pendem, dan Desa Sumberbrantas yang menjadi lokasi pengembangan kawasan pertanian organik
5. Pihak-pihak lain di luar dinas yang terkait dengan upaya pengembangan pertanian organik seperti praktisi maupun kelompok tani mandiri yang telah melaksanakan usaha tani organik, yaitu Ketua Kelompok Tani Tanuse dan pelaku pertanian organik, yaitu Bapak Frans Sutrisno dan Bapak Mulyono.

Data sekunder bersifat melengkapi data primer, diperoleh dengan mengumpulkan sumber tertulis atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2007-2012, Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2011, Batu Dalam Angka Tahun 2011, Jadwal Rencana Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pertanian organik Tahun 2011, Surat Keputusan tentang Panitia Pelaksana Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Organik, Berita Acara Sosialisasi Pengembangan Kawasan Pertanian Organik.

4.5 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa cara. Catherine Marshall dan G.B. Rosmaan sebagaimana disebutkan dalam Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan melalui observasi pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga cara tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap obyek penelitian. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh data yang aktual dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan mengunjungi beberapa situs penelitian seperti Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, lokasi pengembangan kawasan organik, melakukan interaksi dengan beberapa pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pengembangan pertanian organik baik dari pihak dinas, petani maupun praktisi, mengamati kondisi, situasi lingkungan sekitar di wilayah Kota Batu. Peneliti berdomisili di daerah yang cukup banyak dilakukan kegiatan budidaya pertanian sehingga memperluas kesempatan untuk mengamati kegiatan budidaya pertanian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Peneliti juga berkesempatan mengikuti kegiatan yang mendukung pengembangan pertanian organik di Kota Batu seperti kegiatan sekolah lapang petani. Melalui kegiatan tersebut peneliti mengetahui gambaran antusiasme dan pemahaman petani mengenai konsep pertanian organik yang dalam hal ini masih pada taraf transisi atau peralihan menuju organik.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam. Melalui wawancara peneliti dapat melihat dan menginterpretasikan secara langsung situasi yang terjadi. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2009: 73), macam-macam wawancara terdiri dari wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tak

terstruktur, yaitu wawancara bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur melainkan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Hal ini mempunyai tujuan agar dapat meneliti lebih dalam tentang data yang diteliti (Sugiyono, 2009: 74). Dengan demikian dalam melakukan wawancara peneliti membawa *interview guide* yang sifatnya luwes dan dapat berkembang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan pengembangan pertanian organik meliputi prose perencanaan, *stakeholder* yang terlibat, strategi yang digunakan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menghimpun, memeriksa, mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik dan masalah yang diteliti untuk dipelajari dan digunakan dalam analisis. Beberapa dokumen yang digunakan misalnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2011, Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2011, Batu Dalam Angka Tahun 2011, Jadwal Rencana Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pertanian organik tahun 2011, Surat Keputusan tentang Panitia Pelaksana Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Organik, Berita Acara Sosialisasi Pengembangan Kawasan Pertanian Organik, serta foto-foto kegiatan yang dapat menambah kejelasan dalam penyampaian laporan tesis ini.

d. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang

telah ada. Triangulasi yang dilakukan meliputi triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda (observasi, wawancara, dokumentasi) untuk memperoleh data dari sumber yang sama secara serempak. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Tujuan dilakukannya triangulasi tersebut bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman oleh peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2009).

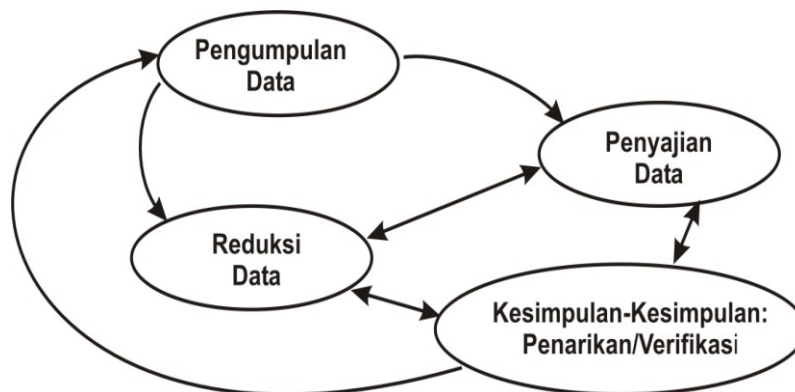
4.6 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Dengan tipe yang demikian, setelah data terkumpul maka proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, diinterpretasi, yang pada hakekatnya merupakan upaya mencari jawaban atas permasalahan yang ada.

Setelah data diperoleh segera dianalisis dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Analisis data ialah kegiatan analisis mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menafsirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman. Pada model ini kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dipisahkan satu sama lain. Keduanya

berlangsung secara serempak. Prosesnya berbentuk siklus, bukan linier dan memperlihatkan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Komponen Analisis Data Model Interaktif
(Sumber: Miles and Huberman, 1992:20)

Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari 3 (tiga) tahapan pokok yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan data ditarik dan diverifikasi. Secara sederhana dapat dijelaskan, dengan reduksi data kita dapat menyederhanakan data kualitatif dan mentransformasikannya dengan berbagai cara, misalnya melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih jelas. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumen yang tersedia dituangkan dalam uraian atau laporan yang rinci. Reduksi data

ini dilakukan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung (Miles dan Huberman, 1992: 16).

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan alur penting kedua dari kegiatan analisis data. Penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dengan cara menyusun matriks, grafik, bagan atau bentuk teks naratif maupun kumpulan kalimat (Miles dan Huberman, 1992: 17-18).

3) Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan analisa lanjutan dari reduksi data dan penyajian data sehingga data dapat disimpulkan sementara. Dengan demikian peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Kesimpulan sementara masih dapat diuji dengan cara merefleksikan kembali, triangulasi sehingga kebenaran ilmiah dapat dicapai (Miles dan Huberman, 1992: 19-20).

4.7 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin agar keabsahan data yang disajikan dapat memenuhi beberapa persyaratan dengan kriteria yang telah ditetapkan antara lain:

1. Standar Kepercayaan (*credibility*),

Agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan sesuai dengan fakta di lapangan perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: a) melakukan observasi secara terus menerus dan sungguh-sungguh, sehingga peneliti semakin memahami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya; b)

melakukan triangulasi, baik triangulasi teknik maupun triangulasi sumber data; c) melibatkan teman sejawat yang tidak ikut melakukan penelitian untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian. Hal ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan peneliti pada kompleksitas fenomena yang diteliti.

2. Standar Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada persamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan peralihan tersebut seorang peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan kejadian-kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dalam penelitian kualitatif, keteralihan dilakukan dengan cara menguraikan secara rinci. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memberikan penafsiran mengenai temuan yang diperoleh selama penelitian dalam bentuk uraian, dimana dalam memberikan penafsiran tersebut, peneliti perlu didukung oleh pengetahuan dan data yang akurat.

3. Standar Ketergantungan (*Dependability*)

Ketergantungan peneliti lakukan untuk memeriksa akurasi pengumpulan dan analisis data. Agar derajat reabilitas dapat terjadi maka diperlukan audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan keilmuan dari komisi pembimbing. Setelah hasil penelitian dianggap benar oleh pembimbing maka dilakukan pertemuan baik formal maupun informal dengan rekan-rekan dan memperoleh masukan, salah satunya melalui seminar hasil penelitian.

4. Standar Kepastian (*confirmability*)

Menurut Sugiyono (2011: 277) penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Untuk memperoleh standar pada penelitian ini dilakukan pengecekan atau penilaian oleh dosen pembimbing selama berlangsungnya konsultasi tesis bersamaan dengan pengecekan standar *dependability*.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu

5.1.1.1 Deskripsi upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu

Berdasarkan hasil penelitian diketahui deskripsi singkat mengenai upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Konsep pertanian organik telah menjadi salah satu pemikiran strategis jajaran pejabat di lingkup Dinas Pertanian Kota Batu sejak sekitar tahun 2002 sejalan dengan upaya pengembangan pertanian organik secara nasional melalui gerakan *Go Organic 2010* oleh pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh mantan Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Batu, sebagai berikut:

“Mulai berdirinya Kota Batu itu pertanian organik sudah dijadikan bahan oleh pemikir-pemikir seperti kita-kita ini pada saat itu. Begitu saya masuk di Dinas Pertanian pada tahun 2002 awal, saya sudah langsung getol kepada pertanian organik itu, karena dari pusat juga mau ada *go organik 2010* persiapan”. (Wawancara tanggal 25 September 2012).

Kota Batu diresmikan sebagai daerah otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang berdasarkan UU No. 11 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2001. Adapun peresmian pembentukan Kota Batu dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2001 yang dijadikan pula sebagai tanggal berdirinya Kota Batu.

Salah satu isu strategis dan menjadi prioritas pembangunan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Batu tahun 2007-2012 menyebutkan kurangnya pengelolaan sektor pertanian dalam rangka mendukung pengembangan sektor

pariwisata di Kota Batu. Karena itu perencanaan pembangunan pertanian di Kota Batu yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra tahun 2007-2012 juga berusaha mengakomodir isu strategis tersebut melalui pengembangan pertanian organik. Pertanian organik merupakan salah satu alternatif aspek dalam bidang pertanian yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata, sekaligus untuk mengatasi permasalahan penurunan kualitas tanah dan meningkatkan daya saing produk hortikultura unggulan Kota Batu.

Pengembangan pertanian organik pada awalnya dilakukan melalui berbagai alokasi bantuan sarana produksi organik, pembangunan laboratorium di Kebun Percobaan Tlekung, dan pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) kepada masyarakat untuk mensosialisasikan penerapan teknologi pertanian organik di kalangan petani. Hal ini disampaikan oleh mantan Kepala bidang Program sebagai berikut:

“Untuk melangkah ke organik waktu itu kita kembangkan pupuk organik, bantuan-bantuan pupuk dan alat-alat pembuatan pupuk kompos, lab untuk pengembangan. Lha kita kembangkan pula sebagai contoh yang pernah kita lakukan itu di Sumberejo untuk bawang melalui SLPHT, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu”. (Wawancara tanggal 26 September 2012).

Kegiatan-kegiatan tersebut tidak berjalan secara berkesinambungan pada beberapa tahun berikutnya karena adanya pergantian pimpinan, rotasi pegawai yang dikader, serta berakhirnya masa tugas pejabat di lingkungan Dinas Pertanian Kota Batu. Hal ini terungkap dari pernyataan mantan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagai berikut:

“Kebun Tlekung itu dulu rencananya untuk *training center organic farming*, begitu kepala dinas yang baru masuk tidak *ngematch* (tidak sesuai-pen), diserahkan DKP *buyar* (bubar-pen) semua itu, diambil karena saya pensiun nggak ada yang melanjutkan, maksudnya untuk diberikan kepada anak-anak, lha mas Z juga dipindah ke Bappeda, ya kalau orang bukan bidangnya ya seperti itu, Pak X dulu nggak setuju dengan teknologi-teknologi saya, nggak bisa

menerima lha memang bukan jurusannya”. (Wawancara tanggal 25 September 2012).

Pernyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa tidak berkesinambungnya kegiatan dalam rangka mengembangkan pertanian organik disebabkan adanya pergantian kepemimpinan di lingkup Dinas Pertanian saat itu dengan kondisi pimpinan mempunyai latar belakang pendidikan bukan dari bidang pertanian. Hal ini dianggap sebagai salah satu penyebab tidak sinkronnya pemikiran mengenai upaya pengembangan pertanian di Kota Batu saat itu antara kepala SKPD dengan kepala bidang teknis terkait. Akibatnya beberapa kegiatan tidak dilanjutkan dan lahan Kebun Percobaan Tlekung selanjutnya diambil alih oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan untuk dijadikan tempat pembuangan akhir.

Setelah terjadi beberapa kali pergantian kepala dinas, wacana pengembangan pertanian organik muncul kembali pada tahun 2009 melalui prakarsa Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan yang menjabat saat itu. Ide untuk memasyarakatkan pertanian organik kepada petani muncul dari banyaknya permasalahan pertanian di Kota Batu, terutama semakin menurunnya kualitas tanah akibat penggunaan bahan kimia sintetis oleh sebagian besar petani di Kota Batu. Hal ini dapat dilihat secara jelas pada turunnya produksi dan produktivitas tanaman apel baik dari segi kuantitas maupun kualitas buah yang dihasilkan. Sebagian besar buah apel yang dihasilkan di Kota Batu berukuran lebih kecil dari produksi sekitar beberapa tahun sebelumnya.

Sejak saat itu mulai dilakukan kembali beberapa kegiatan untuk mengetahui secara pasti kondisi pertanian di Kota Batu baik mengenai keadaan tanah maupun produk pertanian yang dihasilkan. Kegiatan yang dimaksud antara lain Pengujian Kualitas Tanah untuk Lahan Pertanian/Perkebunan di Kota

Batu, serta Pengujian Hasil Pertanian terhadap Residu Pestisida di Kota Batu yang merupakan kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sejak tahun 2009 sampai tahun 2010. Pada tahun 2011 kembali terjadi pergantian pucuk pimpinan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, namun upaya pengembangan pertanian organik terus berlanjut. Bahkan pada tahun tersebut upaya untuk mewujudkan berkembangnya pertanian organik di Kota Batu terlihat lebih nyata hingga di *launching* empat kawasan pertanian organik oleh Walikota Batu pada tahun 2012, yaitu kawasan pertanian organik untuk komoditas sayuran di Desa Sumberbrantas, Desa Sumberejo dan Desa Torongrejo, serta kawasan pertanian organik komoditas padi di Desa Pendem. Hal ini tidak lepas dari peran Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan yang sejak awal telah turut andil dalam upaya merencanakan pengembangan pertanian organik tersebut pada saat masih menjabat sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada dinas yang sama.

Disisi lain untuk lebih mengembangkan sektor pertanian maka pemerintah Kota Batu juga memiliki komitmen terhadap penerapan pertanian organik di Kota Batu. RPJPD Kota Batu tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan sesuai Perda No. 4 tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 menyebutkan bahwa komitmen penerapan sistem pertanian organik dilakukan melalui "*Batu Goes Organik*" yang akan diterapkan di seluruh desa dan kelurahan di Kota Batu. Pertanian organik bisa diwujudkan pada tanah kas desa dengan dukungan Alokasi Dana Desa (ADD). Pedoman Umum ADD mensyaratkan setiap desa menyediakan lahan dari kas desa atau tanah kelurahan untuk menanam produk pertanian yang

bebas bahan kimia. Adapun biaya operasional pengelolaannya dialokasikan dari ADD dan kegiatan ini menjadi salah satu syarat pencairan dalam tahun anggaran. Dengan demikian secara umum perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu dilakukan oleh dua *leading sektor*, yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan, serta Bagian Pemerintahan Kota Batu. Hal ini berlaku mulai tahun 2012 sejak dikeluarkan kebijakan alokasi ADD sebagai pendukung penerapan pertanian organik di Kota Batu, dimana Bagian Pemerintahan sebagai pengelola ADD di tingkat kota. Sedangkan secara teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka upaya pembangunan pertanian menjadi tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan, termasuk pula upaya untuk mengembangkan pertanian organik di Kota Batu. Wujud nyata upaya tersebut adalah dengan membentuk empat kawasan pertanian organik di beberapa wilayah Kota Batu yang dimulai pada tahun anggaran 2011. Penelitian ini mengkaji mengenai upaya perencanaan pengembangan pertanian organik yang dilakukan pemerintah Kota Batu melalui salah satu *leading sektor*, yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.

Sampai penelitian ini dilakukan belum ada perencanaan teknis pengembangan pertanian organik yang diwujudkan secara formal dalam suatu dokumen perencanaan. Pengembangan pertanian organik hanya disebutkan di dalam renstra tahun 2007-2012, berupa arah kebijakan pembangunan untuk bidang pertanian melalui peningkatan teknologi pertanian organik ramah lingkungan dan pengembangan desa kawasan pertanian organik ramah lingkungan. Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan bidang pertanian organik di Kota Batu pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, maka peneliti berusaha menggali informasi melalui: 1) wawancara dengan pihak-

pihak yang dianggap tahu maupun pernah terlibat dalam upaya pengembangan pertanian organik, 2) mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta 3) melakukan pengamatan pada lokasi sasaran pengembangan pertanian organik. Selanjutnya peneliti berusaha mengkronologiskan hasil-hasil temuan selama penelitian serta melakukan beberapa analisa terhadap kondisi keadaan untuk kemudian mengambil suatu kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan berguna untuk perencanaan pengembangan pertanian organik selanjutnya di Kota Batu.

5.1.1.2 Tinjauan Keadaan

Tinjauan keadaan dilakukan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh kondisi wilayah sesuai lingkup perencanaan meliputi tinjauan tentang keadaan wilayah perencanaan (kondisi eksisting), permasalahan yang timbul dan potensi yang dimiliki. Dari beberapa tinjauan keadaan tersebut dapat diidentifikasi permasalahan pokok yang menjadi dasar bagi perumusan kebijaksanaan pembangunan. Selain itu dapat diketahui potensi-potensi yang dimiliki sehingga dapat dilakukan analisa untuk mengetahui potensi-potensi pembangunan, baik yang sudah dimanfaatkan maupun belum dimanfaatkan.

A. Identifikasi permasalahan pertanian di Kota Batu

Hasil wawancara dan penelusuran dokumen menunjukkan tinjauan keadaan dan identifikasi isu permasalahan pertanian diperoleh berdasarkan realitas permasalahan di Kota Batu. Permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya sudah cukup lama terjadi dan dirasakan oleh petani di Kota Batu, misalnya penurunan produksi buah apel serta semakin meningkatnya penggunaan pestisida kimia yang menandakan adanya resistensi beberapa hama dan penyakit tanaman. Beberapa langkah untuk mengetahui secara pasti

kondisi yang terjadi juga telah dilakukan seperti upaya penelitian untuk mengetahui kandungan residu pestisida pada tanah dan komoditas hortikultura, serta pengujian contoh tanah di beberapa wilayah pertanian di Kota Batu sebagai cara untuk mengetahui tingkat kesuburan dan sifat fisik tanah. Hal ini terungkap dari adanya dokumen laporan beberapa kegiatan tersebut serta dari pernyataan mantan Kepala Bidang Program yang menyebutkan bahwa :

“Waktu itu kita sudah lakukan kerjasama dengan fakultas pertanian Unibraw untuk survei analisa tanah, bahwa kandungan organik didalam tanah itu kalau pedomannya itu diatas 5 %, nah Kota Batu itu dibawah 3 %, berarti perlu perlakuan khusus”. (Wawancara tanggal 26 September 2012).

Dari pernyataan tersebut diketahui untuk mengidentifikasi dan membuktikan adanya permasalahan tanah pada lahan pertanian maka dilakukan analisa tanah dengan hasilnya diketahui bahwa kandungan bahan organik pada tanah memang dibawah persyaratan.

Selanjutnya dokumen laporan akhir pengujian kualitas tanah untuk lahan pertanian/perkebunan di Kota Batu tahun 2009 menjelaskan bahwa penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka menggali database untuk menyongsong Pembangunan Pertanian Kota Batu “Go Organik”. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 1) mengetahui jenis pestisida apa saja yang meninggalkan residu di dalam tanah akibat kegiatan budidaya berbagai komoditas pertanian; 2) mengetahui adanya dampak pemanfaatan pestisida dalam berbudidaya terhadap keragaman biota yang ada dalam ekosistem pertanian; 3) dapat dimanfaatkan sebagai dasar berpijak dalam program pembangunan dan pengembangan pertanian khususnya serta lingkungan pada umumnya di wilayah Kota Batu. Sedangkan dari laporan akhir pengujian hasil pertanian terhadap residu pestisida pada komoditas hortikultura di Kota Batu

tahun 2009 diketahui bahwa hasil penelitian tersebut diharapkan dapat bermanfaat memberikan informasi untuk dipertimbangkan dalam melakukan kebijakan dalam upaya mempertahankan produk-produk hortikultura yang bebas dari residu pestisida, sehingga mampu bersaing dengan produk dari daerah atau negara lain.

Usaha untuk melakukan identifikasi permasalahan dilakukan pula melalui analisis statistik pertanian mengenai perkembangan produksi hasil pertanian oleh petugas data yang selanjutnya menjadi bahan kajian pada laporan tahunan dinas. Hal ini seperti hasil wawancara dengan staf petugas pengolah data Dinas Pertanian dan Kehutanan yang menyatakan sebagai berikut:

“Kita kan setiap bulan melakukan pengumpulan data statistik pertanian, disitu ada data-data tentang produksi, produktivitas, luas panen, dan macam-macam yang berhubungan dengan perkembangan komoditas pertanian. Tanaman pangan ada hortikultura juga ada. Nantinya kita juga melaporkan data itu ke propinsi setiap bulan sama per triwulan. Hasil akhirnya jadi data laporan tahunan, dianalisis oh ada peningkatan tanaman ini karena ini atau ada penurunan produksi ini karena ini, lha itu nanti dijadikan juga sebagai bahan di laporan tahunan, sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan”. (Wawancara tanggal 24 September 2012).

Selanjutnya beberapa isu atau permasalahan pertanian di Kota Batu ditelusuri melalui wawancara dengan beberapa narasumber. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu mengemukakan kondisi umum pertanian di Kota Batu sebagai berikut:

“Jadi kan *gini* mbak, kalau bicara permasalahan di Kota Batu, Kota Batu sebetulnya kan memang basisnya pertanian, tetapi kondisi saat ini itu sudah berbeda jauhlah antara dua puluh, dua puluh lima tahun yang kemarin, baik itu tingkat pestisidanya, pupuk anorganiknya, semua terakumulasi di dalam tanah, memang sebagian besar struktur tanah kita itu sudah berubah”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Dari pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perubahan kondisi tanah pada lahan pertanian terkait dengan kebiasaan petani

menggunakan bahan kimia anorganik untuk bercocok tanam di Kota Batu. Akumulasi bahan anorganik di dalam tanah menyebabkan perubahan struktur tanah pada sebagian besar lahan pertanian. Hal senada terkait penurunan kualitas lahan pertanian di Kota Batu juga disampaikan oleh Koordinator Petugas Penyuluh Lapang (PPL) Kota Batu sebagai berikut:

“Kondisi di Batu saat ini memang terjadi menurunnya kualitas dan produktifitas lahan yang diakibatkan praktek pertanian yang eksploitatif yaitu dengan penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Selain itu juga penggunaan bahan-bahan kimia sintesis tersebut juga menyebabkan tercemarnya lingkungan seperti air, tanah dan udara”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Kondisi demikian diperkuat dengan hasil kegiatan pengujian kualitas tanah untuk lahan pertanian dan perkebunan di Kota Batu yang diwakili oleh empat puluh sebaran titik pengambilan sampel tanah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.1, dengan hasil seperti ditunjukkan pada Tabel 5.2 dan Gambar 5.1

Tabel 5.1. Sebaran Titik Sampel Pengujian Tanah

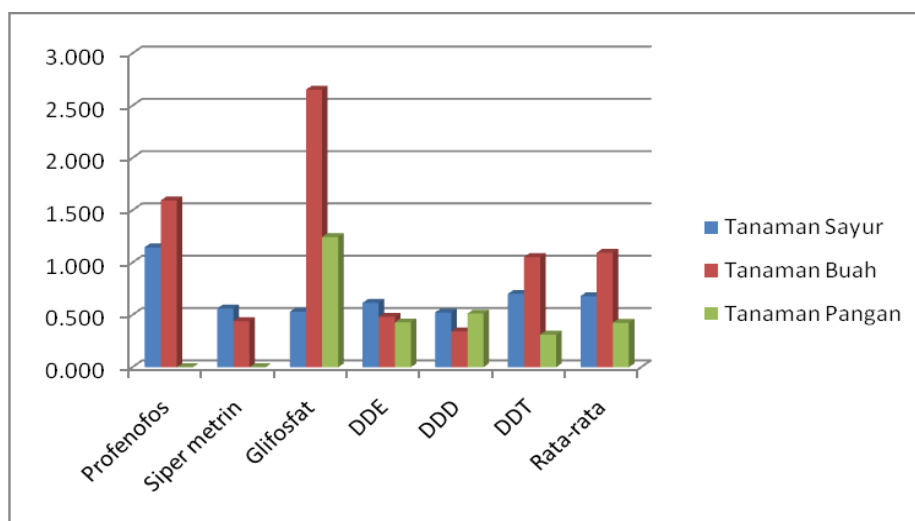
| No | Jenis Komoditi | Jumlah Titik | Desa yang terwakili |
|----|----------------|--------------|--|
| 1. | Tanaman Sayur | 14 | Kec. Bumiaji: Desa Sumberbrantas, Tulungrejo, Bumiaji Kec. Batu: Desa Songgokerto, Pesanggrahan, Sumberejo |
| 2. | Tanaman Buah | 14 | Kec. Bumiaji: Desa Tulungrejo, Bulukerto, Bumiaji, Giripurno, Pandanrejo Kec. Batu: Kel. Temas, Desa Oro-oro Ombo, Kel. Ngaglik Kec. Junrejo: Desa Tlekung |
| | Tanaman Pangan | 12 | Kec. Batu: Kel. Temas Kec. Junrejo: Desa Torongrejo, Junrejo, Mojorejo |

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya: Laporan Akhir Pengujian Kualitas Tanah untuk Lahan Pertanian/Perkebunan di Kota Batu Tahun 2009

Tabel 5.2. Rata-rata residu pestisida dalam tanah pada lahan tanaman sayur, buah dan pangan di Kota Batu

| Asal lahan | Rata-rata residu pestisida (ppm) | | | | | | Rata-rata Total |
|----------------|----------------------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|-----------------|
| | Profenofos | Siper metrin | Glifosfat | DDE | DDD | DDT | |
| Tanaman Sayur | 1,146 | 0,561 | 0,530 | 0,615 | 0,523 | 0,701 | 0,679 |
| Tanaman Buah | 1,594 | 0,441 | 2,652 | 0,481 | 0,341 | 1,053 | 1,094 |
| Tanaman Pangan | 0,000 | 0,000 | 1,244 | 0,478 | 0,513 | 0,311 | 0,424 |
| Batas Maksimum | 005-1,0 | 0,05-1,0 | 0,1-0,2 | 0,2-1,0 | 0,2-1,0 | 0,2-1,0 | |

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Laporan Akhir Pengujian Kualitas Tanah untuk Lahan Pertanian/Perkebunan di Kota Batu Tahun 2009



Gambar 5.1. Rata-rata residu pestisida dalam tanah pada lahan tanaman sayur, buah dan pangan di Kota Batu. (Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Laporan Akhir Pengujian Kualitas Tanah untuk Lahan Pertanian/Perkebunan di Kota Batu Tahun 2009)

Pada Tabel 5.2 dan Gambar 5.1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan terdapat residu pestisida pada tanah yang dijadikan lahan pertanian di Kota Batu. Residu pestisida rata-rata paling tinggi berada pada areal lahan tanaman buah,

diikuti secara berturut-turut oleh areal tanaman sayur dan areal tanaman pangan. Adapun semua jenis pestisida yang ditemukan yaitu profenos, siper metrin, glifosfat, DDE, DDD, dan DDT berada di atas batas ambang yang dapat ditoleransi. Selanjutnya hasil penelusuran dokumen yang dilakukan oleh peneliti diperoleh data sekunder yang menunjukkan adanya penurunan kualitas tanah di Kota Batu berupa laporan hasil analisis tanah di beberapa wilayah Kota Batu seperti ditunjukkan pada Tabel 5.3

Tabel 5.3 Hasil analisa tanah di Kota Batu

| No | Asal Contoh Tanah | Porositas (% vol) | pH | C.organic (%) | N total (%) | C/N | Bahan Organik (%) |
|----|-------------------------------|-------------------|-----|---------------|-------------|-----|-------------------|
| 1 | Kec. Bumiaji: Desa Giripurno: | | | | | | |
| | - Lereng Bawah | 46,8 | 5,9 | 1,09 | 0,11 | 10 | 1,88 |
| | - Lereng Tengah | 56,0 | 6,2 | 1,68 | 0,17 | 10 | 2,91 |
| | - Lereng Atas | 66,6 | 5,9 | 3,51 | 0,36 | 10 | 6,07 |
| 2 | Kec. Batu: Desa Oro-oro Ombo | 64,1 | 5,8 | 2,33 | 0,20 | 12 | 4,03 |
| 3 | Kec. Junrejo: Desa Torongrejo | - | 4,9 | 0,77 | 0,09 | 8 | - |

Sumber: Hasil Analisa Tanah, Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, 2010

Data pada Tabel 5.3 menunjukkan bahwa masing-masing contoh tanah yang mewakili tiga kecamatan di Kota Batu semuanya menunjukkan tingkat kemasaman yang tinggi karena dibawah angka 7 yang merupakan kondisi pH netral untuk tanah. Adapun kondisi bahan organik pada keseluruhan contoh tanah juga tergolong rendah. Kondisi demikian merupakan indikator bahwa tingkat kesuburan tanah di Kota Batu mengalami penurunan.

Penurunan kualitas akibat penggunaan bahan kimia buatan tidak hanya terjadi pada tanah, tetapi ditengarai terjadi juga pada air. Pengamatan yang

dilakukan seorang Petugas Penyuluh Lapang (PPL) senior Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dengan wilayah binaan Kecamatan Bumiaji disampaikan melalui pernyataan berikut:

"Asupan kimia yang di hulu itu mengalir ke hilir, ditengarai asupan kimia sintetis itu berlebihan, baik pupuk maupun pestisida, ya kita nggak bisa memvonis itu akibat kimia yang tinggi sehingga biota itu sekarang makin tertekan makin berkurang beberapa keragamannya, nah *saiki* (sekarang) dari mata air sungai Brantas kebawah, kebawah, kebawah sampai *Selecta*, sungai itu sudah sedikit sekali ada kehidupan ikan, indikator kan itu,nah kalau kehidupan yang makro saja mulai *nggak ketok* (tidak terlihat), apalagi yang mikro?".
(Wawancara tanggal 8 Agustus 2011).

Pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa menurut beliau kegiatan budidaya pertanian di daerah yang lebih tinggi akan mempengaruhi kondisi daerah dibawahnya, dalam hal ini melalui aliran air sungai. Kontaminasi bahan kimia dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia buatan akan ikut melalui aliran air sungai dari bagian hulu ke hilir dan menyebabkan kondisi air sudah tidak sehat yang ditandai dengan berkurangnya keberadaan makhluk hidup, yaitu ikan. Jika makhluk hidup makro sudah mulai berkurang, maka kemungkinan besar keberadaan makhluk hidup mikro juga dipertanyakan keberadaannya.

Namun demikian dari penelusuran dokumen yang dilakukan peneliti ditemukan data sekunder yang ternyata berbeda dengan pendapat narasumber tersebut di atas. Hasil pemantauan kualitas lingkungan akibat pencemaran pestisida pada tanah dan air yang dilakukan oleh Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup Tahun 2010 di beberapa kawasan sentra pertanian termasuk diantaranya Kota Batu menunjukkan bahwa residu pestisida terutama DDT dan turunannya (DDD dan DDE) terdeteksi di wilayah pemantauan di Kota Batu pada contoh uji sedimen sungai dan tanah.

Sedangkan contoh uji pada air terdeteksi residu pestisida tetapi masih di bawah nilai yang dipersyaratkan sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 5.4

Tabel 5.4. Konsentrasi POPs dan OCs di Kota Batu Tahun 2010

| Senyawaan | Konsentrasi POPs dan senyawa Ocs yang terdeteksi di Batu 2010 | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Air (ng/ml) | | | | Tanah (ug/kg) | | | | Sedimen (ug/kg) |
| | A1Bt | A2Bt | A3Bt | A4Bt | T1Bt | T2Bt | T3Bt | T4Bt | |
| Aldrin | <0,006 | < ,006 | <0,006 | <0,006 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 |
| Dieldrin | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 20,7 | < 0,7 | < 0,7 | < 0,7 | < 0,7 |
| Endrin | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Heptachlor | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Heptachlor Epoxide | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 |
| Lindan | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | | | | | |
| Heksaklorobenzen, HCB | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| p,p'-DDD | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 2,80 | < 0,2 | < 0,2 | 6,10 | < 0,2 |
| o,p'-DDD | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 |
| p,p'-DDE | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 54,9 | 3,20 | 8,30 | 36,4 | < 0,5 |
| o,p'-DDE | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 |
| Metoxychlor | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 |
| p,p'-DDT | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | < 0,7 | < 0,7 | 3,20 | 4,70 | < 0,7 |
| o,p'-DDT | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 7,61 | 1,70 | 2,30 | 3,30 | < 0,8 |

Sumber:Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup: Laporan Pemantaun *Persistent Organic Pollutant (POPs)* di Indonesia Tahun 2010.

Keterangan:

A1Bt = Air aliran mata air Arboretum

A2Bt = Air sungai Brantas Gunungsari

A3Bt = Air sungai Brantas Junrejo

A4Bt = Air sungai Brantas Pendem

S1Bt = Sedimen sungai Brantas jembatan Pendem

T1Bt = Tanah kebun kentang Ds. Tulungrejo, Kec. BumiajiTlekung

T2Bt = Tanah kebun Apel Ds. Junggo, Kec. Bumiaji

T3Bt = Tanah kebun apel Ds. Bulukerto Kec. Bumiaji

T4Bt = Tanah kebun Daun Bawang Ds. Tulungrejo, Kec. Junrejo

Laporan tersebut menyebutkan pula bahwa kondisi contoh sumber air secara visual sangat kotor dan berpotensi untuk tercemar sehingga memerlukan pemantauan lebih lanjut dengan melibatkan parameter biologi atau anorganik.

Adapun kriteria mutu air berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Kriteria mutu air berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001

| Parameter | Satuan | Kelas | | | |
|---------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|
| | | I | II | III | IV |
| BHC | µg/L | 210 | 210 | 210 | (-) |
| Aldrin dan Dieldrin | µg/L | 17 | (-) | (-) | (-) |
| Kiordan | µg/L | 3 | (-) | (-) | (-) |
| DDT | µg/L | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Heptaklor dan heptaklor epoksid | µg/L | 18 | (-) | (-) | (-) |
| Lindan | µg/L | 56 | (-) | (-) | (-) |
| Metoksiklor | µg/L | 35 | (-) | (-) | (-) |
| Endrin | µg/L | 1 | 4 | 4 | (-) |
| Toksaphen | µg/L | 5 | (-) | (-) | (-) |

Ket (-) = tidak dipersyaratkan

Sumber: Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Laporan Pemantauan *Persistent Organic Pollutant (POPS)* di Indonesia Tahun 2010.

Jika dibandingkan kriteria mutu air sesuai peraturan pemerintah yang mengatur keberadaan pestisida pada air yaitu PP No. 82 Th. 2001, maka konsentrasi yang terdeteksi pada semua contoh uji masih dibawah nilai yang ditetapkan. Namun demikian hanya kriteria air kelas I untuk bahan baku air minum yang memenuhi syarat nilai konsentrasinya, sedangkan untuk kriteria kelas II, III, dan IV, dimana air sungai tersebut digunakan untuk perikanan, pertanian ataupun rekreasi, beberapa parameter tersebut tidak dipersyaratkan.

Selain itu kondisi tanah dan penurunan hasil juga disampaikan oleh petani sekaligus ketua Kelompok Tani Rukun Tani Desa Torongrejo sebagai berikut:

“Kalau dulu itu anu mbak *kelet* (lengket) tanah saya tapi tanam mudah, penanamannya mudah, terus buahnya juga bagus, kalau tanam bawang merah hasilnya lumayan bagus. Kalau dulu *gar pancen* artinya luas lahan kita 2500 dapat 6 ton dari bibit 2 kuintal. Sekarang sudah berat, sekarang kalau kita bibit 2 kuintal nanti *paling* keluarnya 3 atau 4 ton itu sudah *buagus*”. (Wawancara tanggal 21 September 2012).

Dari pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perubahan kondisi tanah dan hasil panen. Kalau dulu tanah dilahannya lengket (artinya bahan organik masih banyak), mudah ditanami dan hasilnya bagus. Pengalaman petani membuktikan jika menanam bawang merah dari 2 kw bibit dengan luas lahan sekitar 2500 m², di masa lalu mampu menghasilkan 6 ton bawang merah, sedangkan kondisi sekarang lebih sulit. Dengan 2 kw bibit bawang merah hanya dihasilkan 3 sampai 4 ton, atau terjadi penurunan hasil sekitar 25 %. Menurut beliau hal tersebut disebabkan kondisi lahan dan tanaman yang terlalu banyak menggunakan bahan kimia buatan. Hal ini menyiratkan bahwa sebenarnya petani mengetahui dampak kurang baik mengenai penggunaan pestisida terhadap kondisi tanah dan hasil yang diberikan.

Pendapat dan sikap mengenai dampak penggunaan pestisida kimia disampaikan pula oleh petani sayur di Desa Sumberejo, Kecamatan Batu sebagai berikut:

“Lha saya *nanem* itu nggak berani makan sendiri, lho *temenan!*, karena saya paham *nyemprotnya*. Yang saya makan itu yang biasa-biasa aja, *gondes*, apa itu, labu siam! Itu kan *nggak pake nyemprot*. Kalau petani itu sukanya yang rumput-rumputnya, itu yang nunut, tempuyung, *bayem*, *lek sing ditandur yo diborongno kabeh*. Lha kita kan cari untung, *ngono ae*”.

(saya menanam tapi tidak berani memakan (hasilnya), sungguh!, karena saya paham bagaimana menyemprotnya. Yang saya makan itu (tanaman) yang biasa-biasa saja seperti labu siam yang (perawatannya) tidak menggunakan penyemprotan (pestisida kimia sintetis). Kalau petani itu lebih suka rumput-rumputnya (gulma atau tanaman lain disekitar tanaman budidaya) seperti tempuyung, bayam, kalau (tanaman) yang ditanam ya dijual semua. Lha kita kan cari untung, begitu saja). (Wawancara tanggal 29 Agustus 2012).

Pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa petani tersebut takut untuk mengkonsumsi hasil budidaya tanamannya sendiri karena mengerti seberapa banyak pestisida yang digunakan untuk merawat tanamannya. Petani justru memilih mengkonsumsi tanaman lain yang kecil kemungkinannya

menggunakan atau terkena pestisida kimia. Adapun hasil tanaman budidaya seluruhnya adalah untuk dijual.

Kondisi yang dialami oleh petani di Desa Sumberejo tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya ada rasa takut pada petani terhadap dampak buruk pestisida dan kemungkinan residu kimia yang ada pada tanaman hasil budidayanya, sehingga lebih memilih mengkonsumsi tanaman lain yang kemungkinan kecil mengandung residu kimia. Perilaku tersebut juga menggambarkan bahwa keuntungan ekonomi merupakan hal yang utama dalam kegiatan usaha tani sehingga mengesampingkan keamanan pangan produk yang dihasilkan dan kesehatan konsumen (pembeli). Hal ini didukung pernyataan petani lainnya di desa Sumberejo, Bapak Sw, sebagai berikut:

*“Kalau petani untuk meningkatkan hasil yang dituju itu kan *sing cuepet, lemu, ndang panen digowo nang pasar...intine, intine yang diuber* itu cuma hasil yang berlipat ganda, walaupun *dikimia sing penting hasilku ngkok lemu, hasile akeh, aku tak dol nang pasar oleh hasil*”.*

(Kalau petani untuk meningkatkan hasil yang dituju itu kan yang cepat, gemuk, segera panen dibawa ke pasar...intinya yang dikejar itu cuma hasil yang berlipat ganda, walaupun menggunakan bahan kimia yang penting hasil (tanaman)ku nanti gemuk, hasilnya banyak, dijual ke pasar mendapat hasil). (Wawancara tanggal 29 Agustus 2012).

Pernyataan Bapak Sw tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada intinya dalam usaha budidaya tanaman petani lebih berorientasi untuk menghasilkan tanaman yang ‘bagus’ sehingga laku di pasar dengan harga pantas meskipun dalam perawatannya menggunakan bahan kimia. Hal ini juga menunjukkan kepercayaan yang tinggi tentang kemampuan bahan kimia untuk menghasilkan tanaman yang bagus (pertumbuhan cepat, gemuk).

Keengganan untuk meninggalkan pestisida kimia disampaikan oleh Bapak A, petani Desa Torongrejo sebagai berikut:

“Kalau pakai insektisidanya itu benar-benar lepas kimia belum berani...kalau insektisida kimia itu yang masih sulit ditinggal, kalau sudah cuaca seperti ini, angin, ulat itu cepat berkembang, pernah ikut SLPHT sering malah tapi belum diterapkan, petani itu lebih senang jalur cepat. Kalau pakai obat kan set set set, padahal mahal mbak, nggak telaten juga mbak, itu rata-rata”. (Wawancara tanggal 21 September 2012).

Hal senada disampaikan pula oleh petani lainnya di Desa Torongrejo, Bapak Sn, yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya saya dulu sudah pernah nyoba seperti yang diajarkan bapak penyuluh bikin obat sendiri dari daun-daunan itu, pernah juga nyoba pakai perekat yang kuning-kuning itu tapi malah tanaman saya jadi sasaran hamanya mbak, jadi ya saya nggak berani pakai lagi, takut kalau diserbu lagi”. (Wawancara tanggal 21 September 2012).

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa sebenarnya petani sudah mulai paham dengan teknologi organik yang diberikan melalui penyuluhan, namun karena hanya dilakukan secara perorangan maka resiko serangan hama penyakit menjadi lebih tinggi. Hal ini pula yang menyebabkan petani enggan menggunakan pestisida organik dan lebih memilih pestisida kimia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta dukungan data sekunder maka diketahui bahwa masyarakat petani di Kota Batu terbiasa menggunakan bahan kimia sintetis dalam teknik budidaya tanamannya. Kebiasaan yang telah berlangsung cukup lama tersebut meninggalkan residu yang cukup banyak di dalam tanah, bahkan telah melebihi batas ambang yang ditetapkan oleh pemerintah melalui PP No. 82 Tahun 2001 tentang kriteria mutu air. Residu pestisida yang terdapat didalam tanah diantaranya merupakan jenis pestisida berupa senyawa organik yang bersifat toksik dan dapat bertahan lama di lingkungan (persisten), misalnya DDT dan turunannya. Lebih jauh kondisi tanah yang dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat Kota Batu saat ini mengalami penurunan kualitas baik secara fisik maupun kimia, yang

berpengaruh pula pada penurunan hasil panen pertanian. Terkait dengan penerapan pertanian organik petani menganggap cara bertani secara organik sulit dan memerlukan ketelatenan yang cukup besar dengan hasil yang dianggap kurang bagus. Selain itu petani juga belum berani melepas penggunaan pestisida kimia karena takut terhadap resiko kegagalan panen akibat serangan hama penyakit tanaman.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan keadaan dan identifikasi isu terkait upaya pengembangan pertanian organik dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu melalui pelaksanaan kegiatan berupa pengamatan permasalahan di lapang oleh petugas lapang (PPL) berkoordinasi dengan bidang teknis terkait, analisis data statistik pertanian, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan penelitian/pengujian terhadap daya dukung tanah dan kondisi produk hortikultura. Adapun permasalahan pertanian di Kota Batu disimpulkan mencakup beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek lingkungan

- Terjadi penurunan kualitas lingkungan untuk mendukung kegiatan usaha budidaya pertanian di Kota Batu, meliputi penurunan kualitas tanah, air dan udara

b. Aspek ekonomi

- Penurunan pendapatan petani melalui penurunan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian
- Sebenarnya teknologi organik sudah mulai dipahami namun karena dilaksanakan secara perorangan maka resiko serangan hama dan penurunan hasil lebih tinggi

- Kesulitan dalam pemasaran produk terkait dengan tuntutan harga yang tinggi dari petani terhadap produk yang dihasilkan dengan cara organik

c. Aspek sosial

- Kebiasaan dan ketergantungan petani terhadap bahan kimia buatan dalam usaha budidaya pertanian sangat kuat
- Kebanyakan petani menganggap bertani secara organik sulit dan hasilnya kurang bagus
- Hasil pertanian terutama produk hortikultura mengandung residu kimia dan berpotensi memberi dampak negatif bagi orang lain (konsumen)
- Perilaku petani masih lebih mengutamakan segi ekonomi daripada segi sosial seperti kesehatan
- Keperdulian keberadaan bahaya kimia pada produk yang mungkin dirasakan oleh konsumen masih kurang

B. Potensi Pertanian di Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu sentra pertanian di Jawa Timur dengan komoditas hortikultura sebagai unggulannya. Potensi tersebut ditandai dengan beragamnya komoditas hortikultura di Kota Batu meliputi berbagai jenis tanaman dataran tinggi baik sayur, buah-buahan maupun aneka tanaman hias *indoor*, *outdoor* serta bunga potong. Berbagai komoditas hortikultura tersebut tersebar di tiga wilayah kecamatan di Kota Batu, yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Sesuai dengan agroklimat tanaman yang meliputi ketinggian tempat, jenis tanah, kemiringan lahan, serta didukung kondisi sosial budaya masyarakat setempat, maka masing-masing komoditas dengan sendirinya mengelompok dan membentuk kawasan maupun sentra-sentra

produksi. Untuk komoditas buah apel banyak dihasilkan di Kecamatan Bumiaji, sedangkan jeruk ada di Desa Oro-oro Ombo dan Dadaprejo.

Khusus untuk komoditas sayur sebarannya cukup merata di seluruh wilayah Kota Batu. Hampir semua kecamatan sesuai untuk ditanami sayuran, namun demikian terdapat beberapa wilayah penghasil komoditas sayuran lebih banyak seperti di Desa Torongrejo, Desa Sumberejo, dan sebagian besar wilayah Kecamatan Bumiaji.

Staf seksi Penyusunan Program dan Pelaporan yang juga bertanggung jawab sebagai petugas pengolah data Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, menyampaikan kondisi sebaran komoditas pertanian di Kota Batu sebagai berikut:

“Padi sentranya di Pendem, di beberapa daerah di Kecamatan Junrejo ada padi sama jagung, kalau sayur di Torongrejo ada bawang merah, bawang putih, brungkul, seledri. Junrejo bawang merah lainnya tanaman pangan. Sayur-sayuran ada di Torong, Torong dulu malah sentranya bawang merah bawang putih sekitar Tahun 2006-2007. Di Kecamatan Batu itu kalau Oro-oro ombo masih cenderung tanaman pangan, *lek* sayur dulu kubis ada tapi sekarang sudah dipakai jadi BNS (*Batu Night Spectaculer-pen.*). Kalau daerah dibawah ini sayur yang bisa adaptasinya itu kubis. Kalau Temas ini yang ditanam mirip seperti Torong. Kalau yang banyak sayur-sayurnya ya Sumberejo. Kalau Pesanggrahan itu potensinya labu siam. Sisir seledri selain itu bunga, bunga banyak di Sidomulyo, Sumberejo *meh* gandeng Gunungsari banyak mawar sama sayur-sayur lengkap di Sumberejo, sayang di SP (Statistik Pertanian-pen) gak masuk. Kalau SP itu kan komoditasnya sudah ditetapkan. Bumiaji apel sama sayur dataran tinggi, kentang, kubis, wortel, brokoli, Giripurno tanaman pangan juga sayur. Sebenarnya Giripurno bisa ditanami padi 2 kali sampai 3 kali, tapi ternyata lebih untung ditanam sayur makanya sekarang lebih banyak ditanami sayur. Pandan sayure juga banyak, padi juga ada. Apel di kecamatan Bumiaji semuanya kayaknya ada. Pendem agak rendah jadi kalau ditanami sayur gak cocok, mungkin juga dari nenek moyangnya sudah menanam itu. Pasarnya rata-rata ke Surabaya, yang gak ke Surabaya ke Karangploso, Batu. Kalau organik ya yang di Sumberejo itu punya Pak Frans, sama Herbal” (wawancara tanggal 24 September 2012).

Hal senada disampaikan pula oleh mantan Mantri Tani Kecamatan Bumiaji yang menyatakan bahwa:

“Lek sayuran iku merata, meh kabeh deso onok sayure kecuali beberapa wilayah sing akeh apel, tapi ikupun iso ditanduri sayur misale ndek celah-celahe. Ngono iku wis terbentuk secara alami merhatekno komoditas sing ditandur ndek kono, onok pisan sing sengojo ditandur ngikuti permintaan pasar, nyesuekno karo agroekosistem, trus lekne wortel iku digawe rotasine kentang, gobis pisan, contone ndek Sumberbrantas”.

(Kalau sayuran itu merata, hampir semua desa terdapat tanaman sayur kecuali di beberapa wilayah yang banyak tanaman apel, tapi itupun dapat ditanami sayuran di celah-celahnya. Hal itu sudah terbentuk secara alami memperhatikan komoditas yang biasa ditanam disana, ada juga yang sengaja ditanam karena mengikuti permintaan pasar, menyesuaikan dengan agroekosistem, terus kalau wortel itu dipakai rotasi kentang, kubis juga, contohnya di Sumberbrantas. (Wawancara tanggal 25 September 2012).

Informasi tersebut menjelaskan bahwa wilayah Kota Batu sangat berpotensi untuk pengembangan komoditas hortikultura, terutama sayur. Hampir semua desa terdapat tanaman sayur, di beberapa wilayah ada jenis sayuran yang lebih mendominasi karena mengikuti permintaan pasar, pola rotasi / pergiliran tanaman, serta kesesuaian syarat tumbuh / agroekosistem untuk tanaman misalnya jenis sayuran dataran tinggi seperti kentang di Desa Sumberbrantas. Khusus untuk Desa Pendem lebih banyak ditanami padi karena memang termasuk wilayah Kota Batu yang berada pada ketinggian cukup rendah, yaitu sekitar 600 m dpl. Adapun untuk sayuran organik ada di Desa Sumberejo. Sedangkan pasar untuk komoditas sayuran tersebut banyak disalurkan ke Surabaya. Sebaran komoditas hortikultura tergambar pula dari data produksi hortikultura unggulan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.6

Dari data pada Tabel 5.6 diketahui bahwa Kecamatan Bumiaji merupakan daerah yang menghasilkan komoditas hortikultura paling banyak terutama untuk buah seperti apel, jeruk, alpukat dan tanaman hias meliputi mawar, krisan dan

angrek. Sedangkan untuk tanaman sayuran seperti kentang dan wortel sebagian besar dihasilkan oleh Kecamatan Bumiaji, namun seluruh kecamatan di Kota Batu memiliki potensi cukup merata untuk komoditas sayur lainnya. Adapun tanaman hias tidak banyak dihasilkan oleh Kecamatan Junrejo.

Tabel 5.6 Data produksi hortikultura unggulan di Kota Batu Tahun 2011

| Komoditas | Produksi (kw); Tanaman Hias (potong) | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | Bumiaji | Batu | Junrejo | Total |
| A. Sayur | | | | |
| Kentang | 42,044 | 4,167 | 4,631 | 50,842 |
| Wortel | 72,868 | 14,550 | 9,687 | 97,105 |
| Kubis | 8,878 | 22,299 | 18,076 | 49,253 |
| Sawi | 8,222 | 24,063 | 18,058 | 50,343 |
| Brokoli/Cauli | 6,418 | 58,969 | 20,110 | 85,497 |
| Bawang Merah | 6,128 | 14,277 | 15,116 | 35,521 |
| Bawang Daun | 7,178 | 29,806 | 25,764 | 62,748 |
| Tomat | 2,223 | 25,808 | 8,052 | 36,083 |
| <i>Jumlah</i> | <i>153,959</i> | <i>193,939</i> | <i>119,494</i> | <i>467,392</i> |
| B. Buah | | | | |
| Apel | 768,344 | 8,342 | 650 | 777,336 |
| Jeruk | 93,320 | 13,120 | 26,291 | 132,731 |
| Alpukat | 36,316 | 9,876 | 2,336 | 48,528 |
| <i>Jumlah</i> | <i>897,980</i> | <i>31,339</i> | <i>29,277</i> | <i>958,596</i> |
| C. Tanaman Hias | | | | |
| Mawar | 10,130,834 | 394,658 | 0 | 10,525,492 |
| Krisan | 16,200,281 | 7,605,009 | 0 | 23,805,290 |
| Angrek | 548,000 | 56,429 | 9,471 | 613,900 |
| <i>Jumlah</i> | <i>26,879,115</i> | <i>8,056,096</i> | <i>9,471</i> | <i>34,944,682</i> |

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu: Statistik Pertanian Tahun 2011

Sebagian besar pola tanam pertanian di Kota Batu adalah monokultur dengan pergiliran tanaman setiap musim tanam. Selanjutnya produk sayuran banyak dipasarkan melalui pengepul untuk memenuhi pasar lokal seperti di pasar Batu, pasar Karang Ploso serta pasar di luar Kota Batu dengan tujuan utama pasar-pasar di Kota Surabaya. Sebagian masyarakat petani di Desa

Torongrejo berprofesi pula sebagai pedagang sayur yang langsung memasarkan hasil panen sayur di lapak miliknya seperti di Pasar Gadang. Hal ini seperti dijelaskan oleh Kepala Desa Torongrejo sebagai berikut “Kalau petani di Torongrejo ini ya petani pedagang juga, jadi panennya bisa langsung dijual sendiri, kebanyakan juga punya stand di Pasar Gadang”. (Wawancara tanggal 25 September 2012).

Sedangkan untuk petani yang tidak berprofesi sebagai pedagang menjual hasil panennya kepada pedagang atau pengepul seperti dijelaskan oleh Bapak A, seorang petani sayur di Desa Torongrejo sebagai berikut :

“Hasil biasanya dijual ke pedagang, kalau bawang merah dijualnya kiloan bukan tebasan, kalau sistim tebasan itu biasanya jagung. Terus sama pedagang dijual ya ada untuk pasar pagi di Batu, ada yang ke Gadang, ke Karangploso. Kalau yang ke luar itu ya ke Surabaya”. (Wawancara tanggal 21 September 2012).

Selain untuk memenuhi kebutuhan sayuran di wilayah lokal seperti Malang Raya, dan pasar luar kota seperti di Surabaya, produk sayuran dari Kota Batu juga ada yang dipasarkan ke luar propinsi Jawa Timur seperti ke Kalimantan. Pemasaran ke luar Jawa umumnya dilakukan oleh pedagang besar terutama komoditas sayuran dengan nilai ekonomis tinggi seperti kentang dari Sumberbrantas. Hal ini seperti dijelaskan oleh Koordinator PPL Kecamatan Bumiaji sebagai berikut:

“Untuk pasar produk sayur petani di Batu ini umumnya untuk penuhi kebutuhan lokal seperti pasar sekitar Malang, pasar Karangploso. Tapi beberapa ada juga yang dibawa ke luar kota seperti Surabaya, bahkan seperti kentang itu sampai ke luar pulau misalnya ke Kalimantan. (Wawancara tanggal 8 Agustus 2012).

Adapun rantai pemasaran sayuran dari Kota Batu secara umum masih menggunakan jasa pengepul atau tengkulak dengan alasan kemudahan penjualan seperti disampaikan oleh Koordinator PPL Kota Batu sebagai berikut:

“Umumnya petani di Batu ini masih banyak yang menggunakan jasa pengepul untuk menjual hasil panennya. Kebanyakan sih milih yang pasti lakunya, kalau lewat pengepul kan gampang, cepat lakunya, nggak repot cari pembeli”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Dalam upaya pembangunan pertanian secara menyeluruh maka diperlukan kerjasama yang kuat antara berbagai struktur pelaksana pembangunan pertanian dari pemerintah serta masyarakat. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sebagai SKPD teknis pelaksana pembangunan pertanian didukung oleh sumber daya aparatur berupa Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) sebanyak 36 orang, dengan rincian 26 orang berstatus PNS dan 8 orang lainnya merupakan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP). Selain itu terdapat pula tenaga teknis dari Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur yaitu Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) sebanyak dua orang dengan wilayah kerja Malang Raya. Pendidikan rata-rata PPL adalah S1 atau sederajat.

Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dan teknologi maka diberikan penyuluhan melalui kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan). Sesuai Permentan No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, dijelaskan bahwa kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Pada dasarnya kelompok tani merupakan organisasi non formal di pedesaan yang ditumbuhkembangkan ‘dari, oleh, dan untuk petani’. Fungsi kelompok tani diantaranya adalah: a) sebagai kelas belajar antar anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta pengembangan kemandirian dalam berusaha tani; b) wahana kerjasama, yaitu untuk memperkuat kerjasama

diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain dalam memanfaatkan peluang dan mengatai persoalan dalam usaha taninya; c) sebagai unit produksi, yaitu bahwa usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Adapun gapoktan merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Kelompok tani yang berkembang diarahkan untuk bergabung dalam gapoktan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi tawar. Penggabungan dalam gapoktan dapat dilakukan oleh kelompok tani yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif, misalnya di wilayah administratif desa/kecamatan. Fungsi gapoktan meliputi:

- 1). Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga);
- 2) Penyediaan sarana produksi pertanian (pupuk bersubsidi, kualitas, kontinuitas dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya;
- 3) Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/pinjaman kepada para petani yang memerlukan;
- 4) Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, grading, pengepakan dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah;

- 5) Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani kepada pedagang/industri hilir.

Adapun kelompok tani dan gapoktan di Kota Batu disajikan dalam Tabel 5.7

Tabel 5.7 Data kelompok tani di Kota Batu tahun 2011

| Jenis Kelompok Tani | Jumlah di Tiap Kecamatan | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------|---------|
| | Bumiaji | Batu | Junrejo |
| Kelompok Tani | | | |
| a. Pra Kelompok Tani | - | 3 | - |
| b. Kelompok Tani Pemula | 78 | 52 | 26 |
| c. Kelompok Tani Madya | 10 | 4 | 7 |
| d. Kelompok Tani Lanjut | 9 | 9 | 12 |
| Jumlah | 97 | 68 | 45 |
| Kelompok Tani Aktif | 63 | 68 | 44 |
| Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) | 9 | 9 | 7 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Dari data kelompok tani tersebut diketahui jumlah kelompok tani sebanyak 210 kelompok dengan jenis kelompok tani paling banyak adalah kelompok tani pemula. Dari 210 kelompok tani tersebut terdapat 175 kelompok yang aktif melakukan kegiatan. Sedangkan gapoktan berjumlah 25 kelompok tersebar di seluruh desa dan kecamatan di Kota Batu. Setiap kelompok rutin melakukan pertemuan paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Pertemuan kelompok dihadiri oleh anggota kelompok dan PPL, seringkali dihadiri pula oleh pihak lain yang berkepentingan memberikan penyuluhan pertanian seperti produsen pupuk dan benih, kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, atau dimanfaatkan pula oleh SKPD lain untuk memberikan penyuluhan seperti dibidang kesehatan masyarakat. Berbagai informasi kegiatan dan penyaluran bantuan oleh dinas juga dilakukan melalui media pertemuan kelompok tani.

Potensi pertanian secara umum yang dimiliki oleh Kota Batu memungkinkan untuk dilakukan pengembangan pertanian organik atau langkah-langkah menuju organik. Hal ini paling tidak sudah dirintis oleh beberapa pihak yang menyadari pentingnya serta peluang yang dimiliki oleh produk organik tersebut. Propinsi Jawa Timur sudah ada beberapa perintis yang melaksanakan pertanian organik maupun dengan prosedur GAP untuk menuju ke organik. Beberapa pengusaha dan praktisi organik tersebut berlokasi di Kota Batu. Produk organik yang dihasilkan sebagian besar dipasarkan ke Surabaya dan Malang. Sedangkan produk yang afkir dijual pada pasar lokal. Gapoktan Vegory dan Kelompok Tani Tanuse telah menjalin kerjasama dengan PT. Kaliandra sehingga produksi diutamakan untuk memenuhi permintaan perusahaan tersebut. Pemasaran produk organik di Kota Batu tersebut seperti dijelaskan oleh Ketua Kelompok Tani Tanuse dan Ketua Gapoktan Vegory. Ketua Kelompok Tani Tanuse, menyatakan hal sebagai berikut:

“Kalau pemasaran punya saya untuk stok ke Kaliandra sama JJ agro, tapi yang grade B dijual dengan harga biasa ke pedagang atau siapa saja yang mau beli. Untuk tomat chery punya saya harga organik 15-20 ribu sedangkan harga biasa 2000”. (Wawancara tanggal 21 Agustus 2012).

Sedangkan ketua Gapoktan Vegory mengatakan bahwa “Untuk pasar sementara ini masih untuk memenuhi Kaliandra, selanjutnya Kaliandra kan masarkan untuk supermarket-supermarket besar itu”. (Wawancara tanggal 9 Agustus 2012).

Masih mengenai pasar produk organik, anggota Kelompok Tani Tanuse, Bapak M juga menyampaikan pemasarannya sebagai berikut:

“Lahan saya satu hektar, pasarnya sementara ini saya melayani supplier, juga nyetok di Tanuse sama Pak Frans, cuma permintaan di Pak Frans itu kan sedikit, jadi saya lebih banyaknya melayani

supplier itu tadi, sama ada orang-orang yang mbantu masarkan ke rumah sakit, perumahan”. (Wawancara tanggal 15 Agustus 2012).

Dari pernyataan Bapak M tersebut pemasaran produk organik dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan supplier dan penawaran secara langsung ke pihak-pihak yang cenderung peduli dengan keamanan produk seperti rumah sakit dan golongan menengah ke atas, misalnya penduduk yang tinggal di perumahan.

Dukungan sumber daya alam selain mendukung untuk pengelolaan pertanian dengan sistem organik juga memberi nilai tambah bagi Kota Batu melalui keindahan panorama alam dan menjadikannya sebagai kota wisata. Kondisi tersebut memberi peluang untuk pengembangan produk organik sebagai komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomis. Hal ini didukung oleh pernyataan mantan mantri tani Kecamatan Junrejo sebagai berikut:

“Dari segi iklim mendukung kan dataran tinggi maka OPT (organisme pengganggu tanaman-pen.) juga nggak separah di dataran rendah, selain itu kota wisata kan nanti bisa jadi produk unggulan, bisa jadi oleh-oleh”. (Wawancara tanggal 2 Agustus 2012).

Melalui pernyataan tersebut prospek Kota Batu sebagai kota wisata mempunyai peluang tersendiri bagi pasar produk organik untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam bentuk oleh-oleh produk khas Kota Batu. Kota Batu sudah sangat dikenal sebagai penghasil produk pertanian terutama komoditas hortikultura yang meliputi sayur, buah dan tanaman hias. Ketiga komoditi tersebut merupakan produk unggulan Kota Batu yang banyak diminati oleh wisatawan dari luar Kota Batu.

Potensi mengenai pasar produk organik juga disampaikan oleh koordinator PT. Herbal Estate sebagai berikut: “Diluar, pasar memang banyak, bahkan kalau disuruh memilih kita ini kekurangan barang, nggak tau kalau organik yang lain

bingung untuk masarkan, kalau di kita malah kekurangan”. (Wawancara tanggal 9 Agustus 2012). Pernyataan tersebut memberi gambaran adanya peluang penyediaan produk organik untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dimiliki oleh PT. Herbal Estate.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Kota Batu terdapat beberapa praktisi maupun pengusaha produk organik. Jika dapat dilakukan pendekatan dengan baik maka terbuka kemungkinan kerjasama berupa kemitraan dengan mereka untuk pemasaran produk organik yang dihasilkan. Beberapa pelaku usaha organik di Kota Batu serta wilayah lain di Jawa Timur ditampilkan pada Tabel 5.8

Pertanian organik idealnya dilakukan pada kondisi yang seminimal mungkin terjadi kontaminasi bahan kimia dalam usaha budidayanya. Masalah kontaminasi ini juga menjadi kendala pada pengembangan pertanian organik di beberapa daerah. Keberadaan sumber mata air menjadi salah satu hal utama untuk mengurangi kontaminasi produk terhadap bahan kimia karena berkaitan dengan tingkat kemurnian air yang digunakan. Data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan menunjukkan terdapat 138 sumber mata air di Kota Batu dengan rincian 35 sumber terletak di Kecamatan Batu, 78 sumber terletak di Kecamatan Bumiaji dan 25 sumber terdapat di Kecamatan Junrejo. Ketersediaan air juga difasilitasi oleh pemerintah melalui pembangunan jaringan irigasi di lokasi-lokasi penghasil produk hortikultura. Untuk memperlancar arus pemasaran dukungan pemerintah juga diberikan melalui pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi di seluruh wilayah secara bertahap.

Tabel 5.8 Pelaku usaha organik di Jawa Timur

| NO | NAMA | INSTITUSI/KELOM- POK/LEMBAGA | ALAMAT | KOMODITI YANG DIUSAHAKAN | LUAS LAHAN | TUJUAN PASAR | SERTIFIKASI |
|----|---------------------------------------|---|--|--|-----------------|---------------------|--|
| 1 | Ir.Danang Purchahyo | PT.Herbal Estate | Jl.Indragiri 7, Batu | Aneka Sayuran : Selada/lettuce, Caisim, Kailan, Kangkung, Horenzo (Bayam Jepang), Bayam merah, Brokoli, Tomat, Cabe dan Labu | 3 ha | Malang, Surabaya | ADA KAN-LSPO-005- IDN-002 |
| 2 | Ir.Hary Suyanto | CV.Kurnia Kitri Ayu | Jl. Rajawali no. 10 Malang Kebun : - Ds. Sumbersari Kec.Wonosari | Sayuran daun dan umbi organik | 1 ha | Surabaya | ADA 002-INOFICE- 2007 |
| 3 | - Frans Soetrisno - Mulyono | Gapoktan Sayuran Organik "VEGORI" | Jl.Indragiri VI/120, Batu Kebun : Ds.Sumberejo,Batu | Aneka Sayuran (Sawi, Caisim, Selada, Bayam merah, Horenzo, dll) | 1,5 - 4,5 ha | PIA Surabaya | - |
| 4 | - Dwi Prayitno - Jarot - Yunita | Kaliandra Sejati Foundation | Dsn.Gamoh, Ds.Dayurejo, Kec.Prigen Kab.Pasuruan | Sayuran,Buah, Padi, Palawija,empon-empon, Palapendem | 16 ha | Malang, Surabaya | ADA KAN-LSPO-005- IDN-012 |
| 5 | M.Muzaki | PPLH Seloliman | Ds.Seloliman, Kec.Trawas, Kab.Mojokerto Kebun : Kec.Pacet, Kec.Trawas, Kec.Ngoro | Sayuran, Buah, Padi | 5 ha | Surabaya | ADA KAN-LSPO-005- IDN |
| 6 | - Slamet - Sucipto | Brenjonk Lestari | Ds. Penanggungan, Kec. Trawas, Kabupaten Mojokerto 61375 | Sayuran, Buah lokal, Beras | 1,6 ha | Surabaya | ADA BRJ-001/4 PAMOR INDONESIA-A01 |

| NO | NAMA | INSTITUSI/KELOM- POK/LEMBAGA | ALAMAT | KOMODITI YANG DIUSAHAKAN | LUAS LAHAN | TUJUAN PASAR | SERTIFIKASI |
|----|-------------------------------|--|--|---|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 7 | Yudi Kurniawan | Ikatan Keluarga Alumni Magang Jepang-IKAMAJA | Ds. Ketapanrame, Kec. Trawas, Kabupaten Mojokerto | <i>Ashitaba</i> (seledri jepang) dan iles-iles | 40 ha | - Ekspor (Jepang) - PT.Ambico Sby. | ADA (Japan Agricultura Standart) |
| 8 | Edy Supriyanto | Petung Sewu Organik | Dsn. Petung Sewu, Ds.Jugo, Kec. Mojo, Kab. Kediri | Sayuran & Buah2an Sawi putih, Kailan, Brokoli, Bit merah, Lobak, Peterseli, Tomat dan Kabucha | 1 ha | Supermarket lokal | - |
| 9 | - Mardiana - Mei Ridhowati | KT. Vigur Asri | Perumahan Buring Satelit, Malang Kebun : Ds.Cemoro kandang, Kec.Kedung Kandang, Malang | Sayuran, jamur Tiram Putih | 1500 m ² | Supermarket, dll. | - |
| 10 | Indri A.Nurchahja | KOJA (Komunitas Organik Jawa Timur) | Jl. Teh 8, Petrokimia Gresik Kebun : Ds.dayurejo, Kec.Prigen Kab.Pasuruan | Sayuran daun & umbi (caisim, pakchoy,bayam, kangkung,wortel, bit merah) | 3500 m ² | Surabaya & sekitarnya | - |
| 11 | Ferry J.Ngantung | KOJA (Komunitas Organik Jawa Timur) | Dsn.Cepokolimo, Ds.Cepokolimo, Kec.Pacet, Kab.Mojokerto | Okra, Selada Kriting, Bayam Merah, Delima, Jambu Biji | 1 ha | Surabaya | - |
| 12 | Isnan | | Dsn.sawiran, Ds.Dawuhan Sengon, Purwodadi Kab.Pasuruan | Sayuran (Timun acar, Timun Jepang, BactLetus, Tomat, Brokoli, Lobak, Bead, Kubis Merah, Buncis) | 0,5 ha | Surabaya (Suplier/ Nofalindo) | - |

| NO | NAMA | INSTITUSI/KELOM- POK/LEMBAGA | ALAMAT | KOMODITI YANG DIUSAHAKAN | LUAS LAHAN | TUJUAN PASAR | SERTIFIKASI |
|----|---|---|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 13 | - Hj.Titiek Widayati - Efrida Hartini | | Jl.Bandara Juanda I BB 15- Perum Villa Gunung Buring , Malang | Sayuran, Olahan Hasil Organik,Buah | 800 m ² | Supermarket | - |
| 14 | Wagimin | | Sarangan, Magetan | Kangkung,sawi, bayem merah | | Pasar lokal (Hotel, RM) | - |
| 15 | Tohari | Hania dan Hanifah Farm | Ds. Nitikan, Kec.Plaosan, Kab.Magetan | Caisim, Sawi daging, Terong, Cabe, Kangkung, Tomat,dll | 1000 m ² | Pasar Lokal | - |
| 16 | | Kawasan Agrowisata Sayuran Organik | Ds. Klampar, Kec.Proppo, Kab.Pamekasan | Kangkung, Bayam, Cabe merah, Jagung manis | 2,1 ha | Pasar Lokal | - |
| 17 | Yajit Bustomi | KT. Tani Makmur /Gapoktan Rengganis | Ds. Sucolor, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso | Kentang | 1 ha | Pasar Lokal | - |
| 18 | | PT. Kusuma Agro Wisata | Jl. Abdulgani Atas, Batu | Paprika, Stroberi, Aneka Sayuran daun | 1 ha | Malang, Surabaya | - |
| 19 | Sukendri | Kelompok Tani Tanuse (Tanaman Menuju Sehat) | Ds. Sumberejo, Kec. Batu | Aneka Sayuran, terutama Tomat Chery | 1 ha | Surabaya, pasar lokal | ADA KAN-LSPO-005- IDN-018 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Berbicara mengenai pertanian organik maka tidak lepas dari keberadaan ternak sebagai sumber bahan organik. Teknologi pertanian organik merupakan kegiatan bertani selaras dengan alam yang mengutamakan pemanfaatan secara optimal lingkungan sekitar dan penggunaan bahan organik yang ramah lingkungan. Karena itu pertanian organik sangat terkait dengan penggunaan bahan organik termasuk pupuk kandang yang dapat dihasilkan dari kotoran ternak. Kondisi populasi ternak di Kota Batu cukup mendukung untuk memenuhi kebutuhan sumber pupuk organik. Hal ini didukung oleh penjelasan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota yang menyatakan sebagai berikut:

“Sebaran ternak di Batu cukup merata, memang kebanyakan peternakan disini sapi perah, kambing, kayaknya merata di semua kecamatan. Biasanya kotoran ternak memang biasa digunakan sebagai pupuk baik untuk keperluan sendiri maupun kelompok, sama mulai ada untuk bio gas”. (Wawancara tanggal 6 Agustus 2012).

PPL Desa sumberejo juga mengemukakan dukungan potensi peternakan sebagai penyedia bahan organik sehingga bila dilakukan perencanaan secara menyeluruh memungkinkan untuk penerapan pertanian secara mandiri oleh petani. Hal ini terungkap melalui pernyataan sebagai berikut :

“Kalau di Batu terutama di Sumberejo ini cukup potensi untuk melakukan organik, dari SDA mendukung pertama punya sumber mata air sendiri, kedua kalinya masalah ternak juga cukup banyak, otomatis kalau dibangun secara utuh bisa jalan sendiri. Lain lagi kalau misalnya gak ada mata air kemudian ternak nggak punya kan jadi mendatangkan bahan organik dari tempat lain kan nambah biaya lagi”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Untuk mengetahui potensi peternakan di Kota Batu dapat dilihat melalui Tabel 5.9. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah ternak di Kota Batu

cukup banyak untuk mendukung usaha pengembangan pertanian organik.

Adapun produksi pupuk organik disajikan pada Tabel 5.10

Tabel 5.9 Jumlah ternak tahun 2011 di Kota Batu

| No | Kecamatan | Jumlah Ternak (ekor) | | | |
|--------|-----------|----------------------|---------|-------|-----------|
| | | Unggas | Kambing | Sapi | Lain-lain |
| 1 | Batu | 92.810 | 2.284 | 3.622 | 1.570 |
| 2 | Bumiaji | 61.413 | 1.704 | 2.718 | 3.149 |
| 3 | Junrejo | 317.695 | 2.107 | 2.205 | 1.578 |
| Jumlah | | 471.918 | 6.095 | 8.545 | 6.297 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Tabel. 5.10 Produksi pupuk organik di Kota Batu tahun 2011

| No. | Uraian | Hasil |
|-----|-----------------|------------------|
| 1 | Produksi Pupuk | |
| | - Pupuk kandang | 71.267,44 ton/th |
| | - Kompos | - |
| | - Bokashi | 1.372 ton/th |
| 2 | Produksi Urine | |
| | - Sapi | 29.543.230 lt/th |
| | - Kambing | 3.893.150 lt/th |
| | - Kelinci | 5.600 lt/th |

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Petani merupakan pelaku utama dalam keberhasilan penerapan pertanian organik di Kota Batu. Peningkatan kualitas SDM petani menjadi hal yang penting dalam memperlancar transfer teknologi dan inovasi dalam budidaya pertanian. Berdasarkan informasi dari koordinator PPL diketahui sejak tahun 2008 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan SDM petani yang mengarah pada perilaku organik baik dari pihak pemerintah maupun swasta seperti ditampilkan pada Tabel 5.11.

Dari Tabel 5.11 tersebut masyarakat petani yang mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai teknologi organik dan pendukungnya memang masih

sangat sedikit yaitu hanya 5% dari jumlah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.

Tabel 5.11 Gerakan penerapan teknologi di Kota Batu

| No | URAIAN | TAHUN | JUMLAH |
|----|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Sekolah Lapang (SL) | 2008 - 2011 | 1.175 orang |
| 2. | Good Agriculture Practices (GAP) | 2008 - 2011 | 300 orang |
| 3. | Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) | 2010 - 2012 | 525 orang |
| 4. | System of Rice Intensification (SRI) | 2009 - 2011 | 12 unit |
| 5. | Cooperative Farming | 2008 | 150 orang |

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Dari hasil kajian wawancara, dokumen, observasi yang dilakukan peneliti, potensi yang dimiliki Kota Batu untuk mendukung penerapan pertanian organik antara lain:

- a. Ketersediaan tenaga kerja di bidang pertanian yang cukup besar
- b. Ketersediaan lahan untuk pengembangan pertanian organik, baik lahan kering berupa kebun atau pekarangan, serta lahan sawah
- c. Potensi ekonomis komoditas hortikultura yang merupakan produk unggulan spesifik Kota Batu seperti buah (apel, jeruk), sayuran dataran tinggi (kentang, kembang kol, kubis, wortel, bawang merah), dan tanaman hias potong (mawar, krisan)
- d. Potensi peluang pasar produk organik yang telah dirintis oleh pengusaha organik di Kota Batu
- e. Ketersediaan air melimpah karena memiliki 138 sumber mata air dan fasilitas jaringan irigasi

- f. Adanya potensi peternakan untuk mendukung penyediaan bahan organik
- g. Adanya kelompok tani yang cukup banyak dan aktif di setiap desa dan sebagian diantaranya sudah mengikuti sekolah lapang maupun kegiatan peningkatan SDM lainnya.

5.1.1.3 Penetapan tujuan dan strategi

Salah satu ciri dari perencanaan pembangunan adalah adanya usaha mencapai tujuan-tujuan pembangunan tertentu. Demikian pula rencana pengembangan pertanian organik di Kota Batu dilakukan dengan beberapa tujuan seperti diungkap melalui hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu menjelaskan bahwa pengembangan pertanian organik dilaksanakan terutama adalah untuk merubah cara berpikir masyarakat petani di Kota Batu dari pertanian konvensional (anorganik) menuju ke pertanian organik serta memanfaatkan peluang pasar mengenai produk organik melalui pernyataan yang disampaikan sebagai berikut:

“Mulai tahun 2011 kita telah meluncurkan, lakukan pertanian organik itu dengan maksud pertama untuk merubah mindset atau paradigma masyarakat dengan penggunaan pupuk untuk benar-benar mengarah ke organik, ya mungkin 3 tahun atau 4 tahun kita buat, tapi ini kan masih *go organic*, kedua karena memang berkaitan juga permintaan pasar dari anorganik sudah ke organik, maka kita berusaha untuk memenuhi peluang tersebut”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Dari informasi tersebut diketahui pula bahwa penentuan tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan prospek peluang kebutuhan produk organik, serta melihat kondisi yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengembangan pertanian organik di Kota Batu yaitu pola pikir petani tentang cara bertani. Pentingnya merubah pola pikir petani sangat terkait dengan keberhasilan rencana pengembangan pertanian organik mengingat dalam hal ini petani adalah pelaku utama di lapangan.

Selanjutnya terkait dengan masalah lingkungan, penerapan pertanian organik terbukti mampu membantu mengembalikan kondisi tanah yang rusak, karenanya harapan akan kembalinya kondisi tanah di Kota Batu menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai. Hal ini terungkap dari pernyataan salah seorang Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan mantan Mantri Tani Kecamatan Bumiaji. PPL Desa Sumberejo menyatakan bahwa “Kalau pertanian organik itu salah satu tujuan utamanya supaya bisa mengembalikan kondisi lahan pertanian yang sudah semakin berkurang kesuburannya”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Hal senada disampaikan oleh mantan Mantri Tani Kecamatan Bumiaji, yang menyatakan bahwa “*Lekne pertanian berkelanjutan sing ndek Kota Batu iki ditempuh melalui go organik iku tujuane kan memperbaiki lahan pertanian disamping harga produk organik sing duwur-a, Ke*”.(Kalau pertanian berkelanjutan yang di Kota Batu ini ditempuh melalui *go organik* itu tujuannya untuk memperbaiki lahan pertanian disamping harga produk organik yang tinggi). (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Kesejahteraan petani yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan merupakan tujuan akhir dari setiap upaya pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini pula yang menjadi salah satu tujuan dan ide dari perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu sebagaimana disampaikan oleh mantan Kepala Seksi Hortikultura yang juga memiliki peran besar dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu melalui pernyataan sebagai berikut:

“Jadi intinya pada akhirnya itu ingin meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan nilai jual serta menarik wisatawan. Konsep awalnya itu, trus apa yang perlu kita lakukan dengan pertanian? Kalau perluasan lahan jelas gak mungkin, terus intensifikasi lahan kita sudah melakukan itu, hampir semua lahan yang beririgasi teknis baik pasti dimanfaatkan untuk lahan

pertanian. Akhirnya kepikiran untuk meningkatkan di sektor pasar, nah yang punya pasar bagus yang harganya selisih kan barang organik, hal ini melihat beberapa petani di Kota Batu itu sudah ada yang melakukan organik, dan nilainya lumayan. Dengan luasan lahan yang sama nilai ekonomisnya lebih tinggi, dan dampaknya ke lingkungan lebih baik.” (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Hal senada disampaikan pula oleh Mantri Tani Kecamatan Junrejo sebagai berikut:

“Tujuannya adalah diharapkan pertanian organik ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, yaitu meskipun lahan yang dimiliki tidak begitu besar namun mampu menghasilkan produk yang baik dengan biaya produksi rendah dan harga lebih baik”. (Wawancara tanggal 2 Agustus 2012).

Hasil telaah pada beberapa dokumen perencanaan pembangunan di Kota Batu seperti RPJPD diketahui pula bahwa komitmen untuk menerapkan pertanian organik di Kota Batu dipilih dengan harapan mampu memberikan *image* bahwa produk pertanian asal Kota Batu lebih aman dikonsumsi karena bebas bahan kimia. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan pertanian sebagaimana disebutkan pada Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2007-2012 yang terkait dengan upaya pengembangan pertanian organik disebutkan pada tujuan ke 2, 3, 4, 7 dan 9, yaitu:

- memantapkan dan meningkatkan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) untuk memantapkan keamanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat;
- meningkatkan produksi yang berdaya saing tinggi untuk mencukupi pasar lokal, regional maupun nasional;
- mengembangkan usaha tani konservasi yang ramah lingkungan untuk mengatasi kemerosotan kualitas sumberdaya alam dan sumberdaya pertanian;

- meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produksi, produktivitas mutu hasil dan nilai tambah;
- meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budidaya lokal.

Dengan demikian beberapa tujuan yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian adalah: 1) merubah cara berpikir masyarakat petani di Kota Batu dari pertanian konvensional (anorganik) menuju ke pertanian organik serta memanfaatkan peluang pasar produk organik; 2) memperbaiki kondisi tanah yang rusak; 3) meningkatkan kesejahteraan petani yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan; 4) meningkatkan produksi yang berdaya saing tinggi dan aman dikonsumsi oleh masyarakat; 5) mendukung arah pembangunan Kota Batu sebagai kota wisata berbasis pertanian. Tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan pengembangan pertanian organik tersebut didasarkan pada adanya kenyataan kondisi pertanian yang terjadi di Kota Batu, keinginan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh produk organik.

Dari tujuan-tujuan tersebut selanjutnya dipilih cara-cara yang sesuai untuk mencapai tujuan. Kondisi tentang tujuan yang ingin dicapai menjadi dasar menentukan bentuk strategi yang akan dijalankan, hal ini tergambar dari informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kota Batu di atas bahwa untuk mencapai tujuan dalam hal merubah pola pikir masyarakat menuju organik maka cara yang digunakan adalah memasyarakatkan penggunaan pupuk organik melalui kegiatan pemberian bantuan pupuk organik. Selanjutnya

dalam sebuah wawancara dengan mantan Kepala Bidang Tanaman Pangan, Beliau mengungkapkan bahwa:

“Untuk menentukan strategi atau cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan harus dipahami dulu fakta masalah yang terjadi di lapangan itu seperti apa, baru kita bisa mencari solusi cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Gambaran pertanian di Batu ini memang kan sentra pertanian sayur ya utamanya sehingga lebih banyak menggunakan pertisida kimia itu luar biasa, contoh aja kubis, kentang yang saya juga mengalami jika tidak disemprot dua hari sekali tidak panen. Jadi kenapa penggunaan kimia itu begitu besar karena hama penyakitnya memang sudah luar biasa, sehingga saya dulu untuk pembentukan pertanian organik sampai mengikuti pelatihan NEP 2 kali di Jember, belajar mencari solusi mengatasi masalah HPT itu dengan cara organik, salah satunya ya NEP itu”. (Wawancara tanggal 25 September 2012).

Pemilihan cara untuk mencapai tujuan rencana dilakukan dengan terlebih dahulu memahami permasalahan yang terjadi di lapangan. Sebenarnya penerapan pertanian organik merupakan strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan pertanian yang terjadi di Kota Batu.

Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari beberapa bidang teknis yang memiliki tugas berbeda-beda. Diharapkan masing-masing bidang dapat bekerjasama memberi kontribusi untuk mendukung tercapainya tujuan menerapkan pertanian organik di Kota Batu. Hal ini terungkap oleh pernyataan mantri tani Kecamatan Junrejo yang mengatakan bahwa:

“Strateginya untuk pertanian organik ini terutama merubah pola pikir masyarakat atau *mindset* sudah dilakukan melalui SL-SL itu, kemudian penyediaan rumah-rumah kompos, terus kita juga lakukan pelatihan-pelatihan pembuatan agen hayati, pembuatan kompos. Semuanya dilakukan secara terpadu semua bidang terlibat”. (Wawancara tanggal 2 Agustus 2012).

Hal senada disampaikan oleh mantan Kasie. Hortikultura sebagai berikut:

“ Waktu awal-awal kegiatan organik ini kita laksanakan ada instruksi dari Kepala Dinas ke seluruh bidang di Dinas Pertanian supaya ada kontribusi ke organik ini, kan tiap bidang punya tupoksi sendiri misalnya siapa yang bisa untuk mengadakan bantuan ternak, saprodi dan lain-lain, itu juga kenapa di SK tim pelaksana

melibatkan semua bidang. Tapi dalam perjalanannya tidak semua mau beri kontribusi". (Wawancara tanggal 16 Oktober 2012).

Dari kedua pernyataan tersebut diketahui bahwa kegiatan pendukung sebagai bentuk atau cara untuk mencapai tujuan rencana disesuaikan pula dengan tugas dan fungsi bidang teknis yang ada di lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu, maka Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu terdiri dari 1 bidang sekretariat dan 4 bidang teknis yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan bidang pengembangan tanaman pangan, pengembangan hortikultura dan bimbingan usaha serta pengelolaan hasil
2. Bidang Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang peternakan dan perikanan
3. Bidang Teknologi dan Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang teknologi pengolahan dan pemasaran
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang perencanaan dan penatagunaan hutan dan perkebunan.

Adapun kegiatan pendukung pengembangan pertanian organik dari berbagai sumber pembiayaan ditampilkan pada Tabel 5.12

Tabel 5.12 Kegiatan pendukung Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu Tahun 2011

| No | Program dan Kegiatan | Sumber Dana | Bentuk Kegiatan | Ket |
|----|---|-------------|---|-------------------------------|
| 1. | Program Peningkatan Ketahanan Pangan: - Kegiatan Pengembangan Agribisnis & Agroindustri | APBD II | - Bantuan saprodi (bibit bermutu) - Sosialisasi prosedur sertifikasi tanaman - Pembangunan prasarana pertanian (screen house, jalan produksi, jalan usaha tani, jaringan irigasi) | Bidang TPH |
| | - Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Organik | APBD II | - Bantuan saprodi organik (benih, pupuk organik, pestisida hayati, agen hayati) | Bidang TPH |
| 2. | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan - Keg. Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna | APBD II | - Bantuan saprodi (pupuk organik, dan agen hayati untuk tanaman apel) - Rapat koordinasi dan pembekalan RPO (Regu Pengendali OPT) | Bidang TPH |
| 3. | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan - Keg. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah, Florikultura, Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan | APBN | - Sekolah Lapang GAP Buah, tanaman hias dan sayuran - Identifikasi Calon Kebun Registrasi - Penyusunan SOP | Bidang TPH |
| 4. | Keg. Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) | APBD I | - SLPTT Padi dan Jagung | Bidang TPH |
| 5. | Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna | APBD II | - Bantuan sarana prasarana produksi: APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik) | Bidang TPHP |
| 6. | Keg. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat | APBD II | - Bantuan ternak (sapi, kambing) | Bidang Peternakan |
| 7. | Keg. Pengembangan Budidaya Sapi Perah dan kambing perah | APBN | - Bansos untuk modal peningkatan populasi ternak sapi perah dan kambing perah | Bidang Peternakan |
| 8. | Keg. Perlindungan Mata Air | APBD II | - Pembangunan unit-unit perlindungan mata air konstruksi reservoir - Pengawasan sumber mata air | Bid. Kehutanan dan Perkebunan |
| 9. | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan | APBD II | - Demplot tanaman spesifik lokasi oleh PPL - Penyediaan sarana penyuluhan (Soil Test Kit) | Kelompok Jabatan Fungsional |

Sumber: Laporan Tahunan 2011 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Tujuan jangka panjang dari upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu adalah mengarah pada pembentukan kawasan pertanian organik yang selanjutnya dikembangkan menjadi salah satu tempat wisata berbasis pertanian (Agrowisata). Posisi saat ini yang dikembangkan adalah pada tahap awal yaitu usaha untuk memasyarakatkan pertanian organik melalui penerapan pertanian organik. Dengan demikian bentuk-bentuk kegiatan yang ditempuh saat ini adalah untuk menguatkan sektor hulu yaitu meningkatkan produksi hortikultura dengan cara budidaya mengarah ke organik (Go Organik).

Dengan demikian gambaran strategi yang digunakan dalam upaya pengembangan pertanian organik tersebut pada intinya adalah memasyarakatkan penerapan cara bertani yang mengarah pada pertanian organik serta menginisiasi pembentukan kawasan organik sebagai *pilot project*, yang mana hal ini diperkuat dengan arah kebijakan bidang pertanian sebagaimana disebutkan dalam Renstra Tahun 2007-2012 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yaitu pengembangan pertanian organik ditempuh melalui:

- a. Pembinaan Teknologi Pertanian Organik/Ramah Lingkungan;
- b. Pengembangan Desa Kawasan Pertanian Organik/Ramah Lingkungan

Kesimpulannya pada rencana pengembangan pertanian organik Penentuan tujuan diawali dengan memahami permasalahan dan kondisi yang terjadi di lapangan, serta prospek peluang kebutuhan produk organik untuk selanjutnya ditentukan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi tujuan yang ingin dicapai maka ditentukan strategi yang digunakan dalam upaya pengembangan pertanian organik tersebut. Pada intinya, strategi yang digunakan adalah memasyarakatkan penerapan cara bertani yang mengarah pada pertanian organik serta menginisiasi pembentukan kawasan organik sebagai *pilot*

project. Adapun kegiatan pendukung sebagai bentuk atau cara untuk mencapai tujuan rencana disesuaikan dengan tugas masing-masing bidang yang ada di lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang diterima.

5.1.1.4 Mekanisme / Tahap Perencanaan

Perencanaan pengembangan pertanian organik oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007-2012 Kota Batu yang menjadi acuan perencanaan pembangunan pertanian di Kota Batu. Visi pembangunan Kota Batu meletakkan sektor pariwisata dan pertanian menjadi sektor utama pembangunan. Disisi lain salah satu permasalahan yang disoroti dalam RPJMD adalah menurunnya kualitas air, suhu udara dan semakin parahnya degradasi tanah, karena itu berkembangnya pertanian organik/ramah lingkungan menjadi salah satu sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2007-2012. Sebagai penjabaran dari RPJMD, maka Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2007-2012 yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah dari SKPD. Salah satu kebijakan bidang pertanian yang disebutkan dalam Renstra tersebut adalah upaya untuk mengembangkan pertanian organik ramah lingkungan di wilayah Kota Batu. Hal ini ditempuh sebagai upaya mewujudkan visi, misi dan sasaran pembangunan pertanian dalam RPJMD, serta menjawab permasalahan pertanian di Kota Batu.

Mewujudkan pertanian organik memerlukan cukup banyak waktu dan berbagai tahap kegiatan. Hasil penelitian melalui wawancara dan penelusuran dokumen tidak berhasil menemukan pentahapan secara pasti tentang perencanaan pembangunan bidang pertanian organik di Kota Batu, serta rentang

waktu perencanaan yang dibutuhkan. Informasi yang diperoleh peneliti hanya mencakup bahwa upaya dan rencana yang dilakukan saat ini adalah tahap awal dari upaya pencapaian tujuan mewujudkan pertanian organik di Kota Batu seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Batu bahwa peluncuran kegiatan pertanian organik yang dirintis melalui pembentukan kawasan organik pada Tahun 2011 masih pada tahap *go organic* atau menuju organik yang rencananya akan dilaksanakan selama tiga atau empat tahun. Berikutnya hasil wawancara dengan mantan Kasie. Hortikultura yang juga konseptor pertanian organik disampaikan hal-hal sebagai berikut:

“Nah untuk Kota Batu kan tahapannya mengarah ke organik, go organik jadi yang sudah dilaksanakan adalah registrasi kebun...Untuk tahap awal itu kita mulai menggunakan pupuk organik sebanyak mungkin dan mengurangi pupuk kimia, mengurangi lho bukan menghilangkan... Setelah terbentuk itu kawasan organik nanti kita akan promosikan sebagai daerah pariwisata, jadi arahnya kesana”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Dari informasi tersebut diketahui bahwa tahap awal perencanaan adalah mengupayakan penerapan budidaya pertanian mengarah ke organik (Go Organik) yang dilakukan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan memperbanyak pupuk organik. Disamping itu dimulai pula pembentukan kawasan organik yang nantinya diharapkan pada jangka panjang dapat berkembang menjadi kawasan wisata pertanian organik. Kedua hal tersebut pada dasarnya merupakan bentuk nyata dan penjabaran dari kebijakan pengembangan pertanian organik sebagaimana disebutkan dalam Renstra.

Selanjutnya peneliti berusaha mengidentifikasi mekanisme upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu sesuai yang termuat pada Renstra Distanhut Tahun 2007-2012 yaitu ditempuh melalui dua strategi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

A. Pembinaan Teknologi Pertanian Organik/Ramah Lingkungan.

Strategi ini mengakomodir upaya pengembangan pertanian organik di seluruh wilayah Kota Batu. Penentuan bentuk kegiatan yang dilakukan mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan bidang pertanian pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yang dilakukan dengan mengedepankan aspirasi masyarakat melalui musrenbang sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sebagai berikut:

“Jadi setiap tahun kita itu kan merencanakan dan melaksanakan sesuai dengan tupoksi kita Dinas Pertanian dan Kehutanan, dengan arti pertanian dalam arti luas. Dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pun kita nggak akan memaksa membuat kegiatan *top down* ya, artinya kita berusaha mensinergikan apa yang kita rencanakan aspirasi masyarakat dari musrenbang-musrenbang desa sampai kecamatan sampai ke kota, tapi tetap mensinergikan dengan kegiatan dari propinsi dan pusat. Pusat punya RPJP kalau propinsi punya RPJMD Propinsi termasuk pula dari kementerian pertanian dalam arti luas, pertanian peternakan, perikanan”. (Wawancara tanggal 11 Oktober 2012).

Selanjutnya disampaikan bahwa:

“Kita itu kan setiap tahun itu kan ada musrenbang diikuti oleh bidang program, bidang program mencatat aspirasi itu terus kita infokan ke bidang-bidang, nah bidang-bidang menyerahkan kembali dalam bentuk usulan-usulan kegiatan yang mengakomodir aspirasi tersebut”. (Wawancara tanggal 11-10-2012).

Melalui kedua penjelasan tersebut diketahui bahwa proses penyusunan kegiatan diawali dengan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat hasil dari musrenbang yang dilakukan oleh sub bagian penyusunan program. Selanjutnya rekapitulasi hasil musrenbang dari mulai tingkat desa sampai kota di informasikan ke masing-masing bidang teknis sesuai dengan tupoksinya. Berikutnya bidang teknis menyusun usulan kegiatan dengan mengakomodir hasil musrenbang dan mensinergikan dengan kegiatan dari propinsi (sumber dana APBD I) maupun kegiatan pusat/kementerian (sumber dana APBN). Mekanisme

selanjutnya adalah penyusunan program dan kegiatan untuk kurun waktu satu Tahun anggaran misalnya penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Mekanisme penyusunan program dan kegiatan secara garis besar disampaikan oleh staf sub bagian penyusunan program sebagai berikut:

“Musrenbang kan kecamatan dulu, masing-masing kecamatan ikut, nah usulan-usulan itu dimasukkan dalam SKPD istilahnya untuk renja lah, nah semua usulan itu semua SKPD pasti 100 % memasukkan usulan-usulan itu, tapi ketika sudah berjalan pembuatan KUA PPAS nah disitu ada penyesuaian dengan kebijakan *top down*, ada pembatasan pagu, ada prioritas-prioritas, sehingga usulan dari musrenbangnya dikurangi, *top down* itu masalah kebijakan, misalnya Pak Wali pingin melakukan itu, nah otomatis harus mengurangi usulan yang dari musrenbang itu, ngepas-ngepasno pagu lah istilaha gitu, jadi nanti kira-kira yang masuk itu 30, 40 % paling, itu ae wis buagus”. (Wawancara tanggal 11 Oktober 2012).

Secara teknis untuk merealisasikan bentuk kegiatan pendukung pengembangan pertanian organik dilakukan mengikuti mekanisme tertentu sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang menaunginya. Misalnya kegiatan dengan sumber dana APBN maka untuk segala hal terkait pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada pedoman yang diberikan, baik berupa pedoman umum maupun petunjuk pelaksanaan. Dalam hal ini dinas hanya bertindak sebagai pelaksana lapangan, yaitu mengelola kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan misalnya mengenai siapa yang diusulkan sebagai penerima kegiatan (CPCL) serta bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Terkait hal ini pihak dinas dapat menyesuaikan CPCL kegiatan dengan hasil musrenbang, proposal kelompok tani, maupun usulan dari petugas penyuluh lapang. Hal tersebut berlaku pula untuk kegiatan dari propinsi yang menggunakan sumber dana dekonsentrasi. Hal ini seperti dijelaskan oleh staf Bidang Tanaman Pangan dan

Hortikultura yang juga menjabat bendahara pengeluaran kegiatan untuk sumber dana APBN menyatakan bahwa:

“Kalau kegiatan APBN itu kita cuma sebagai pelaksana saja, aturannya sudah ada dari pusat, berupa pedum sama juklaknya, kota tinggal buat juknis untuk pelaksanaan di lapang. Tugas kita menentukan petani penerima bantuan melalui CPCL yang dibantu oleh PPL”. (Wawancara tanggal 31 Agustus 2012).

Hal senada disampaikan oleh staf pengelola kegiatan APBN dari bidang

Teknologi Pengolahan Hasil dan Pemasaran, sebagai berikut:

“Kalau kegiatan yang dari sumber dana APBN kita kan posisinya pelaksana aja, menentukan petani dan lokasi kegiatan. Untuk penentuan CPCL kita minta bantuan PPL yang tau kondisi di lapang, tapi kita dari bidang biasanya juga ada survei lapangan sendiri, sama dari proposal-proposal kelompok tani yang masuk itu jadi pertimbangan kita juga, terus hasil-hasil musrenbang”. (Wawancara tanggal 14 September 2012).

Untuk mendukung terakomodasinya kebutuhan terkait pengembangan pertanian organik maka kepala dinas saat itu mengamanatkan kepada seluruh bidang untuk memberikan kontribusi pada upaya tersebut melalui alokasi kegiatan yang dapat mendukung rencana pengembangan pertanian organik di Kota Batu sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Kepala Bidang Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan Pemasaran menyampaikan hal sebagai berikut: “Kalau kontribusi dari bidang TPHP itu bentuknya pemenuhan infrastruktur pendukung produksi pertanian, misalnya jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani”. (Wawancara tanggal 8 Agustus 2012). Sedangkan dukungan dari bidang Kehutanan dan Perkebunan adalah berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga sumber mata air seperti disampaikan oleh Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Konservasi Hutan sebagai berikut: “Kalau dari Bidang Kehutanan yang bisa dilakukan untuk mendukung pertanian organik itu ya melalui upaya melindungi

kelestarian sumber mata air yang ada di Kota Batu mbak, melalui usaha konservasi hutan”. (Wawancara tanggal 3 September 2012).

Pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat baik pada daerah yang ditetapkan sebagai kawasan organik maupun daerah lainnya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kegiatan pengembangan kawasan organik yang dilakukan pada tahap awal berfokus pada komoditi sayuran, padahal masyarakat petani secara umum juga membudidayakan komoditas lain seperti tanaman hias dan buah-buahan. Disisi lain rencana pembangunan pertanian oleh Kementerian Pertanian melalui Dirjen Hortikultura memiliki program kegiatan yang mendukung pengembangan pertanian organik untuk komoditas hortikultura baik tanaman sayuran, tanaman hias, maupun buah-buahan.

B. Pengembangan Desa Kawasan Pertanian Organik/Ramah Lingkungan

Upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu juga ditempuh secara khusus melalui strategi pengembangan desa kawasan pertanian organik/ramah lingkungan yang diwujudkan melalui upaya pembentukan kawasan pertanian organik dimulai sekitar tahun 2011. Adapun tugas perencanaan dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, khususnya seksi Hortikultura. Hal ini terkait dengan salah satu tugas pokok dan fungsi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu perencanaan bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh Kepala seksi hortikultura saat itu mendapat mandat dari kepala dinas untuk menyusun jadwal rencana pelaksanaan pengembangan kawasan pertanian organik yang memuat rencana pengembangan kawasan pertanian organik berupa tahapan

kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan pertanian organik mulai dari persiapan perencanaan, pelaksanaan di lapangan hingga tahap akhir mengenai monitoring dan pengawasan. Jadwal selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.13.

Dalam rangka perencanaan pengembangan kawasan pertanian organik tersebut dilakukan koordinasi dan konsultasi secara formal dan informal dengan beberapa pihak yang terkait sesuai dengan penjelasan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sebagai berikut:

“Jadi awalnya orang-orang yang memang sudah punya *background* organik seperti Pak Frans, Herbal, apa itu, praktisi, awalnya kita ajak *share* dulu secara informal sebelum ke masyarakat, termasuk BPTP dan akademisinya dari Brawijaya, setelah itu baru kita sosialisasi dulu ke teman-teman kita ke PPL, mantri tani, baru sosialisasi ke masyarakat (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa koordinasi awal dilakukan secara informal antara pihak dinas dengan pihak-pihak ahli tentang pertanian organik seperti perguruan tinggi, balai penelitian, praktisi dan pengusaha swasta yang bergerak di bidang pertanian organik. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi, saran dan kepastian kerjasama pendampingan dengan pihak-pihak tersebut. Koordinasi selanjutnya dilakukan dengan pihak internal dinas meliputi para PPL, POPT, bidang teknis, dan mantri tani, untuk membahas teknis rencana pengembangan kawasan serta menyamakan persepsi tentang konsep kawasan yang dikembangkan. Adapun koordinasi dengan masyarakat dilakukan dalam rangka memperkenalkan kegiatan dan menjaring aspirasi. Diketahui pula bahwa koordinasi yang dilakukan merupakan permulaan dari tahap perencanaan yang dilakukan dan merupakan bagian dari upaya pematangan konsep kawasan yang akan dikembangkan.

Tabel 5.13 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Organik Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu TA. 2011

| NO | KEGIATAN | JANUARI | | | | FEBUARI | | | | MARET | | | | APRIL | | | | MEI | | | | JUNI | | | | JULI | | | | AGUSTUS | | | | SEPTEMBER | | | | OKTOBER | | | | NOVEMBER | | | | DESEMBER | | | |
|----|-------------------------------|---------|----|-----|----|---------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-----|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|---------|----|-----|----|-----------|----|-----|----|---------|----|-----|----|----------|----|-----|----|----------|--|--|--|
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | | | |
| 1 | Pematangan Konsep Kawasan | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pembentukan Tim pelaksana | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Mapping Lokasi | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Sosialisasi ke petani | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Penentuan Komoditas unggulan | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Identifikasi masalah kawasan | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Penentuan Paket Teknologi | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penyusunan pola tanam kawasan | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Sosialisasi ke petani II | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Persiapan Lahan | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Tanam perdana | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pelaksanaan budidaya | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 13 | Pembangunan sarana pendukung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 14 | Pendampingan teknologi | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 15 | Pasca Panen dan Pemasaran | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 16 | Monev dan pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 17 | Promosi Kawasan | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2011

Melalui koordinasi tersebut dibicarakan pula mengenai alternatif pemilihan lokasi berdasarkan identifikasi potensi desa. Identifikasi yang dilakukan misalnya tentang komoditas unggulan, penawaran kepada PPL mengenai kesanggupan untuk pelaksanaan di lapang termasuk kesiapan lahan dan petani/kelompok tani. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh mantan Mantri Tani Kecamatan Batu, sebagai berikut:

”Pemilihan lokasi untuk *pilot project* ditunjuk Sumberejo karena Sumberejo ada pionernya, trus di Junrejo yang siap mana, waktu itu PPL Torong yang siap, PPL wilayah lain belum siap. Kalau Bumiaji karena kita ngarahnya salah satunya ke kentang maka di Bumiaji ditentukan di Sumberbrantas”. (Wawancara tanggal 2 Agustus 2012).

Mantan Kepala Seksi Hortikultura juga menjelaskan dasar pemilihan komoditas dan lokasi melalui pernyataan berikut:

“Jadi waktu itu kan targetnya kita komoditas sayuran karena sayur yang paling banyak diproduksi, akhirnya ditetapkan di tiga lokasi di tiga kawasan itu lha ternyata dilapangan ada perkembangan bahwa di Pendem itu sudah mulai ke prinsip-prinsip pertanian ramah lingkungan di padi itu, akhirnya kita pakai juga Pendem untuk tanaman padi (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Lebih lanjut Koordinator Petugas Penyuluh Lapang (PPL) Kota Batu yang menjabat sebagai Sekretaris Tim Pelaksana Pengembangan Kawasan Pertanian Organik di Kota Batu menjelaskan bahwa:

“Sebelumnya kita melakukan penggalian data. Penggalian data itu termasuk luasan potensi. Potensi wilayah disana termasuk SDM-nya, termasuk komoditasnya, ya komoditas itu kemarin kan ada beberapa potensi di sana seperti di Torong itu kan ada bawang merah, jagung manis dalam satu kawasan, kalau Sumberbrantas khusus kentang. Intinya daerah yang memiliki komoditas spesifik, yaitu Sumberbrantas kentang, Torongrejo bawang merah, Sumberejo sayur organik terutama sayur eksotik, Pendem padi. Selain itu juga mempertimbangkan potensi dukungan alam, dan kondisi masyarakat, yaitu budaya masyarakat apakah sudah mengenal organik” (wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Dari ketiga penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa komoditas yang dikembangkan serta lokasi pengembangan ditentukan dengan mempertimbangkan potensi wilayah di masing-masing kecamatan baik potensi alam, komoditas spesifik yang diunggulkan dan kesiapan SDM pelaksana. Dari empat lokasi yang ditentukan sebagai kawasan pengembangan, tiga lokasi untuk pengembangan sayur organik yaitu Desa Sumberejo Kecamatan Batu, Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo dan satu lokasi untuk kawasan padi organik di Desa Pendem Kecamatan Junrejo.

Keputusan untuk membentuk empat titik lokasi kawasan pengembangan pertanian organik yang tersebar pada tiga kecamatan di Kota Batu dijelaskan oleh mantan Kepala Seksi Hortikultura sebagai berikut:

“Jadi sebenarnya kita ingin membandingkan kawasan mana yang paling baik selain satu, prinsip keadilan bagi masing-masing kelompok tani. Kalau dicermati dari ketinggian tempat kan masing-masing punya ketinggian berbeda, yang dianggap rendah di Torong, medium di Sumberejo dan yang paling tinggi di Sumberbrantas. Nah ini ingin membandingkan sebenarnya ketinggian mana yang paling efektif untuk mengembangkan sayur organik dari segi biaya, produksi nanti kan bs kelihatan disitu. Selama ini belum ada kajian yang menyatakan di ketinggian sekian organik itu bagus. Kalau kita nggak mau *ngompare* maka kita nggak akan tahu”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Hasil wawancara di atas menunjukkan pertimbangan ditentukannya lokasi pengembangan di masing-masing kecamatan adalah untuk alasan keadilan bagi kelompok tani di setiap kecamatan serta untuk melakukan perbandingan hasil pelaksanaan kegiatan pada keempat lokasi pengembangan. Harapannya dapat diketahui lokasi mana yang paling tepat untuk pengembangan kawasan pertanian organik berdasarkan salah satunya posisi ketinggian tempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PPL di masing-masing kawasan, peneliti mengetahui beberapa karakteristik dari desa tersebut yang menjadi salah satu alasan pemilihan lokasi oleh PPL setempat.

Hasil wawancara dengan Koordinator PPL Kecamatan Bumiaji yang menyatakan bahwa:

“Pemilihan lokasi untuk kawasan organik kemarin sudah mempertimbangkan aspek sosial, yaitu mayoritas penduduk Sumberbrantas itu penduduk asli dan berprofesi sebagai petani sehingga memudahkan untuk dilakukan pembinaan, dari segi ekonomi di Bumiaji terutama Sumberbrantas mayoritas komoditas yang dibudidayakan mempunyai nilai ekonomis tinggi karena banyak dibutuhkan konsumen, yaitu kentang, secara lingkungan Sumberbrantas merupakan daerah dekat mata air, dekat hutan, merupakan daerah hulu sehingga tingkat kontaminasi bahan kimia lebih sedikit. Disamping itu waktu itu saya juga mengkondisikan lokasi yang dikembangkan terkait dengan kegiatan PLA (Pengelolaan Lahan dan Air-pen), yaitu menanam pohon kesemek sebagai border dan upaya konservasi hutan. (Wawancara tanggal 8 Agustus 2012).

Adapun PPL Desa Sumberejo memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kalau di Batu terutama di Sumberejo ini cukup potensi untuk melakukan organik, dari SDA mendukung pertama punya sumber mata air sendiri, kedua kalinya masalah ternak juga cukup banyak, otomatis kalau dibangun secara utuh bisa jalan sendiri. Lain lagi kalau misalnya gak ada mata air kemudian ternak nggak punya kan jadi mendatangkan bahan organik dari tempat lain kan nambah biaya lagi. Kalau masyarakat saya pikir cukup mendukung tapi disisi lain tuntutan masalah pemasaran. Disumberejo kan minimal ada beberapa anggota kelompok taninya yang sudah melakukan itu, tapi katakanlah misalnya belum organik murni tapi sudah melakukan, masyarakat di kawasan itu beberapa anggota kelompok tani itu sendiri”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Sedangkan PPL Desa Torongrejo mengatakan bahwa:

“Dipilih Torongrejo karena di Torongrejo kan tingkat penggunaan pestisida maupun pupuk kimianya kan sangat tinggi, karena itu untuk merubah itu kebijakan dari dinas dipilih Torongrejo itu agar supaya disana bisa berubah”. (Wawancara tanggal 12 September 2012).

Adapun pernyataan PPL Desa Pendem adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk Pendem kenapa kok Pendem, kebetulan Pendem itu termasuk salah satu sentra lumbung pangannya Kota Batu karena memang kawasan padi hamparan itu Pendem. Memang di Junrejo kan ada dua kawasan, Pendem dan Torong, jadi Pendem salah satunya itu lumbung pangannya Kota Batu”. (Wawancara tanggal 31 Agustus 2012).

Berdasarkan keempat pernyataan tersebut diketahui bahwa masing-masing PPL juga memiliki pertimbangan tersendiri terkait lokasi yang tepat untuk dilakukan penerapan pertanian organik. PPL Desa Bumiaji misalnya telah mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta keterkaitan dengan kegiatan lain oleh dinas, yaitu Pengelolaan Lahan dan Air (PLA). PPL Sumberejo lebih menekankan pentingnya keberadaan pihak-pihak yang sudah mengenal pertanian organik serta dukungan potensi temak. PPL Torongrejo memperhatikan kurangnya pengetahuan petani di wilayahnya sehingga memandang perlu petani binaannya terlibat dalam kegiatan pengembangan kawasan pertanian organik tersebut sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dan merubah pola pikir petani. Sedangkan PPL Desa Pendem memperhatikan potensi Desa Pendem sebagai sentra tanaman padi sehingga perlu untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Masing-masing desa dan PPL memiliki karakteristik berbeda namun harapannya sama yaitu mewujudkan terlaksananya pertanian organik di Kota Batu.

Selanjutnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan maka dibentuk tim pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui surat keputusan No. 180/745/KEP/422.110/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Tim Pelaksana Teknis Pengembangan Kawasan Organik. Kewajiban utama seluruh anggota tim adalah memfasilitasi terlaksananya upaya pengembangan pertanian

organik secara teknis di lapangan sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Susunan tim beragam terdiri dari akademisi, praktisi, perwakilan dinas, serta perwakilan Gapoktan. Meskipun demikian tim pelaksana terutama PPL yang wilayah binaannya ditentukan sebagai kawasan organik telah bekerja meskipun surat keputusan mengenai panitia pelaksana teknis secara administrasi belum dikeluarkan. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan waktu untuk penerapan di lapangan.

Setelah ditentukan lokasi desa yang akan dikembangkan sebagai kawasan, maka dilakukan identifikasi calon petani dan calon lahan (CPCL) serta komoditas yang ingin ditanam oleh petani. Identifikasi dilakukan oleh tim pelaksana teknis lapangan berkoordinasi dengan aparat desa dan Ketua Gapoktan. Hal ini sesuai dengan penjelasan PPL Desa Torongrejo, yang mengatakan sebagai berikut:

“Kita sudah lakukan pemetaan dulu, kira-kira dari petak sini sampai ke sana nanti khusus untuk organik terus dari sini kesana untuk pola petani, pemetaannya disitu. Pertimbangannya ada, kalau lahan untuk organik lebih diatas dengan pertimbangan nanti pencemaran lahan yang diatas kan kurang, kalau dibawah kan banyak, termasuk pintu masuk pertama untuk airnya. Kalau pemetaan lahan pertimbangannya ya air yang pertama masuk terus orang-orang disekitarnya mau. Kalau pemetaan sudah pas, saya lewat kepala desa juga masukan dari dinas kira-kira kalau disini bagaimana”. (Wawancara tanggal 12 September 2012).

Setelah diperoleh gambaran lokasi dan komoditas yang akan dikembangkan maka langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini petani yang lahannya berada dalam rencana lokasi kawasan pengembangan. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan maksud menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan serta mencari aspirasi dari petani meliputi kesediaan, luas lahan, serta jenis komoditas yang akan

ditanam. Hal ini diketahui melalui pernyataan mantan Kasie. Hortikultura, sebagai berikut:

“Jadi fungsinya sosialisasi itu kita memperkenalkan program dan menawarkan siapa yang bersedia lahannya digunakan. Tidak semua petani di kawasan itu menerima, yang tidak mau ya tidak kita libatkan” (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Dari pernyataan tersebut diketahui pula bahwa tidak semua petani bersedia menerapkan konsep pertanian organik yang ditawarkan. Bagi petani yang tidak bersedia, maka tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya peneliti mendapati berkas Berita Acara Sosialisasi Pengembangan Kawasan Pertanian Organik yang ditulis oleh sekretaris tim pelaksana teknis kegiatan. Berita acara sosialisasi tanggal 2 Maret 2011 menyebutkan kesepakatan antara pihak dinas dengan peserta sosialisasi yaitu petani Desa Sumberbrantas yang lahannya termasuk dalam kawasan pengembangan. Kedua pihak sepakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan organik di Desa Sumberbrantas dengan komoditas yang ditanam adalah kentang, wortel dan sawi putih.

Kawasan pengembangan pertanian organik di Desa Pendem, sesuai dengan Berita Acara Sosialisasi tanggal 17 Maret 2012 menyebutkan bahwa 1) para petani yang lahannya tergabung dalam pengembangan kawasan pertanian organik bersedia melaksanakan program tersebut sesuai dengan petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu; 2) komoditas yang ditanam adalah padi non hibrida varietas Ciherang, dengan pola tanam serempak dalam satu kawasan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2011.

Untuk Desa Torongrejo, berdasarkan Berita Acara Sosialisasi tanggal 19 April 2011 menghasilkan kesepakatan bahwa petani yang tergabung dalam pengembangan kawasan bersedia melaksanakan kegiatan tersebut dengan

komoditas yang ditanam adalah bawang merah, brungkul (kembang kol), bawang daun dan jagung manis.

Sedangkan untuk desa Sumberejo tidak ditemukan Berita Acara Sosialisasi, namun berdasarkan data usulan petani mengenai kebutuhan sarana produksi serta penjelasan mantan Mantri Tani Kecamatan Batu diketahui komoditas yang disepakati adalah brokoli, seledri, cabai, dan tomat. Adapun penjelasan secara ringkas berita acara sosialisasi dan usulan kebutuhan saprodi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, luas kawasan 15 ha, komoditas yang dikembangkan antara lain kentang, wortel dan sawi putih
2. Desa Sumberejo Kecamatan Batu, luas kawasan 10 ha dengan komoditas yang dikembangkan antara lain seledri, brokoli, cabe dan tomat
3. Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo, luas kawasan 10 ha, dengan komoditas bawang merah, kembang kol, bawang daun dan jagung manis
4. Desa Pendem Kecamatan Junrejo, luas kawasan 10 ha, dengan komoditas yang dikembangkan tanaman padi

Setelah didapatkan data calon petani dan calon lahan (CPCL) maka dilakukan identifikasi masalah kawasan. Identifikasi masalah kawasan dilakukan sebagai dasar penentuan paket teknologi budidaya dan alokasi bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan. Bentuk identifikasi masalah kawasan misalnya pengambilan contoh tanah pada masing-masing kawasan untuk dilakukan analisis tanah. Hal ini dijelaskan oleh mantan Kasie. Hortikultura sebagai berikut:

“Di keempat titik itu dilakukan analisa tanahnya per lokasi. Hasil analisa tanah itu adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi tanahnya terus apa yang harus kita lakukan terkait dengan paket teknologi yang akan kita berikan”. (Wawancara tanggal 2 Agustus 2012).

Setelah rangkaian tahap sebelumnya dilakukan maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan di lapangan. Untuk keperluan pelaksanaan budidaya

tanaman pihak dinas mengalokasikan bantuan sarana produksi kepada petani pelaksana berupa bibit, pupuk organik, dan pestisida organik.



Gambar 5.2 Penyerahan Bantuan Sarana Produksi Organik berupa Bibit oleh Walikota Batu kepada Perwakilan Petani (Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2011)

Selama kegiatan budidaya tanaman dilakukan pendampingan kepada petani. Pendampingan idealnya dilakukan secara bersama-sama antara PPL, POPT, dan pihak akademisi. Fungsi pendampingan adalah mengontrol pelaksanaan budidaya tanaman oleh petani apakah telah sesuai dengan paket teknologi yang disampaikan, serta memberi saran terkait masalah yang terjadi selama proses budidaya tanaman. Selain pendampingan pada tahap pelaksanaan dilakukan pula pembangunan prasarana pendukung seperti jalan usaha tani maupun perbaikan jaringan irigasi. Penjelasan mengenai tahap pelaksanaan seperti disampaikan oleh mantan Kasie Horti sebagai berikut:

“Tahap eksekusi di lapangan yaitu budidaya tanaman kita ada paket teknologi, jadi apa yang mereka lakukan di lahan harus sesuai dengan arahan paket teknologi yang kita berikan. Kita akan bangun

sarana pendukungnya, jika daerah tersebut butuh jalan usaha tani maka kita juga akan bangun jalan usaha tani, irigasinya kita benahi, terus pendampingan ini terus, kan kita punya pendamping masing-masing kawasan, ya kan kita punya timnya termasuk PPL”. (Wawancara tanggal 2 Agustus 2012).

Pendampingan yang dilakukan terutama oleh PPL dan anggota tim pelaksana teknis lainnya sekaligus merupakan kegiatan monitoring. Laporan mengenai perkembangan kegiatan di lapangan dilakukan melalui koordinasi serta rapat-rapat rutin dengan kepala dinas sebagai penanggung jawab kegiatan. Sedangkan evaluasi akan dilakukan setelah pelaksanaan lapang di seluruh kawasan selesai, dan diagendakan pada tahun 2012 sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan berikut ini:

“Setelah *pilot project* pada tahun 2011, tahun 2012 ini sebetulnya ada evaluasi, kita lakukan evaluasi bekerjasama dengan Brawijaya, hasil evaluasi itu kita jadikan pijakan untuk tahun 2013, kekurangan kita itu apa sih di tahun 2011”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Dari penjelasan tersebut diketahui pada tahun 2012 ini akan dilaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan kawasan organik yang telah dilakukan pada Tahun sebelumnya. Harapannya agar dapat diketahui kekurangan pelaksanaan pada Tahun 2011 sebagai masukan dalam perencanaan pengembangan kawasan pertanian organik periode berikutnya.

Dari uraian keseluruhan hasil wawancara tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa perencanaan pengembangan kawasan pertanian organik di Kota Batu dilakukan dalam tiga tahap utama, yaitu:

1. Tahap persiapan, yang didalamnya meliputi kegiatan:
 - a. Koordinasi dan konsultasi, meliputi:
 - Konsultasi pematangan konsep kawasan dan kesediaan kerjasama dengan akademisi, praktisi, balai penelitian

- Koordinasi internal dengan PPL, mantri tani, POPT, dan struktural dinas untuk menyamakan persepsi dan teknis pelaksanaan di lapang
 - b. Identifikasi dan penggalian data, meliputi:
 - identifikasi komoditas yang akan dikembangkan, dilakukan berdasarkan komoditas yang dinilai memiliki keunggulan ekonomis
 - identifikasi lokasi rencana kawasan pengembangan, dilakukan berdasarkan potensi komoditas sayur unggulan, potensi SDM (masyarakat/Kelompok Tani, kesiapan PPL)
 - c. Penyusunan rencana jadwal pelaksanaan
 - d. Pembentukan tim pelaksana teknis
2. Tahap pelaksanaan, meliputi kegiatan:
- a. Sosialisasi rencana kegiatan
 - b. Penentuan CPCL
 - c. Identifikasi masalah kawasan
 - d. Penentuan paket teknologi
 - e. Pelaksanaan di lapangan (penanaman)
 - f. Penyediaan infrastruktur
 - g. Pendampingan teknologi
 - h. Panen dan pasca panen
3. Tahap monitoring dan evaluasi kegiatan

Jika diamati secara lebih lanjut dari upaya-upaya yang dilaksanakan serta tujuan yang ingin dicapai maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan perencanaan pengembangan pertanian organik yang dilakukan mengarah pada tiga tahap fase pembangunan. Fase pertama adalah jangka pendek dengan tujuan merealisasikan upaya sosialisasi penerapan pertanian

organik di Kota Batu; jangka menengah dengan tujuan yang ingin dicapai adalah perbaikan kondisi tanah lahan pertanian di Kota Batu dan peningkatan mutu produksi hortikultura; fase ketiga adalah jangka panjang dengan tujuan yang ingin dicapai adalah terbentuknya kawasan pertanian organik yang berkonsep agrowisata.

5.1.1.5 Pendekatan perencanaan yang digunakan

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa proses perencanaan pembangunan dilakukan dengan memenuhi beberapa pendekatan, yaitu 1) Politik, bermakna bahwa pemilihan langsung kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD; 2) Teknokratis, bahwa perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu; 3) Partisipatif, bermakna bahwa proses penyusunan perencanaan daerah perlu dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki; 4) Perencanaan *top down* dan *bottom-up*, bahwa proses penyusunan rencana juga memperhatikan aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan.

Perencanaan pengembangan pertanian organik oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan sangat terkait dengan visi dan misi Walikota terpilih. Visi dan misi tersebut termuat dalam RPJMD Kota Batu yang menjadi acuan perencanaan pembangunan pertanian di Kota Batu. Visi pembangunan yang termuat dalam RPJMD tersebut adalah berbunyi sebagai berikut:

” Kota Batu sebagai sentra pariwisata berbasis pertanian didukung oleh SDM, SDA, dan SDB serta pemerintahan yang kreatif, inovatif dan bersih bagi seluruh rakyat yang dijiwai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Visi tersebut memberi tugas khusus bagi Dinas pertanian dan Kehutanan untuk mampu merencanakan pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam suatu kerangka pembangunan pertanian yang kreatif dan mampu bersinergi serta mendukung potensi pariwisata di Kota Batu. Mantan Kepala Bidang Program sebagai pihak yang cukup mempunyai andil dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2007-2012 menyampaikan keterkaitan visi dengan perencanaan pembangunan pertanian di Kota Batu sebagai berikut:

” Kalau dulu memang visi Kota Batu itu pertanian yang bernuansa wisata, kalau sekarang kan pariwisata berbasis pertanian, jadi dibalik, sehingga kita memang dari dulu itu mengembangkan konsep-konsep pertanian yang menuju kawasan-kawasan wisata, salah satunya pertanian organik”. (Wawancara tanggal 26 September 2012).

Dari pernyataan tersebut diperoleh informasi bahwa pertanian organik merupakan salah satu alternatif aspek dalam bidang pertanian yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata berbasis pertanian, sesuai dengan visi Kota Batu. Selain itu pertanian organik diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing produk hortikultura Kota Batu sehingga misi ke-5 RPJMD Kota Batu dapat terwujud yaitu:

“Meningkatkan peran Kota Batu sebagai Kota Pertanian (Agropolitan), khususnya untuk jenis tanaman sayur, buah dan bunga, serta menguatnya perdagangan hasil pertanian dan industri pertanian (*agro-industry*) yang diperhitungkan baik pada tingkat regional (Jawa Timur) maupun tingkat nasional guna memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian”.

Upaya tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yang notabene merupakan penjabaran dari RPJMD

Kota Batu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sebagai berikut:

“Dinas Pertanian ini membuat *grand design* dengan *breakdown* dari RPJMD, kan kita punya to RPJMD, kita *breakdown* melalui Renstra itu kita sampaikan kepada masyarakat, kebutuhan dia itu apa, nah itu yang akan kita usahakan untuk dipenuhi dalam lima tahun”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Adanya keterkaitan antara pernyataan visi dan misi kepala daerah dengan penyusunan renstra yang didalamnya juga mengutamakan rencana pengembangan pertanian organik maka dapat diketahui bahwa dalam perencanaan pembangunan pertanian bidang pengembangan pertanian organik tersebut terdapat pendekatan politik.

Dalam perkembangannya pendekatan politik tersebut semakin menguatkan untuk dilaksanakannya pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Saat penelitian ini dilaksanakan di Kota Batu sedang berlangsung proses pemilihan calon kepala daerah yang baru untuk periode Tahun 2012-2017. Sebagai warga Kota Batu peneliti juga mengamati proses pemilihan tersebut. Pada saat pemaparan visi dan misi pembangunan calon walikota hanya satu pasangan yang memberikan pemaparan, yaitu pasangan *incumbent* atau Walikota yang sedang menjabat. Visi pembangunan yang disampaikan adalah “Kota Wisata Batu sebagai sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional”, dengan demikian semakin menguatkan untuk dilaksanakannya pertanian organik di Kota Batu.

Adapun penggunaan RPJMD sebagai acuan dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan pembangunan pertanian termasuk salah satunya adalah pengembangan kawasan organik menunjukkan adanya arus proses kewenangan dari pemerintahan yang lebih atas ke bawah (*top down*), juga mengamanatkan

SKPD untuk melakukan perumusan dan penyusunan program kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing demi mendukung terwujudnya program pembangunan daerah, yang berarti membuka kesempatan bagi SKPD untuk melakukan perencanaan dengan pendekatan teknokratis.

Rencana pengembangan pertanian organik dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu berdasarkan pemikiran sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah pertanian di Kota Batu. Proses pemikiran dan penyusunan strategi dilakukan berkoordinasi antara dinas dengan berbagai pihak yang kompeten dibidangnya seperti pihak perguruan tinggi maupun balai penelitian serta praktisi pertanian organik. Dengan demikian perencanaan pengembangan pertanian organik ini juga dilaksanakan melalui pendekatan teknokratis.

Selanjutnya Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan menyampaikan bahwa dalam perencanaan kegiatan diusahakan ada sinergi antara aspirasi masyarakat serta kegiatan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (pusat dan propinsi) melalui pernyataan sebagai berikut:

“Dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pun kita nggak akan memaksa membuat kegiatan *top down* ya, artinya kita berusaha mensinergikan apa yang kita rencanakan, aspirasi masyarakat dari musrenbang-musrenbang desa sampai kecamatan sampai ke kota, tapi tetap mensinergikan dengan kegiatan dari propinsi dan pusat”. (Wawancara tanggal 11 Oktober 2012).

Pendekatan *top down dan bottom-up* pada perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu terlihat pada pelaksanaan kegiatan yang berasal dari sumber pembiayaan pusat (APBN), yaitu melalui Kementerian Pertanian dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Hortikultura pada program Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura, dengan bentuk kegiatan pemberian dana bantuan sosial, penyusunan SOP, registrasi kebun, pelatihan

petani dan sekolah lapang petani dengan materi GAP atau SLPHT. Arus *top-down* dalam hal ini bahwa Dinas Pertanian dan Kehutanan melaksanakan kegiatan mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dalam pedoman umum kegiatan. Dalam pedoman tersebut dijelaskan pula bahwa pihak pelaksana kegiatan yaitu SKPD terkait di Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun petunjuk teknis yang disesuaikan dengan kondisi daerah serta melakukan pendataan calon petani dan calon lokasi (CP/CL) yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pertanian sebagai kelengkapan pemberian alokasi bantuan, dalam hal ini arus *bottom-up* berlaku.

Perencanaan pengembangan pertanian organik juga melibatkan masyarakat. Aspirasi masyarakat diperoleh melalui usulan-usulan dalam kegiatan musrenbang terkait penerapan teknologi pertanian organik. Strategi pengembangan pertanian organik salah satunya adalah dengan membentuk kawasan pertanian organik di beberapa lokasi, dan dalam proses perencanaannya terdapat tahap sosialisasi dengan masyarakat. Pada kegiatan sosialisasi tersebut terjadi komunikasi langsung dengan peserta tentang hal-hal yang diinginkan meliputi kesediaan, jenis atau varietas tanaman yang ingin dibudidayakan, serta kemungkinan kendala yang dihadapi. Hal ini disampaikan oleh mantan Kasie. Hortikultura sebagai berikut:

“Sebenarnya yang banyak itu *bottom up*, makanya kenapa kita banyak sosialisasi per desa hingga 3 sampai 4 kali sampai barang itu datang, mulai dari pengenalan konsep sampai penentuan spesifikasi jenis itu masyarakat, kita hanya memfasilitasi, misalnya di Torongrejo itu mintanya nanam apa varietasnya apa itu dari masyarakat”. (Wawancara tanggal 16 Oktober 2012).

Selanjutnya mantan Mantri Tani Junrejo menambahkan maksud dari dilaksanakannya sosialisasi kegiatan melalui pernyataan berikut:

“Sosialisasi itu maksudnya untuk menyampaikan program-program sama tujuan pertanian organik. Memang dari sosialisasi itu banyak pertanyaan dari petani mengenai kejelasan pasar dan tanggung jawab kerugian kalau ada atau gagal panen atau turunnya produktivitas atau turunnya hasil panen. Dan itu kita sempat jelaskan karena semua saprodi bibit serta semua saprodi untuk keperluan pelaksanaan pertanian organik ini didukung oleh dinas *disupport* penuh dan petani hanya menyediakan lahan dan tenaga kerja aja, jadi walaupun untuk tahap awal ada penurunan sampai 50%, diharapkan petani masih untung”. (Wawancara tanggal 2 Agustus 2012).

Dari pernyataan tersebut diketahui terjadi komunikasi dua arah antara petani dan pemerintah terkait maksud dilakukan rencana kegiatan, teknis pelaksanaan, dan manfaat yang bisa diperoleh petani. Dari sisi pemerintah dapat diperoleh informasi tentang kesediaan, keinginan petani dan hal-hal yang menjadi kekhawatiran petani. Suasana pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Desa Sumberejo ditunjukkan pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Sosialisasi Pengembangan Kawasan Hortikultura di Desa Sumberejo, Kecamatan Batu (Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2011)

Dengan demikian terjadi keterlibatan dan komunikasi dengan masyarakat dalam proses perencanaan yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan perencanaan tersebut juga dilakukan melalui pendekatan partisipasi. Kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait penerapan pertanian organik diperoleh pula melalui peran PPL. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan PPL menjadi sarana penyampaian program kegiatan pemerintah sekaligus menjaring aspirasi petani. Selanjutnya aspirasi petani dari hasil penyuluhan serta pengamatan kondisi lapangan oleh PPL disampaikan kepada pihak dinas sebagai masukan dalam penyusunan rencana kegiatan. Selain itu ada juga usulan melalui penyampaian proposal dari Kelompok Tani kepada pihak dinas.

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan perencanaan pengembangan pertanian organik oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dilakukan melalui pendekatan politis, teknokratis, partisipasi serta *top down* dan *bottom up*.

5.1.2 Stakeholder Perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu

Keterlibatan *stakeholder* atau pemangku kepentingan dalam suatu perencanaan pembangunan merupakan hal yang sangat penting. Disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu faktor penting yang dapat menentukan seberapa jauh suatu ide akan berjalan adalah adanya dukungan yang diberikan kepada ide tersebut. Maka dari itu dalam pembangunan pertanian, khususnya pada pengembangan pertanian organik juga dibutuhkan dukungan dan kerjasama antar *stakeholder* yang terkait.

5.1.2.1 Identifikasi *stakeholder*

Identifikasi *stakeholder* dilakukan untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pengembangan pertanian menuju organik di Kota Batu. Dari hasil identifikasi *stakeholder* akan diketahui muatan tanggung jawab *stakeholder* terkait dengan peran dan tugas yang diembannya. Identifikasi dilakukan melalui wawancara dengan informan yang secara langsung terlibat dalam proses perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu, serta melalui penelusuran dokumen yang terkait dengan proses perencanaan pengembangan pertanian organik. *Stakeholder* yang terlibat dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu ada beberapa pihak sesuai hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, sebagai berikut:

“*Stakeholder* yang terlibat tentu pemangku wilayah, baik camat, kepala desa, ketua gapoktan, terus kita, akademisi yang membantu kita, orang-orang yang memang sudah punya *background* organik seperti Pak Frans, Herbal Estate, apa itu, praktisi. Awal itu kita ajak *share* dulu secara informal sebelum ke masyarakat, terus BPTP, akademisinya dari Brawijaya. Setelah itu baru kita sosialisasi dulu ke teman-teman kita ke PPL, baru sosialisasi ke masyarakat ke petani”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui beberapa pihak yang diajak berkomunikasi terkait dengan rencana pengembangan pertanian organik di Kota Batu meliputi pemangku wilayah seperti camat dan aparat desa; dari pihak masyarakat melibatkan petani dan ketua Gapoktan; serta dari pihak swasta melibatkan praktisi dan pengusaha pertanian organik di Kota Batu. Adapun dari pihak dinas mengikutsertakan keterlibatan Petugas Penyuluh Lapang (PPL); sedangkan dari instansi di luar lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu melibatkan BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian), serta Universitas Brawijaya sebagai perwakilan dari pihak akademisi. Komunikasi dilakukan secara

informal melalui diskusi informal, serta acara formal berupa sosialisasi dengan masyarakat.

Salah satu hal penting dalam terselenggaranya suatu kegiatan dengan baik adalah terbukanya informasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Maka dari itu sejak tahap perencanaan, pihak dinas juga melibatkan media massa untuk membantu mensosialisasikan rencana pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Hal ini terungkap melalui informasi yang diberikan oleh mantan Kepala Seksi Hortikultura yang juga merupakan konseptor pertanian organik, sebagai berikut:

“Pelaku yang sudah berhasil juga kita mintai pendapat, Mas Danang Herbal Estate, Pak Frans, Pak Toto Himawan. Dari masyarakat itu waktu sosialisai kan kita dapat masukan. Mulai proses sosialisasi selalu melibatkan media massa koran-koran lokal untuk membantu sosialisai. *Wong* mereka tiap minggu datang untuk menanyakan perkembangannya”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Lebih lanjut beliau juga menginformasikan bahwa masih ada beberapa pihak penting yang belum dilibatkan dalam upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu melalui pernyataan berikut:

“Kalau peran swasta banyak yang belum kita libatkan, seperti hotel dan restoran, pedagang, pengepul, retail-retail besar, karena kita memang belum tahu kontinuitas produksinya, kan ini masih sangat awal sekali”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Dari pernyataan tersebut diketahui belum dilibatkannya pihak swasta seperti pihak hotel dan restoran, pedagang, pengepul maupaun retail-retail besar dikarenakan kegiatan tersebut masih dalam tahap sangat awal sehingga belum diketahui kualitas dan kontinuitas produksinya.

Selanjutnya dalam perencanaan pembangunan tentu tidak lepas dengan alokasi anggaran. Dalam proses penentuan anggaran selalu ada koordinasi antara SKPD, Pimpinan Daerah dalam hal ini Walikota Batu dan DPRD Kota

Batu dalam hal ini pihak panitia anggaran. Disetujuinya alokasi anggaran demi terlaksananya kegiatan merupakan bentuk dukungan tersendiri pada kegiatan tersebut. Dengan demikian salah satu *stakeholder* yang juga terlibat dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu adalah Walikota Batu dan DPRD Kota Batu. Hal ini disampaikan pula oleh mantan Kepala Seksi Hortikultura sebagai berikut: “Pak Wali tahu dan mendukung, kalau nggak mendukung kan nggak keluar anggarannya, *wong* anggarannya kemarin cukup besar”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Dukungan Walikota Batu dan perwakilan anggota DPRD dapat dilihat pula melalui kehadiran pada acara *launching* kawasan organik di Desa Torongrejo pada tanggal 10 Januari 2012. Pada acara tersebut juga dilakukan dialog dengan petani untuk mengetahui tanggapan, permasalahan dan harapan petani tentang perbaikan pertanian di Kota Batu (Gambar 5.6).



Gambar 5.4 Walikota Batu beserta perwakilan anggota DPRD hadir dalam acara panen perdana dan *launching* Kawasan Pertanian Organik Desa Torongrejo Kec. Junrejo (Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2011)

Selain melalui kegiatan wawancara, identifikasi *stakeholder* dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu dilakukan pula

melalui penelusuran dokumen surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu No. 180/745/KEP/422.110/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Tim Pelaksana Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Organik Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yang keanggotaannya ditunjukkan pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14 Susunan Tim Pelaksana Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Organik Dinas pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2011

| No | Jabatan dalam Tim | Nama / Instansi | Jabatan |
|-----------------|---|--|--|
| I | Konsultan Teknis | 1. Tim Fakultas Pertanian Unibraw Malang | - |
| | | 2. Tim. Lab. Hama dan Penyakit Propinsi di Pandaan | - |
| | | 3. Tim Nusa Organic Farming (Nofar) | - |
| II | Penanggung Jawab | Ir. Sugeng Pramono | Kadis. Pertanian & Kehutanan |
| III | Ketua | Ir. Matali, M.Agr | Kabid. Tanaman Pangan & Hortikultura |
| IV | Wakil Ketua | Ir. Suprianto | Kabid. Teknologi Pengolahan Hasil & Pemasaran |
| V | Sekretaris | Ir. Suhinto, M.Agr | Kelompok Jabatan Fungsional |
| VI | Koord. Pelaksana Lapangan Ds. Sumber Brantas Anggota | Parwoto | Kasi. Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Hama |
| | | 1. Kasi Sarana dan Prasarana | Kasie. Sarana dan Prasarana |
| | | 2. Edi Siswanto, SP | POPT Kec. Bumiaji |
| | | 3. Alfas Fatrus Akbar, SP | Mantri Tani |
| | | 4. Sugiyo Pranoto | Koordinator PPL |
| | | 5. Mazidhah Aan D.A, SPt | PPL |
| | | 6. Agus Sutrisno | THL-TBPP |
| 7. Joni Junaedi | Gapoktan | | |
| VII | Koord. Pelaksana Lapangan Ds. Sumberejo Anggota Anggota Anggota | Agung Supriadi, SP | Kasie. Hortikultura |
| | | 1. Nurhadi, SP | POPT Kec. Batu |
| | | 2. Slamet Nu Hasan, SP | Mantri Tani |
| | | 3. Agus Suliyanto, SP | PPL |

| No | Jabatan dalam Tim | Nama / Instansi | Jabatan |
|------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| VIII | Anggota | 4. Intan Sari Widodo, SPT | PPL |
| | Anggota | 5. H. Mulyono | Gapoktan |
| | Koord. Pelaksana Lapangan Ds. Torongrejo | Kasi Pengolahan & Pemasaran | Kasie. Pengolahan & Pemasaran |
| | Anggota | 1. Yusuf Effendi, S.TP | Mantri Tani |
| | Anggota | 2. Budi Winulyo, SST | PPL |
| IX | Anggota | 3. Riza Yuhana, SP | PPL |
| | Anggota | 4. Sutejo | Gapoktan |
| | Koord. Pelaksana Lapangan Ds. Pendem | Kasi Sarana Produksi dan Permodalan | Kasie. Sarana Produksi |
| | Anggota | 1. Muarifin | THL-TBPP |
| | Anggota | 2. Bambang Sutrisno | THL-TBPP |
| | Anggota | 3. Agus Muntolib | Gapoktan |

Sumber: Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu No. 180/745/KEP/422.110/2011

Dari hasil wawancara dan penelusuran data sekunder maka dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* yang terlibat dalam perencanaan pengembangan pertanian organik adalah: 1) perguruan tinggi 2) aparat pemerintah Kota Batu dalam hal ini Walikota Batu, Dinas Pertanian Kota Batu, dan aparat kecamatan/desa; 3) petugas Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT); 4) masyarakat, yaitu petani, ketua gabungan kelompok tani (gapoktan); 5) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu; 6) swasta dalam hal ini praktisi dan pengusaha produk organik, 7) media massa.

5.1.2.2 Peran *stakeholder*

Dalam rangka mengembangkan pertanian organik di Kota Batu, pemerintah Kota Batu dalam hal ini Dinas Pertanian dan Kehutanan berusaha melaksanakan suatu kegiatan untuk mewadahi berbagai hal yang dapat mendukung terlaksananya pertanian organik di Kota Batu. Karena itu pemerintah

juga berupaya menyusun suatu rencana kegiatan pengembangan kawasan pertanian organik yang dalam prosesnya melibatkan beberapa pihak pemangku kepentingan atau *stakeholder* yang mempunyai peran sesuai dengan keahlian dan wewenang masing-masing.

Berikut ini disampaikan hasil wawancara terkait dengan peran *stakeholder*. Informasi pertama disampaikan oleh mantan Kepala Seksi Hortikultura yang juga salah satu anggota tim pelaksana teknis kegiatan. Beliau memberikan informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat beserta perannya melalui pernyataan berikut:

“*Stakeholder* ya dari pemerintah, petani sama pelaku usaha. Akademisi untuk pendampingan, kan dulu sudah pernah kirim kesediaan dan sudah dijawab bersedia. Jadi mereka memberikan paket-paket teknologi, kalau ada masalah dilapang nanti diberi saran-saran secara akademis, dinas sebagai fasilitator dan stimulan. Semua saprodi dari A sampai Z dipenuhi, infrastruktur juga, petani hanya menyediakan lahan dan tenaga, petani sebagai pelaksana dan hasilnya pun untuk modal awal, pihak swasta keterlibatannya blm banyak”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa masing-masing *stakeholder* memiliki peran yang berbeda. Pihak akademisi, dalam hal ini perguruan tinggi mempunyai peran dalam hal pemberian paket-paket teknologi sekaligus sebagai pihak konsultan ahli yang berwenang untuk memberikan saran-saran akademis terkait permasalahan teknis yang ditemui di lapangan. Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu adalah sebagai fasilitator dengan tugas memfasilitasi kebutuhan petani untuk teknis pelaksanaan pertanian organik di lapangan. Fasilitas yang diberikan berupa sarana produksi, dukungan infrastruktur, dan pendampingan/bimbingan budidaya organik. Fasilitas pendampingan dan pengetahuan yang diberikan melalui campur tangan dinas diharapkan juga mampu membangkitkan semangat petani, termasuk pula

kebijakan bahwa hasil yang diperoleh diberikan kepada petani untuk digunakan sebagai modal. Karena itu dalam hal ini pemerintah juga berperan sebagai stimulator. Adapun keberadaan petani adalah sebagai penyedia lahan dan tenaga pelaksana di lapangan.

Informasi yang diberikan oleh mantan Kepala Seksi Hortikultura tentang keterlibatan media massa pada perencanaan pengembangan pertanian organik mencakup pula peran media massa dalam hal membantu mensosialisasikan upaya pengembangan pertanian organik yang salah satu strateginya dilakukan dengan membentuk kawasan pertanian organik di empat desa se-Kota Batu.

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak lepas dari peran penting seorang Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Bahkan PPL merupakan pasukan di garis terdepan karena tugas dan kewajibannya yang langsung berinteraksi dengan petani. Karena itu pula dalam susunan tim pelaksana teknis di lapangan sesuai surat keputusan yang telah ditetapkan, keterlibatan PPL paling banyak. Peran penting PPL dalam upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu terutama berhubungan dengan transfer teknologi pertanian organik serta pemahaman tentang pentingnya pertanian organik tersebut. Bukan hal yang mudah bagi PPL dalam melakukan transfer teknologi dan merubah perilaku petani. Terkait dengan sulitnya merubah perilaku tersebut diakui oleh salah satu PPL Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sebagai berikut:

“Tanggapan petani Alhamdulillah untuk di wilayah binaan saya yang ikut kawasan bagus, jadi mereka sudah mulai paham, cuma merubah pola perilaku mereka yang tadinya harus pakai pupuk sintesis akhirnya nggak pakai sama sekali itu susah memang, jadi akhirnya harus bertahap. Kita juga nggak bisa lihat perlakuannya setiap hari. Hari ini katanya nggak pakai eh tiba-tiba pakai, lihat kondisi tanaman jelek ya dia pakai sendiri. Sulit memang, merubah pola itu mbak susah, tapi kita bisa lakukan itu secara bertahap melalui penyuluhan. Kemarin kita sudah pernah lakukan, sudah panen sekali kebetulan ada *launching* juga dengan Pak Wali, itu

pemakaiannya bisa berkurang yang sintetis itu 75 % jadi yang masuk cuma sekitar 25% yang sintetis. (Wawancara tanggal 31 Agustus 2012).

Berdasarkan informasi tersebut dapat dilihat bahwa peran PPL dalam melakukan transfer teknologi dan pendampingan kepada petani tidak mudah. Butuh ketelatenan dan kesabaran serta keterampilan tersendiri dalam menyampaikan suatu teknologi kepada petani agar dapat diterima dengan baik untuk selanjutnya dilaksanakan.

Peran masing-masing *stakeholder* secara lebih jelas dapat diketahui melalui tugasnya berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu No. 180/745/KEP/422.110/2011, sebagai berikut:

- 1) Tim Perguruan Tinggi, Tim Laboratorium Hama dan Penyakit Propinsi di Pandaan, serta tim Nusa Organic Farming (Nofar) dalam hal ini bertindak sebagai konsultan teknis memiliki tugas yaitu:
 - Menganalisa kondisi lahan dan ekosistem di masing-masing kawasan pertanian organik
 - Memberikan konsultasi teknis paket teknologi pengembangan kawasan organik
 - Memberikan solusi teknis terhadap semua permasalahan pengembangan kawasan pertanian organik
- 2) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, dalam susunan tim pelaksana teknis ini terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan jabatan dalam tim, sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai penanggung jawab memiliki tugas: bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengembangan kawasan pertanian organik; memberikan arah kebijakan kegiatan

pengembangan kawasan pertanian organik; memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian organik; melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian organik kepada Walikota

- b. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai ketua, memiliki tugas: melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan; bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun administrasi; menetapkan teknis pelaksanaan kegiatan dimasing-masing kawasan; mengalokasikan kebutuhan bibit dan saprodi dimasing-masing kawasan; memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan; melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab kegiatan
- c. Kepala Bidang Teknologi Pengolahan Hasil dan Pemasaran, dalam hal ini sebagai wakil ketua, memiliki tugas: bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksana lapang yang membawahi seluruh koordinator di masing-masing desa pengembangan kawasan pertanian organik; membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan; memberikan masukan/saran kepada ketua tim pelaksana teknis dalam memutuskan suatu masalah; membantu ketua tim pelaksana teknis dalam merencanakan dan merumuskan teknis pelaksanaan kegiatan dilapang, membantu ketua tim pelaksana teknis untuk mengalokasikan kebutuhan bibit dan saprodi; menyediakan data dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan; menghimpun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari masing -masing pelaksana

lapang serta melaporkan kepada ketua tim pelaksana teknis pengembangan kawasan pertanian organik.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional (Koordinator PPL) dalam hal ini sebagai sekretaris, memiliki tugas: menyiapkan dokumen administrasi kegiatan; menyimpan semua administrasi kegiatan; menyusun laporan kegiatan secara berkala; mendokumentasikan seluruh kegiatan; melaporkan perkembangan kepada wakil ketua tim pelaksana.
- e. Kepala seksi terkait, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), PPL, perwakilan gapoktan, dalam hal ini sebagai pelaksana lapangan, memiliki tugas: bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan kawasan pertanian organik di masing-masing kawasan; menyampaikan paket teknologi pengembangan kawasan pertanian organik kepada petani pelaksana kegiatan; melakukan koordinasi dengan konsultan teknis untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian organik di lapang; melaksanakan sosialisasi kegiatan dimasing-masing wilayah; memberikan bimbingan teknis sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan masyarakat; melaporkan perkembangan dan permasalahan dilapang kepada wakil ketua tim pelaksana kegiatan pengembangan kawasan pertanian organik.

Dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 180/745/KEP/422.110/2011 tentang tim pelaksana teknis pengembangan kawasan pertanian organik tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pimpinan SKPD pada terlaksananya kegiatan tersebut. Namun ternyata keberadaan SK tersebut belum dapat sepenuhnya menggerakkan tim yang ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya. Seorang PPL yang merupakan salah

satu anggota tim pelaksana lapangan memberikan pernyataan tentang kurangnya komitmen anggota yang lain dalam melaksanakan tugasnya, sebagai berikut:

“Ada kelemahan dari tim itu, ternyata yang jalan cuma saya sendiri, yang lain seperti dari PHP (POPT-pen.) nggak pernah kesana, sama teman-teman yang lain juga. Koordinasi sudah dilakukan, beberapa kali kan kita dikumpulkan oleh kepala dinas tim harus jalan, ternyata ya gak jalan, termasuk ketua timnya (koordinataoer pelaksana lapangan desa Z-pen.) juga nggak pernah kesana”. (Wawancara tanggal 12 September 2012).

Keterangan tersebut diperkuat oleh pernyataan PPL yang juga merupakan anggota pelaksana lapangan di desa lain, melalui pernyataan berikut:

“Pada awal mulai kawasan organik itu kan terbentuk tim, tapi tim itu hanya terbentuk begitu saja, nggak ada komunikasi entah apa, cuma pemahaman saya entah salah atau bener yang namanya SK itu kan mencakup hak dan kewajiban, kalau nggak ada hak cuma ada kewajiban ya begitulah. *Timne gak jalan yo saiki sing obah sing ndek lapang tok*”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Berdasarkan informasi tersebut maka diketahui bahwa salah satu alasan yang mungkin menyebabkan tim pelaksana tidak menjalankan tugas secara maksimal adalah tidak adanya honor tim pada kegiatan tersebut. Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan surat keputusan yang diterbitkan memang tidak terdapat alokasi anggaran untuk honorarium tim pelaksana teknis yang dibentuk.

5.1.3 Strategi untuk mewujudkan keberlanjutan perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu

Setiap rencana yang dibuat diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan. Berkelanjutan yang dimaksud adalah rencana tersebut tidak dapat terlaksana hingga mencapai tujuan dan maksud disusunnya rencana tersebut. Untuk mengetahui upaya atau cara yang ditempuh supaya perencanaan pengembangan pertanian organik dapat berlanjut maka peneliti

berusaha menggali informasi kepada narasumber dengan mengacu pada teori yang disampaikan oleh Gharajedaghi dan Ackoff dalam Kartasasmita (1990: 52) bahwa untuk keberlanjutan suatu rencana hendaknya menerapkan prinsip interaktif, yaitu prinsip partisipasi, kesinambungan, dan holistik. Selain itu peneliti juga berupaya mengambil kesimpulan dari hasil wawancara dengan narasumber terkait hal-hal yang dapat mendukung keberlanjutan rencana dan pelaksanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu.

5.1.3.1 Penerapan prinsip interaktif (partisipatif, kesinambungan dan holistik) dalam perencanaan pengembangan pertanian organik

Prinsip partisipatif mengandung arti dalam perencanaan melibatkan stakeholder yang terkait. Stakeholder utama dalam pengembangan pertanian organik adalah masyarakat / petani itu sendiri, karena mereka sebagai penerima manfaat, sekaligus sebagai pelaksana di lapang. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan menyampaikan informasi sebagai berikut:

“Supaya kegiatan ini bisa terus berlanjut maka salah satu hal yang kita tempuh adalah melibatkan masyarakat, mulai dari awal kita telah melibatkan masyarakat. Kan waktu itu kita ada sosialisasi, nah itu mesti disitu nanti ada masukan dari masyarakat, itu nanti juga jadi pertimbangan-pertimbangan kita juga. Salah satunya jenis atau varietas komoditas yang ingin ditanam itu apa”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012)”.

Hal senada disampaikan pula oleh mantan Kasie. Hortikultura sebagai berikut:

“Kita banyak sosialisasi per desa hingga 3 sampai 4 kali sampai barang itu datang, mulai dari pengenalan konsep sampai penentuan spesifikasi jenis itu masyarakat, kita hanya memfasilitasi, misalnya di Torongrejo itu mintanya nanam apa varietasnya apa itu dari masyarakat, takutnya kalau petani *gak karep yo akhire gak kanggo* (Wawancara tanggal 16 Oktober 2012).

Dari kedua informasi tersebut diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan kawasan organik telah ada melalui kegiatan

sosialisasi yang dilakukan beberapa kali di masing-masing desa mulai dari awal pengenalan kegiatan hingga pelaksanaan di lapang. Masukan dari masyarakat terkait dengan jenis komoditas yang akan ditanam menjadi pertimbangan dan difasilitasi untuk dipenuhi oleh dinas. Pelibatan petani dalam rangkaian tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat mendorong petani untuk mau melaksanakan kegiatan dan terus berlanjut sesuai rencana.

Pelibatan petani melalui sosialisasi disampaikan pula oleh Ketua Kelompok Tani Rukun Tani desa Torongrejo sebagai berikut:

“Diundang oleh dinas pernah mbak dua kali, waktu itu yang dibicarakan ya masalah mau ada nanam organik itu, butuhnya satu kawasan, dikasih tau juga tatacara pengolahan tanah trus aplikasinya, masalah bibit sama pupuk nanti dibantu sama dinas. Kalau saya biasanya nanam bawang merah sama bawang prei, kemarin bawang merah yang dari dinas bagus sama preinya juga bagus, tapi kalau jagung sama brungkul nggak cocok”. (Wawancara tanggal 21-9-2012).

Dalam kegiatan sosialisasi, masyarakat petani yang berada pada rencana kawasan dimintai pendapatnya mengenai kesediaan menerapkan teknis budidaya organik, jika bersedia maka komoditas apa yang ingin ditanam, berapa jumlahnya, dan kapan rencana tanamnya. Aspirasi yang diperoleh dari masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tersebut selanjutnya di dokumentasikan dalam sebuah berita acara sosialisasi dan ditandatangani oleh perwakilan masyarakat, aparat desa dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.

Prinsip kedua dalam perencanaan interaktif adalah kesinambungan. Yang dimaksud kesinambungan yakni perencanaan selalu terkait dengan tahap pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Mantan Kasie. Hortikultura menjelaskan bahwa perencanaan dibuat dan disusun dalam suatu jadwal rencana pelaksanaan kegiatan untuk satu tahun. Di dalam jadwal tersebut terdapat

tahapan kegiatan meliputi kegiatan pelaksanaan misalnya penanaman dilapang, pendampingan selama pelaksanaan, hingga dilakukannya monitoring dan evaluasi kegiatan. Monitoring dilakukan oleh PPL dan tim pelaksana teknis lapangan mengenai kondisi pertanaman dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan di lapang. Mantan Kasie. Hortikultura menjelaskan isi dari jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sebagai berikut:

“Dari awal rencana itu kita buat kan harapannya bisa terlaksana sesuai tahapan-tahapannya. Dijadwal itu kan ada tahap-tahap yang mesti kita tempuh, mulai dari sosialisasi-sosialisasi, tanam perdana, pendampingan-pendampingan di lapangan. Di tahap akhir nanti ada monev-nya juga, trus ada juga rencana promosi itu”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan juga menyampaikan adanya rencana evaluasi kegiatan terkait perencanaan pengembangan kawasan organik melalui pernyataan berikut:

“Setelah *pilot project* pada tahun 2011, tahun 2012 ini sebetulnya ada evaluasi, kita lakukan evaluasi bekerjasama dengan Brawijaya, hasil evaluasi itu kita jadikan pijakan untuk tahun 2013, kekurangan kita itu apa sih di tahun 2011”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Dari penjelasan tersebut diketahui pada tahun 2012 akan dilaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan kawasan organik yang telah dilakukan pada tahun 2011. Harapannya agar dapat diketahui kekurangan pelaksanaan pada tahun 2011 sebagai masukan dalam perencanaan pengembangan kawasan pertanian organik periode berikutnya.

Prinsip ketiga dalam prinsip perencanaan interaktif adalah holistik atau menyeluruh. Hal ini menyangkut materi dalam perencanaan tersebut apakah sudah mengkomodir keseluruhan aspek yang terkait. Pada perencanaan pengembangan kawasan organik keterpaduan dapat diartikan rencana untuk membentuk suatu kawasan yang mandiri dan terpenuhi segala aspek yang

terkait dengan pembangunan pertanian baik dari sektor hulu hingga hilir. Dengan demikian perlu dipertimbangkan pula upaya perbaikan dan peningkatan untuk produksi, pasca panen, hingga pasar. Hal ini membuka kepentingan akan kerjasama dengan sektor lain yang terkait (perdagangan, industri, koperasi, dll). Terkait dengan keterpaduan tersebut peneliti mendapat uraian singkat dari mantan Kasie. Hortikultura sebagai berikut:

“Memang perencanaan organik ini belum melibatkan SKPD lain. Fokus kita untuk awal kegiatan ini adalah bagaimana caranya supaya produksi yang dihasilkan melalui teknologi organik atau yang mengarah ke organik itu tersedia dulu secara kontinyu, baru nanti kita libatkan dinas lain untuk promosi misalnya”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Hal senada disampaikan pula oleh Kabid Peternakan dan Perikanan, sebagai berikut:

“Kegiatan yang dilaksanakan saat ini masih pada pengembangan di hulu, produksi organik dikuatkan dulu sampai stabil. Petani kita kan mudah goyah mbak, jangan-jangan nanti ketika sudah dikerjakan sampai hilir ternyata yang hulu goyah dan berubah balik ke konvensional lagi maka keberlanjutan pertanian organik itu ya tidak tercapai”. (Wawancara tanggal 6 Agustus 2012).

Dari penjelasan tersebut perencanaan yang dilakukan mengutamakan pada pembentukan dan penguatan sektor hulu, yaitu produksi dengan pertimbangan setelah terbentuk sektor hulu (produksi) dengan baik dan terjamin kuantitas maupun kualitasnya maka baru mengarah pada sektor lain, misalnya promosi dengan melibatkan instansi terkait. Lebih lanjut Kasie Hortikultura menjelaskan bahwa yang sudah dipikirkan adalah masalah pemasaran, yaitu melakukan perbaikan pengemasan dan strategi penjualan mengikuti harga pasar secara umum. Selanjutnya Mantan Mantri Tani Kecamatan Junrejo menyampaikan bahwa perencanaan yang dilakukan memang belum meyeluruh, tetapi masih

berkisar pada upaya mewujudkan produksi organik. Hal ini disampaikan melalui pernyataan berikut:

“Perencanaan kawasan organik yang dilakukan kemarin hanya sampai produksi saja, belum membahas masalah yang lainnya belum... Tapi terpadu semua bidang terlibat, kontribusi dari TPHP pengandaan sarana prasarana rumah kompos, APPO; dari Kehutanan studi mengenai lingkungan, dari kita Tanaman Pangan dan Horti untuk pengandaan saprodi pupuk dan bibitnya”. (Wawancara tanggal 2 Agustus 2012).

Beliau juga menambahkan bahwa untuk mencapai produksi tersebut rencananya dilakukan tersinergi dengan melibatkan seluruh bidang teknis yang ada sesuai tupoksi masing-masing, misalnya bidang Teknologi Pengolahan Hasil dan Pemasaran (TPHP) memberi kontribusi pada penyediaan sarana dan prasarana berupa rumah kompos dan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), bidang Kehutanan melakukan studi mengenai lingkungan, sedangkan dari Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura memberi kontribusi untuk penyediaan sarana produksi berupa pupuk organik dan bibit.

Berdasarkan uraian tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil adalah

- 1) perencanaan pembangunan bidang pembangan pertanian organik di Kota Batu telah berupaya menyertakan partisipasi masyarakat yang diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dengan masyarakat pada rencana pengembangan kawasan organik;
- 2) didalam perencanaan tersebut juga telah dijadwalkan tahap monitoring dan evaluasi terhadap rencana serta pelaksanaan pengembangan kawasan organik;
- 3) aspek perencanaan yang dilakukan lebih mengutamakan pada sektor hulu, yakni produksi organik melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian organik.

5.1.3.2 **Strategi untuk mewujudkan keberlanjutan pertanian organik di Kota Batu**

Selain keberlanjutan dari sisi perencanaan, maka harapan dari dilakukannya sebuah perencanaan pembangunan adalah berlanjutnya program atau kegiatan secara mandiri oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan rencana pengembangan pertanian organik, pihak Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu melakukan strategi berupa pengembangan kawasan pertanian organik. Hal ini merupakan wujud konkrit pelaksanaan kebijakan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2007-2012.

Dijelaskan dalam Renstra tahun 2007-2012 bahwa pengembangan desa kawasan pertanian organik/ramah lingkungan merupakan suatu pola strategi pengembangan kawasan pertanian organik/ramah lingkungan secara terpadu komponen-komponen agribisnis melalui kegiatan sentra kawasan produksi sarana pertanian organik/ramah lingkungan, budidaya pertanian organik/ramah lingkungan, penanganan pasca panen, wisata tani organik/ramah lingkungan, dan kegiatan produktif masyarakat desa secara ramah lingkungan. Dengan demikian melalui konsep kawasan diharapkan terjadi pergerakan aktivitas dari berbagai kegiatan lintas sektor sehingga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat.

Mantan Kasie. Hortikultura pernah menjelaskan kepada peneliti ketika masih menjadi staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bahwa pemilihan konsep kawasan sebagai strategi pengembangan pertanian organik di Kota Batu dipilih karena pola pertanian berbasis kawasan berpotensi pada kecukupan pemenuhan permintaan pasar, memudahkan pengawasan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta memberikan peluang semua komoditas potensial di kawasan tersebut ditangani secara proporsional. Menge-

nai skenario yang akan diterapkan dalam rangka pengembangan kawasan tersebut mantan Kasie. Hortikultura menjelaskan sebagai berikut:

“Jadi pada intinya kita menggunakan sistim demoplot, tapi kalau demoplot kan terlalu lama dan harus kita yang mengerjakan. Lha ini konsepnya seperti demoplot tapi petani yang mengerjakan. Makanya kita beri fasilitas produksi, petani yang mengerjakan, kita penuh sebagai modal awal, kan nanti pasti ada penurunan hasil jadi tidak sampai mengganggu dapur mereka. Setelah terbentuk itu kawasan organik nanti kita akan promosikan sebagai daerah pariwisata, jadi arahnya kesana”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Dari informasi tersebut diketahui bahwa pada dasarnya kawasan pertanian organik tersebut merupakan bentuk demoplot atau percontohan kepada petani yang dilakukan oleh petani itu sendiri dengan pendampingan teknologi dan fasilitas sarana produksi dari pihak dinas. Fasilitas sarana produksi dimaksudkan untuk mengantisipasi resiko penurunan hasil yang mungkin terjadi. Jika nantinya memang terjadi penurunan hasil diharapkan petani tidak terlalu rugi karena modal awal merupakan bantuan dari dinas. Pada akhirnya jika sudah terbentuk kawasan organik seperti yang diharapkan maka akan dilakukan promosi sebagai daerah pariwisata.

Berikutnya beliau juga menjelaskan mengenai pentingnya persiapan yang perlu dilakukan bagi para pendamping di lapangan yaitu para PPL. Sebagai pendamping sudah seharusnya PPL mengetahui dan paham mengenai segala hal terkait kegiatan yang sedang dilakukan mulai dari tujuan serta teknologi yang diterapkan sebagai bekal dalam melakukan pendampingan. Karena itu sebelum dilakukan pelaksanaan di lapang, para pendamping harus mengikuti pelatihan untuk mematangkan dan memperbarui pemahaman tentang konsep dasar pertanian organik beserta teknologi terapannya. Kasie Hortikultura juga menyampaikan target awal kegiatan tersebut adalah mengurangi penggunaan

pupuk kimia dengan memperbanyak penggunaan pupuk organik. Sedangkan untuk pestisida diharapkan sudah menggunakan pestisida alami. Hal tersebut sebagaimana pernyataan berikut:

“Sebelum pelaksanaan, para pendamping ini kan juga harus paham. Makanya saya minta TOT pelatihan. Kalau mereka sudah paham baru eksekusi di lahan, jadi ibaratnya kalau di jalan sudah taulah apa yang harus dilakukan. Kalau kemarin kayaknya saya sampaikan untuk tahap awal itu kita mulai menggunakan pupuk organik sebanyak mungkin dan mengurangi pupuk kimia, mengurangi lho bukan menghilangkan. Mengurangi sedikit demi sedikit, kalau pestisidanya diupayakan untuk sudah menggunakan pestisida alami”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Dijelaskan pada Renstra Distanhut 2009-2012 bahwa konsep kawasan merupakan pola strategi pengembangan kawasan secara terpadu komponen-komponen agribisnis, maka tidak akan lepas dari strategi pemasaran. Sebagai pihak yang mempunyai peran penting dalam mengkonsep kegiatan pengembangan kawasan organik di Kota Batu, mantan Kasie. Hortikultura menjelaskan strategi pemasaran yang digunakan berturut-turut sebagai berikut:

“Jadi harapan saya waktu itu, nanti sudah dapat label organik, tapi dijual dengan harga curah. Bayangan saya tidak akan dijual lebih harganya. Dari ongkos produksinya kan sudah berkurang, logikanya kalau ongkos produksinya rendah maka dijual dengan harga curah pun untungnya sudah besar. Karena kalau nggak dibuat begitu organik nggak akan laku, hanya orang-orang tertentu yang mau..... Konsep pemasaran yang saya pikirkan waktu itu nanti sudah dikemas dengan bagus dengan *packaging* yang dibantu dari bidang TPHP, tapi dijualnya dengan harga sama seperti pasar tapi dengan kemasan yang lebih baik. Nanti dipasar dengan harga yang sama orang pasti akan pilih organik. Dan nantinya kalau semua sudah pilih organik maka yang anorganik itu akan kalah dan mengarah ke organik juga”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Lebih lanjut mantan Kasie. Horti juga menjelaskan bahwa pada mulanya sempat dipikirkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam hal pemasaran produk yang dihasilkan dengan standar harga produk organik. Namun setelah dilakukan pembicaraan ternyata masih banyak hal yang perlu

dipersiapkan dengan matang untuk dapat menjalin kerjasama tersebut. Misalnya perlu adanya aturan dari pihak pemerintah kota yang mengatur kewajiban kontribusi pemanfaatan produk organik yang dihasilkan dalam mendukung usaha yang dijalankan. Pada akhirnya diputuskan untuk memperkuat pemahaman petani bahwa produk organik tidak harus dijual dengan harga organik, melainkan menekankan keuntungan yang diperoleh melalui biaya usah tani yang lebih rendah dari usaha pertanian konvensional. Hal ini tergambar melalui pernyataan mantan Kasie. Hortikultura berikut ini:

“Sempat juga kepikiran minta tolong Herbal untuk membantu memasarkan, tapi waktu itu itung-itungan saya dengan Mas Danang, kita agar bisa dijual dengan harga organik harus ada perwali atau yang mewajibkan misalnya hotel atau restoran yang terkenal harus menggunakan produk tersebut. Karena kalau dihitung misalnya ini semua jalan masing-masing 10 hektar, maka tiap minggu kita akan menghasilkan berapa ton gitu, nah itu mau dijual kemana? Dan nanti bisa-bisa jadi pukulan kepada petani, sudah mau *soro-soro* mengikuti organik, begitu *dongnya* panen gak laku. Makanya setelah dapat saran seperti itu konsep pasarannya saya rubah, tidak dijual dengan harga organik, tapi dikemas dengan baik dan dijual dengan harga pasar”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Hal senada disampaikan pula pada kesempatan lain sebagai berikut:

“Upaya untuk membentuk pasar memang belum, cuma pendekatan yang ditekankan adalah input yang diberikan pada modal berkurang sehingga pendapatan bisa bertambah. Jadi penekanan di input bukan di harga, karena penentu harga bukan kita.... Kemarin dipilih kelompok tani yang bener-bener aktif. Selain itu dulu kan juga ada pelatihan waktu puasa-puasa itu, itu juga sebagai rangkaian pengembangan pertanian organik dalam rangka meningkatkan SDM. Hal-hal itu bisa dijadikan strategi supaya pertanian organik ini bisa terus dilanjutkan”. (Wawancara tanggal 16 Oktober 2012).

Melalui informasi tersebut diketahui cara lain yang dapat digunakan agar pertanian organik dapat terus dilakukan oleh petani, yaitu menekankan pemahaman bahwa pertanian organik memberi keuntungan melalui rendahnya input yang digunakan, karenanya jika dijual dengan harga sama seperti di pasar maka

petani tetap memperoleh untung.

Berdasarkan pernyataan tersebut konsep pemasaran yang ingin diterapkan sebagai rangkaian strategi pengembangan kawasan pertanian organik di Kota Batu adalah melakukan pasca panen yaitu pengemasan yang baik pada produk yang dihasilkan. Produk yang sudah dikemas dengan baik tersebut selanjutnya dijual dengan harga sama seperti produk anorganik di pasar. Harapannya pembeli akan lebih tertarik dan memilih produk organik yang sehat dan murah. Pada akhirnya produk anorganik akan sepi peminat dan beralih juga ke produk organik. Meskipun dijual dengan harga sama dengan produk anorganik petani organik tetap untung karena biaya produksi yang rendah.

Perwujudan pertanian organik di Kota Batu disadari tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Hal ini mengingat dalam sistem budidaya pertanian secara organik sendiri mencakup berbagai persyaratan teknis yang tidak mudah untuk dipenuhi, misalnya perlakuan bera atau pembiaran lahan selama 2-3 tahun serta tidak memperbolehkan penggunaan bahan kimia sama sekali. Karena itu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu berupaya menerapkan metode teknik budidaya yang memungkinkan terwujudnya pertanian organik di Kota Batu secara bertahap. Terkait dengan hal ini Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pertanian berkelanjutan itu kan bisa pertanian organik bisa juga bukan pertanian organik, tapi kalau organik biasanya mesti berkelanjutan. Posisi Kota Batu sekarang go organik masih dalam fase peralihan, yang penerapan dilapangan bisa ditempuh melalui GAP. Kalau GAP itu umum untuk tanaman, bisa bukan organik artinya masih menggunakan bahan kimia”. (Wawancara tanggal 3 September 2012).

Lebih lanjut mantan Kasie. Hortikultura menyampaikan kepada peneliti, mengenai hubungan antara teknologi GAP dan pertanian organik sebagai berikut:

“Perlu Inneke ketahui bahwa GAP itu adalah awal untuk menuju ke organik, jadi ini bukan merupakan sesuatu yang berbeda melainkan suatu sistem kesatuan. Jadi sebelum kita mengarah ke organik kita harus menerapkan GAP, nah awalnya GAP kita harus memiliki SOP, dari SOP kita harus memberikan pemahaman ke petani untuk melaksanakan SOP ini. SOP siapa yang nyusun? Dinas, petani, pelaku usaha, dan pedagang. Jadi standarisasinya ada dari situ. Nah setelah SOP dilaksanakan nanti ada registrasi kebun, kalau sudah registrasi kebun ini baru bisa mendapatkan sertifikasi prima, prima kan ada prima 3, prima 2, prima 1. Setelah sertifikat prima 3,2,1 terpenuhi maka tahap yang tertingginya adalah sistem pertanian organik. Jadi bukan sesuatu yang berbeda tapi suatu kesatuan. (Wawancara tanggal 2 Agustus 2012).

Dari kedua penjelasan tersebut diketahui bahwa untuk mewujudkan pertanian organik di Kota Batu ditempuh melalui penerapan GAP (*Good Agricultural Practices*) atau teknik budidaya tanaman yang baik. GAP sendiri sesuai Permentan No. 48/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (*Good Agricultural Practices For Fruit and Vegetables*) dijelaskan sebagai panduan budidaya buah dan sayur yang baik untuk menghasilkan produk bermutu yang mencakup penerapan teknologi yang ramah lingkungan, pencegahan penularan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), penjagaan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta prinsip penelusuran balik (*traceability*). Sedangkan Prosedur Operasional atau *Standard Operating Procedure* yang selanjutnya disebut SOP adalah petunjuk teknis standar penerapan teknologi budidaya yang spesifik komoditas dan spesifik lokasi serta teknologi untuk menghasilkan produk sesuai dengan target produksi dan mutu yang diharapkan. Penyusunan SOP hendaknya mengacu pada GAP.

Penerapan GAP dalam budidaya tanaman dimaksudkan untuk memperbaiki proses produksi menjadi lebih ramah lingkungan, meningkatkan kualitas produk sesuai standar, memungkinkan penelusuran semua aktivitas produksi dan dapat dilacak balik bila terjadi masalah atau keluhan dari konsumen. Secara teknis GAP masih memperbolehkan penggunaan bahan kimia anorganik dalam proses budidaya tanaman tetapi harus berdasarkan pertimbangan kondisi tanaman dan SOP yang telah disepakati.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan uraian diatas maka peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa strategi untuk mewujudkan keberlanjutan pertanian organik yang Kota Batu adalah dengan membentuk kawasan organik di beberapa desa sebagai *pilot project* atau blok percontohan dengan tujuan akhir diarahkan sebagai agrowisata. Harapannya keberhasilan penerapan pertanian organik pada kawasan yang dibentuk dapat memotivasi masyarakat di desa lain untuk turut serta menerapkan pertanian organik pada lahan pertaniannya. Selanjutnya disusun pula skenario dalam pembentukan kawasan pertanian organik tersebut yang diharapkan mampu memberi pengaruh positif dalam jangka panjang, yaitu:

1. Pembentukan kawasan dilakukan pada lokasi yang memiliki potensi sebagai penghasil sayur, dengan jenis komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat setempat dan memiliki nilai ekonomis tinggi (unggulan).
2. Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya adalah demoplot dengan pelaksana adalah petani sendiri. Adapun pihak dinas berperan sebagai fasilitator yang mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana produksi organik.

3. Upaya perubahan pola pikir menuju organik dilakukan melalui pelaksanaan penyuluhan, pendampingan, dan sekolah lapang petani selama pelaksanaan kegiatan.
4. Teknologi peralihan konversi pertanian dari konvensional menuju organik ditempuh melalui penerapan GAP, memperbanyak penggunaan bahan organik (pupuk dan pestisida), dan pengenalan teknologi organik (penggunaan dan pembuatan secara mandiri oleh petani).
5. Meningkatkan nilai jual produk melalui perbaikan penanganan pasca panen dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang ditempuh adalah memperbaiki pengemasan produk dan tetap menjual produk yang dihasilkan dengan harga pasar. Pemahaman yang diberikan adalah biaya usaha tani secara organik yang rendah sehingga meskipun dijual dengan harga pasar maka petani tetap memperoleh keuntungan.

5.1.4 Faktor-faktor pendukung dan penghambat perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu

5.1.4.1 Faktor pendukung

a. Adanya dukungan sumber daya alam

Dukungan sumber daya alam bagi perencanaan pengembangan pertanian organik disampaikan oleh beberapa narasumber berikut ini.

Pengelola PT. Herbal Estate menjelaskan keuntungan daerah di dataran tinggi melalui pernyataan berikut:

“Pertanian organik itu penambahan biomassa cuma bisa dilakukan di dataran tinggi. Diasumsikan tanaman dataran rendah itu bisa ke dataran tinggi, tapi kalau tanaman dataran tinggi itu belum tentu bisa diterima di dataran rendah, jadi di dataran tinggi semua bisa masuk. Nah memang kita pilih pertama harus sumber airnya yang jelas, dan setelah kita pilih-pilih tempat yang sesuai ya di Batu ini”. (Wawancara tanggal 9 Agustus 2012).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dukungan potensi sumber daya alam di Kota Batu terutama ketinggian tempat serta keberadaan sumber mata air menjadi salah satu alasan bagi praktisi dan pengusaha produk organik tersebut untuk mengembangkan usahanya di Kota Batu. Pernyataan tersebut didukung oleh mantan mantri tani wilayah Kecamatan Bumiaji yang menambahkan keberadaan hutan sebagai salah satu dukungan alam di Kota Batu untuk mengembangkan pertanian organik melalui pernyataan sebagai berikut:

“Insya Allah pemilihan organik di Kota Batu ini cocok, satu, kota Batu letaknya 750-1700, yang diatas sampai 2000, itu kontaminasi disekitarnya itu minim, dua, terus di Batu ada 111 sumber mata air, otomatis kalau kita menggantungkan pada sumber itu kan masih murni, kalau misalnya ada semprotan kan dari atas *kegiles* (tercuci-pen.), kajian ilmuwan untuk organik masih diatas 600 m dpl yang dianggap bisa dipercaya organiknya, ketiga border hutan yang kita miliki, untuk hama kan diborder oleh hutan itu, memang masing-masing desa tidak selalu ada hutan, tapi model yang kita kembangkan kan model kawasan, ke empat, ya kondisi alamnya, kondisi udara, lingkungan masih mendukung”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Hasil observasi dan dukungan data sekunder masih ada dukungan sumber daya alam yang dimiliki Kota Batu, yaitu jenis tanah yang ada di Kota Batu. Kota Batu memiliki beberapa jenis tanah, yaitu tanah Andisol, Kambisol, dan Latosol yang seluruhnya masuk kedalam kategori tanah subur dan cocok untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Meskipun saat ini terjadi penurunan kualitas tanah yang berimbas pula pada penurunan kesuburan tanah namun kondisi tersebut dapat diperbaiki dengan penggunaan pupuk organik hingga dicapai tingkat kesuburan tanah seperti semula, atau paling tidak mendekati semula. Pengembangan penerapan pertanian organik secara berkelanjutan akan membantu mempercepat kembalinya kondisi tanah subur di Kota Batu.

Dukungan sumber daya alam yang dimiliki Kota Batu merupakan kelebihan tersendiri yang jarang dimiliki oleh daerah lain. Pengelola PT. Herbal

Estate menaruh harapan kepada seluruh masyarakat di Kota Batu untuk memperhatikan anugrah tersebut melalui pernyataan berikut:

“Kalau kita mentok sumberdaya alamnya nggak ada itu mungkin akan lebih susah. Lebih enak nggerakkan orangnya, nggak mungkin juga dari sejuta penduduk di Batu ini pemikirannya sama semua ke konvensional aja, cuma belum menemukan orangnya saja, potensi alamnya sudah ada, intinya potensi alamnya itu, misalnya di Surabaya, potensi alamnya nggak ndukung tapi orangnya ndukung semua itu kita tetep nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak mungkin juga misalnya dari sejuta orang di Batu nggak ada yang pingin sehat, saya yakin sekali masyarakat di Batu ini bisa”. (Wawancara tanggal 9 Agustus 2012).

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa dukungan sumber daya alam yang dimiliki Kota Batu merupakan modal awal bagi pengembangan pertanian organik. Beliau memberi contoh melalui kondisi di Kota Surabaya yang penduduknya cukup banyak mendukung produk organik namun karena tidak didukung oleh sumber daya alam maka tidak banyak hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya. Menggarisbawahi pernyataan di atas maka dukungan sumber daya alam yang ada di Kota Batu perlu disadari, dilindungi dikembangkan, dan dimanfaatkan secara bijaksana oleh pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat Kota Batu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber tersebut diatas maka dapat disimpulkan faktor pendukung dari segi potensi sumber daya alam meliputi posisi Kota Batu sebagai daerah dataran tinggi; keberadaan sumber mata air yang cukup banyak di Kota Batu; keberadaan hutan di sebagian wilayah Kota Batu; serta jenis tanah subur yang dimiliki oleh Kota Batu.

b. Adanya dukungan sosial kemasyarakatan

Selain dukungan sumber daya alam dan potensi ekonomi, dukungan terhadap pengembangan pertanian organik di Kota Batu diperoleh dari kondisi sosial masyarakatnya. Potensi yang dimiliki masyarakat di Kota Batu terkait

dengan kearifan lokal masyarakat asli Kota Batu yang sejak turun menurun berinteraksi dengan dunia pertanian. Kondisi demikian disampaikan oleh salah seorang aparat Desa Sumberejo, yang mengatakan sebagai berikut:

“Orang desa dari segi pendidikan kalau SDM agak kurang, tapi mereka pengalamannya pengalaman warisan bertaninya itu sudah mendarah daging. Karena gini, kalau dilihat itu para pemuda yang petani itu jarang sekali yang keluar, mereka lebih suka, rela jadi buruh tani, terus lambat laun mereka berkembang jadi petani sendiri. Jadi kalau ada pihak-pihak yang bisa memberi cara pandang mereka terhadap organik mungkin lama kelamaan juga gampang. Kan sekarang anak-anak remaja sekarang pendidikannya juga nggak seperti dulu kan, kalau angkatan saya ke belakang itu kan juarang sekali yang sekolah, pokoknya *isoku ngene yo wis ngene ae* (saya yang bisanya begini ya begini saja-pen.), kalau yang sekarang kan anak-anak minimal SMP, SMA, SMK sudah banyak”. (Wawancara tanggal 29 Agustus 2012).

Dari informasi di atas diketahui bahwa pengalaman masyarakat Kota Batu dalam bidang pertanian diperoleh sejak kecil sehingga mereka sudah sangat paham mengenai budidaya tanaman. Hal ini memberi peluang kemudahan dalam hal transfer teknologi budidaya pertanian, termasuk teknologi organik. Disisi lain tingkat pendidikan yang semakin tinggi jika dibandingkan dengan kondisi di masa lalu juga mendukung penerimaan informasi baru. Sebagian kaum muda yang bekerja di bidang pertanian terutama di Desa Sumberejo umumnya lebih suka bekerja di desanya sendiri daripada di tempat lain.

Stakeholder utama dalam upaya pembangunan pertanian termasuk dalam hal pengembangan pertanian organik adalah petani itu sendiri karena mereka merupakan pelaksana di lapangan. Karena itu faktor kesediaan petani untuk menerapkan teknologi pertanian organik menjadi hal utama. Di Kota Batu sudah mulai tumbuh kesadaran dan kemauan di tingkat petani untuk mulai menerapkan teknologi pertanian organik, atau paling tidak teknologi GAP seba-

gai proses untuk menuju organik. Hal ini diungkapkan pula oleh aparat Desa Sumberejo sebagai berikut:

“Kalau dulu petani *juarang* pakai pupuk organik, sekarang sudah *pake*, trus kadang kan ada *dum-duman* pupuk organik dari dinas itu *gelem njupuk, kadang rebutan, kadang nggawe dewe, iku petani sing melok SL. Trus bentuk pupuk sing* sudah siap pakai kebanyakan mereka juga mempraktekan itu, kadang ditambahi iki, *dirageni iki*. Sebagian juga ada yang buat pestisida organik sendiri tapi masih dicampur-campur”.

(Kalau dulu petani jarang memakai pupuk organik, sekarang sudah memakai, terkadang ada pembagian pupuk organik dari dinas itu mau mengambil, terkadang berebut, terkadang buat sendiri, itu petani yang mengikuti SL (sekolah lapang-pen). Untuk bentuk pupuk organik yang siap pakai kebanyakan juga sudah mempraktekan, bahkan terkadang ditambah bahan-bahan lain. Sebagian petani juga ada yang membuat pestisida organik sendiri tetapi masih dicampur-campur”. (Wawancara tanggal 29 Agustus 2012).

Melalui penjelasan aparat desa tersebut diketahui bahwa salah satu teknologi pertanian organik sudah banyak diterapkan oleh petani di Sumberejo, terutama petani yang pernah mengikuti kegiatan sekolah lapang (SL). Bahkan beberapa diantaranya sudah dapat membuat pupuk dan pestisida organik. Kondisi demikian sudah tentu menjadi nilai lebih yang diharapkan mampu mendukung pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Kesiapan petani tercermin pula dari adanya usulan masyarakat pada kegiatan musrenbang untuk melaksanakan pertanian organik di desanya.

Terkait dengan kesiapan petani untuk menerapkan teknologi pertanian organik, hasil wawancara dengan beberapa petani menemukan beberapa hal yang mampu menarik minat mereka untuk mau menerapkan teknologi tersebut. Terdapat pemahaman yang cukup berbeda antara petani yang sudah paham tentang teknologi organik dengan petani awam. PPL Desa Torongrejo mengemukakan alasan petani di wilayah binaannya bersedia mengikuti kegiatan

karena adanya kesempatan memperoleh bantuan dari dinas. Hal ini disampaikan melalui pernyataan berikut:

“Pengetahuan petani di Torongrejo kan untuk pertanian organik masih kurang, mereka masih mengandalkan pestisida maupun pupuk kimia. Petani bisa menerima karena ada bantuan dari dinas, bantuan bibit sama bantuan pupuk itu, mereka nggak mengembalikan. Kalau nggak ada bantuan dari dinas ya mau tapi pelan-pelan. Ketika saya masuk di Torongrejo itu mereka nggak mau pakai pupuk kandang, setelah 2006 itu mulai masuk pakai pupuk kandang meskipun nggak sesuai (Wawancara tanggal 12 September 2012).

Selanjutnya petani organik di Desa Sumberejo, Bapak M, memilih menerapkan pertanian organik paham mengenai peluang produk organik dan kerusakan lahan pertanian. Beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Satu karena mengikuti program pemerintah, Pak Edi Rumpoko kan juga sudah mencanangkan waktu itu di Torongrejo, kedua ya sekarang minat konsumen sudah mengarah ke organik, tiga mengingat lahan sudah parah”. (Wawancara tanggal 15 Agustus 2012).

Sedangkan keinginan untuk tidak tergantung dari pupuk buatan pabrik dan mengoptimalkan limbah yang ada menjadi alasan bagi Ketua Kelompok Tani Tanuse untuk menerapkan pertanian organik. Hal ini dijelaskan melalui pernyataan berikut:

“Kalau khususnya di saya mau bertani organik itu karena memanfaatkan limbah yang ada, kebetulan saya punya ternak untuk memenuhi kebutuhan pupuk organiknya, kedua kalau dari segi pemikiran, kita tidak ingin terus-terusan tergantung pada produk pabrikan, contohnya kita sebenarnya bisa bikin produk-produk tertentu termasuk dekomposer, sebenarnya kita bisa buat sendiri, dengan biaya tiga puluh ribu bisa bikin seratus liter”. (Wawancara tanggal 29 Agustus 2012).

Pendapat lain diberikan oleh Bapak A dan Bapak T, petani dari desa Torongrejo yang bersedia menerapkan pupuk organik sebagai salah satu teknologi dalam pertanian organik karena telah merasakan dampak positif penggunaan pupuk organik. Selain meningkatkan produksi juga membuka

peluang usaha pupuk organik bagi kelompok. Bapak A mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:

“Sing paling seneng (yang paling suka-pen.) itu ya pupuknya kalau pakai pupuk organik itu hasilnya itu bagus sekali. Pupuknya pakai pupuk pabrik sama kelompok saya buat sendiri dari pupuk kambing difermentasi trus saya giling biar mudah diserap. Pupuk kambing yang dibuat kelompok saya sebagian untuk konsumsi kelompok petani sendiri sama umum dijual tiap saknya enam belas ribu”. (Wawancara tanggal 21 September 2012).

Sedangkan Bapak T mengungkapkan keuntungan lain bahwa dengan menggunakan pupuk organik dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50% melalui pernyataan berikut: “Harga pupuk organik beda sekali, kalau pupuk organik itu bener butuhnya banyak tapi kan cuma sekali di awal, kalau sudah pakai pupuk organik pakai pupuk kimianya lebih rendah, 50% lah”. (Wawancara tanggal 21 September 2012).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber maka dapat disimpulkan beberapa faktor pendukung perencanaan pengembangan pertanian organik dari segi potensi sosial kemasyarakatan adalah: kearifan lokal masyarakat di Kota Batu bahwa sebagian besar penduduk Kota Batu adalah petani dan akrab dengan dunia pertanian sejak kecil; mulai ada peningkatan sumber daya manusia (petani) yaitu peningkatan kemampuan petani untuk menerapkan teknologi organik dan sudah cukup banyak petani yang mengikuti kegiatan sekolah lapang (SL), serta meningkatnya rata-rata pendidikan masyarakat di Kota Batu; kesediaan petani untuk menerapkan teknologi pertanian organik.

c. Adanya dukungan pemerintah Kota Batu

Terlaksananya upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan tidak lepas dari dukungan pemerintah Kota Batu. Dukungan diberikan secara langsung melalui Dinas

Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sebagai pelaksana pembangunan di bidang pertanian. Dinas Pertanian dan Kehutanan berupaya untuk mengembangkan pertanian organik melalui beberapa agenda kegiatan yang telah direncanakan. Usulan penyediaan anggaran untuk memwadahi upaya pengembangan juga intens dilakukan, baik melalui jalur APBD II, APBD I, maupun dana APBN. Selain itu pihak dinas juga berupaya menggandeng pihak-pihak lain yang berkompeten di bidang pertanian organik seperti dari perguruan tinggi, balai penelitian serta perusahaan swasta pemasok hasil produk organik untuk mensukseskan upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu.

Disisi lain dukungan pemerintah Kota Batu diberikan melalui pencanangan slogan 'Batu Go Organik". Sebagai salah satu upaya perwujudan pertanian organik di Kota Batu maka pemerintah Kota Batu mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pengalokasian sebagian alokasi dana desa untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung penerapan pertanian organik di desa tersebut. Kebijakan tersebut disebutkan dalam RPJP Kota Batu Tahun 2005-2025 dan pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2012.

d. Adanya lembaga pendukung pertanian organik

Upaya pembangunan membutuhkan dukungan kelembagaan yang mampu mempercepat dan memwadahi berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah. Dalam bidang pertanian lembaga yang mampu menjalankan fungsi tersebut adalah kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan). Kelembagaan petani di Kota Batu sendiri tercatat cukup banyak dan rata-rata masih aktif. Jumlah keseluruhan kelompok tani di Kota Batu adalah 210, dan yang masih aktif adalah 175 kelompok. Kelompok tani atau Gapoktan tersebut dapat dilibatkan dan diperkuat perannya dalam hal

penyediaan dan pengelolaan pupuk organik seperti yang telah dilakukan oleh beberapa kelompok tani, misalnya Kelompok Tani Rukun Tani di Desa Torongrejo, dan Gapoktan Sumber Jaya di Desa Sumberbrantas. Kelompok tani dan gapoktan tersebut merupakan wadah yang tepat dalam mempercepat arus informasi teknologi pertanian organik di kalangan petani.

Selain itu salah satu potensi besar yang dimiliki oleh Kota Batu terkait dengan lembaga kelompok tani adalah keberadaan kelompok tani yang telah memiliki sertifikat organik, yaitu Kelompok Tani Tanuse (Tanaman Menuju Sehat) di Desa Sumberejo. Kondisi tersebut paling tidak diharapkan mampu memberi motivasi kepada kelompok tani yang lain bahwa bertani organik itu bisa dilakukan, bisa mendapatkan sertifikat dan memberikan banyak keuntungan secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kota Batu juga memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mawadahi bidang pertanian sebagai salah satu bidang jurusannya. Yaitu SMKN 02 yang terletak di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji. Keberadaan SMK tersebut diharapkan mampu memberikan pengetahuan dasar mengenai pentingnya pertanian organik dan pemahaman pertanian organik yang benar kepada generasi muda Kota Batu. Selain itu di Kota Batu juga terdapat lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pengembangan pertanian organik, misalnya PPAH (Pusat Pengembangan Agen Hayati). Lembaga swadaya masyarakat tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan pertanian organik di Kota Batu melalui penyediaan hasil teknologi pertanian organik seperti pupuk organik dan pestisida hayati, bantuan konsultasi untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman.

Kota Batu merupakan salah satu bagian dari Malang raya. Posisinya cukup dekat dengan Kota Malang yang merupakan kota pendidikan dengan keberadaan perguruan tinggi negeri/swasta. Diantara perguruan-perguruan tinggi tersebut cukup banyak pula yang membuka fakultas pertanian sebagai salah satu bidang pendidikannya. Dengan posisi yang dekat tersebut maka memudahkan pihak dinas untuk melakukan kerjasama dan konsultasi mengenai upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Selain itu kondisi Kota Batu sebagai sentra pertanian menyebabkan banyak mahasiswa dan pengajar perguruan tinggi yang melakukan penelitian maupun kegiatan kemahasiswaan di Kota Batu, misalnya saja praktek kerja lapangan atau kuliah kerja nyata. Dalam melakukan kegiatan mereka juga memasukkan kegiatan pertanian organik di dalamnya. Hasil wawancara peneliti dengan petani menunjukkan kondisi tersebut. Bapak A, petani Desa Torongrejo mengatakan bahwa:

“Kalau saya taunya organik itu yang jelas karena ada penyuluhan, kalau ada penyuluhan terus ada penelitian dikasih info dari dinas. Selain dinas ada juga dari Unibraw ada, dari Unmu juga ada, ya itu mahasiswa yang sedang pengabdian, KKN di sini”. (Wawancara tanggal 21 September 2012).

Dari informasi tersebut diketahui bahwa keterlibatan pihak perguruan tinggi tersebut dapat membantu sosialisasi penerapan teknologi pertanian organik di kalangan petani.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara maka dapat diketahui faktor pendukung perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu dari segi kelembagaan adalah: sudah banyak dibentuk kelompok tani dan gapoktan; adanya SMK pertanian di Kota Batu; keberadaan organisasi maupun lembaga swadaya masyarakat bidang pertanian organik seperti PPAH; perguruan tinggi di sekitar Kota Batu.

e. Adanya faktor pendukung lainnya

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Konsep tersebut mencakup berbagai bidang pembangunan termasuk pula bidang pertanian. Maka dari itu telah ditetapkan beberapa aturan perundangan yang mensyaratkan dilakukannya pembangunan pertanian berkelanjutan, yang salah satunya dapat ditempuh melalui penerapan pertanian ramah lingkungan. Beberapa peraturan tersebut adalah UU No. 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, PP No. 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, UU No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Permentan No. 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang pedoman budidaya buah dan sayur yang baik, Permentan No. 62/Permentan/OT.140/10/2010 tentang registrasi lahan. Ditetapkannya aturan-aturan tersebut menjadi motivasi bagi pelaksana pembangunan di daerah untuk merencanakan pembangunannya sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu sebagai salah satu sektor utama sasaran pembangunan secara nasional maka Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu berupaya juga mendukung program pembangunan dari Kementerian Pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. Salah satu tantangan pembangunan pertanian adalah peningkatan produktivitas, mutu dan nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan menjadi salah satu pendorong dilaksanakannya upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu, sebagaimana diungkapkan oleh mantan Kepala Seksi Hortikultura sebagai berikut:

“Upaya pengembangan pertanian organik ini didorong juga oleh teman-teman di pusat yang juga menjadi program nasional ya untuk memperbaiki, merevitalisasi sistem pertanian dengan berbagai sifat fisiknya. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Faktor pendukung lainnya adalah keterlibatan media massa terutama untuk sosialisasi kegiatan. Rencana kegiatan yang telah disosialisasikan terutama melalui media massa, telah memberi kekuatan tersendiri bagi perencana untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini terungkap dari pernyataan Kabid. Peternakan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Kalau suatu rencana kegiatan sudah diliput melalui media ada positif, ada negatifnya juga, tapi paling tidak bisa menjadi support untuk melaksanakan dan membantu sosialisasi juga”. (Wawancara tanggal 6 Agustus 2012).

Terwujudnya pertanian organik di Kota Batu tidak lepas dari adanya lembaga sertifikasi. Terbukti pelaku organik yang sudah bersertifikat memiliki kelebihan peluang pasar dari mereka yang tidak bersertifikat. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak M, anggota Kelompok Tani Tanuse sebagai berikut:

“Saya itu promo mbak ke orang-orang yang mau mbantu masarkan produk organik saya ke perumahan ke rumah sakit itu dengan harga dibawah kimia, terus dia ditanya beneran ini organik lha kok harganya murah? Dijawab iya langsung beli dari petani, ditanya lagi lha petaninya gak rugi kalo harganya murah dan lain-lain, dijawab lagi iya kalo petani yang baru-baru itu lha ini ndak. Wis gini aja, saya tunjukkan sertifikat, wis jaminannya ini aja sampeyan lihatkan, akhirnya mau yang mau beli itu. Ditanya lagi sama yang mbantu masarkan itu ke pembelinya: lha sampeyan mau yang harganya murah apa mahal, gitu. Mesti akhirnya gitu”. (Wawancara tanggal 15 Agustus 2012).

Dari penjelasan tersebut peneliti melihat masih ada keraguan di kalangan masyarakat umum mengenai kebenaran produk organik serta pemahaman bahwa produk organik itu mahal. Padahal seperti penjelasan yang disampaikan oleh salah seorang petani organik, Bapak M kepada peneliti bahwa jika memang kondisi pertanian sudah jadi maka biaya yang dikeluarkan sangat rendah sehingga jika dijual meskipun dengan harga dibawah produk kimia masih memberikan keuntungan. Dengan demikian kesulitan pemasaran pada kelebihan

produk yang dihasilkan dapat diatasi dan hal ini sangat didukung dengan adanya sertifikat yang dimilikinya sebagai anggota kelompok tani Tanuse.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dan pengamatan peneliti maka diketahui beberapa faktor lain yang mendukung perencanaan pengembangan pertanian organik antara lain regulasi atau peraturan yang mengarah untuk melaksanakan pertanian berkelanjutan; keterlibatan media massa, serta adanya lembaga sertifikasi.

Dari hasil analisis keseluruhan faktor-faktor yang mendukung perencanaan pengembangan pertanian organik tersebut dapat diketahui faktor-faktor pendukung internal yaitu berasal dari dalam wilayah Kota Batu, maupun faktor pendukung eksternal (berasal dari luar wilayah Kota Batu) sebagai berikut:

1. Faktor pendukung internal:

- a. Adanya dukungan sumber daya alam, meliputi:
 - posisi Kota Batu sebagai daerah dataran tinggi
 - keberadaan sumber mata air yang cukup banyak
 - keberadaan hutan di sebagian wilayah Kota Batu
 - jenis tanah subur yang dimiliki oleh Kota Batu.
- b. Adanya dukungan sosial kemasyarakatan, meliputi:
 - kearifan lokal masyarakat di Kota Batu bahwa sebagian besar penduduk Kota Batu adalah petani dan akrab dengan dunia pertanian sejak kecil
 - mulai ada peningkatan sumber daya manusia (petani) yaitu peningkatan kemampuan petani untuk menerapkan teknologi organik dan sudah cukup banyak petani yang mengikuti kegiatan sekolah lapang (SL), serta meningkatnya rata-rata pendidikan masyarakat di Kota Batu
 - kesediaan petani untuk menerapkan teknologi pertanian organik

- c. Adanya dukungan pemerintah Kota Batu, meliputi:
 - pencanangan slogan ‘Batu Go Organik’
 - kebijakan alokasi dana desa untuk kegiatan pertanian organik
 - d. Adanya lembaga pendukung pertanian organik, meliputi:
 - sudah banyak dibentuk kelompok tani dan gapoktan;
 - SMK dengan bidang keahlian pertanian;
 - keberadaan organisasi maupun lembaga swadaya masyarakat bidang pertanian organik seperti PPAH (Pusat Pengembangan Agensi Hayati)
2. Faktor pendukung eksternal:
- a. adanya wisatawan yang mengunjungi Kota Batu
 - b. adanya perguruan tinggi di sekitar Kota Batu
 - c. adanya regulasi atau peraturan yang mengarah untuk melaksanakan pertanian berkelanjutan;
 - d. adanya keterlibatan media massa di luar Kota Batu
 - e. adanya lembaga sertifikasi
 - f. adanya potensi dukungan dana dari luar Kota Batu (APBD I, APBN)

5.1.4.1.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang menyebabkan perencanaan pengembangan pertanian organik tidak dapat maksimal, termasuk dalam hal pelaksanaannya. Berikut ini disajikan beberapa hasil wawancara terkait dengan faktor penghambat perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu.

a. Adanya kendala teknis lapangan

Membiasakan penerapan pertanian organik di kalangan petani membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Berbagai faktor teknis di lapangan terkait upaya penerapan pertanian organik seringkali menjadi sebab petani berpi-

kir beberapa kali sebelum memutuskan bersedia atau tidak menerapkan teknologi tersebut. Beberapa kendala teknis yang menjadi faktor penghambat dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu terungkap melalui hasil wawancara dan pengamatan penelitian.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Kalau bicara organik terutama pada proses transisi seperti ini kan pasti ada kemungkinan penurunan hasil, nah itu yang perlu disosialisasikan sebanyak mungkin kepada masyarakat terutama para petani”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Melalui penjelasan tersebut kendala teknis yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan penurunan hasil pada masa peralihan dari cara bertani secara konvensional menuju organik. Hal ini sedapat mungkin disosialisasikan kepada petani. Ketika peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai kemungkinan kompensasi dari adanya penurunan hasil tersebut Kepala Dinas menjelaskan bahwa belum ada kompensasi secara khusus terkait penurunan hasil.

Kendala teknis lainnya yang cukup meresahkan adalah kesulitan dalam pengendalian serangan hama penyakit tanaman sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian menggunakan bahan kimia. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan mantan Mantri Tani Kecamatan Junrejo yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kendalanya banyak ya dilapangan terutama permasalahan seperti di Sumberbrantas di komoditas kentang ada penyakit yang tidak bisa diatasi dengan pestisida nabati, nah ini petaninya langsung menggunakan pestisida kimia”. (Wawancara tanggal 2 Agustus 2012).

Demikian pula yang dialami oleh petani di Desa Torongrejo yang masih ragu untuk benar-benar meninggalkan pestisida kimia melalui pernyataan yang disampaikan sebagai berikut: “Selama ini sangat menerima cuma kendalanya ya

itu kalau pakai insektisidanya itu benar-benar lepas kimia belum berani". (Wawancara tanggal 21 September 2012).

Peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) juga dimungkinkan adanya fenomena perubahan iklim. Saat ini periode musim hujan dan musim kemarau semakin bergeser yang berimbas pula pada perkembangan OPT. Dampak perubahan iklim bisa secara langsung maupun tidak langsung melalui serangan OPT. Fluktuasi suhu dan kelembaban udara yang semakin meningkat mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan OPT sehingga seringkali menstimulasi ledakan (*outbreak*) beberapa hama dan penyakit utama tanaman. Kekeringan akan menyebabkan meningkatnya populasi ulat, sebaliknya pada musim penghujan serangan penyakit yang disebabkan oleh cendawan lebih dominan.

Selanjutnya upaya penerapan pertanian organik secara murni mengalami hambatan terkait kontaminasi bahan kimia dari kondisi air yang digunakan. Salah seorang petani di Desa Pendem, Bapak A (50 th), mengatakan hal sebagai berikut:

"Permasalahan mengapa tidak bisa organik murni adalah karena pengairan kami di hilir, jadi kalau kita bunyinya organik tidak mungkin karena airnya sudah tercemar dari atas. Kalau di Sumber Ngepoh memang dia punya sumber sendiri, jadi bisa benar-benar organik. Untuk pengairan disini antara sumber sampai sini sekitar 6-7 kilo dari sumber Kali Lanang.....Kalau full organik kita nggak mungkin karena kita nggak punya sumber sendiri. Kalau kita kemarin dari SPP Lawang (STPP-pen) disarankan punya bak-bak penyaring, cuma kan kalau bak penyaring berarti air harus ada setiap hari, padahal disini giliran satu minggu cuma 2 kali, dapatnya malam". (Wawancara tanggal 11 September 2012).

Berdasarkan penjelasan Bapak A tersebut bahwa untuk menghasilkan produk yang murni organik sangat sulit karena lokasi lahan tidak memiliki sumber air sendiri dan posisi pada daerah hilir memungkinkan tingkat kontaminasi kimia

pada air cukup besar. Pernah ada saran dari Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) untuk membuat bak penyaring, tetapi terkendala keberadaan air yang tidak setiap hari ada. Selain itu pengamatan pada lokasi kawasan pengembangan yang dilakukan peneliti juga diketahui tidak ada border atau pembatas antara lahan blok pertanian organik dengan pertanian konvensional sehingga kemungkinan kontaminasi juga sangat mungkin. Hal ini dapat terlihat pada gambar 5. 7



Gambar 5.7 Lokasi penanaman sayur organik di Desa Torongrejo (Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2011)

Hasil wawancara dengan petani dan PPL diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan dalam hal pemberian bantuan sarana produksi untuk petani ada kelemahan terkait dengan kualitas dan ketepatan waktu pemberian bantuan. Kualitas benih yang kurang bagus disampaikan oleh petani di Desa Sumberejo dan Desa Torongrejo. Bapak Sk, penerima bantuan di Desa Sumberejo, menyatakan hal sebagai berikut:

“Bantuan dari Dinas itu saprodinya saya rasa sudah bagus, cuma benihnya yang bermasalah, benih kurang bagus, jadi orang-orang satupun nggak ada yang mau. Kalau pupuknya semua yang di daftar itu ngambil semua”. (Wawancara tanggal 29 Agustus 2012).

Ketidakseesuaian bantuan benih oleh Dinas disampaikan pula oleh

Bapak A, petani Desa Torongrejo, melalui pernyataan berikut:

“Untuk bantuan dari dinas keluhannya cuma itu saja waktu nggak cocok itu bibitnya nggak sesuai dengan keadaan disini. Yang bagus bawang merah bagus sama preinya juga bagus, jagung sama brungkul nggak cocok. Kalau yang brungkul terlalu panjang umurnya”. (Wawancara tanggal 21 September 2012).

Selanjutnya pernyataan PPL di Desa Torongrejo menjelaskan adanya ketelambatan pemberian alokasi bantuan sebagai berikut:

“Cuma kelemahannya atau kekurangannya kegiatan seperti itu kita seharusnya lebih selektif dalam pengadaan agen hayati, pupuknya. Pupuk yang didrop ke petani khususnya yang dari rekanan itu kualitasnya sangat kurang bagus. Keluhan dari masyarakat ada juga, keperluan produksi terus kenapa bibit datang nggak tepat waktu, terus kenapa pupuknya kok seperti tanah, makanya harapan saya kalau memang nanti ada lagi ya mencari rekanan yang baik sehingga apa yang diminta oleh petani dapat dipenuhi oleh pihak rekanan. Kemarin juga sudah berusaha difasilitasi kepada rekanan tentang yang diminta petani seperti bibit jagung itu, cuma alasan rekanan kan nggak boleh menyebut merk. (Wawancara 12 September 2012).

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan sarana produksi pertanian berupa benih dan pupuk organik terdapat kendala bahwa sarana produksi yang diberikan ada yang kualitasnya kurang bagus, tidak sesuai dengan yang diinginkan petani. Selain itu waktu pemberian benih juga terlambat sehingga petani harus menyesuaikan lagi waktu tanamnya.

Masalah jaminan pemasaran dan tuntutan terhadap yang harga yang tinggi pada produk organik juga menjadi salah satu kendala dalam upaya pengembangan pertanian organik di tingkat petani. Hal ini diungkapkan oleh PPL dan masyarakat petani di Desa Sumberejo sebagai berikut:

“Kalau masyarakat saya pikir cukup mendukung, tapi disisi lain tuntutan masalah pemasaran. Di Sumberejo kan minimal ada beberapa anggotanya yang sudah melakukan organik, tapi katakanlah misalnya belum organik murni, produknya itu *over* padahal

perusahaan mitra Kaliandra yang diminta 20-25 item tapi volumenya cuma 2-10 kg per item, akhirnya kelebihannya dijual ke pasar biasa.... Memang dari segi biaya nggak banyak, tapi kan mereka memandangnya kan pertanian secara ekonomis karena faktor kepemilikan lahan masing-masing di sana juga terbatas, bahkan ada juga yang sewa. Katakan kalau mereka punya 500 meter terus kalau gak di pas secara ekonomis untuk menghidupi keluarganya kurang. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Sumberejo mempunyai tuntutan harga yang lebih tinggi terhadap produk organik. Jika produk organik dijual dengan harga umum mereka merasa rugi. Disisi lain perusahaan mitra produk organik membutuhkan produk dengan jenis komoditi yang beragam tetapi dengan jumlah masing-masing per komoditi sedikit.

Selanjutnya Ketua Kelompok Tani Tanuse sebagai satu-satunya kelompok tani di Kota Batu yang telah mendapatkan sertifikat organik menyatakan pendapatnya terkait tuntutan harga tersebut sebagai berikut:

“Kendalanya itu kalau diajak organik petani disini pasti berbicara masalah harga, lha kita juga nggak berani menjajikan apa-apa takutnya kan jadi beban buat kita... jika tidak ada sertifikat maka pasar khusus organik sulit untuk menerima. Sedangkan untuk menerima produk dari petani lain maka perlu lagi pendaftaran penambahan jumlah areal untuk sertifikasi. (Wawancara tanggal 21 September 2012).

Melalui penjelasan tersebut diketahui bahwa pihak Kelompok Tani Tanuse telah berusaha mengajak petani sekitar untuk menerapkan pertanian organik namun terkendala tuntutan jaminan harga yang tinggi untuk produk organik yang dihasilkan. Sedangkan untuk memperoleh harga yang tinggi syaratnya harus sudah ada sertifikat organik yang mempunyai prosedur tertentu dan mahal.

Pendapat berbeda disampaikan oleh petani Desa Torongrejo yang tidak mempermasalahkan masalah harga sebagai berikut:

“Kalau pedagang disini nggak pilih entah itu organik apa nggak pokoknya kita beli bawang merah, kan kalau organik biasanya

nilainya kan lain, maksudnya dinas kan juga gitu, tapi disini nggak gitu. (Wawancara tanggal 21 September 2012).

Kondisi masyarakat di Desa Torongerejo tidak memperlakukan harga antara produk organik atau anorganik. Keduanya diperlakukan sama yaitu mengikuti harga yang berlaku di pasar.

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti maka dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi faktor kendala pada perencanaan pengembangan pertanian organik dalam hal teknis di lapangan adalah: kemungkinan penurunan hasil pada masa peralihan; serangan hama dan penyakit tanaman; kontaminasi bahan kimia melalui air dan udara; ketidaktepatan alokasi bantuan pemerintah; kesulitan dalam pemasaran; serta adanya persepsi dan tuntutan terhadap harga yang tinggi pada produk organik.

b. Adanya kendala sumber daya

Kendala yang dirasa cukup sulit adalah pola pikir organik belum sepenuhnya dipahami oleh petani, disisi lain pola pikir anorganik atau konvensional masih sangat kuat sebagaimana dikemukakan oleh beberapa orang PPL dan POPT. POPT wilayah Kecamatan Bumiaji menyatakan bahwa:

“Batu SDA-nya kuat untuk mendukung organik, yang menghambat adalah perilaku SDM-nya terutama petani. Filosofi organik di petani juga salah yaitu hanya menggunakan pupuk organik, padahal organik adalah suatu sistem”. (Wawancara tanggal 3 September 2012).

Koordinator PPL Kecamatan Bumiaji juga menggambarkan kebiasaan petani dalam mengelola tanamannya yang menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya memelihara ekosistem sebagai dasar untuk budidaya secara organik, melalui pernyataan berikut:

“Kebiasaan budaya petani kita itu yang boleh hidup hanya tanaman yang diusahakan, lainnya tidak boleh hidup misalnya rumput, hewan-hewan, padahal mereka juga diperlukan untuk

membentuk ekosistem dan tidak semuanya merupakan pengganggu tanaman budidaya. Kebiasaan menyemprot tanaman dengan pestisida kimia juga berubah dari yang dulunya sekitar 8 kali menjadi 20 kali, hal ini juga disebabkan hilangnya keseimbangan sehingga hama penyakit tanaman lebih banyak dan lebih tahan". (Wawancara tanggal 8 Agustus 2012).

PPL Kecamatan Pendem menambahkan sulitnya merubah pola pikir petani dari bertani anorganik menuju organik, sehingga diperlukan ketelatenan dan pemahaman secara bertahap melau penyuluhan sebagai berikut:

"Merubah pola perilaku mereka yang tadinya harus pakai pupuk sintesis akhirnya nggak pakai sama sekali itu susah memang, jadi akhirnya harus bertahap. Kita juga nggak bisa lihat perlakuannya setiap hari. Hari ini katanya nggak pakai eh tiba-tiba pakai, lihat kondisi tanaman jelek ya dia pakai sendiri". (Wawancara tanggal 31 Agustus 2012).

Hal lain terkait dengan sumber daya yang terungkap sebagai kendala dalam perencanaan pengembangan pertanian organik tersebut adalah keterbatasan dana yang menyebabkan kegiatan tidak berkesinambungan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Koordinator PPL Kota Batu bahwa: "Untuk tahun ini tidak dilanjutkan, yang ada untuk evaluasi saja, *lha anggaran* nggak ada, *sakjane* yo berlanjut, kemarin kita usulkan paling nggak difasilitasi untuk pupuk organiknya". (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012). Selain itu kurang tepatnya penyusunan anggaran menyebabkan ketersediaan dana yang cukup besar untuk pengembangan pertanian organik pada tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu tahun 2011, yaitu sebesar Rp.1.318.009.000, dalam realita kebutuhan biaya dalam teknis pelaksanaan hanya mengakomodir pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan dukungan dana yang minim, yaitu sebesar Rp. 2.850.000 yang diperuntukkan sewa tempat dan biaya makanan/minuman rapat. Kekurangan dana untuk sosialisasi akhirnya menggunakan dana lain diluar anggaran kegiatan pengem-

bangun pertanian organik. Dapat dilihat pula pada Gambar 5.5 pada acara sosialisasi tidak didukung dengan spanduk kegiatan. Selain itu juga tidak ada alokasi honorarium untuk tim pelaksana teknis kegiatan pengembangan kawasan organik yang menjadi salah satu penyebab rendahnya komitmen kerja anggota tim. Adapun peruntukan anggaran sebagian besar digunakan untuk penyediaan sarana produksi pertanian organik meliputi benih, pupuk dan pestisida organik.

Keterbatasan dana tidak hanya pada posisi dana kegiatan yang dianggarkan oleh dinas, tetapi juga dana yang dimiliki oleh petani. Dana yang terbatas menyebabkan petani tidak mau menerapkan pertanian organik (maupun teknologi yang mengarah ke organik) karena dianggap beresiko terhadap penurunan hasil. Selain itu kepemilikan lahan yang sempit dan dalam bentuk sewa menyebabkan petani enggan untuk mencoba menerapkan teknologi organik. Dalam hal ini petani lebih memperhitungkan sisi ekonomis mengenai keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan lahan yang tersedia secara maksimal dan asumsi penggunaan bahan kimia buatan akan membantu tanaman dapat tumbuh subur dan hama penyakit tanaman terkendali dengan baik melalui penggunaan pestisida kimia.

Keraguan petani pada penerapan pertanian organik menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang pertanian organik masih kurang. Petani selalu berpikir bahwa teknologi organik tersebut susah, ribet, memerlukan waktu lama dengan kemungkinan keberhasilan yang rendah. Hal ini diketahui dari beberapa pendapat petani berturut-turut sebagai berikut:

Petani konvensional desa Sumberejo, Bapak S, menyatakan bahwa:

“Masalahne lekne (masalahnya kalau) organik iku kan berkelanjutan gak iso (tidak bisa) ditinggal-tinggal, nanam kan terus menerus, gantian, sak gulud (satu guludan) ditanam sawi, sak gulud ditanam

gobis, kok koyok dulinan yo, terus harus ditunggu. (Wawancara tanggal 29 Agustus 2012).

Bapak S menganggap bertani secara organik merepotkan karena harus sering diamati, rotasi tanaman berkelanjutan, menanampun tidak boleh satu hamparan sama tetapi berbeda-beda tiap bedeng yang dianggapnya seperti bertani main-main. Selanjutnya pernyataan petani desa Sumberejo lainnya, Bapak Sw (45 th), mengakui bahwa bertanam secara organik sebenarnya lebih ringan biayanya, tetapi tidak dilakukan karena tidak telaten dan malu seandainya tanaman tumbuh kurang bagus akan ditertawakan tetangganya:

“Nanam model organik sebetulnya biayanya ya ringan, tapi yaitu nggak telaten, *ngkok lek tandurene ngingkrik diguyu tanggane*”. (Menanam dengan model organik sebetulnya biayanya ringan, tapi tidak telaten, nanti kalau tanaman pertumbuhannya tidak bagus ditertawakan tetangganya) (Wawancara tanggal 29 Agustus 2012).

Selain itu masih ada hal lain yang peneliti anggap sebagai faktor penghambat yaitu kondisi lahan pertanian yang cukup bermasalah. Seperti diketahui bahwa salah satu permasalahan utama di bidang pertanian adalah penurunan kualitas tanah pada lahan pertanian. Upaya untuk memperbaiki memerlukan cukup waktu dan biaya. Hal ini didukung oleh pendapat Pengamat Oranisme Pengganggu Tamanan (POPT), wilayah Kecamatan Bumiaji:

“Untuk SDA di Kota Batu yang paling berat adalah kondisi agrofisik tanah, dalam arti keseimbangan ekosistemnya lemah sehingga masukkan yang hanya berupa bahan organik saja tidak cukup, harus ada kegiatan untuk mengurangi bahan kimia secara drastis, kalau mau bisa melalui sterilisasi tanah tapi biayanya mahal (Wawancara tanggal 3 September 2012).

Dari keseluruhan hasil wawancara dan observasi mengenai kendala sumber daya sebagai faktor penghambat perencanaan pembangunan bidang pertanian organik di Kota Batu adalah: pola pikir pertanian konvensional yang sangat kuat di kalangan petani; kurangnya pemahaman yang benar mengenai konsep

dan teknologi pertanian organik di kalangan petani; perilaku lebih mengedepankan segi ekonomis di kalangan petani; keterbatasan dana di pihak pemerintah dan petani; serta kondisi lahan pertanian di Kota Batu.

c. Adanya kendala administrasi

Suatu upaya pembangunan akan dapat berjalan dengan lebih baik jika dilakukan berdasarkan suatu perencanaan yang baik pula. Pada upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu telah dilakukan upaya perencanaan, namun belum dituangkan dalam suatu dokumen yang memuat teknis perencanaan tersebut sebagai acuan pelaksanaan di lapangan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu menyebutkan bahwa memang belum disusun suatu dokumen perencanaan secara formal mengenai teknis pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Perencanaan yang dibuat hanya melalui koordinasi dan penyusunan jadwal tahapan pelaksanaan di lapang. Beberapa pendapat terkait dengan tidak adanya dokumen rencana teknis sebagai penghambat disampaikan sebagai berikut.

Hasil wawancara dengan mantan Kepala Seksi Hortikultura, yaitu:

“*Roadmap* itu baru kita rencanakan susun akhir-akhir tapi nggak tau lagi ada PAK itu, mestinya *roadmap* itu di awal, kalau ini ditinggal orangnya akhirnya ya kacau balau, tapi kalau ada *roadmapnya* siapapun yang memegang disitu pasti tau oh ini waktunya pada tahap yang ini, dan itu kembali ke komitmen lagi mau nggak mereka melaksanakan sesuai rencana yang dibuat”. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2012).

Hasil wawancara dengan PPL Desa Sumberejo sebagai berikut:

“Pertanian organik harusnya dibangun secara keseluruhan tidak sepotong sepotong, Untuk menyikapi seperti itu perlu keterampilan luas dan perencanaan yang jelas. Paling tidak harus ditata dulu kepastian pasarnya”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan kurang matang dan tidak tersusun dalam bentuk nyata sebuah doku-

men perencanaan teknis pengembangan pertanian organik (*roadmap*). Hal ini menyebabkan tidak ada panduan pasti dalam pelaksanaan di lapang. Keberadaan dokumen perencanaan diperlukan sebagai panduan pelaksanaan di lapang bagi semua pihak yang terkait. Selain itu rencana yang dilakukan dianggap belum menyentuh keseluruhan aspek yang diperlukan dalam rencana pengembangan pertanian organik, misalnya tentang kepastian pasar.

Selain mengenai perencanaan, faktor kekuatan hukum juga menjadi salah satu penghambat pelaksanaan rencana. Kekuatan hukum dalam hal ini misalnya terkait dengan pembentukan tim pelaksana teknis pengembangan kawasan pertanian organik yang hanya ditetapkan oleh Kepala Dinas. Karena yang mengeluarkan pihak eselon II dirasa tidak cukup kuat untuk mendorong komitmen anggota tim pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

Hambatan administrasi lainnya adalah koordinasi antar anggota tim yang masih kurang sehingga keterlibatan dan kontribusi yang diberikan tidak optimal. Hal ini diungkapkan oleh pejabat eselon III yang juga termasuk dalam tim tersebut sebagai berikut: “Yang saya rasakan itu koordinasi dalam perencanaan dengan tim sangat kurang dan lebih bersifat formalitas saja, sehingga mengurangi antusiasme anggota tim yang lain”. (Wawancara tanggal 8 Agustus 2012).

Hal senada disampaikan pula oleh salah satu PPL, sebagai berikut

“Pada awal mulai kawasan organik itu kan terbentuk tim, tapi tim itu hanya terbentuk begitu saja, nggak ada komunikasi entah apa... *Timne gak jalan yo saiki sing obah sing ndek lapang tok* (tim tidak jalan ya sekarang yang bergerak hanya petugas lapangan saja)”. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2012).

Selain itu ketersediaan data terkait pertanian organik dirasakan oleh peneliti masih sangat kurang. Data yang diinventarisir oleh petugas data hanya mencakup data umum sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan

propinsi. Sedangkan data potensi unggulan masih belum tercover termasuk data tentang beberapa jenis buah dan sayuran di Kota Batu, termasuk pula pertanian organik di Kota Batu baik dari segi produksi, komoditas, pengusaha, dan pemasarannya.

Dari hasil wawancara dan pengamatan tersebut maka diketahui faktor-faktor penghambat dari segi administrasi antara lain: belum ada rencana teknis kegiatan; kekuatan hukum SK tim pelaksana teknis; serta kurangnya koordinasi antar anggota tim pelaksana. Selain faktor-faktor penghambat yang telah dikelompokkan oleh peneliti sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat beberapa faktor lain yang dirasa mampu menjadi penghambat upaya pengembangan pertanian organik, yaitu perdagangan pupuk dan pestisida kimia sintetis, yang mana seringkali mereka berusaha mempengaruhi pemikiran petani agar memilih menggunakan produk kimia yang ditawarkan; pasar global yang memungkinkan masuknya komoditas hortikultura dari negara lain dan menjadi kompetitor produk yang dihasilkan oleh petani lokal; serta adanya persaingan dengan daerah lain. Terkait dengan persaingan dengan daerah lain, mantan mantri Tani Kecamatan Batu menyampaikan pendapatnya sebagai berikut: “Peluang produk organik itu dimasa depan besar, karenanya semua daerah sepertinya menuju kesana, jika tidak memulai dari sekarang maka kita akan tertinggal dengan daerah lain. (Wawancara tanggal 2 Agustus 2012).

Kesimpulan dari faktor-faktor yang menghambat perencanaan pengembangan pertanian organik secara internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Faktor penghambat internal:

- a. Adanya kendala teknis di lapangan, meliputi: kemungkinan penurunan hasil pada masa peralihan; serangan hama dan penyakit tanaman;

kontaminasi bahan kimia melalui air dan udara; ketidaktepatan alokasi bantuan pemerintah; kesulitan dalam pemasaran; persepsi dan tuntutan terhadap harga yang tinggi pada produk organik

- b. Adanya kendala sumber daya, meliputi: pola pikir pertanian konvensional yang sangat kuat di kalangan petani; kurangnya pemahaman yang benar mengenai konsep dan teknologi pertanian organik di kalangan petani; perilaku lebih mengedepankan segi ekonomis di kalangan petani; keterbatasan dana di pihak pemerintah dan petani; penurunan kualitas tanah pada lahan pertanian di Kota Batu
 - c. Adanya kendala administrasi, meliputi: belum ada rencana teknis kegiatan; kekuatan hukum SK tim pelaksana teknis; kurangnya koordinasi antar anggota tim pelaksana; ketersediaan data pendukung pertanian organik masih sangat terbatas
2. Faktor penghambat eksternal: a) keberadaan pupuk dan pestisida kimia; b) pasar global; c) perubahan iklim; d) serangan OPT

5.2 Pembahasan

Perencanaan pengembangan pertanian organik merupakan bentuk perencanaan pembangunan pada bidang pertanian sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah di Kota Batu secara keseluruhan. Pembangunan dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Karena itu perlu untuk memperhatikan aspek-aspek penting dalam perencanaan pembangunan, serta secara khusus pada konsep pembangunan pertanian. Perencanaan pengembangan pertanian organik melibatkan banyak *stakeholder* sesuai kapasitas peran masing-masing untuk mendukung keberhasilan upaya pengembangan pertanian organik. Untuk

lebih fokus pada keberhasilan pencapaian tujuan, maka perlu dilakukan upaya-upaya strategis yang ditempuh melalui pendekatan perencanaan strategis yaitu salah satunya tentang pelibatan *stakeholders*.

Pada dasarnya perencanaan strategis pertanian organik merupakan acuan dan bentuk idealisme pelaku pertanian organik di suatu daerah untuk mengembangkan pertanian organik di daerahnya. Melalui perencanaan strategis, unsur-unsur pemerintah dan *stakeholders* yang ada diupayakan untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaannya secara efektif yang dapat ditempuh melalui pendekatan manajemen strategis. Dengan demikian kajian pada penelitian ini memadukan antara konsep perencanaan pembangunan dan perencanaan strategis sebagai kesatuan dalam kegiatan perencanaan pembangunan di daerah pada bidang pengembangan pertanian organik.

Perencanaan pengembangan pertanian organik berada pada domain perencanaan publik sehingga bersifat kompleks terkait kemungkinan permasalahan yang timbul serta teknis penerapannya di lapangan oleh *stakeholders*. Karena itu dalam melakukan perencanaan perlu memperhatikan ilmu perencanaan baik dalam hal prosedur perencanaan maupun kontribusi ilmu lainnya sebagai substansi dalam perencanaan pengembangan pertanian organik. Hal ini mengacu pada penjelasan Faludi (1976: 3) bahwa dalam diskusi mengenai teori perencanaan, ada dua teori besar di dalamnya yaitu teori prosedural dan teori substantif. Teori prosedural yang dikaji pada penelitian ini terutama meliputi kajian perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan strategis, dengan substansi perencanaan pada pembangunan pertanian berkelanjutan dan konsep pengembangan pertanian organik.

Kajian terhadap teori prosedural dan teori substantif dalam perencanaan dibahas pada fokus dan sub fokus penelitian ini. Fokus pertama mengenai perencanaan pengembangan pertanian organik lebih banyak mengkaji tentang aspek-aspek dalam perencanaan pembangunan; fokus kedua mengenai *stakeholders* dalam perencanaan pengembangan pertanian organik dibahas melalui pendekatan perencanaan strategis; adapun fokus ketiga mengenai strategi perencanaan untuk keberlanjutan pengembangan pertanian organik lebih banyak dibahas mengenai substansi perencanaan pembangunan berkelanjutan, terutama untuk keberlanjutan pengembangan pertanian organik di Kota Batu; sedangkan fokus keempat mengenai faktor pendukung dan penghambat perencanaan mengkaji tentang hal-hal yang berpengaruh pada perencanaan, termasuk kaitannya dengan administrasi pembangunan.

5.2.1 Perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu

5.2.1.1 Deskripsi upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu

Pengembangan pertanian organik di Kota Batu sesuai dengan hasil penelitian sebenarnya telah diupayakan sejak awal berdirinya Kota Batu pada tahun 2002. Hal ini berpijak pada kondisi nyata yang terjadi di Kota Batu terutama terkait dengan adanya penurunan daya dukung lahan yang terlihat dari penurunan secara drastis produksi buah apel baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Penurunan tersebut memang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti perubahan iklim serta serangan hama penyakit tanaman, namun ditengarai penurunan kualitas tanah menjadi faktor utama. Karena itu untuk mengembalikan kondisi lahan serta mengembangkan potensi Kota Batu sebagai produsen komoditas hortikultura di Jawa Timur, maka perlu dipikirkan upaya sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Upaya perbaikan tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu singkat sehingga menuntut dilaksanakannya pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Berkelanjutan yang dimaksud adalah mampu memberi kontribusi positif untuk jangka panjang bagi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat sekitar serta berkelanjutan dalam arti pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan. Solusi yang dianggap sesuai dengan tuntutan tersebut adalah penerapan pertanian organik di Kota Batu. Melalui penerapan pertanian organik diharapkan penggunaan bahan organik secara perlahan namun pasti dapat memperbaiki kualitas lingkungan baik tanah, air maupun udara. Selain itu penerapan organik berdampak positif bagi kehidupan manusia baik petani melalui cara budidaya yang baik dan aman, serta masyarakat umum melalui produk pertanian yang lebih aman dikonsumsi. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh produk organik dan biaya usaha tani yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Uraian tersebut sesuai dengan pendapat Sutanto (2006: 24) bahwa pertanian organik akan memberikan keuntungan ditinjau dari segi lingkungan dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem, meningkatkan kesuburan tanah dan produksi tanaman maupun ternak; dari segi ekonomi akan menghemat devisa negara untuk mengimpor pupuk dan bahan kimia pertanian, serta meningkatkan pendapatan petani. Penerapan pertanian organik juga membuka kemandirian petani dalam hal penyediaan secara mandiri bahan organik yang diperlukan sebagai sarana produksi. Usaha tani tidak terganggu oleh keterbatasan pupuk yang mahal harganya dengan demikian kegiatan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Agustina (2002: 68) yang menyatakan bahwa melalui pelaksanaan pertanian organik akan mencuatkan kemandirian petani terutama dalam

penyediaan saprodi, sehingga petani tidak rentan terhadap adanya gangguan dalam sistem produksinya akibat ketidakkuasaan mereka untuk menentukan pengaturan penyediaan saprodi.

Jika dikaji berdasarkan ciri spesifik pertanian berkelanjutan yang disampaikan oleh Libunao dalam Salikin (2003: 11) dipadukan dengan empat prinsip dasar pertanian organik yang ditetapkan oleh IFOAM (2009), maka pertanian organik dapat mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan karena mampu memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: 1) bemuansa ekologi, pertanian organik dilakukan berdasarkan pada prinsip ekologi yang menekankan pada daur ulang ekologis; 2) pertanian organik berjiwa sosial karena dilakukan dengan berpedoman pada prinsip kesehatan, keadilan dan prinsip perlindungan yang memberi kesempatan dicapainya keadilan, transparansi dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi organik baik petani, pedagang, dan konsumen dari segi keamanan produk yang dihasilkan serta keamanan proses produksi; 3) bernilai ekonomis karena produk yang dihasilkan secara kualitas keamanan pangan lebih baik sehingga berpotensi pada perbaikan harga jual dan keuntungan optimal; 4) berbasis ilmu holistik karena dalam pengelolaan dan penerapannya memperhatikan keterpaduan secara menyeluruh baik dari proses produksi, pengolahan, pengemasan, dan distribusinya sehingga memerlukan adanya perangkat atau institusi pendukung yang memadai; 5) berketepatan teknik karena sesuai dengan prinsip perlindungan bahwa pertanian organik harus mampu mencegah terjadinya resiko merugikan dengan menerapkan teknologi tepat guna dan menolak teknologi yang memungkinkan terjadinya kerusakan keseimbangan ekologi seperti pupuk dan pestisida kimia sintetis; 6) berketepatan budaya karena pertanian organik

mengutamakan pelestarian kearifan lokal dalam teknik budidaya dan memperhatikan hubungan saling menghormati antar manusia maupun hubungan dengan makhluk hidup lain.

Perencanaan pengembangan pertanian organik sampai penelitian ini dilakukan belum diwujudkan secara formal dalam suatu dokumen perencanaan khusus untuk pengembangan pertanian organik di Kota Batu, melainkan hanya berupa kebijakan-kebijakan yang direalisasikan dalam beberapa bentuk kegiatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Tjokroamidjojo (1995: 189) yang menyebutkan bahwa proses perencanaan dapat dimulai dengan suatu rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti dengan berbagai langkah kegiatan (*measures*) untuk merealisirnya. Adapun bentuk kebijakan pengembangan pertanian organik dituangkan dalam Renstra Tahun 2007-2012, berupa kebijakan pembangunan untuk bidang pertanian melalui peningkatan teknologi pertanian organik ramah lingkungan dan pengembangan desa kawasan pertanian organik ramah lingkungan. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan kebijakan tersebut meliputi berbagai pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian organik, survei dan pengkajian kondisi tanah, residu pestisida pada produk hortikultura, serta penyelenggaraan sekolah lapang petani yang diikuti dengan pelaksanaan demo plot. Secara lebih nyata, pada tahun 2011 dirintis pembentukan empat kawasan organik di empat desa se-Kota Batu.

Upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu yang telah dirintis mulai tahun 2002 tidak dilakukan secara berkesinambungan. Beberapa bentuk kegiatan seperti demplot pertanian organik, pengembangan agen hayati yang

memerlukan pengkajian cukup mendalam kurang mendapat dukungan sehingga tidak dilanjutkan. Hasil penelitian menunjukkan salah satu penyebab kegiatan tidak berkesinambungan adalah dari aspek kepemimpinan, yaitu pergantian pimpinan di lingkup Dinas Pertanian saat itu dengan kondisi latar belakang pendidikan bukan dari bidang pertanian. Dengan kata lain terjadi ketidaksesuaian penempatan sumber daya manusia pada posisi pimpinan organisasi yang berakibat pada ketidaksinkronan pemikiran antara pimpinan dan staf teknis. Akibat yang ditimbulkan adalah perencanaan pembangunan yang telah digagas tidak dilanjutkan karena terjadi perbedaan pemahaman arti penting pertanian organik dalam pembangunan pertanian. Dalam hal ini pimpinan kurang setuju dengan konsep yang digagas, disisi lain pimpinan mempunyai kewenangan pada penentuan suatu kebijakan, dan kebijakan yang diambil ternyata tidak mendukung upaya pengembangan pertanian organik saat itu.

Dinas Pertanian dan Kehutanan berperan dalam dua fungsi administrasi pembangunan pertanian, yaitu: 1) perumusan kebijaksanaan dan program pembangunan pertanian; 2) pelaksanaan kebijaksanaan dan program pembangunan pertanian secara efektif. Dalam kedua fungsi tersebut peran pemimpin sangat diperlukan sehingga ketepatan pemimpin sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan kepemimpinan menjadi hal yang utama. Hal ini sesuai dengan pendapat Tjokroamidjojo (1995: 14-170) bahwa perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan maupun program pembangunan perlu memperhatikan instrumen administrasi yang baik, sehingga perlu memperhatikan dua hal, yaitu pertama terkait dengan kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan fungsi administrator sebagai unsur pembaharu; kedua terkait dengan

pengendalian atau pengurusan yang baik dari administrasi fungsional seperti kepegawaian dan pembiayaan pembangunan.

Faktor manusia dalam hal ini seorang pemimpin merupakan faktor yang dominan dalam menentukan keberhasilan tujuan organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syamsi (1983: 46-47) bahwa orang-orang yang memegang tampuk pimpinan merupakan penanggung jawab utama keberhasilan tujuan organisasi. Pimpinan dibedakan dalam tingkatan pucuk, menengah dan pimpinan tingkatan bawah yang merupakan satu tim. Masing-masing pimpinan harus memiliki keterampilan yang sama meliputi keterampilan *managerial* yang diperlukan untuk pekerjaan pimpinan secara fungsional administratif (perencanaan, mengatur pelaksanaan, dan pengawasan); serta *technical skill* yang diperlukan untuk pekerjaan bersifat teknis. Semakin tinggi tingkat kedudukan pimpinan, semakin diutamakan ketrampilan *managerial*, begitu sebaliknya. Berikutnya Syamsi juga menjelaskan pengelompokan keterampilan oleh Harlow, yaitu *conceptual skill* (keterampilan menyelami keadaan, mengkoordinasi kegiatan beserta orang-orangnya); *human relation skill* (keterampilan untuk menciptakan kerjasama diantara anggotanya); dan *technical skill* (keterampilan teknis sesuai bidangnya). Semakin tinggi kedudukan pimpinan, semakin diutamakan *conceptual skill*, sedangkan untuk *human relationship skill* porsi sama. Kondisi yang terjadi pada Dinas Pertanian Kota Batu sebagaimana dijelaskan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin, yakni Kepala Dinas yang latar belakang pendidikannya bukan pertanian memiliki sudut pandang yang berbeda dengan kepala bidang teknis (tanaman pangan dan perkebunan) terkait perencanaan pembangunan pertanian saat itu sehingga upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu tidak berlanjut. Padahal sebenarnya pertanian

organik merupakan hal yang penting dalam rangka revitalisasi pembangunan pertanian yang juga diagendakan secara nasional. Dari sisi tingkat kepemimpinan di daerah tingkat kota/kabupaten, kepala dinas berada dalam kategori pimpinan menengah sehingga memerlukan keahlian yang cukup tinggi dalam hal *managerial* dan *conceptual* untuk memimpin staf dan pimpinan tingkat bawah (kepala bidang dan kepala seksi), namun juga harus cukup banyak memahami hal-hal teknis yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pucuk pimpinan dinas teknis (*technical skill*).

Kondisi berbeda dialami ketika terjadi pergantian pimpinan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai yaitu dari bidang pertanian. Didukung dengan komunikasi yang cukup baik dengan kepala daerah, maka pengembangan pertanian organik mendapat perhatian yang cukup besar dan telah dilaksanakan beberapa upaya untuk mewujudkannya. Hal ini mendukung pendapat Olsen dan Eadie yang dikemukakan kembali oleh Bryson (2005: 85) bahwa dukungan dan komitmen dari orang-orang penting pembuat keputusan adalah hal yang vital. Pada saat Walikota Batu mengetahui dan memahami pentingnya penerapan pertanian organik di Kota Batu sebagai salah satu bentuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan, maka upaya untuk menerapkan pertanian organik di seluruh wilayah Kota Batu menjadi salah satu prioritas pembangunan dengan dicanangkan slogan 'Batu Go Organik' sebagai arah pembangunan pertanian jangka panjang di Kota Batu. Bahkan setiap desa diamanatkan untuk mulai menerapkan teknologi pertanian organik tersebut melalui alokasi dana desa.

Dalam birokrasi pemerintahan, pergantian pemimpin dan mutasi pegawai merupakan hal yang sering dilakukan dengan berbagai alasan. Namun demikian dalam melakukan pergantian dan rotasi pegawai hendaknya memperhatikan ber-

bagai hal agar pelaksanaan pemerintahan dan upaya pembangunan dapat berjalan dengan baik, misalnya kesesuaian latar belakang pendidikan dengan posisi atau jabatan, kemampuan personal masing-masing pegawai, komposisi dan jumlah pegawai dengan beban tanggung jawab yang diemban.

5.2.1.2 Tinjauan Keadaan

Tinjauan keadaan merupakan kegiatan yang penting dalam proses awal penyusunan rencana pembangunan. Tinjauan keadaan dilakukan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh kondisi wilayah sesuai lingkup perencanaan meliputi tinjauan tentang keadaan wilayah perencanaan (kondisi eksisting), permasalahan yang timbul dan potensi yang dimiliki. Dari beberapa tinjauan keadaan tersebut dapat diidentifikasi permasalahan pokok yang menjadi dasar bagi perumusan kebijaksanaan pembangunan. Selain itu dapat diketahui potensi-potensi yang dimiliki sehingga dapat dilakukan analisa untuk mengetahui potensi pembangunan, baik yang sudah dimanfaatkan maupun belum dimanfaatkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Riyadi dan Deddy (2004: 11-12) yang mengemukakan tentang pentingnya mengetahui potensi dan masalah dalam perencanaan pembangunan daerah karena fakta dilapangan berupa potensi dan masalah merupakan suatu pijakan awal dalam proses penyusunan rencana yang berguna sebagai dasar analisis berikutnya.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan kondisi pertanian menjadi salah satu alasan dan latar belakang dilakukannya perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan tinjauan keadaan dan identifikasi permasalahan dilakukan melalui:

1. Pengamatan di lapang oleh petugas lapang (PPL) berkoordinasi dengan bidang teknis terkait;

2. Melakukan kegiatan penelitian dan pengujian atau analisa laboratorium terhadap tanah dan produk hortikultura Kota Batu;
3. Mengkaji data statistik pertanian mengenai kondisi perkembangan produksi pertanian di Kota Batu untuk dicari kemungkinan penyebab yang berhubungan dengan perkembangan yang terjadi.

Ketiga upaya tersebut sesuai dengan pendapat Kunarjo (2002: 71) dan Tjokroamidjojo (1987: 75-76) bahwa kegiatan penelitian tentang potensi sumber daya alam dan manusia serta kelembagaan yang tersedia merupakan tahap awal dalam rangkaian proses perencanaan. Kegiatan tinjauan keadaan yang meliputi identifikasi masalah dan potensi memerlukan sekali bahan-bahan statistik dan hasil-hasil penelitian. Bahkan kelemahan dibidang ini merupakan kelemahan kegiatan perencanaan. Melalui kegiatan penelitian dan analisa data statistik yang akurat akan diperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kondisi wilayah perencanaan.

Kegiatan tinjauan keadaan dan identifikasi isu permasalahan jika dilihat dari siklus perencanaan yang disampaikan oleh Conyers dan Hills (1990:74) termasuk pada tahap mengumpulkan dan menganalisis data yang digunakan untuk menjembatani antara penentuan tujuan dan perumusan alternatif tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan. Pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi wilayah perencanaan, baik berupa potensi dan masalah bermanfaat dalam menentukan pilihan strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah perencanaan serta berpengaruh pula guna memperlancar pelaksanaannya (Riyadi dan Deddy, 2002: 69-70). Dengan demikian strategi yang ditentukan diharapkan tepat sasaran dan mempermudah pencapaian tujuan karena seperti yang dikatakan oleh Abe (2005: 28) bahwa perencanaan yang baik adalah

perencanaan yang mampu secara tepat menetapkan pilihan, disesuaikan dengan kondisi yang ada.

A. Identifikasi permasalahan pertanian di Kota Batu

Beberapa permasalahan pertanian dalam upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu pada hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Suwanto (2008: 162-164) yaitu mengenai rendahnya pengetahuan dan pemahaman petani tentang pertanian organik; pertanian organik dipandang sebagai sistem pertanian yang merepotkan; serta kendala teknis terkait penurunan produksi pada masa kritis fase transisi. Beberapa hal tersebut merupakan alasan utama keengganan petani untuk menerapkan sistem pertanian organik. Lebih lanjut beberapa permasalahan pertanian di Kota Batu yang terjadi saat ini maupun diperkirakan masih menjadi kendala di masa yang akan datang sesuai hasil penelitian mencakup tiga aspek, yaitu aspek lingkungan, ekonomi dan sosial dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Aspek lingkungan

Terjadi penurunan kualitas lingkungan untuk mendukung kegiatan usaha budidaya pertanian di Kota Batu meliputi penurunan kualitas tanah, air dan udara sebagai akibat dari penerapan pertanian konvensional selama bertahun-tahun. Hasil penelitian seperti pengujian residu pestisida pada tanah dan produk hortikultura menunjukkan hasil positif adanya residu pestisida dalam jumlah melebihi batas minimum residu yang diperbolehkan. Hal ini membawa pengaruh negatif bagi pelaksanaan kegiatan budidaya pertanian di Kota Batu yaitu penurunan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Jika tidak segera dilakukan upaya perbaikan maka dapat mengancam kemampuan daya dukung dan keseimbangan lingkungan di masa yang akan datang terutama pada produktivi-

tas tanah dan air yang merupakan faktor utama dalam kegiatan budidaya pertanian serta keseimbangan ekosistem baik di tanah, air dan udara yang oleh Agustina (2002: 68) dijelaskan bahwa perubahan keseimbangan ekosistem salah satunya ditandai dengan munculnya pencemaran lingkungan dan meledaknya hama.

Karena itu diperlukan segera upaya-upaya perbaikan lingkungan salah satunya adalah melalui penerapan metode pertanian yang ramah lingkungan/organik. Pada tahap awal dapat dimulai dengan penggunaan bahan kimia organik sebagai masukan atau *input* dalam kegiatan budidaya tanaman, yang sudah mulai disosialisasikan oleh pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugito (2002: 2) bahwa penggunaan bahan anorganik secara terus-menerus menjadi penyebab penurunan kesuburan tanah jika tidak diimbangi oleh penggunaan pupuk organik.

b. Aspek ekonomi

Permasalahan dalam aspek ekonomi meliputi penurunan pendapatan petani melalui penurunan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian; teknologi organik sudah mulai dipahami namun karena dilaksanakan secara perorangan maka resiko serangan hama dan penurunan hasil lebih tinggi; serta alasan kesulitan pemasaran produk organik karena tuntutan harga yang tinggi di tingkat petani.

Faktor ekonomi merupakan hal utama yang dipertimbangkan oleh sebagian besar petani dalam usaha budidaya pertanian. Bahkan budidaya pertanian konvensional yang dilakukan selama ini adalah demi mengejar keuntungan ekonomi melalui perolehan produksi yang cepat dan berkualitas dari segi penampilan tanaman yang bagus. Karena itu ketika terjadi penurunan produksi yang disebabkan berbagai hal sebagai dampak dari pertanian konvensional itu sendiri ma-

ka juga berimbas pada aspek ekonomi petani. Pendapatan turun karena penurunan produksi dan meningkatnya biaya usaha tani.

Harapan peningkatan pendapatan petani dapat ditempuh melalui penerapan pertanian organik yang lebih rendah dari segi biaya usaha tani. Disisi lain untuk beralih ke teknologi organik, petani dihadapkan pada permasalahan penurunan produksi pada masa konversi/peralihan serta ancaman serangan hama penyakit tanaman pada penanaman organik skala perorangan dengan luasan lahan sempit. Permasalahan lain dari segi ekonomi yang menjadi alasan bagi petani enggan beralih ke organik adalah kesulitan dalam pemasaran produk. Asumsi yang berkembang pada sebagian petani bahwa produk organik seharusnya dihargai tinggi karena beresiko mengalami penurunan hasil dalam proses budidayanya. Disisi lain, pengakuan dan harga tinggi pada produk organik hanya berlaku pada produk-produk yang telah bersertifikat, dan dipasarkan secara eksklusif seperti supermarket atau even pameran. Adapun biaya sertifikasi di Indonesia masih sangat mahal dan tidak mudah dijangkau oleh petani kecil seperti kebanyakan petani di Kota Batu.

Hal ini menunjukkan perlunya dukungan stimulan atau pemicu yang mampu meningkatkan minat petani pada penerapan pertanian organik dari sisi ekonomi melalui fasilitasi sarana produksi, strategi pengelolaan pertanian organik dalam satu kesatuan lingkungan/wilayah, dukungan kebijakan pemerintah dalam pemberian kompensasi untuk mengantisipasi penurunan produksi pada masa transisi sebagaimana disebutkan dalam hasil penelitian Suwanto (2008), serta rintisan pemasaran produk organik.

c. Aspek sosial

Masalah pertanian dalam aspek sosial meliputi kebiasaan dan ketergantungan petani terhadap bahan kimia buatan dalam usaha budidaya pertanian masih sangat kuat; kebanyakan petani menganggap bertani secara organik sulit dan hasilnya kurang bagus; hasil pertanian terutama produk hortikultura mengandung residu kimia dan berpotensi memberi dampak negatif bagi orang lain (konsumen); perilaku petani masih lebih mengutamakan segi ekonomi daripada segi sosial seperti kesehatan; serta keperdulian keberadaan bahaya kimia pada produk yang mungkin dirasakan oleh konsumen masih kurang.

Tujuan utama yang ingin dicapai dari pertanian konvensional yang dicirikan menggunakan banyak masukan kimia buatan adalah untuk mendapatkan hasil besar dalam waktu singkat dan cara yang mudah. Kebiasaan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun berimbas pada perilaku petani seperti telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini menjadi kendala pada penerimaan dan penerapan petani terhadap inovasi pertanian organik yang memang membutuhkan cukup banyak waktu untuk mampu memberikan hasil optimal. Karena itu diperlukan upaya pembinaan dan pendampingan secara terus-menerus kepada petani mengenai konsep dasar, prinsip dan manfaat pertanian organik dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan pendapat Agustina *et al.* (2002: ix) bahwa bimbingan kepada petani tidak hanya mengenai masukan bahan organik tetapi juga pertimbangan dampak masukan tersebut pada skala luas seiring berjalannya waktu. Bimbingan yang diberikan diharapkan tidak hanya bersifat parsial melainkan sampai pada pengambilan keputusan di lapangan yang keadaannya beragam. Selain itu pemahaman konsep dasar dan prinsip pertanian organik yang mengutamakan aspek sosial dan keadilan bagi

semua pihak diharapkan mampu mengarahkan petani untuk berpikir lebih panjang dan bijaksana, mempertimbangkan aspek yang lebih luas seperti kelestarian lingkungan dan sosial, tidak hanya terpaku pada segi ekonomi saja.

B. Potensi pertanian di Kota Batu

Secara umum wilayah Kota Batu berpotensi untuk pengembangan komoditas hortikultura seperti buah, tanaman hias, dan sayuran. Penyebaran beberapa komoditas unggulan di Kota Batu sesuai hasil penelitian ini ditampilkan pada Tabel 5.15. Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan Bumiaji mendominasi sebagai daerah penghasil buah, sayur dan tanaman hias potong seperti mawar dan krisan. Hal ini disebabkan kesesuaian syarat tumbuh masing-masing tanaman yang dipenuhi oleh sebagian besar wilayah di Kecamatan Bumiaji baik dari segi ketinggian tempat (berpengaruh pada kelembaban, perbedaan suhu minimum dan maksimum), jenis tanah, ketersediaan air, serta didukung pula oleh potensi luas lahan pertanian dan perkebunan. Penyebaran komoditas hortikultura unggulan tersebut sesuai pula dengan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) tanaman sayur dan buah pada penelitian Irianto (2010: 55-73), yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecamatan Bumiaji merupakan basis dari komoditas kentang, kubis, wortel, brokoli, apel dan jeruk;
2. Kecamatan Batu merupakan basis komoditas kubis, bawang merah, brokoli, tomat, jeruk dan alpukat;
3. Kecamatan Junrejo merupakan basis dari komoditas sawi, bawang merah, tomat, jeruk dan alpukat.

Tabel 5.15 Sebaran tanaman pangan dan hortikultura unggulan di Kota Batu

| No | Jenis Komoditas | Daerah Sentra Penghasil | | |
|----|---|---|---|--|
| | | Kec. Bumiaji | Kec. Batu | Kec. Junrejo |
| 1. | Tanaman pangan (padi) | Ds. Giripurno | - | - Ds. Pendem - Ds. Dadaprejo |
| 2. | Tanaman buah: - Apel - Jeruk - Alpukat | - Ds. Tulungrejo - Ds. Bumiaji - Ds. Giripurno - Ds. Bulukerto - Ds. Gunungsari - Ds. Bulukerto - Ds. Punten - Ds. Sumberbrantas - Ds. Pandanrejo Ds. Sumbergondo | Desa Sidomulyo Ds. Oro-oro Ombo Ds. Oro-oro ombo | - Ds. Dadaprejo - Desa Junrejo - Desa Tlekung - Desa Dadaprejo |
| 3. | Tanaman sayur: - Kentang - Wortel - Aneka sayur: (kubis, kembang kol, brokoli, bawang merah, Bawang daun, sawi, tomat) | - Ds. Sumberbrantas - Ds. Tulungrejo - Ds. Sumberbrantas - Ds. Tulungrejo - Ds. Punten - Ds. Pandanrejo - Ds. Giripurno - Ds. Bulukerto - Ds. Sumberbrantas - Ds. Tulungrejo - Ds. Punten - Ds. Pandanrejo - Ds. Giripurno - Ds. Bulukerto | - Ds. Sumberejo - Ds. Sumberejo - Kel. Temas | - - - Ds. Torongrejo - Ds. Tlekung |
| 4. | Tanaman Hias: - Bunga potong (mawar, krisan) - Aneka tanaman hias pot - Anggrek | - Ds. Tulungrejo - Ds. Punten - Ds. Gunungsari - Ds. Sumbergondo - Ds. Gunungsari - Ds. Sumbergondo | - Ds. Sumberejo - Ds. Sidomulyo - Ds. Sumberejo - Ds. Sidomulyo - Ds. Sidomulyo - Ds. Pesanggrahan - Kel. Ngaglik | - Ds. Junrejo - |

Sumber: Hasil penelitian, 2012

Dari gambaran sebaran komoditas unggulan dan daerah penghasil tersebut dapat dikembangkan untuk mengarah ke pertanian organik. Hal ini sesuai dengan pendapat Setiawan dan Carolina (2008: 150-151) bahwa pembangunan pertanian dapat dimulai dengan mengoptimalkan potensi yang ada dipedesaan yaitu lahan pertanian, sumber air, hutan dan tenaga kerja, kemudian memfokuskan pembangunan pada komoditas unggulan setempat. Hal ini diperlukan agar pembangunan lebih tepat sasaran mengingat keterbatasan dana merupakan hal umum bagi proses pembangunan di daerah. Pembangunan yang terfokus pada komoditas unggulan, dalam arti mempunyai kontribusi besar bagi perekonomian wilayah diharapkan mampu meminimalkan investasi pemerintah serta memacu pengembangan komoditas lain yang berkaitan dengan komoditi unggulan yang pertama kali dikembangkan karena membawa pengaruh dukungan investasi untuk pengembangan komoditas unggulan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Mawardi (2007: 182) bahwa dengan sasaran pembangunan yang lebih terfokus pada komoditas unggulan maka kebutuhan investasi baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat akan dapat diminimalkan karena lebih terfokus. Diharapkan pula terjadi spesialisasi industri pada tiap-tiap wilayah yang selanjutnya akan dapat meningkatkan produktivitas industri yang bersangkutan dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing (*competitiveness*) dari industri tersebut serta efisiensi penggunaan sumberdaya lokal yang tersedia. Karena itu pengembangan hortikultura organik di Kota Batu dapat dipertimbangkan dilakukan pada wilayah yang telah teridentifikasi dengan komoditas unggulan masing-masing.

Beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pengembangan pertanian organik adalah:

- 1) Ketersediaan tenaga kerja di bidang pertanian yang cukup besar mendukung dalam penerapan pertanian organik yang memerlukan lebih banyak tenaga kerja sehingga membuka peluang kerja bagi masyarakat;
- 2) Ketersediaan lahan untuk pengembangan pertanian organik, baik lahan kering berupa kebun atau pekarangan, serta lahan sawah. Penerapan pertanian organik dapat dilaksanakan pada lahan-lahan pertanian yang sudah ada, atau mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan yang notabene lebih sedikit terkontaminasi bahan kimia;
- 3) Potensi ekonomis komoditas hortikultura yang merupakan produk unggulan spesifik Kota Batu seperti buah (apel, jeruk), sayuran dataran tinggi (kentang, kembang kol, kubis, wortel, bawang merah), dan tanaman hias potong (mawar, krisan). Pengembangan pertanian organik dapat diterapkan pada komo-diti unggulan karena disukai dan tingkat permintaan tinggi;
- 4) Ketersediaan air melimpah karena memiliki 138 sumber mata air dan fasilitas jaringan irigasi. Ketersediaan air merupakan hal utama dalam sistem pertani-an organik terkait dengan teknis peminimalan kontaminasi bahan kimia. Loka-si pengembangan diupayakan pada daerah yang memiliki sumber mata air, atau didukung oleh jaringan irigasi yang memadai;
- 5) Adanya potensi peternakan untuk mendukung penyediaan bahan organik. Hal ini membantu pasokan bahan organik sehingga meminimalkan penyediaan bahan organik dari daerah lain;
- 6) Adanya kelompok tani yang cukup banyak dan aktif di setiap desa dan sebagi-an diantaranya sudah mengikuti sekolah lapang maupun kegiatan peningkat-an SDM lainnya. Kelompok tani maupun gapoktan dapat dikembangkan me-ngarah dalam pengelolaan distribusi bahan organik dan produk organik.

Dengan demikian perputaran kebutuhan bahan organik dan kebutuhan produk dapat direncanakan dan diperhitungkan dengan seksama.

Adapun pasar untuk distribusi produk hortikultura organik terutama sayur organik diutamakan bekerjasama dengan pihak-pihak yang telah mengembangkan usaha pertanian organik, memanfaatkan potensi pasar di daerah wisata seperti taman-taman rekreasi di wilayah Kota Batu. Alternatif jalur pemasaran yang disampaikan adalah membuka *outlet* khusus yang menampung produk organik/semi organik serta mengoptimalkan peran desa wisata sayur organik.

5.2.1.3 Penetapan tujuan dan penentuan strategi

Beberapa tujuan perencanaan pengembangan pertanian organik yang dapat disimpulkan sesuai hasil penelitian antara lain: 1) merubah cara berpikir masyarakat petani di Kota Batu dari pertanian konvensional (anorganik) menuju ke pertanian organik serta memanfaatkan peluang pasar mengenai produk organik; 2) memperbaiki kondisi tanah yang rusak; 3) meningkatkan kesejahteraan petani yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan; 4) meningkatkan produksi yang berdaya saing tinggi dan aman dikonsumsi oleh masyarakat; 5) mendukung arah pembangunan Kota Batu sebagai kota wisata berbasis pertanian. Tujuan tersebut didasarkan pada adanya kenyataan kondisi pertanian yang terjadi di Kota Batu, keinginan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh produk organik.

Jika melihat cara penetapan tujuan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam hal ini Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yaitu memahami adanya kenyataan permasalahan pertanian di lapangan dan berbagai dampak yang ditimbulkannya serta melihat peluang yang ditawarkan oleh produk organik maka sesuai dengan pendapat Tjokroamidjojo (1995:62) yaitu menetapkan

tujuan berdasarkan tinjauan keadaan dan prakiraan tentang masa yang akan dilalui. Hal ini diperkuat pula dengan pendapat Argawal yang disampaikan oleh Syamsi (1983) bahwa dalam proses perencanaan, penetapan tujuan atau sasaran didasarkan pada macam-macam prakiraan, yang dalam hal ini diwujudkan dalam prakiraan mengenai prospek produk organik.

Penentuan strategi pada rencana pengembangan pertanian organik diawali dengan memahami permasalahan dan kondisi yang terjadi di lapangan untuk selanjutnya ditentukan tujuan yang ingin dicapai. Kondisi tentang tujuan yang ingin dicapai menjadi dasar menentukan bentuk strategi yang akan dijalankan. Dengan demikian tampak hubungan yang saling terkait antara permasalahan, tujuan dan pemilihan strategi. Hal ini sesuai dengan pendapat Tjokroamidjojo (1987: 62) dan Abe (2005: 82) bahwa perumusan tujuan perencanaan pembangunan merupakan prasyarat bagi penentuan strategi yang baik. Tujuan tidak lain adalah kondisi keadaan yang hendak dicapai / diharapkan, karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya. Karena tujuan menyangkut kondisi yang diharapkan, maka dengan sendirinya penentuan tujuan menjadi momentum yang sangat penting. Conyers dan Hills (1990: 74) bahkan meletakkan tujuan sebagai tahap awal dalam siklus perencanaan karena melalui tujuan maka dapat disusun langkah-langkah maupun strategi untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Strategi yang digunakan dalam rencana pengembangan pertanian organik oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu pada intinya adalah memasyarakatkan penerapan cara bertani yang mengarah pada pertanian organik serta menginisiasi pembentukan kawasan organik sebagai *pilot project*. Pemilihan strategi tersebut mengacu pada tujuan yang ingin dicapai yaitu meru-

bah cara berpikir masyarakat petani di Kota Batu dari pertanian konvensional (anorganik) menuju ke pertanian organik. Dengan memasyarakatkan pertanian organik kepada petani diharapkan secara bertahap dapat membantu mengembalikan kualitas lahan pertanian sehingga mampu memberikan hasil yang lebih baik, meningkatkan nilai jual produk, memberikan keuntungan kepada petani karena biaya usaha tani rendah. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai tujuan berikutnya yaitu peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani, serta menarik wisatawan untuk mendukung arah pembangunan Kota Batu sebagai kota wisata berbasis pertanian. Hal ini sesuai dengan pendapat Conyers and Hills (1990: 3) bahwa keputusan cara-cara penggunaan sumberdaya (strategi) adalah didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang.

Penentuan strategi juga perlu mempertimbangkan masalah dan potensi sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya yang digunakan dalam teknis pelaksanaan rencana seperti ketersediaan anggaran, tetapi terkait pula dengan sumber daya sasaran/obyek rencana pembangunan yang pada akhirnya berpengaruh pula pada pemilihan cara atau strategi untuk mencapai tujuan. Upaya pemanfaatan sumber daya oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu untuk mendukung pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan pengembangan pertanian organik baik sumber dana yang berasal dari tingkat pusat, provinsi maupun pembiayaan daerah sendiri. Pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan tersebut mendukung pendapat Tjokroamidjojo (1987: 12) dan Conyers (1990: 5) bahwa perencanaan pembangunan memungkinkan untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sumber daya yang dimaksud mencakup apapun yang

dianggap oleh pembuat keputusan sebagai potensi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, dalam hal ini termasuk pula sumber dana pembangunan.

Namun demikian terdapat kelemahan dalam hal pendanaan, yaitu meskipun sudah memperhitungkan keberadaan sumber-sumber pembiayaan, tetapi belum dilakukan perhitungan perkiraan kebutuhan dana secara menyeluruh. Perencanaan pendanaan masih bersifat jangka pendek yaitu terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang berjangka 1 (satu) tahun anggaran saja. Hal ini bertentangan dengan pendapat Riyadi dan Deddy (2004: 39) bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus sudah dapat diperhitungkan masalah pendanaan, mulai dari jumlah yang dibutuhkan, sumber pendanaan, serta sistem pengelolaannya, meskipun kesemuanya masih bersifat tentatif.

Perumusan tujuan juga bermanfaat untuk memberikan batasan terhadap pelaksanaan pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek kebutuhan maupun aspek dukungan sumber daya yang dimiliki. Jika dilihat dari aspek kebutuhan maka tujuan yang dianggap mendesak dan banyak berpengaruh terhadap pencapaian tujuan hendaknya menjadi prioritas untuk dicapai dan menjadi fokus dalam penentuan strategi. Dalam merumuskan atau menentukan tujuan harus bisa dilihat berdasarkan kurun waktunya seperti tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini selanjutnya menjadi acuan dalam menentukan strategi dan tahap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan. Pada perencanaan pengembangan pertanian organik, tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah terbentuknya kawasan pertanian organik yang berkonsep agrowisata. Dampak yang diharapkan adalah terjadi pergerakan berbagai sektor yang mengarah pada peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan petani secara khusus serta masyarakat lain secara

umum. Sedangkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai adalah perbaikan kondisi tanah lahan pertanian di Kota Batu dan peningkatan mutu produksi hortikultura, serta tujuan jangka pendek adalah merealisasikan upaya sosialisasi penerapan pertanian organik di Kota Batu.

5.2.1.4 Mekanisme / Tahap Perencanaan

Hasil penelitian pada upaya-upaya yang dilaksanakan serta tujuan yang ingin dicapai maka secara keseluruhan perencanaan pengembangan pertanian organik yang dilakukan mengarah pada tiga tahap fase pembangunan. Fase pertama adalah jangka pendek dengan tujuan merealisasikan upaya sosialisasi penerapan pertanian organik di Kota Batu; jangka menengah dengan tujuan yang ingin dicapai adalah perbaikan kondisi tanah pada lahan pertanian di Kota Batu dan peningkatan mutu produksi hortikultura; fase ketiga adalah jangka panjang dengan tujuan yang ingin dicapai adalah terbentuknya kawasan pertanian organik yang berkonsep agrowisata. Namun terdapat kelemahan yaitu tidak ada kepastian rentang waktu yang diperlukan pada setiap fase tersebut. Padahal dalam suatu rencana pembangunan yang baik kejelasan tahap pencapaian tersebut sangat diperlukan karena menyangkut dengan fungsi dari perencanaan itu sendiri sebagai alat untuk mencapai tujuan, serta berkaitan dengan tahapan dalam fase pembangunan. Dengan demikian perencanaan pengembangan pertanian organik yang dilakukan di Kota Batu tersebut tidak sesuai dengan aspek ruang dan waktu yang disampaikan oleh Riyadi dan Deddy (2004: 13-14), bahwa perencanaan pembangunan sebagai tahapan dalam proses pembangunan memiliki keterkaitan dengan tahapan berikutnya sehingga membutuhkan *timing* yang jelas dan tepat.

Proses perencanaan mempunyai pentahapan yang panjang. Jika dikaji berdasarkan proses perencanaan yang dijelaskan oleh Kunarjo (2002: 71), maka perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Tahap pertama, melakukan penelitian tentang potensi SDA, SDM serta kelembagaan yang tersedia. Hal ini dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu melalui kegiatan analisis tanah, kegiatan penelitian/pengujian residu pestisida pada tanah dan produk hortikultura, analisa potensi produksi pertanian melalui data-data statistik pertanian, dan identifikasi masalah;
- b) Tahap kedua, menentukan tujuan dan sasaran perencanaan. Hal ini dilakukan melalui tujuan yang ingin dicapai baik dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Adapun sasaran utama pembangunan adalah petani;
- c) Tahap ketiga, menjabarkan tujuan ke sasaran dalam program dan kebijakan di tingkat makro. Hal ini dilakukan melalui penetapan kebijakan pengembangan pertanian organik / ramah lingkungan pada Renstra Tahun 2007-2012 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, namun belum disusun secara sistematis program-program yang mengiringi kebijakan tersebut;
- d) Tahap keempat, menyusun kebijakan secara lebih rinci mengenai apa dan siapa yang melaksanakan, serta kapan. Secara keseluruhan hal ini tidak dilakukan, karena tidak ada dokumen perencanaan teknis yang menjabarkan rincian kegiatan. Upaya mewujudkan salah satu kebijakan pertanian organik yaitu melakukan inisiasi pembentukan kawasan pertanian organik yang perencanaannya juga hanya dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi dan dijabarkan dalam jadwal kegiatan serta penetapan SK tim pelaksana teknis pengem-

- bangun kawasan organik oleh Kepala Dinas. Perencanaan juga dirancang dilaksanakan dalam jangka pendek (1 tahun);
- e) Tahap kelima, melaksanakan apa yang direncanakan. Pelaksanaan kebijakan pengembangan pertanian organik ramah lingkungan pada Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan diwujudkan melalui alokasi bantuan saprodi organik, serta kegiatan pembentukan kawasan organik di empat lokasi;
 - f) Tahap keenam, melakukan penilaian terhadap program, proyek dan kebijakan yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan melalui monitoring kegiatan pengembangan kawasan organik oleh tim pelaksana teknis kegiatan;
 - f) Tahap ketujuh, apabila diperlukan melakukan revisi dan menyesuaikan dengan perencanaan program yang benar. Revisi terhadap program tidak dapat dilakukan karena perencanaan program tidak ada. Yang dapat dilakukan adalah hasil monitoring terhadap kegiatan yang berjalan (dalam hal ini terutama dilakukan pada kegiatan pengembangan kawasan organik). Hasil monitoring menunjukkan ada ketidaksesuaian saprodi yang diberikan dengan permintaan petani pada kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya beberapa saprodi diganti sesuai kesepakatan pihak dinas dengan petani penerima bantuan;
 - g) Tahap kedelapan; mengidentifikasi dan menginformasikan keberhasilan maupun kegagalan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan berikutnya. Tahap ini merupakan tahap evaluasi yang saat penelitian dilakukan sedang dalam proses pelaksanaan.

Dari seluruh tahap perencanaan tersebut maka perencanaan pengembangan kawasan pertanian organik belum memenuhi tahap perencanaan yang dikemukakan oleh Kunarjo. Ada beberapa hal penting yang tidak dilakukan seperti penjabaran kebijakan makro ke dalam program kegiatan yang lebih rinci.

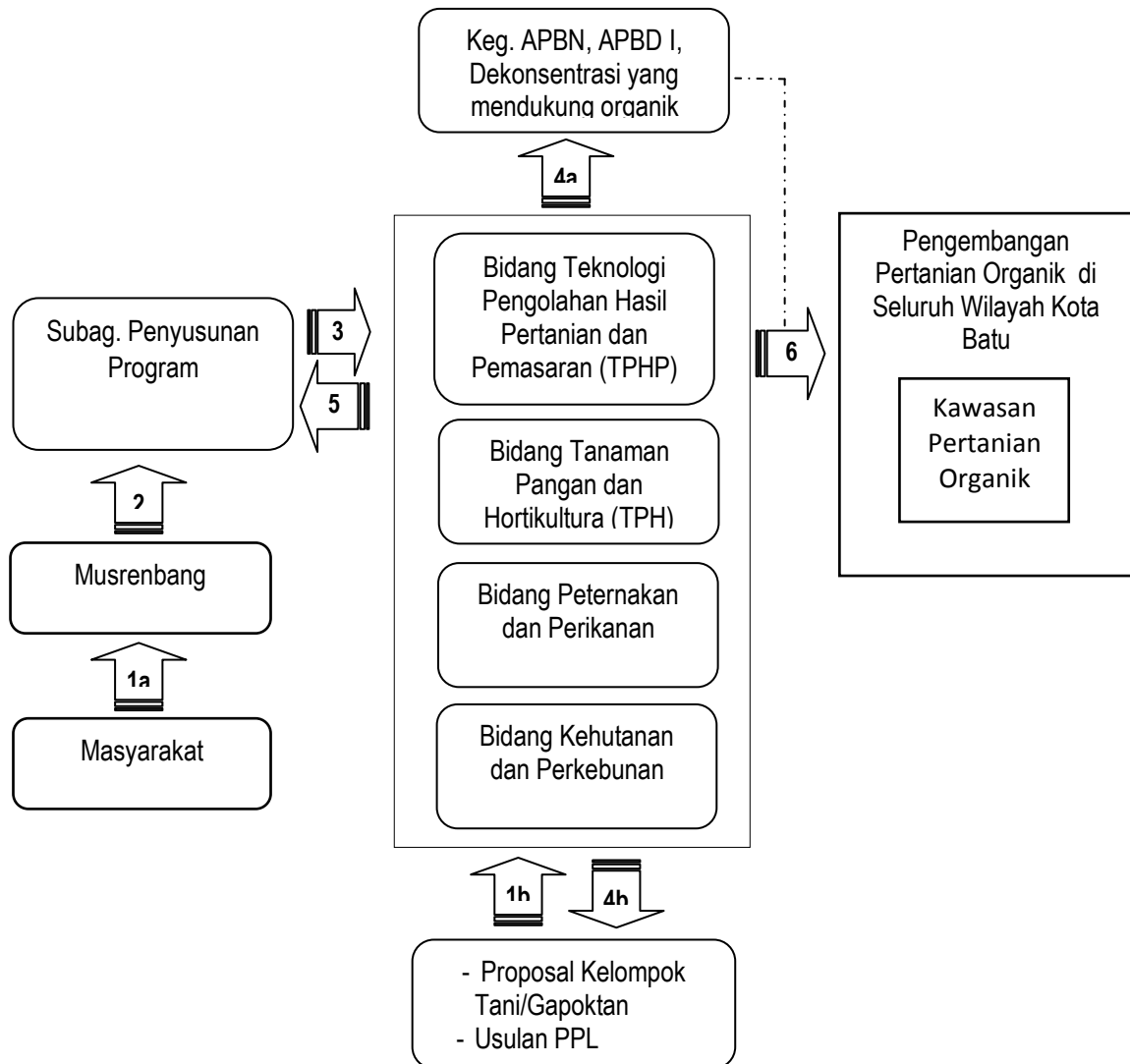
Dengan demikian tidak diketahui pedoman yang jelas sebagai panduan atau arah untuk mewujudkan pertanian organik di Kota Batu. Tujuan yang ingin dicapai baik dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek tidak terakomodasi dalam strategi pencapaian tujuan dan jangka waktu pelaksanaan yang sistematis. Pada kondisi yang demikian dikhawatirkan bahwa perencanaan yang dibuat tidak berkelanjutan dan hanya berorientasi jangka pendek (1 tahun), atau dengan kata lain terlihat untuk kepentingan 'proyek' pihak pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan. Pengembangan pertanian organik membutuhkan proses yang panjang terkait dengan berbagai kompleksitas komponen pendukungnya baik dari pelaksana, kegiatan pendukung, dan keberlanjutannya sehingga membutuhkan pola dasar pembangunan jangka panjang yang memungkinkan untuk dijabarkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek agar lebih terarah sesuai dengan ciri logis dan strategis dari perencanaan pembangunan daerah yang disampaikan oleh Syafrudin, (1993:47).

Upaya pengembangan pertanian organik mencakup banyak hal teknis. Karena itu untuk memenuhi berbagai kebutuhan perencanaan maka Kepala Dinas menghimbau agar seluruh bidang teknis di lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu agar dapat berkontribusi melalui pengalokasian berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing dari berbagai sumber dana yang dimiliki. Upaya pengembangan pertanian organik yang terkonsentrasi pada beberapa kawasan telah dirintis pada tahun 2011, dengan sumber dana APBD II melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan: Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura Organik. Dalam kegiatan tersebut prioritas kawasan organik yang dibentuk adalah untuk komoditas sayuran dan padi. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan berupa fasilitasi saprodi meli-

puti bibit, pupuk dan pestisida organik. Karena itu untuk mengakomodir permintaan masyarakat diluar kawasan serta memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dialokasikan melalui kegiatan tersebut maka diupayakan untuk dipenuhi oleh program/kegiatan lain. Misalnya kebutuhan penyediaan prasarana pertanian seperti rumah kompos, alat pengolah pupuk organik, pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani dipenuhi oleh seksi sarana prasarana; bantuan ternak dipenuhi oleh bidang peternakan, dan sebagainya. Penentuan alokasi bantuan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat melalui hasil musrenbang, proposal kelompok tani, maupun saran dari PPL, serta penyesuaian dengan kegiatan-kegiatan *top down*, dalam hal ini melalui Kementerian Pertanian. Dengan demikian diharapkan upaya pengembangan pertanian organik dapat dilakukan secara bertahap pada kawasan yang telah dibentuk, serta menyeluruh melalui berbagai alokasi bantuan pendukung penerapan pertanian organik di seluruh wilayah Kota Batu. Proses penentuan alokasi bantuan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.6

Pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan berupa dana APBN, APBD I dan APBD II sesuai dengan pendapat Tjokroamidjojo (1987: 12) dan Conyers (1990: 5) bahwa perencanaan pembangunan memungkinkan untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sumber daya yang dimaksud mencakup apapun yang dianggap oleh pembuat keputusan sebagai potensi dapat digunakan untuk mencapai tujuan, dalam hal ini yang dimanfaatkan adalah sumber dana pembangunan. Pengembangan pertanian organik di Kota Batu juga ditempuh melalui pendekatan kawasan organik. Mekanisme rencana pembentukan kawasan organik sesuai hasil penelitian terbagi dalam tiga tahap, yaitu

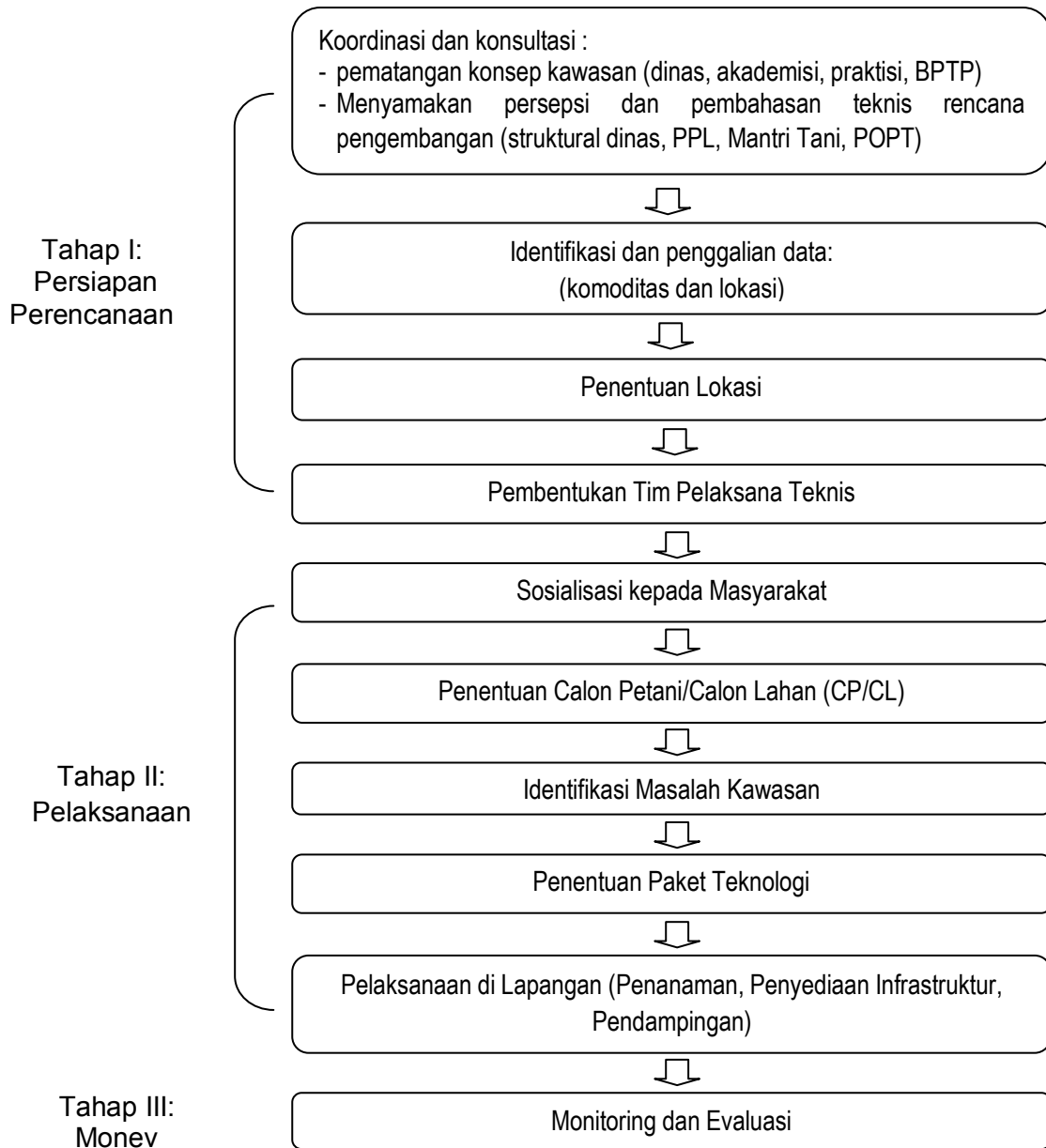
persiapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Masing-masing tahap terdiri dari kegiatan-kegiatan teknis penunjangnya seperti ditampilkan pada Gambar 5.7



Keterangan:

1. a. Aspirasi masyarakat melalui mekanisme musrenbang
b. Aspirasi masyarakat melalui penyerahan proposal kelompok tani/Gapoktan dan usulan PPL
2. Inventarisasi aspirasi masyarakat hasil musrenbang oleh sub bagian penyusunan program
3. Penginformasian hasil musrenbang kepada bidang teknis
4. a. Penyesuaian dengan kegiatan dari pusat
b. Penyesuaian dengan proposal yang masuk dan usulan PPL
5. Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD oleh Sub bagian penyusunan program
6. Pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada Pedum, Juklak dan Juknis Kegiatan baik untuk keperluan alokasi di seluruh wilayah Kota Batu maupun secara khusus di lokasi kawasan pertanian organik

Gambar 5.6 Alur Penentuan Alokasi Kegiatan Pendukung Pengembangan Pertanian Organik (Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2012).



Gambar 5.7 Diagram Alir Kegiatan dalam Rencana Pembentukan Kawasan Pertanian Organik di Kota Batu (Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2012)

Penyusunan rencana pembantuan kawasan organik tersebut telah sesuai dengan langkah-langkah perencanaan yang disampaikan oleh Wrihatnolo dan Riant (2006:59), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data yang dilakukan meliputi identifikasi alternatif lokasi dengan komoditas unggulan di masing-masing lokasi;
2. Pengambilan keputusan, meliputi penentuan 4 lokasi kawasan organik, komoditas sayuran sebagai prioritas pengembangan organik, pembentukan tim pelaksana teknis; serta menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan
3. Pelaksanaan keputusan meliputi pelaksanaan rangkaian kegiatan yang direncanakan yaitu sosialisasi, pelaksanaan CPCL, identifikasi masalah lapangan, dan kegiatan lainnya hingga pasca panen;
4. Evaluasi dilakukan pada akhir periode pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengembangan kawasan pertanian organik dimulai pada tahun 2011 dan dianggarkan dalam masa anggaran 1 tahun. Dengan demikian evaluasi dilakukan di akhir masa anggaran yang berlaku, yaitu pada akhir tahun 2011;
5. Perencanaan kembali berdasarkan hasil evaluasi tidak disebutkan dalam jadwal rencana yang disusun, tetapi hasil wawancara dengan narasumber mengidentifikasi adanya rencana untuk melakukan perencanaan kembali berdasarkan hasil evaluasi.

Pada tahap persiapan perencanaan dilakukan kegiatan koordinasi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pihak. Kegiatan konsultasi dilakukan oleh Kepala Dinas dan pejabat struktural baik kabid maupun kasi yang secara teknis bertanggung jawab terhadap perencanaan pengembangan pertanian organik dengan pihak ahli (akademisi) atau yang berpengalaman dalam bidang pertanian organik (praktisi). Konsultasi bertujuan untuk mematangkan konsep pengembangan pertanian yang tepat dengan kondisi lingkungan di Kota Batu, baik dari berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Dengan melakukan konsultasi pada pihak yang paham dengan bidang yang direncanakan diharapkan langkah-langkah-

kah yang ditempuh sesuai dengan masalah yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya dilakukan pula koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagai pelaksana di lapangan yaitu para PPL, POPT, dan jajaran struktural di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, baik mengenai konsep, tujuan, langkah-langkah pelaksanaan.

Kegiatan konsultasi dan koordinasi yang dilakukan merupakan langkah awal untuk memperoleh kesepakatan mengenai hal-hal yang dilakukan dalam proses perencanaan pengembangan kawasan organik. Hal ini sesuai dengan pendapat Bryson (2005: 85-86) bahwa langkah pertama dari proses perencanaan adalah mengembangkan kesepakatan awal tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah-langkah perencanaan utama oleh orang-orang penting pembuat keputusan demi keberhasilan upaya perencanaan. Proses kesepakatan awal biasanya berlangsung melalui langkah-langkah memperkenalkan konsep perencanaan, mengembangkan pemahaman mengenai makna yang dapat dilekatkan kepada proses dan prakteknya, berpikir melalui prioritas yang lebih penting, mengembangkan komitmen terhadap perencanaan, serta mencapai kesepakatan. Pada perencanaan pengembangan kawasan pertanian organik, keseluruhan langkah tersebut ditempuh melalui konsultasi dan koordinasi yang menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan pengembangan kawasan pertanian organik di empat kawasan dengan prioritas pengembangan pada komoditas sayuran dan dilaksanakan oleh tim pelaksana teknis yang akan ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutan Kota Batu.

5.2.1.5 Pendekatan perencanaan

A. Pendekatan politik

Walikota Batu yang terpilih untuk masa jabatan 2007-2012 mengusung visi Kota Batu sebagai sentra pariwisata berbasis pertanian. Visi tersebut memberi mandat bagi Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk mampu merencanakan pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam suatu kerangka pembangunan pertanian yang kreatif dan mampu bersinergi untuk mendukung pariwisata di Kota Batu yang dijabarkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2007-2012. Salah satu kebijakan bidang pertanian dalam renstra tersebut adalah melakukan upaya untuk mengembangkan pertanian organik dalam suatu kawasan pertanian organik yang pada jangka panjang diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif pariwisata berbasis pertanian di Kota Batu. Dengan kata lain visi misi kepala daerah menjadi salah satu pendorong realisasi rencana pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Hal ini mendukung pendekatan politik dalam perencanaan yang dijelaskan oleh Wahyudi (2006:7) yaitu berkaitan dengan pemilihan langsung kepala daerah yang akan menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*) khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMD.

Pada perkembangan selanjutnya, pendekatan politik semakin menguatkan untuk terlaksananya pengembangan pertanian organik di Kota Batu, yaitu dengan disosialisasikannya "Batu Go Organik" oleh Walikota Batu pada tahun 2011. Karenanya pada tahun 2011 Dinas Pertanian dan Kehutanan bekerja keras untuk dapat merealisasikan rintisan kawasan pertanian organik di empat desa di Kota Batu. Saat penelitian ini dilaksanakan, di Kota Batu sedang berlangsung proses pemilihan calon kepala daerah yang baru untuk periode tahun 2012-2017. Visi pembangunan yang disampaikan oleh calon *incumbent* adalah "Mewujudkan Kota Batu sebagai sentra pertanian organik berbasis kepariwisata-

an internasional”, dengan demikian semakin menguatkan untuk dilaksanakannya pertanian organik di Kota Batu.

Kondisi yang terjadi di Kota Batu, Walikota sebagai pihak yang memiliki kekuasaan formil memiliki visi yang kuat terhadap pembangunan pertanian di Kota Batu dengan menempatkan bidang pertanian sebagai salah satu fokus utama pembangunan serta mendukung inovasi dalam teknologi alternatif pembangunan pertanian melalui pengembangan pertanian organik. Dengan terpilihnya pasangan *incumbent* sebagai Walikota Batu periode 2012-2017 maka peluang pelaksanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu akan semakin besar. Hal ini menjelaskan pendapat bahwa aspek politik dalam perkembangan masyarakat atau negara berhubungan erat dengan administrasi negara sebagaimana dijelaskan oleh Tjokroamidjojo (1995: 54) bahwa berbagai aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan salah satunya adalah komitmen dari elit kekuasaan/elit pemerintahan terhadap proses pembangunan. Komitmen politik tersebut berkaitan dengan lebih terjaminnya terjadinya proses pembangunan. Elit kekuasaan politik juga merupakan kelompok yang menduduki kekuasaan formil politik dan memberikan pengesahan politik suatu kebijaksanaan atau program pemerintah, yang juga diharapkan merupakan unsur pembaharu, yaitu mampu memberikan maupun menerima gagasan-gagasan pembaharuan.

B. Pendekatan teknokratis

Pendekatan teknokratis pada perencanaan pengembangan pertanian organik diwujudkan dalam perencanaan pengembangan kawasan pertanian organik oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Adapun mekanismenya dilakukan dengan mulai tahap perencanaan (meliputi koordinasi dan konsultasi,

identifikasi dan penggalian data, penyusunan jadwal rencana, pembentukan tim); tahap pelaksanaan (meliputi sosialisasi, penentuan CPCL, identifikasi masalah kawasan, penentuan paket teknologi, penanaman, penyediaan infrastruktur, pendampingan teknologi, panen dan pasca panen); serta tahap monitoring dan evaluasi kegiatan. Perencanaan tersebut dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sebagai institusi teknis yang mempunyai kewenangan dan tupoksi untuk melakukan perencanaan pembangunan di bidang pertanian. Dalam proses perencanaan dilakukan pula konsultasi dengan pihak-pihak yang dianggap paham dan ahli dalam bidang pertanian organik, diantaranya pihak akademisi (Universitas Brawijaya), praktisi pertanian organik (PT. Herbal Estate, Ketua Gapoktan Vegory), pihak lembaga penelitian (BPTP). Perencanaan oleh institusi dan pelibatan pihak-pihak ahli tersebut sesuai dengan penjelasan Wahyudi (2006: 7), bahwa perencanaan pembangunan dengan pendekatan teknokratik merupakan perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan, khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana.

Pentingnya perencanaan secara teknokratis adalah karena dalam perencanaan pembangunan mencakup pula pembangunan sektor teknis sebagai komponen penyusun perekonomian di suatu wilayah. Karena itu perencanaan pembangunan daerah juga terkait dengan perencanaan pembangunan di masing-masing sektor. Karena bersifat teknis dan spesifik maka perencanaan tersebut memerlukan pemikiran oleh pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya agar benar-benar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam ilmu administrasi pembangunan, pendekatan perencanaan secara teknokratis termasuk dalam fungsi administrasi pembangunan, yaitu terkait dengan substansi dan perumusan

program-program pembangunan di sektor terkait. Tjokroamidjojo (1995: 14) menjelaskan bahwa administrasi pembangunan memiliki fungsi sebagai: 1) perumusan kebijaksanaan dan program-program pembangunan; 2) pelaksanaan kebijaksanaan dan program pembangunan secara efektif. Terkait dengan fungsi untuk perumusan kebijaksanaan dan program-program pembangunan, maka rangkaian proses perumusan kebijaksanaan maupun program pembangunan termasuk dalam wilayah administrasi, sedangkan substansi dan perumusan kebijaksanaan maupun program menjadi wilayah disiplin ilmu lain yang bersangkutan untuk mengolah dan menganalisanya. Dalam hal ini perencanaan sektor pertanian menjadi substansi perencanaan, atau yang oleh Muluk (2007: 13) dijelaskan sebagai teori substantif (*theory in planning*), yaitu lebih merujuk pada bidang perhatian atau substansi bidang yang direncanakan. Dengan demikian kontribusi disiplin ilmu lain dalam perencanaan dapat dikatakan sebagai modal *observing* sekaligus media penjelas. Lebih lanjut Faludi (1993: 7-8) menjelaskan bahwa *substantive theory* lebih mengarah kepada pemahaman terhadap konsep dan metoda yang sesuai untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dan memberikan fleksibilitas dalam merumuskan persoalan dan cara pemecahan persoalan tersebut.

C. Pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom-up*)

Upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu secara keseluruhan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan baik dari daerah maupun pusat yang memungkinkan untuk mendukung dilaksanakannya berbagai kegiatan dalam penerapan pertanian organik. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir usulan dari masyarakat terkait penerapan teknologi organik, tidak hanya

pada kawasan yang dibentuk namun juga untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat di desa lain diluar kawasan.

Pendekatan *top down dan bottom-up* pada perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu terlihat pada pelaksanaan kegiatan yang berasal dari sumber pembiayaan pusat (APBN), yaitu melalui Kementerian Pertanian, dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Hortikultura pada program Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura. Bentuk kegiatan berupa pemberian dana bantuan sosial, penyusunan SOP, registrasi kebun, pelatihan petani dan sekolah lapang petani dengan materi GAP (*Good Agricultural Practices*) dan SLPHT. Arus *top-down* dalam hal ini bahwa Dinas Pertanian dan Kehutanan melaksanakan kegiatan mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dalam pedoman umum kegiatan. Dalam pedoman tersebut dijelaskan pula bahwa pihak pelaksana kegiatan yaitu SKPD terkait di Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun petunjuk teknis yang disesuaikan dengan kondisi daerah serta melakukan pendataan calon petani dan calon lokasi (CP/CL) yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pertanian sebagai kelengkapan pemberian alokasi bantuan. Usulan data CP/CL dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu kepada Kementerian Pertanian merupakan arus *bottom-up*. Pendekatan *top-down dan bottom-up* terkait dengan kewenangan lembaga yang terlibat dalam perencanaan. Hal ini seperti penjelasan Tarigan (2003: 16) bahwa model perencanaan *top-down dan bottom-up* hanya berlaku jika terdapat beberapa tingkat pemerintahan atau beberapa jenjang jabatan di perusahaan yang masing-masing tingkatan diberi wewenang untuk melakukan perencanaan. Perencanaan model *top-down* adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan berada pada institusi yang lebih tinggi, dan institusi perenca-

na pada level lebih rendah harus menerima arahan dari institusi yang lebih tinggi. Rencana dari institusi yang lebih tinggi tersebut harus dijadikan bagian rencana dari institusi yang lebih rendah. Sedangkan perencanaan *bottom-up* apabila kewenangan utama dalam perencanaan berada pada institusi yang lebih rendah, dimana institusi yang lebih tinggi harus menerima usulan yang diajukan oleh tingkat yang lebih rendah.

Tjokroamidjojo (1995:12) mengungkapkan perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, lebih efektif, dan efisien. Karena itu diperlukan pembatasan terhadap perencanaan yang dapat ditempuh melalui pendekatan dalam perencanaan, mengingat banyaknya kebutuhan yang ingin diakomodir sebagaimana pernyataan Abe (2005:80) bahwa suatu keinginan memiliki subyektivitas yang tinggi dan cenderung tanpa batas yang jelas. Dari segi inilah pendekatan perencanaan *top-down* diperlukan.

Perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan *top down* berfungsi sebagai pembatas dari koridor perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu perencanaan, yaitu tercapainya usaha pembangunan kawasan hortikultura di Kota Batu sebagai salah satu daerah pengembangan hortikultura sesuai rencana kementerian pertanian. Sedangkan proses *bottom-up* yang dilakukan oleh institusi pada level lebih rendah, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu diharapkan mampu memberikan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan di tingkat bawah berdasarkan permasalahan, potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian jika dapat diterapkan dengan baik diharapkan dapat tercapai keserasian yang seimbang antara peren-

canaan dan ketersediaan sumber daya di tingkat atas dalam hal ini tujuan perencanaan dan ketersediaan anggaran pada Dirjen Hortikultura, Kementerian Pertanian dengan kebutuhan dan kondisi pada level bawah, yaitu masyarakat petani di Kota Batu yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuncoro (2004:58), bahwa sistem perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* akan menjamin adanya keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah. Gabungan dan kombinasi yang tepat antara pendekatan *top down* dan *bottom up* dalam suatu perencanaan pembangunan diharapkan mampu menghasilkan suatu perencanaan yang efektif dan efisien.

D. Pendekatan partisipatif

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan pertanian organik dilakukan dengan mengakomodir aspirasi yang diberikan melalui PPL serta hasil musrenbang berupa usulan masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan dalam penerapan pertanian organik. Pelibatan masyarakat secara lebih jelas terlihat pada perencanaan pengembangan kawasan pertanian organik di Kota Batu. Proses perencanaan pengembangan kawasan organik mencakup kegiatan konsultasi, koordinasi, dan sosialisasi dengan *stakeholder* terkait seperti perguruan tinggi, praktisi pertanian organik dan tentu saja petani atau kelompok tani sebagai penerima sekaligus pelaksana.

Pelibatan masyarakat terutama petani dan kelompok tani diwadahi dalam suatu kegiatan sosialisasi untuk menjelaskan maksud perencanaan, memperoleh aspirasi petani secara langsung, mencari informasi mengenai kesediaan, kebutuhan, kemungkinan permasalahan dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksa-

naan rencana. Dengan demikian diharapkan perencanaan yang dihasilkan telah sesuai dengan keinginan masyarakat seperti disampaikan oleh Abe (2005: 88) bahwa dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, maka produk yang dihasilkan diharapkan sesuai dengan persepsi dan harapan masyarakat, karena masyarakatlah yang mengetahui mengenai apa yang sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini sesuai pula dengan penyampaian oleh Riyadi dan Deddy (2004: 309) bahwa pembangunan yang didalamnya mencakup perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi seharusnya berangkat dari keinginan dan kemampuan masyarakat, serta seyogyanya dimulai dengan menemukenali potensi dan kebutuhan dari masyarakat sebagai penerima manfaat dan penanggung resiko pembangunan.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah perencanaan pengembangan pertanian organik oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu telah menerapkan UU No. 25 tahun 2004 yang mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui pendekatan perencanaan secara politis, teknokratis, partisipasi serta *top down* dan *bottom up*. Masing-masing pendekatan dilakukan sesuai konteks perencanaan. Pendekatan politis terkait dengan ide awal perencanaan, dukungan pemimpin daerah terhadap pelaksanaan rencana, serta mendukung struktur perencanaan pembangunan pertanian secara keseluruhan melalui renstra dinas yang juga berarti mendukung perencanaan secara keseluruhan arah pembangunan Kota Batu yang dijabarkan dalam RPJMD Kota Batu. Pendekatan teknokratis berperan dalam teknis dan substansi perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu, sedangkan gabungan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dilaksanakan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan mensinkronkan program kegiatan dari tingkat pusat yang dapat mendukung upa-

ya pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Adapun pendekatan partisipatif berperan dalam menjaring aspirasi dari *stakeholder* sebagai dasar perencanaan teknokratis, serta untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat tentang terlaksananya rencana yang disusun.

5.2.2 Stakeholder dalam perencanaan pengembangan pertanian organik

5.2.2.1 Identifikasi *Stakeholder*

Pemerintah daerah selaku institusi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan di daerah hendaknya dapat mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat dengan melibatkannya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini penting dilakukan karena bagaimanapun pembangunan daerah pasti melibatkan berbagai pihak, baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan, demikian pula pada perencanaan pengembangan pertanian organik. Pada bagian ini peneliti mengidentifikasi *stakeholder* yang memiliki hubungan dengan upaya pengembangan pertanian organik baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya, serta mekanisme koordinasi yang terjalin.

Secara umum diidentifikasi ada tiga *stakeholder* yang terlibat dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu, yaitu: pemerintah, masyarakat, dan swasta. Secara lebih rinci *stakeholder* yang terlibat meliputi: 1) perguruan tinggi; 2) pemerintah Kota Batu dalam hal ini Walikota Batu, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, Aparat Desa; 3) Petugas Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT); 4) masyarakat, terdiri dari petani, kelompok tani, Ketua Gapoktan; 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu; 6) swasta dalam hal ini praktisi dan pengusaha produk organik; 7) media massa. Dengan demikian *stakeholder* yang terlibat telah mencakup secara individu maupun kelompok yang

masing-masing memiliki kepentingan berbeda sesuai dengan pernyataan Iqbal, (2007: 90) bahwa dalam konteks sektor pertanian, secara organisasi pemangku kepentingan dapat dikategorikan dalam lingkup yang lebih luas sebagai pemerintah, LSM, sektor swasta; dan komunitas serta secara perorangan atau kelompok mencakup aparat pemerintah, peneliti, penyuluh, petani, pedagang, penyedia jasa dan pihak-pihak terkait lainnya. Setiap kelompok memiliki sumber daya dan kebutuhan masing-masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan.

Selanjutnya bila dikelompokkan berdasarkan jenis *stakeholder* sesuai pendapat Crosby dalam Iqbal (2007: 90) maka *stakeholder* perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu baik yang sudah dilibatkan maupun belum ditampilkan pada Tabel 5.16

Tabel 5.16 Pengelompokan *Stakeholder* dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu

| Jenis Pemangku Kepentingan/ <i>Stakeholder</i> | | |
|---|---|--|
| Stakeholder Utama | Stakeholder Penunjang | Stakeholder Kunci |
| Terlibat: - Petani - Kelompok Tani Belum Terlibat - Konsumen - Pedagang pupuk kimia - Pedagang produk organik - Hotel dan Restoran | Terlibat: - Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu - Perguruan Tinggi - Aparat Desa - Praktisi/Pengusaha organik - POPT - Ketua Kelompok Tani/Gapoktan - Media Massa Belum Terlibat: - SKPD lain yang terkait (Bappeda, Disperindag-Koperasi/UKM, Dikbud, Dishubkominfo, Dinkes) - Pemerintah Daerah Lain - Lembaga keuangan - LSM organik/peduli lingkungan | Terlibat: - Walikota Batu - DPRD Kota Batu |

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2012

Dari tabel 5.16 tersebut *stakeholder* utama adalah masyarakat secara umum di Kota Batu, khususnya dilokasi kawasan pengembangan pertanian organik yang memperoleh dampak baik secara positif (penerima manfaat) maupun negatif (diluar kesukarelaan, misalnya pedagang pupuk kimia). Selanjutnya *stakeholder* penunjang, yakni yang pihak-pihak yang berperan sebagai perantara dalam pembentukan dan pengembangan kawasan organik yang terdiri dari kelompok pelaksana kegiatan seperti Dinas Pertanian dan Kehutanan; sedangkan *stakeholder* kunci adalah Walikota Batu, dan DPRD yang memiliki posisi penting terkait terlaksananya kegiatan, menentukan dan mendukung kelancaran pelaksanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu.

Adapun jaringan kerjasama yang terjalin pada perencanaan pengembangan pertanian organik tersebut digambarkan sebagai berikut. Masyarakat khususnya petani di Kota Batu merupakan stakeholder utama yang menerima manfaat dari rencana pengembangan pertanian organik karena pada dasarnya tujuan dilaksanakannya upaya pengembangan pertanian organik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selain sebagai penerima manfaat petani juga berperan secara langsung sebagai sumber daya utama pelaksana. Keberhasilan penerapan pertanian organik di masa yang akan datang menjadi sangat tergantung dari kesiapan petani untuk menerapkan pertanian organik. Karenanya kerjasama antara petani dan pemerintah hendaknya terus dipupuk demi tercapainya tujuan untuk kebaikan bersama. Pemerintah sebagai lembaga yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat adalah untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Hal ini sejalan dengan pendapat Tjokroamidjojo (1995: 18) bahwa pemerintah

dalam perannya sebagai *service state* atau abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Dalam suatu pembangunan berencana, pemerintah berperan sebagai *development agent* atau unsur pendorong pembangunan.

Pihak perguruan tinggi, pengusaha organik, POPT, PPL dan media massa merupakan stakeholder pendukung yang berperan sebagai perantara dalam menyampaikan rencana dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Sekali lagi diperlukan koordinasi yang baik antar *stakeholder* penunjang demi lancarnya pembangunan yang direncanakan maupun dilaksanakan.

Kelompok stakeholder berikutnya adalah Walikota dan DPRD Kota Batu yang dikelompokkan sebagai stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini terkait dengan perannya sebagai penentu dan pembuat kebijakan yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan suatu program pembangunan. Dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu, Walikota dan pihak DPRD merupakan stakeholder yang memiliki kekuasaan yang dapat digunakan untuk memaksa *stakeholder* lain. Disisi lain Walikota Batu merupakan *stakeholder* yang memiliki peran paling penting karena memiliki kekuasaan, legitimasi dan urgensi. Dengan ketiga atribut yang dimiliki maka Walikota dapat membuat suatu kebijakan terkait keberlanjutan pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Hal ini ditunjukkan sejak *launching* beberapa desa kawasan organik di Kota Batu, Walikota telah mencanangkan program 'Go Organik' Kota Batu dan mengamanatkan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Termasuk pula menegaskan pengembangan pertanian organik

sebagai visi yang akan dicapai pada masa kepemimpinan selanjutnya untuk periode 2012-2017. Dengan demikian jaringan kerjasama antar stakeholder yang terlibat berdasarkan peran, kepentingan dan kapasitas masing-masing *stakeholder* telah sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Agustina (2002: viii). Selanjutnya Riyadi dan Deddy (2004: 310) menyampaikan bahwa koordinasi dalam perencanaan pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya.

Perencanaan pengembangan pertanian organik juga telah berupaya melibatkan tiga pilar *stakeholders* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan penerapan administrasi publik yang mengarah pada demokratisasi administrasi maka perencanaan pengembangan pertanian organik telah berupaya menerapkan prinsip *good governance* atau tata pemerintahan yang baik. Namun demikian dari ketiga jenis *stakeholder* masih ada beberapa pihak yang belum dilibatkan seperti SKPD lain yang masih terkait, pemerintah daerah lain, restoran dan hotel, pedagang atau distributor pupuk kimia. Tidak terlibatnya *stakeholder* tersebut merupakan indikasi masih kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam perencanaan pengembangan pertanian organik. Kondisi tersebut juga menunjukkan perencanaan yang dilakukan masih bersifat sektoral karena SKPD yang terlibat hanya satu, yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan. Dengan demikian kemungkinan yang terjadi adalah program dan kegiatan yang dilakukan sebagian besar berorientasi untuk memperkuat dari satu sisi saja, yaitu bidang

pertanian. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yaitu sebagian besar pelaksanaan kegiatan berupa alokasi saprodi dan infrastruktur pendukung pertanian.

Identifikasi *stakeholder* akan membantu dalam merumuskan koordinasi, strategi, dan penentuan prioritas program kegiatan yang sekiranya diperlukan guna mempercepat dan memperlancar dicapainya tujuan karena perencana telah mengetahui gambaran tentang pihak-pihak yang terkait dengan maksud perencanaan meliputi kelompok pelaksana dan sasaran perencanaan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bryson (2007: 119) bahwa tujuan utama dari analisis *stakeholder* adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat tentang para pemain di dalam gelanggang. Berdasarkan hal tersebut maka pihak-pihak lain yang belum terlibat perlu dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pertanian organik selanjutnya.

Secara keseluruhan rencana pengembangan pertanian organik di Kota Batu tertuang pada Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2007-2012. Renstra tersebut berisi kebijakan strategis dan prioritas pembangunan bidang pertanian. Namun demikian tidak menjelaskan secara terfokus arah pelaksanaan pengembangan pertanian organik. Melihat kegiatan-kegiatan pengembangan pertanian organik yang kompleks dan melibatkan banyak *stakeholder* maka menurut peneliti, Dinas pertanian dan Kehutanan perlu menyusun rencana strategis untuk pengembangan pertanian organik.

5.2.2.2 Peran Stakeholder

Perencanaan pengembangan pertanian organik berdasarkan hasil penelitian telah melibatkan beberapa pihak, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, maupun masyarakat. Masing-masing pihak yang terlibat memiliki peran tersendiri. Pihak akademisi, dalam hal ini perguruan tinggi mempunyai peran untuk pem-

berian paket-paket teknologi sekaligus sebagai pihak konsultan ahli yang berwenang memberikan saran akademis terkait permasalahan teknis yang ditemui di lapangan. Peran pemerintah, yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu adalah sebagai fasilitator dengan tugas memfasilitasi kebutuhan petani berupa sarana produksi, dukungan infrastruktur, pendampingan dan transfer ilmu pengetahuan/teknologi pertanian organik melalui PPL/POPT, serta inisiator dalam perencanaan pertanian organik. Pihak swasta dalam hal ini praktisi/pengusaha organik dilibatkan sebagai konsultan dalam perencanaan. Sedangkan petani merupakan pihak penerima manfaat sekaligus pelaku utama dalam penerapan pertanian organik secara teknis di lapang.

Pelaksanaan peran *stakeholders* yang terlibat dipandu melalui beberapa jalur koordinasi. Pada kegiatan pengembangan kawasan organik, pembagian peran diperjelas dengan dikeluarkannya SK tim pelaksana teknis kegiatan. Jika dikaji menggunakan konsep manajemen strategis yang menekankan pentingnya peran manajemen puncak dalam koordinasi, maka pengembangan kawasan pertanian organik di Kota Batu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) DPRD dan Walikota Batu menempati posisi sebagai dewan komisaris dengan peran mengarahkan dan memberi saran/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada manajemen puncak melalui manajer puncak;
- 2) Kelompok manajemen puncak sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan terdiri dari: a) Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai penanggung jawab; b) Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai ketua, c) Kabid. Teknologi Pengolahan Hasil dan Pemasaran sebagai wakil ketua; d) koordinator pelaksana lapangan dan anggotanya yang terdiri dari beberapa kompo-

nen *stakeholder*, yaitu PPL, POPT, ketua Gapoktan. Adapun manajer puncak dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;

- 3) Sesuai kedudukan dalam manajemen strategis tersebut, maka pihak DPRD mempunyai peran menyetujui, mengontrol, dan mengawasi kegiatan dalam hal persetujuan alokasi anggaran kegiatan, mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasinya melalui laporan pertanggungjawaban kegiatan yang disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan melalui laporan Walikota sebagai pelaksana pemerintahan tertinggi di daerah (Kota);
- 4) Dalam teknis perencanaan, kelompok manajemen puncak bersama pihak konsultan melakukan koordinasi untuk merumuskan rancangan kegiatan, dan menyamakan persepsi tentang maksud dan teknis pelaksanaan kegiatan. Agar dapat berjalan secara efektif maka Kepala Dinas selaku manajer puncak menetapkan SK tim pelaksana teknis kegiatan untuk memperjelas tugas dan kewajiban pihak-pihak yang dilibatkan. Selanjutnya dilakukan penjaringan dan penyesuaian dengan aspirasi *stakeholder* sasaran yaitu petani melalui pelaksanaan sosialisasi kegiatan. Aspirasi yang dituju terutama kesepakatan mengenai kesediaan petani, lokasi penanaman, komoditas yang ditanam, alokasi bantuan saprodi yang diperlukan;
- 5) Dalam teknis pelaksanaan, tim pelaksana lapangan terutama PPL dan POPT merupakan pihak yang paling banyak berhubungan dengan petani. Petani merupakan pihak utama sasaran kegiatan sebagai penerima manfaat dan pelaksana di lapang. PPL dan POPT menjalankan perannya untuk memberikan bimbingan/transfer teknologi, mendampingi petani dan kelompok tani selama kegiatan budidaya tanaman, serta tetap berkoordinasi dengan kelompok manajemen puncak terkait perkembangan maupun masalah yang ditemui di la-

pangan. Koordinasi dapat dilakukan secara informal melalui komunikasi personal maupun secara formal pada rapat-rapat koordinasi yang juga merupakan sarana untuk memonitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh manajer puncak, yaitu kepala dinas. Adapun evaluasi secara khusus dilakukan melalui kerjasama dengan pihak akademisi setelah kegiatan pengembangan kawasan organik pada tahun 2011 selesai dilaksanakan.

Manajer puncak dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan memiliki posisi penting dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing personel/komponen *stakeholder* agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kelancaran perencanaan dan pelaksanaan rencana. Hal ini diwujudkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan potensi kemampuan personil, melakukan koordinasi/komunikasi dengan anggota tim maupun pihak lain yang dapat mendukung kelancaran kegiatan, menyetujui keputusan alokasi anggaran, serta membuat keputusan penting berdasarkan pertimbangan rasional. Namun demikian ada beberapa hal yang belum optimal dilakukan, misalnya belum dilakukan perencanaan strategis secara ideal, koordinasi bersifat sektoral pada bidang pertanian dan belum memberi dampak nyata bagi komitmen anggota tim. Dengan demikian manajer puncak masih belum optimal menangani tanggung jawab penting untuk manajemen strategis yang efektif sesuai pendapat Hunger dan Wheelen (2003: 43), meliputi: 1) memenuhi peran utama; 2) memberikan kepemimpinan eksekutif, 3) mengelola proses perencanaan strategis. Hal ini terkait pula dengan posisi manajer puncak yang dijabat oleh Kepala Dinas belum memiliki legitimasi yang kuat dalam membentuk komitmen tim. Pada akhirnya pelaksanaan kegiatan kurang maksimal yang salah satunya ditun-

jukkan dengan hanya beberapa pihak yang aktif menjalankan perannya yaitu PPL di wilayah desa binaan.

Berdasarkan beberapa kelemahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan beberapa hal perbaikan. Pertama yaitu melakukan perencanaan pengembangan pertanian organik secara lintas sektoral. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat pengembangan pertanian organik bersifat kompleks. Dengan demikian koordinasi dilakukan dengan melibatkan SKPD pendukung, diantaranya Disperindag/UKM/koperasi, Dinas Kesehatan dll. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Kartasasmita (2997:61) bahwa koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor atau badan di berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi. Agar tercipta sinergi antar *stakeholders* perlu dilakukan koordinasi secara sistematis dan terarah yang mana pada dasarnya hal tersebut merupakan langkah awal dari perencanaan strategis. Koordinasi awal dilakukan di tingkat manajemen puncak, yaitu para pimpinan SKPD yang memiliki keterkaitan cukup besar dalam pengembangan pertanian organik. Inisiatif penyusunan rencana dapat berasal dari pimpinan Dinas Pertanian dan Kehutanan berkoordinasi dengan pimpinan Bappeda serta beberapa SKPD pendukung untuk melakukan koordinasi awal. Koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan mengenai beberapa hal, yaitu: 1) pihak-pihak yang perlu dilibatkan; 2) maksud dilakukannya perencanaan pengembangan pertanian organik dan kesepakatan mengenai perlu atau tidak dilakukan perencanaan; 3) langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses penyusunan rencana, termasuk keanggotaan tim perencanaan pengembangan pertanian organik, misalnya perlunya pembentukan tim teknis/kelompok kerja; 4) pembagian peran sesuai kapasitas dan tupoksi masing-masing SKPD; 5) sumber daya yang

diperlukan dan komitmen pengalihan sumber daya tersebut setiap *stakeholder* untuk mendukung pelaksanaan rencana. Kesepakatan yang dihasilkan selanjutnya disampaikan kepada Walikota sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memberi mandat sebagai dasar pelaksanaan perencanaan strategis, agar mendapat legitimasi, misalnya dengan penetapan SK tim teknis oleh Walikota. Dukungan Walikota sangat penting karena dengan adanya kepastian mandat yang diberikan oleh pihak eksekutif paling tinggi di daerah diharapkan mampu memunculkan komitmen yang kuat bagi pelaksana serta memperjelas pembagian peran *stakeholders*.

Pada intinya tim teknis yang dibentuk hendaknya mewakili *stakeholders* terkait yaitu terdiri dari: 1) unsur pemerintah (SKPD terkait, baik di tingkat kepala SKPD, kepala bidang, kepala seksi, atau staf); 2) perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat/ LSM/ gapoktan/praktisi organik; 3) perwakilan akademisi dari perguruan tinggi. Tim perencana yang terdiri dari berbagai unsur perwakilan *stakeholder* mempunyai maksud agar tim mampu menganalisis dan merumuskan rencana dari sudut pandang yang beragam sesuai latar belakang masing-masing anggota, namun mengarah ke satu tujuan yaitu mewujudkan keberhasilan pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Hal ini sesuai dengan pendapat Riyadi dan Deddy (2004: 10) bahwa pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam perencanaan bisa dari masyarakat umum, kalangan akademisi, tokoh-tokoh ormas, parpol dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang dapat memberikan informasi penting tentang kebutuhan dasar pembangunan. Selanjutnya tim teknis yang terbentuk melakukan penjaringan aspirasi *stakeholder* yang diperlukan untuk melakukan langkah-langkah perencanaan strategis selanjutnya yaitu perumusan tujuan, misi, analisis lingkungan (internal dan eksternal), identifikasi isu strategis,

perumusan strategi dan merumuskan visi. Data dan informasi yang perlu dijarah dari *stakeholder* berkaitan dengan harapan, keluhan dan impian tentang kondisi pertanian organik yang akan dikembangkan. Proses perencanaan strategis yang dijelaskan tersebut mengacu pada langkah-langkah penyusunan rencana strategis oleh Bryson (2007: 55). Keterlibatan *stakeholder* dapat mengacu pada peran dan fungsi yang dijelaskan oleh Sutanto, sehingga gambaran keterlibatan serta peran stakeholder yang disarankan peneliti disajikan pada Tabel 5.17

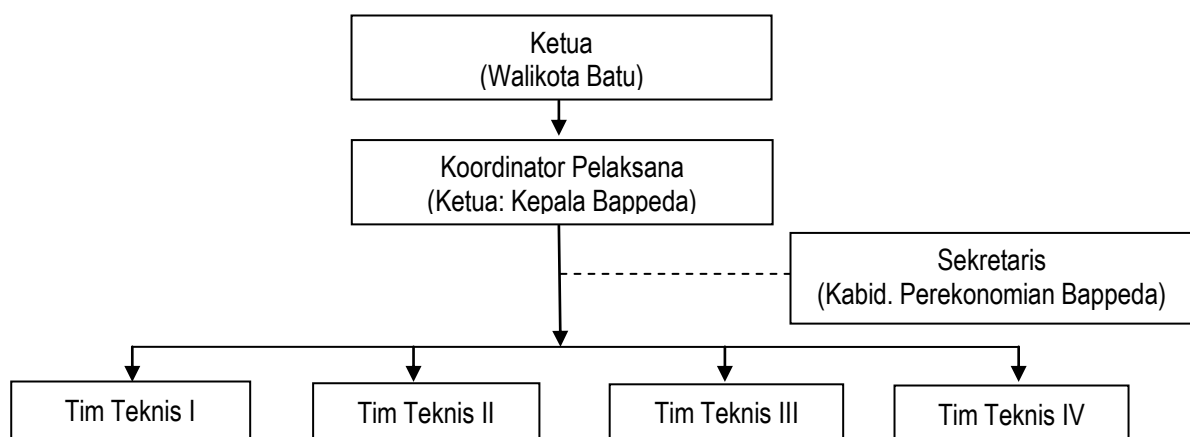
Tabel 5.17 *Stakeholder* dalam Perencanaan Pengembangan Pertanian Organik

| No. | Stakeholder | Rincian | Peran |
|-----|-------------------|---|--|
| 1. | Pemerintah Daerah | Walikota Batu | <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kebijakan pendukung perencanaan pengembangan pertanian organik (perda) - Mendorong komitmen pelaksanaan kegiatan |
| | | Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu: | <ul style="list-style-type: none"> - Inisiator dalam pengembangan pertanian menuju organik - Memfasilitasi sarana produksi pertanian organik - Pendampingan dan transfer teknologi pertanian organik |
| | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> - Membantu merintis jaringan pemasaran - Pelatihan kewirausahaan |
| | | Dinas Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi kesehatan masyarakat, terutama mengenai pangan yang aman dan sehat |
| | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan penyebaran konsep, teknologi pertanian organik secara formal dalam materi kurikulum pendidikan - Pendidikan wirausaha pertanian |
| | | Dinas Cipta Karya | Perbaiki infrastruktur umum (jalan, fasilitas umum) |
| | | Aparat desa dan kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> - Membantu koordinasi program kegiatan dari SKPD dengan masyarakat - Memberi motivasi melalui keterlibatan/aktif secara fisik dalam kegiatan bersama masyarakat |
| 2. | Akademisi | Fakultas Pertanian Universitas Barawijaya | <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai konsultan ahli yang bertugas memberikan saran-saran akademis terkait permasalahan teknis yang ditemui di lapangan |

| | | | |
|----|------------|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan paket-paket teknologi - Melakukan penelitian teknologi organik |
| 3. | Masyarakat | Petani, anggota kelompok tani | - Pelaksana aplikasi teknologi pertanian organik di lapangan |
| | | Ketua kelompok tani, ketua gapoktan, pemuka masyarakat | - Mendorong keaktifan anggota kelompok tani dan memupuk semangat petani |
| 4. | Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> - DPRD - LSM organik / peduli lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pemerintah dan LSM dalam menentukan kebijakan yang diperlukan untuk memperlancar pengembangan pertanian organik - Berkoordinasi dengan pemerintah dan DPRD dalam menentukan kebijakan yang diperlukan untuk memperlancar pengembangan pertanian organik - Pendampingan petani - Pengawasan kegiatan oleh masyarakat dan masyarakat |

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2012

Adapun mekanisme koordinasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan pertanian organik di Kota Batu menurut peneliti ditampilkan pada Gambar 5.8



Gambar 5.8 Mekanisme Koordinasi dalam Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu (Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2012)

Koordinator dari setiap posisi dalam mekanisme koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketua kegiatan adalah Kepala Daerah, yaitu Walikota Batu karena pengembangan pertanian organik perlu melibatkan lintas sektoral. Ketua berwenang memberikan arahan penyelenggaraan tugas seluruh pelaksana;
2. Koordinator pelaksana kegiatan, yaitu Kepala Bappeda Kota Batu sebagai instansi yang memiliki fungsi perencanaan Kota Batu, memiliki tugas antara lain: melakukan koordinasi dengan SKPD Kota Batu guna kelancaran pengembangan pertanian organik di Kota Batu; mengkoordinir keseluruhan kinerja, melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada ketua;
3. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Bidang Ekonomi Bappeda, yang dalam tupoksinya mencakup pula bidang pertanian. Tugas sekretaris adalah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesekretariatan guna menunjang kelancaran kegiatan;
4. Tim teknis informasi dan sosialisasi pertanian organik. Terdiri dari unsur Dinas Infokom, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Tim teknis peningkatan teknologi, SDM dan kelembagaan pertanian organik. Terdiri dari unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan, POPT, perguruan tinggi;
6. Tim teknis peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil. Terdiri dari unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan; Kantor Ketahanan Pangan;
7. Tim teknis promosi dan pengembangan pasar terdiri dari unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi, unsur Dinas Pariwisata.

Melalui alur mekanisme koordinasi yang jelas, terstruktur dan mempunyai legitimasi yang kuat diharapkan masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi dan mewujudkan komitmennya secara maksimal.

5.2.3 Strategi untuk mewujudkan keberlanjutan perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu

5.2.3.1 Penerapan prinsip interaktif (partisipasi, kesinambungan dan holistik) dalam perencanaan pengembangan pertanian organik

A. Prinsip partisipasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu telah berupaya menyertakan partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi secara tidak langsung diperoleh melalui usulan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada PPL atau melalui proposal kegiatan, dan hasil-hasil musrenbang. Sedangkan partisipasi secara langsung diwujudkan khususnya melalui kegiatan sosialisasi dengan masyarakat pada kegiatan pengembangan kawasan organik. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini dilakukan sesuai penjelasan Abe (2002: 91) bahwa metode partisipasi dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Pelibatan masyarakat dalam hal ini petani penting untuk dilaksanakan terkait dengan peran mereka sebagai pelaksana di lapang, sehingga perlu diketahui dengan jelas informasi mengenai kesediaan, kondisi wilayah dan masyarakat di lokasi sasaran, serta hal-hal yang dibutuhkan dalam teknis/pelaksanaan termasuk jenis komoditi yang diinginkan petani. Pada kegiatan pengembangan kawasan organik aspirasi yang diperoleh melalui sosialisasi di dokumentasikan dalam berita acara sosialisasi dan ditandatangani oleh perwakilan masyarakat, aparat desa dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehu-

tanan Kota Batu. Kesepakatan tersebut juga sebagai jaminan/komitmen pelaksanaan kegiatan oleh pihak dinas sesuai dengan keinginan masyarakat, serta kesiediaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan budidaya tanaman sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Dinas atau sesuai kesepakatan lain, misalnya SOP. Hal ini sesuai dengan pendapat Conyers (1992: 154) bahwa pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan adalah: pertama untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya maka program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada program atau proyek pembangunan yang akan dilaksanakan karena mereka mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga bahwa partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat.

Penerapan prinsip partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan diharapkan akan menikmati manfaat yang diberikan bukan hanya dari hasil (*product*) perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya sehingga akan terbentuk rasa memiliki dan tanggung jawab pada implementasi rencana. Demikian pula pada perencanaan pengembangan pertanian organik ini masyarakat merupakan subyek dan obyek kegiatan. Indikator keberhasilan rencana adalah apabila upaya penerapan pertanian organik diterapkan secara nyata oleh petani baik secara langsung maupun bertahap. Keterlibatan petani menjadi hal utama sehingga untuk memotivasi keterlibatan secara berkelanjutan perlu diketahui melalui penjangkaran keinginan dan hal-hal yang dapat memacu semangat petani dalam penerapan teknologi pertanian organik. Dengan demikian partisipasi disini menjadi tujuan dalam perencanaan, tidak hanya dibutuhkan sebagai cara/proses. Hal ini mendukung pendapat Adiyono

so (2009: 44) yang menjelaskan dua maksud penerapan partisipasi yaitu: 1) sebagai proses atau cara untuk mencapai tujuan dan 2) sebagai tujuan dari perencanaan itu sendiri.

Partisipasi penting dalam menumbuhkan kepercayaan, rasa tanggung jawab dan memiliki dari suatu program atau rencana pembangunan, termasuk pada upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Melalui komunikasi dan aspirasi yang peroleh dapat diketahui pula kondisi masyarakat sasaran sehingga dapat ditempuh cara untuk mewujudkan kesejahteraan petani secara mandiri melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia petani sebagai pelaku aktif pembangunan. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan yang disampaikan oleh Salikin (2003: 15) yaitu meningkatkan sumber daya manusia petani dan memfokuskan tujuan produktivitas untuk jangka panjang yang dapat ditempuh melalui pendekatan pertanian berkelanjutan yang bersifat proaktif, berdasarkan pengalaman, dan partisipatif.

B. Prinsip Kestinambungan

Hasil penelitian menemukan bahwa didalam perencanaan pengembangan pertanian organik telah dijadwalkan agenda pelaksanaan kegiatan, tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan organik. Hal ini menunjukkan perencanaan telah menerapkan prinsip kestinambungan yang diartikan bahwa perencanaan tidak berhenti pada satu tahap, tetapi selalu terkait dengan tahap pelaksanaan dan evaluasi kegiatan (Kartasasmita, 1990: 53).

Salah satu alasan perencana harus memperhatikan tahap implementasi dan evaluasi adalah karena sifat siklis proses perencanaan. Dengan memandang perencanaan sebagai hal yang berkesinambungan, maka rencana dapat diusahakan untuk dapat dilaksanakan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan ke-

ungkinan hambatan dalam tahap pelaksanaan, serta memilih alternatif tindakan atau strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan yang mungkin akan terjadi. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan maka perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan, penyesuaian kembali rencana dengan pelaksanaan, atau bahkan mengkaji dan menyusun kembali rencana yang telah dibuat sesuai dengan perkembangan kondisi yang terjadi dan dibutuhkan di lapangan (*replanning*).

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan, ternyata pelaksanaan di lapangan terutama pada kegiatan pengembangan kawasan organik ditemui beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana. Hal ini ditemui misalnya pada beberapa jenis bantuan yang diberikan pihak dinas tidak sesuai kesepakatan yang dibuat dengan petani, serta adanya keterlambatan penyerahan bantuan. Realita yang lain meskipun telah diagendakan kegiatan monitoring dalam pelaksanaan, ternyata hanya beberapa pihak saja dari tim pelaksana yang aktif melaksanakan tugasnya. Dari pengamatan dan hasil wawancara terungkap bahwa hal tersebut disebabkan kurangnya komitmen dari anggota tim pelaksana karena tidak ada dukungan pembiayaan untuk operasional kegiatan monitoring, dan pembentukan tim pelaksana hanya dianggap sebagai suatu formalitas saja. Selain itu beberapa anggota tim juga berpendapat bahwa rencana pengembangan kawasan pertanian organik dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang mempertimbangkan kecukupan waktu untuk mencapai tujuan. Hal ini menunjukkan terdapat kelemahan dalam perencanaan yang telah disusun terkait operasionalisasi rencana sebagaimana dijelaskan oleh Conyers (1990) terutama berhubungan dengan penggunaan sumber daya (anggaran, dan waktu). Tjokroamidjojo (1995: 90)

menjelaskan bahwa masalah dalam pelaksanaan rencana perlu sudah dipertimbangkan dalam jangka waktu perencanaannya. Dengan demikian dimaksudkan supaya terdapat jaminan yang lebih besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran rencana.

Adapun untuk evaluasi akan dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan kegiatan, dalam arti telah selesai dalam satu tahun masa anggaran tahun 2011, dengan demikian evaluasi akan dilaksanakan pada tahun 2012. Hasil evaluasi terutama mengenai hal-hal yang menjadi kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan menjadi bahan masukan dalam perencanaan pengembangan pertanian organik, khususnya yang ditempuh dalam bentuk pengembangan kawasan pertanian organik di Kota Batu.

C. Prinsip Holistik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan pertanian organik yang dilakukan lebih mengutamakan pada sektor hulu, yakni produksi sayur organik melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian organik. Dalam upaya pengembangan pertanian organik, pihak perencanaan berpandangan bahwa sektor hulu dianggap sebagai hal prioritas yang harus dikuatkan karena dalam praktek dilapangan memerlukan waktu dan komitmen yang kuat dari pelaksananya terutama petani. Hal yang dikhawatirkan jika sektor hulu tidak dikuatkan maka kontinuitas produksi tidak dapat dipenuhi baik dari segi kuantitas dan kualitas. Pemilihan prioritas sektor hulu ini sesuai dengan pendapat Riyadi dan Deddy (2004:7) yang menjelaskan bahwa dalam kegiatan perencanaan perlu dilakukan penentuan prioritas mengingat adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki sehingga tidak memungkinkan pula untuk melaku-

kan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus.

Upaya untuk melakukan penguatan di sektor hulu tersebut dilakukan melalui dukungan dari seluruh bidang teknis di lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yang meliputi bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang peternakan dan perikanan, bidang teknologi pengolahan hasil dan pemasaran, bidang kehutanan dan perkebunan, serta ditunjang oleh kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari petugas penyuluh lapang. Berdasarkan hal tersebut, jika dilihat dari lingkup organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, maka usaha perencanaan yang dilakukan telah melibatkan seluruh aspek sumber daya dan pihak yang dianggap dapat memecahkan persoalan terkait dengan usaha penguatan sektor hulu, yang mana hal ini sesuai dengan pendapat Tjokroamidjojo (1987: 12) dan Conyers (1990: 5) mengenai pemanfaatan sumberdaya untuk mencapai tujuan. Namun jika dilihat dari keseluruhan sektor pendukung kegiatan ekonomi, perencanaan tersebut hanya melibatkan satu sektor saja yaitu sektor pertanian, belum mengintegrasikan sektor lain untuk pengembangan sektor hilir, misalnya dengan bidang industri, pemasaran, dan pariwisata. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pendapat Jenssen dalam Kadir (2005: 78) yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal kompleks yang dapat dilakukan melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, dimana suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai unit ekonomi yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. Dalam hal pengembangan pertanian organik peneliti berpendapat penguatan di satu sektor, misalnya sektor hulu saja belum cukup untuk menjamin keberlanjutan rencana. Hal ini didukung pada permasalahan pasar yang juga teridentifikasi dalam penelitian ini

sebagai salah satu kendala yang banyak dihadapi oleh petani. Beberapa alasan yang menjadi dasar perlunya keterpaduan dan kesinambungan dalam pengembangan pertanian organik dijelaskan sebagai berikut:

1. Produk organik dihasilkan pada suatu sistem yang dikondisikan sedemikian rupa sesuai prinsip dan syarat keorganikannya;
2. Produk yang dihasilkan memerlukan suatu sistem pemasaran yang tepat agar mampu menjaga keseimbangan antara permintaan, penyediaan, distribusi, kestabilan harga dan lainnya;
3. Upaya pemasyarakatan pertanian organik juga memerlukan penjelasan dari berbagai sudut pandang baik dari segi kesehatan masyarakat, lingkungan, maupun ekonomi, bahkan keterpaduan dari administrasi pendukung kebijakan pengembangannya.

Dengan demikian pertanian organik secara konsep maupun pelaksanaan memiliki sifat holistik yang memerlukan keterpaduan berbagai aspek pendukungnya, baik dari aspek teknik budidaya, sosialisasi, maupun cara pemasarannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Agustina (2002: 68) bahwa sistem pertanian organik bersifat kompleks dan membutuhkan keterpaduan mulai dari rumah tangga petani, sistem rakitan teknologi, transfer alih teknologi, sistem pemasaran, keterpaduan di dalam individu para *stakholdernya*. Karena itu pandangan holistik dalam perencanaan keterpaduan berbagai sektor lebih tepat sebagai salah satu cara untuk keberlanjutan rencana pengembangan pertanian organik di Kota Batu.

Upaya pengembangan pertanian organik dan pembangunan berkelanjutan secara umum di Kota Batu hendaknya didukung pula dari sisi administrasi terkait dengan regulasi, pedoman dan kelembagaan. Regulasi yang mengatur tentang kebijakan pengembangan pertanian organik masih bersifat umum, yaitu pa-

da rencana pembangunan daerah Kota Batu (RPJPD, RPJMD, Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu). Belum ada dokumen perencanaan, panduan dan regulasi yang bersifat khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanian organik. Kelembagaan yang menangani pertanian organik baik swasta maupun pemerintah juga belum banyak terbentuk sehingga upaya pengembangan masih berjalan secara parsial. Agar dapat berjalan secara berkesinambungan maka upaya penerapan dan pengembangan pertanian organik memerlukan pengelolaan secara terpadu mulai dari tingkat pusat (nasional) hingga ke daerah (pemerintah kota/kabupaten), yang berarti memerlukan aturan/regulasi yang mampu mengatur secara tegas dan jelas hal-hal yang menjadi tugas serta kewenangan masing-masing level pemerintahan. Hal ini telah dilakukan oleh beberapa negara yang berkomitmen untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan pada agenda pembangunan di negaranya. Bahkan di Cina dibentuk lembaga independen dibawah kementerian untuk mewedahi aspirasi dan koordinasi lintas sektoral untuk menyelaraskan fungsi pembangunan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada intinya penerapan pembangunan berkelanjutan memerlukan keterpaduan dalam tiga hal, yaitu: 1) antar sektor pembangunan; 2) antar aktor/pelaksana; 3) kebijakan, komitmen dan pengawasan oleh berbagai level pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai di daerah (Breton, 2007: 433-532).

Prinsip holistik mengandung arti bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek. Pentingnya orientasi holistik dalam perencanaan, terutama perencanaan pembangunan daerah dijelaskan oleh Kadir (2005: 78), yaitu karena tingkat kompleksitas yang besar maka tidak mungkin untuk mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelak-

kan. Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui penerapan pertanian organik bertujuan untuk dapat memberikan manfaat pembangunan yang sebesar-besarnya dalam berbagai aspek kehidupan baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Karenanya pendekatan yang holistik dan bervisi jangka panjang menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dijelaskan oleh Soegijoko (2005: 2).

Dari kajian terhadap penerapan prinsip-prinsip perencanaan ideal (perencanaan interkatif) yang meliputi prinsip partisipatif, prinsip kesinambungan, dan prinsip holistik, maka pada perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu hanya prinsip partisipatif yang telah terlihat nyata. Adapun prinsip kesinambungan dalam penerapannya masih terdapat kelemahan, dan prinsip holistik belum diterapkan. Dengan demikian dapat dikatakan proses perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu belum ideal sehingga belum menjamin keberlanjutan rencana yang telah disusun.

5.2.3.2 Strategi untuk mewujudkan keberlanjutan pertanian organik di Kota Batu

Strategi untuk mewujudkan keberlanjutan pertanian organik di Kota Batu dilakukan dengan membentuk kawasan organik di beberapa desa sebagai *pilot project* atau blok percontohan dengan tujuan akhir diarahkan sebagai agrowisata. Diharapkan keberhasilan penerapan pertanian organik pada kawasan yang dibentuk dapat memotivasi masyarakat di desa lain untuk turut serta menerapkan pertanian organik pada lahan pertaniannya.

Kawasan organik dalam konteks perencanaan pembangunan merupakan salah satu bentuk perencanaan wilayah. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan potensi SDA, SDM, teknologi, dan letak geografis dari wilayah strategis untuk pengembangan pertanian organik. Daerah yang dijadikan kawasan termasuk da-

lam jenis daerah strategis karena memiliki potensi pendukung sebagai daerah penghasil komoditas sayur unggulan, infrastruktur yang memadai berupa jalan usaha tani dan jaringan irigasi yang memadai, serta sering dijadikan tujuan pedagang sebagai pemasok sayur. Selain daerah yang memiliki dukungan potensi untuk pengembangan kegiatan, lokasi kawasan juga ada yang dipilih berdasarkan pertimbangan banyaknya petani yang bertani secara konvensional namun berpotensi cukup mudah menerima inovasi dan tidak menuntut harga tinggi untuk produk yang dihasilkan secara organik. Dengan demikian daerah yang ditentukan sebagai kawasan sesuai dengan kategori daerah perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Syafrudin (1993: 45), yaitu daerah yang memiliki potensi pembangunan cukup besar (SDA, SDM), atau bisa juga daerah yang mendesak untuk dilakukan pembangunan.

Kawasan organik tersebut membutuhkan dukungan berbagai sektor sehingga pada prosesnya membutuhkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk mendukung eksistensi kawasan melalui pengembangan berbagai komponen pendukungnya meliputi sektor perdagangan, industri kecil pengolahan hasil pertanian, serta infrastruktur pendukung. Hal ini membuka pula peluang kerjasama antar daerah untuk saling mendukung demi memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan kawasan pertanian organik. Dengan kata lain keterpaduan lintas sektor dalam perencanaan wilayah diperlukan dalam pengembangan kawasan pertanian organik sebagai salah satu bentuk upaya dan strategi perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Hal ini sesuai dengan pendapat Iryanto (2006: 94-96) bahwa paduan antara pendekatan wilayah dan pendekatan sektoral sangat penting karena masing-masing mempunyai kemampuan dalam menyukseskan suatu pembangunan.

Pembentukan kawasan pertanian organik oleh pemerintah Kota Batu disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan kawasan dilakukan pada lokasi yang memiliki potensi sebagai penghasil sayur, dengan jenis komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat setempat dan memiliki nilai ekonomis tinggi (unggulan). Hal ini diharapkan mampu menginisiasi minat petani untuk melaksanakan dan melanjutkan kegiatan secara mandiri. Pemilihan komoditas bernilai ekonomis tinggi untuk pengembangan pertanian organik tersebut sesuai dengan hasil penelitian Naik dan Nagadevara (2010), bahwa pengembangan pertanian organik diprioritaskan pada komoditas yang banyak dibudidayakan masyarakat setempat dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Melalui pemilihan komoditas unggulan diharapkan upaya pembangunan dapat tepat sasaran dan alokasi dana yang telah dikeluarkan memberi hasil pembangunan yang nyata berupa peningkatan produksi baik dari segi kualitas dan kuantitas produk unggulan. Pemilihan prioritas pengembangan pada produk unggulan juga sesuai dengan penelitian Mawardi (2007: 182) bahwa keterbatasan sumberdaya pembangunan seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya, mengharuskan upaya pemanfaatan sumberdaya dilakukan melalui perencanaan yang tepat, melalui pendekatan pengembangan sektor/komoditas unggulan. Melalui pengembangan komoditas unggulan diharapkan pengembangan komoditas-komoditas lain yang berkaitan dengan komoditi unggulan yang pertama kali dikembangkan dapat tumbuh dengan sendirinya;
2. Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya adalah demoplot dengan pelaksana adalah petani sendiri. Adapun pihak dinas berperan sebagai fasilitator yang mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana produksi organik. Hal ini di-

maksudkan agar petani dapat belajar dan memahami dengan baik teknologi pertanian organik karena menerapkan secara langsung. Dengan demikian secara perlahan namun pasti kemandirian petani dapat terbentuk dan diharapkan banyak memunculkan inovasi spesifik lokasi di tingkat petani terkait teknologi organik yang sesuai dengan kondisi pertanamannya. Pelaksanaan demoplot ini merupakan salah satu teknis transfer teknologi dalam rangka meningkatkan SDM petani yang merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan sebagaimana disampaikan oleh Hidayat (2007: 49) dan Sugito (2002: 8). Peningkatan kualitas SDM yang juga merupakan bentuk pemberdayaan petani yang diharapkan mampu memacu tumbuhnya inisiatif kreatif dari masyarakat petani sehingga kelangsungan pembangunan itu dapat dipertahankan sebagaimana hasil penelitian Dewi (2011) yang menekankan pentingnya aspek pemberdayaan sebagai strategi keberlanjutan suatu pembangunan;

3. Upaya perubahan pola pikir menuju organik dilakukan melalui pelaksanaan penyuluhan, pendampingan, dan sekolah lapang petani selama pelaksanaan kegiatan. Selama pelaksanaan di lapang dilakukan pendampingan untuk memfasilitasi jika ada ketidakpahaman atau terdapat masalah di lapang agar segera dapat diberikan solusi. Pola pikir yang benar tentang konsep pertanian organik, yaitu pemahaman terhadap empat prinsip pertanian organik merupakan hal dasar bagi suksesnya upaya penerapan pertanian organik. Berbagai usaha yang dilakukan tanpa didukung pemahaman dan perubahan pola pikir petani berpotensi pada kegagalan upaya penerapan pertanian organik oleh petani. Hal ini seperti dijelaskan oleh Agustina et.al (2002: viii) bahwa

penerapan pertanian organik dihadapkan pada tantangan yang cukup besar karena memutar pola pikir dalam pembangunan pertanian;

4. Teknologi peralihan konversi pertanian dari konvensional menuju organik ditempuh melalui penerapan GAP, memperbanyak penggunaan bahan organik (pupuk dan pestisida), dan pengenalan teknologi organik (penggunaan serta pembuatan secara mandiri oleh petani). Peralihan atau konversi ke arah organik sulit dilakukan dalam waktu singkat karena terkait dengan biaya dan pemahaman yang kurang mengenai konsep dasar pertanian organik. Maka cara yang dapat ditempuh adalah melakukan konversi secara bertahap melalui metode GAP. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sutanto (2006: 203) dan Prihandarini (2002: 65) bahwa pada tahap awal pemasyarakatan pertanian organik memerlukan strategi dengan cara memadukan beberapa komponen pertanian organik ke dalam teknologi konvensional yang sedang berjalan. Dalam implementasinya memungkinkan untuk penggunaan pupuk dan pestisida kimia sintetis, tetapi yang lebih diutamakan adalah mengoptimalkan pemanfaatan limbah organik demi menjaga kelestarian lahan dan lingkungan dalam jangka panjang, kualitas pangan dan kesehatan manusia;
5. Meningkatkan nilai jual produk melalui perbaikan penanganan pasca panen dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang ditempuh adalah memperbaiki pengemasan produk dan tetap menjual produk yang dihasilkan dengan harga pasar. Pemahaman yang diberikan adalah biaya usaha tani secara organik lebih rendah daripada usaha tani konvensional sehingga meskipun dijual dengan harga pasar maka petani tetap memperoleh keuntungan. Hal ini dilakukan agar petani tidak selalu menuntut harga tinggi pada produk yang dihasilkan, karena hal tersebut dapat dicapai jika petani telah mempunyai ser-

tifikat organik. Padahal biaya sertifikasi relatif mahal dan syarat prosedur sertifikasi sangat ketat. Melalui pendekatan pemahaman biaya usaha tani organik yang lebih rendah, diharapkan mampu memacu keinginan petani untuk beralih ke pertanian organik secara bertahap dan berkelanjutan.

Kondisi pada kawasan pertanian organik yang dibentuk di Kota Batu masih berfokus pada pembentukan sektor hulu yaitu penguatan produksi organik (*on farm*) dan belum melibatkan sektor lain yang terkait. Hal ini tidak sesuai dengan konsep kawasan pertanian organik Kementerian Pertanian yang didefinisikan sebagai suatu ruang geografis yang dideliniasi oleh batas imajiner ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis pertanian organik mulai dari penyediaan sarana produksi budidaya, penanganan dan pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya. Lebih lanjut Budiyanto (2011: 170) menjelaskan bahwa pola kluster mengaitkan antara input-proses-output dan pasar secara terangkai yang berbasis pada suatu jenis komoditas pangan organik tertentu. Dengan demikian dalam suatu kawasan diharapkan terbentuk suatu pola keterpaduan dan memiliki keterkaitan dengan sektor industri hulu-hilir yang merupakan stimulan kegiatan ekonomi.

Konsep kawasan yang hanya menitikberatkan pembangunan pada satu sektor dikhawatirkan tidak dapat memenuhi tujuan dari pembentukan kawasan tersebut. Jika penguatan sektor hulu tidak diimbangi dengan penguatan sektor hilir pada saat bersama-sama maka kemungkinan keutuhan pengembangan tidak tercapai karena faktor yang menampung produksi dari sektor hulu belum siap, misalnya faktor pasar. Hal ini sesuai dengan penjelasan Tanjung dalam Budiyanto (2011: 170) bahwa tidak adanya keterkaitan antar sektor hulu dan hilir

menyebabkan banyak lembaga usaha mikro, kecil dan menengah gagal beroperasi karena tidak mendapatkan kepastian terhadap penyediaan input dan pemasaran output. Disisi lain keterlibatan input, proses, output dan akses pasar sering tidak terorganisir secara benar, dan paket kebijakan pengembangan usaha masih bersifat sangat sektoral serta tidak terfokus pada satuan kelompok yang terangkai.

Pembentukan kawasan pertanian organik di Kota Batu masih pada tahap awal sehingga belum menunjukkan kontribusi yang nyata bagi keberlanjutan pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Masih banyak kelemahan dalam upaya yang dilakukan baik dari segi perencanaan, keterlibatan stakeholder, regulasi pendukung di tingkat daerah, serta sistem pengelolaan kawasan. Namun demikian pemilihan konsep kawasan sebagai strategi pengembangan pertanian organik merupakan hal yang tepat karena berpeluang memberi kontribusi positif bagi keberlanjutan pertanian organik. Konsep kawasan/klaster didefinisikan sebagai konsentrasi geografis berbagai kegiatan di kawasan tertentu yang satu sama lain saling melengkapi, saling bergantung, saling bersaing dalam melakukan aktivitas bisnis. Saat ini strategi kawasan menjadi salah satu alternatif untuk pengembangan daya saing daerah. Pengalaman di beberapa negara membuktikan bahwa klaster/kawasan dinilai cukup efektif karena bersifat lokalitas, mampu mendorong terciptanya inovasi, serta sinergitas diantara pelaku-pelaku terkait. Pada umumnya pendekatan kawasan digunakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui peningkatan hubungan antar berbagai industri dan lembaga yang terlibat di dalam klaster tersebut dengan harapan mampu membangun ekonomi daerah secara lebih mantap dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan (Direktorat Pengembangan Kawasan Khu-

sus dan Tertinggal, 2005: 42). Para pembuat kebijakan dan ahli pembangunan sering menggunakan pendekatan kawasan untuk memilih dan mempromosikan kelompok industri daerah yang sudah menunjukkan atau memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai unggulan daerah. Hal ini tidak lepas dari adanya tuntutan bagi daerah untuk mampu mengembangkan ciri khas (spesialisasi) daerahnya agar mampu bersaing dengan daerah lain (Santoso, 2011). Dengan demikian pendekatan kawasan dapat diterapkan pada sektor lain seperti sektor pertanian.

Untuk tahap awal seperti kondisi Kota Batu, pembentukan kawasan ditunjukkan sebagai *pilot project* yang diharapkan mampu menjadi contoh dan area pembelajaran bagi petani tentang manfaat penerapan pertanian organik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Putri (2010) yang menunjukkan perlunya suatu pilot pertanian organik di tiap daerah. Pilot ini dapat menjadi contoh bagi wilayah sekitar untuk berubah, karena karakteristik masyarakat petani adalah membutuhkan figur contoh. Pendekatan kawasan juga sesuai untuk kondisi masyarakat petani di Kota Batu yang luas kepemilikan lahan rata-rata kecil. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil penelitian Naik dan Nagadevara (2010) bahwa penerapan pola klaster/kawasan untuk pengembangan pertanian organik di India terbukti membantu dalam kontrol kualitas output yang lebih baik, mengurangi biaya sertifikasi karena ditanggung secara berkelompok, dan memungkinkan petani dengan luas lahan kecil untuk turut menerapkan pola pertanian organik. Pendekatan kawasan juga mempermudah pengelolaan lahan dan pemeliharaan tanaman secara organik. Pengelolaan hama penyakit dapat dilakukan secara terpadu sesuai dengan kaidah pertanian organik. Kontaminasi bahan anorganik dapat dihindari karena lahan organik mengelompok pada satu kawasan dan terpisah dari lahan pertanian anorganik/konvensional sehingga kemurnian hasil dapat dijaga sehing-

ga memenuhi prosedur sertifikasi yang ketat dan menghendaki kontaminasi minimum. Disisi lain konsentrasi produksi pertanian organik dalam skala yang cukup besar pada kawasan disertai jaminan sertifikasi yang jelas akan menarik konsumen sehingga menumbuhkan arus pergerakan ekonomi melalui pergeseran permintaan dan penawaran produk organik. Dengan kata lain adanya kawasan organik dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di kawasan dan sekitarnya, sehingga mempercepat pertumbuhan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan sektor-sektor usaha terkait (Kementerian Pertanian, 2010). Namun demikian tetap diperlukan dukungan regulasi secara terpadu untuk memfasilitasi, mengatur dan melindungi eksistensi kawasan yang dibentuk, karena sistem pertanian organik terutama pada kawasan menyangkut interaksi berbagai komponen yang terlibat pada berbagai jenjang baik tingkat internasional, nasional, daerah, sub daerah hingga tingkat *farming* dan *farm household system* atau rumah tangga petani (Agustina, 2002: 74).

Dengan demikian pendekatan klaster/kawasan yang banyak digunakan untuk meningkatkan pembangunan di sektor industri, dapat diterapkan pula pada bidang pertanian, khususnya untuk pengembangan pertanian organik. Pendekatan kawasan dapat memberi manfaat bagi pengelolaan pemeliharaan lahan pertanian organik, pengurangan biaya sertifikasi, membantu menciptakan pasar, serta mempermudah pemerintah dalam merumuskan kebijakan terpadu untuk mengembangkan pertanian organik secara nasional maupun di daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas serta beberapa kelemahan konsep kawasan yang ada di Kota Batu maka saran yang diberikan untuk perencanaan pengembangan kawasan pertanian organik di Kota Batu adalah menyertakan sektor hilir dalam pembantuan kawasan sehingga penguatan sektor hulu (*on farm*)-

proses-sektor hilir (*of farm*) dapat tumbuh bersama-sama. Upaya pembangunan masing-masing sektor menjadi tanggung jawab sektor terkait yang bekerjasama dalam satu payung besar kegiatan bersama. Untuk beberapa lokasi di Kecamatan Bumiaji dapat dipertimbangkan memasukkan kawasan organik sebagai salah satu kawasan unggulan dalam konsep Agropolitan, menyesuaikan penetapan Kecamatan Bumiaji sebagai kawasan Agropolitan di Kota Batu. Orientasi ekonomi bukan satu-satunya tujuan yang ingin dicapai. Namun demikian sebagai satu kesatuan dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah, sektor ekonomi tetap perlu diperhatikan dan diupayakan sesuai dengan kondisi produk organik yang telah mampu dihasilkan. Beberapa alternatif pemasaran yang dapat digunakan berdasarkan hasil penelitian dan informasi narasumber misalnya:

- a. Mempertimbangkan pola kemitraan sebagaimana hasil penelitian Saptana dan Ashari (2007). Dalam hal ini peran pemerintah sebagai penghubung dan perintis kemitraan dengan pengusaha, koperasi, serta akses pada lembaga keuangan sangat diperlukan.
- b. Rintisan pasar dapat dibentuk melalui promosi desa wisata yang memungkinkan menarik pengunjung ke lokasi kawasan/desa organik. Hal ini cukup menguntungkan karena meskipun belum mendapat sertifikat organik, kepercayaan konsumen sudah dapat dibentuk melalui pengamatan langsung oleh pengunjung tentang kegiatan budidaya tanaman organik di lokasi.

Selanjutnya perlu dilakukan penetapan lokasi-lokasi kawasan organik melalui SK Walikota agar kawasan terlindungi secara legal administrasi.

5.2.3 Faktor-faktor pendukung dan penghambat perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu

5.2.3.1 Faktor-faktor pendukung

A. Faktor pendukung internal

Banyak pihak seperti kalangan akademisi dan pemerhati lingkungan menganggap kebijakan untuk menerapkan pertanian organik di Kota Batu merupakan keputusan yang tepat. Hal ini tidak lepas dari adanya berbagai faktor yang mendukung dalam pengembangan pertanian organik baik dari dalam maupun dari luar wilayah Kota Batu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang rumit karena menyangkut suatu wilayah yang mempunyai kompleksitas keadaan baik dari segi komunitas, lingkungan, dan kondisi sosial yang ada di dalamnya. Proses pembangunan sulit untuk mewujudkan hal-hal yang dapat mengatasi secara langsung permasalahan tersebut secara menyeluruh, sehingga diperlukan prioritas pembangunan yang dipilih berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki yang berpotensi untuk mendukung berjalannya proses pembangunan. Karena itu Janssen dalam Riyadi dan Deddy (2004: 8) merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dalam prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber daya lainnya.

Dukungan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Batu untuk mengembangkan pertanian organik meliputi posisi Kota Batu sebagai daerah dataran tinggi; keberadaan sumber mata air yang cukup banyak; keberadaan hutan di sebagian wilayah Kota Batu; serta potensi jenis tanah subur yang dimiliki oleh Kota Batu. Kondisi sumber daya alam ini mendukung dalam hal teknis pelaksanaan di lapangan. Sebagai dataran tinggi memungkinkan pengembangan tanaman sayur dataran tinggi yang mempunyai nilai ekonomis, selain itu didukung keberadaan border hutan dapat meminimalkan pertumbuhan hama penyakit tanaman utama pada sayuran dataran tinggi. Banyaknya sumber mata air

mendukung ketersediaan dan pemurnian air yang merupakan salah satu faktor utama dalam budidaya tanaman secara organik. Potensi jenis tanah yang subur meskipun sedang mengalami penurunan kualitas masih memungkinkan dilakukan upaya perbaikan melalui pengelolaan penggunaan pupuk organik.

Selanjutnya bila dikaji melalui faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan oleh Riyadi dan Deddy (2004: 16-24), maka kondisi lingkungan internal di Kota Batu yang mendukung dalam perencanaan pengembangan pertanian organik adalah sebagai berikut:

- Dalam bidang sosial dan budaya

Sebagian besar penduduk Kota Batu merupakan petani dan akrab dengan dunia pertanian sejak kecil. Hal ini merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat di Kota Batu. Kondisi petani yang akrab dengan dunia pertanian setidaknya memberi kemudahan dalam hal penyampaian informasi teknologi budidaya pertanian. Hal-hal teknis yang disampaikan melalui penyuluhan lebih mudah dipahami oleh petani bahkan diharapkan petani dapat berinovasi terhadap informasi yang diberikan. Hal ini terbukti dengan mulai ada peningkatan sumber daya manusia (petani) yaitu peningkatan kemampuan petani untuk menerapkan teknologi organik dan sudah cukup banyak petani yang mengikuti kegiatan sekolah lapang (SL). Selain itu meningkatnya rata-rata pendidikan masyarakat di Kota Batu dalam hal pendidikan dasar banyak membantu upaya untuk memahami manfaat pertanian organik yang berpengaruh pada kesediaan petani untuk menerapkan teknologi pertanian organik.

Dengan memperhatikan keberadaan petani dan lebih melibatkannya pada proses perencanaan melalui kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan diharapkan

dapat menghasilkan konsensus bersama menuju penerapan pertanian organik yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak.

- Bidang ekonomi,

Potensi ekonomi di Kota Batu seperti *image* Kota Batu sebagai kota wisata didukung produk hortikultura yang sudah dikenal sebagai produk unggulan Kota Batu maka diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang mampu mendukung pergerakan pertumbuhan ekonomi dalam hal pangsa pasar produk organik yang dihasilkan melalui pasar-pasar di daerah wisata yang ada di Kota Batu. Keberadaan praktisi organik diharapkan mampu menginisiasi jiwa entrepreneur petani sehingga mampu memberikan pertumbuhan ekonomi secara mandiri oleh masyarakat melalui kerjasama antara praktisi dengan masyarakat melalui kegiatan kemitraan. Namun demikian tetap perlu upaya dari pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi yang mendukung berkembangnya potensi ekonomi di Kota Batu. Hal ini berdasarkan penjelasan Tjokroamidjojo (1989: 60) bahwa untuk suatu perluasan kegiatan pembangunan dan partisipasi pembangunan diperlukan sikap birokrasi pemerintah terhadap pembinaan dunia usaha atau entrepreneur nasional. Sebab pada akhirnya kegiatan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi faktor-faktor produksi perlu banyak dilakukan oleh kegiatan dalam masyarakat sendiri. Dengan memperhatikan faktor ekonomi dalam pembangunan termasuk pada proses awal pembangunan yaitu perencanaan diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan terutama jika dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat (Riyadi dan Bratakususmah, 2004: 20). Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat faktor ekonomi masih menjadi tujuan utama bagi sebagian besar petani di Kota Batu.

- Bidang politik

Dukungan untuk perencanaan pengembangan pertanian organik dari bidang politik terkait dengan dukungan pemerintah terhadap rencana tersebut. Pemerintah Kota Batu telah mencanangkan gerakan 'Batu Go Organik' pada tahun 2011 serta memasukkannya pada arah pembangunan pertanian dalam RPJP Kota Batu tahun 2005-2025. Dengan demikian komitmen untuk melaksanakan upaya-upaya terkait dengan pengembangan pertanian organik di Kota Batu cukup kuat dari pihak pemerintah. Hal ini sesuai dengan pendapat Kunarjo (2002: 75), bahwa sejak awal penyusunan program sampai dengan proses pelaksanaannya, tidak lepas dari unsur-unsur politik. Politik ditekankan pada dua makna, yakni negara dan kekuatan (*power*). Adanya dukungan politik berarti ada dukungan dari pihak negara (pemerintah) yang mempunyai kekuatan terhadap penyusunan rencana atau pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Tjokroamidjojo (1995: 54), yang menjelaskan bahwa aspek politik dalam pembangunan terkait pula dengan komitmen dari elit kekuasaan atau elit pemerintahan terhadap proses pembangunan dan kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat.

Faktor pendukung lain dari dalam wilayah Kota Batu adalah dari segi kelembagaan. Lembaga seperti kelompok tani, gapoktan, dan PPAH (Pusat Pelayanan Agensi Hayati) dapat digerakkan sebagai media penyaluran informasi teknologi pertanian organik dan upaya mewujudkan kemandirian di tingkat petani terkait dengan penyediaan dan pengelolaan saprodi organik. Selain itu adanya sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan bidang pertanian dapat digunakan untuk memperkenalkan dan memperdalam pengetahuan mengenai konsep

dasar, manfaat dan berbagai teknologi pertanian organik. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sutanto (2006: 197) bahwa dalam mengembangkan dan memasyarakatkan pertanian alternatif termasuk diantaranya pertanian organik melibatkan peranan banyak lembaga baik dari pemerintah maupun lembaga masyarakat.

B. Faktor pendukung eksternal

Faktor pendukung dari luar wilayah Kota Batu terkait dengan adanya wisatawan yang mengunjungi Kota Batu, perguruan tinggi di sekitar Kota Batu, regulasi atau peraturan yang mengarah untuk melaksanakan pertanian berkelanjutan, keterlibatan media massa di luar Kota Batu, adanya lembaga sertifikasi, potensi dukungan dana dari luar Kota Batu (APBD I, APBN). Berbagai faktor tersebut turut andil dalam memicu ide dan memperlancar rencana pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Potensi kehadiran wisatawan di Kota Batu membuka peluang pasar bagi produk hortikultura organik. Sosialisasi penerapan pertanian organik sekaligus promosi produk organik diperlancar oleh keterlibatan media massa baik cetak maupun elektronik. Keberadaan perguruan tinggi yang terletak cukup dekat dengan Kota Batu membuka kesempatan kerjasama untuk perencanaan dan pendampingan teknologi pertanian organik. Sedangkan regulasi atau peraturan nasional yang mengarah pada penerapan pertanian organik menjadi dasar perencanaan pengembangan pertanian organik, termasuk di Kota Batu. Hal ini sesuai dengan pendapat Riyadi dan Dedy (2004: 15-39) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program perencanaan adalah faktor sistem yang digunakan, yaitu aturan-aturan atau kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah sebagai dasar pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Terkait dengan beragamnya faktor pendukung dalam perencanaan pengembangan pertanian organik tersebut memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Tjokroamidjojo (1987: 12) dan Conyers (1990: 5) bahwa perencanaan memungkinkan untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sumber daya yang dimaksud mencakup apapun yang dianggap oleh pembuat keputusan berpotensi dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Namun faktor-faktor pendukung tersebut akan berjalan maksimal jika ada komitmen dari pimpinan untuk melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada dalam penyusunan rencana. Jika hal ini diabaikan maka faktor pendukung tersebut tidak dapat memberikan manfaat dalam proses penyusunan rencana.

5.2.3.2 Faktor-faktor penghambat

A. Hambatan Internal

Hal-hal yang menghambat dalam perencanaan pengembangan pertanian organik juga ditemui baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah Kota Batu. Hambatan dari dalam (internal) menyangkut kendala teknis di lapangan, kendala sumber daya, serta kendala administrasi.

Beberapa kendala teknis di lapangan pada hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Suwanto (2008), yaitu terkait dengan penurunan hasil pada masa peralihan dari cara bertani konvensional menuju organik. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi petani tidak bersedia menerapkan pola pertanian organik, apalagi jika kerugian tersebut ditanggung secara pribadi. Ancaman serangan hama dan penyakit tanaman yang tidak dapat diantisipasi oleh penggunaan pestisida organik juga menjadi kendala yang ditemui dalam hasil wawancara peneliti mengenai kesediaan petani untuk beralih ke organik. Serangan hama penyakit

tersebut semakin tinggi jika penerapan pertanian organik hanya dilakukan pada petak-petak perseorangan dengan luas lahan yang kecil. Karena itu dalam strategi penerapan pertanian organik sedapatnya dilakukan pada suatu kawasan sehingga dapat dipantau perkembangan organisme pengganggu tanaman secara lebih dini.

Sedangkan kendala sumber daya dari pihak petani meliputi pola pikir petani konvensional yang sangat kuat di kalangan petani, kurangnya pemahaman yang benar mengenai konsep dasar dan teknologi pertanian organik di kalangan petani, serta perilaku yang lebih mengedepankan segi ekonomis di kalangan petani. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tandisau dan Herniwati (2009: 237-238) bahwa sikap petani selama ini dinobatkan oleh cara pertanian yang relatif serba cepat, mudah, kebutuhan relatif lebih sedikit sehingga menjadi tantangan untuk dapat merubah kembali menjadi petani yang tekun, sabar dan mau bekerja keras. Hal ini membawa konsekuensi pentingnya melakukan kegiatan sosialisasi secara intensif untuk memberi pemahaman dan bekal tentang makna serta manfaat pertanian organik kepada masyarakat produsen (petani), konsumen (pengguna), pedagang, pemerintah daerah, penyuluh serta pelaku pertanian dan institusi terkait lainnya.

Perbaikan dalam bidang administrasi sangat penting untuk mendukung kelancaran proses pembangunan. Hal ini seperti pendapat Siagian dalam Riyadi dan Deddy (2004: 24) bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan menyangkut masalah-masalah administrasi. Karenanya dapat dikatakan sukses tidaknya proses pembangunan itu berlangsung sangat tergantung atas kemampuan administratifnya. Pada perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu tidak adanya dokumen rencana teknis atau rencana operasional ditam-

bah dengan seringnya terjadi pergantian pimpinan dan mutasi pejabat struktural menyebabkan ketidakjelasan keberlangsungan rencana kegiatan. Proses perencanaan yang dilakukan telah berupaya melibatkan berbagai pihak, namun secara administrasi dalam hal penyusunan keseluruhan isi rencana (penyusunan dokumen, strategi yang digunakan) hanya dilakukan oleh beberapa pihak saja, yaitu mantan Kasie Hortikultura serta Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura. Disisi lain tugas yang dibebankan kepada mantan Kasi Hortikultura tersebut cukup banyak sehingga dokumen rencana tidak selesai dibuat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan ketika terjadi pergantian pejabat struktural, maka pejabat yang menggantikan mengalami kesulitan dalam memahami arah untuk melanjutkan kegiatan yang telah direncanakan.

Terkait dengan pergantian pimpinan tersebut, Afifuddin (2010: 97) menjelaskan mengenai kelemahan perencanaan di negara-negara dunia ketiga yang salah satunya adalah pemerintahan yang silih berganti mengakibatkan silih bergantinya pelaksanaan rencana, bahkan mungkin silih berganti perencanaan. Hal ini terkait dengan karakter, kemampuan dan gaya kepemimpinan masing-masing orang yang berbeda. Persepsi dan pandangan serta visi pimpinan yang baru belum tentu sejalan dengan perencanaan yang telah ada, walaupun visi yang diajukan lebih baik masih memungkinkan adanya perubahan terhadap rencana yang telah dibuat menyesuaikan dengan karakter pimpinan.

Selain itu berkaitan dengan SK tim pelaksana teknis kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas belum cukup kuat untuk memberikan komitmen bagi anggota tim pelaksana. Ditambah lagi tidak adanya anggaran yang mendukung operasional kegiatan tim pelaksana teknis menyebabkan anggota tim kurang ter-

motivasi dan lemah komitmennya untuk menjalankan tugas yang diemban sesuai SK yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan anggaran untuk pengembangan kawasan organik mencapai 1,3 M cukup besar, namun dalam perinciannya tidak terdapat pos anggaran honorarium panitia pelaksana, juga anggaran untuk kegiatan penunjang seperti anggaran sosialisasi sangat minim. Hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan dalam hal penganggaran dan pemikiran ke depan terkait hal-hal yang diperlukan atau yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan rencana. Dengan demikian kondisi perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu dalam hal perencanaan anggarannya belum memenuhi pendapat Riyadi dan Deddy (2004: 39) bahwa perencanaan pembangunan harus sudah memperhitungkan masalah pendanaan mulai dari jumlah yang dibutuhkan, sumber pendanaan, dan bagaimana system pengelolaannya. Hal ini penting demi efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.

Kendala lain dari segi administrasi adalah kurangnya data tentang perkembangan pertanian organik di Kota Batu. Hal ini dialami pula oleh peneliti saat mengumpulkan data penelitian. Keterbatasan data tentunya berpengaruh pada penyusunan proyeksi, perkiraan maupun penyusunan proyek-proyek pembangunan (Affifudin, 2010: 97).

B. Hambatan Eksternal

Hambatan terkait perencanaan pengembangan pertanian organik juga berasal dari luar wilayah Kota Batu, meliputi keberadaan pupuk dan pestisida kimia, pasar global, perubahan iklim, serangan OPT. Perubahan iklim dan serangan OPT berimbas pada penurunan hasil pertanian jika tidak diikuti dengan teknologi pengendalian OPT yang tepat.

Perilaku sebagian besar petani di Kota Batu yang masih sangat tergantung dengan pupuk dan obat kimia sintetis. Keberadaan pupuk dan pestisida kimia sintetis yang mudah ditemukan dan tersedia banyak menjadi kendala tersendiri bagi penerapan pertanian organik. Para pedagang pupuk dan pestisida buatan seringkali memberikan argumen dan penawaran yang lebih menarik minat petani. Jika tidak dilibatkan dalam komunikasi yang baik, mereka dapat menjadi pihak yang dirugikan karena sosialisasi penggunaan pupuk organik akan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Disisi lain perkembangan perekonomian kearah ekonomi global semakin membuka pasar terhadap masuknya berbagai produk dari luar negeri baik produk pertanian maupun sarana produksi pertanian. Umumnya produk hortikultura impor memiliki ciri penampilan menarik dengan harga terjangkau. Jika hal ini kurang dicermati maka akan semakin meningkatkan persaingan pasar produk organik dengan produk dari luar (impor) baik produk anorganik maupun organik, termasuk pula serbuan berbagai sarana produksi pertanian. Hal ini lambat laun dapat mengikis produk yang dihasilkan petani terutama jika produk yang dihasilkan tidak memiliki nilai lebih. Pada akhirnya rasa percaya diri petani semakin luntur yang berimbas pada berkurangnya kemandirian dan keberlanjutan dari pertanian organik.

Berbagai faktor penghambat yang ditemui dalam perencanaan pengembangan pertanian organik tersebut memperjelas kenyataan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan selalu dihadapkan pada berbagai persoalan yang menyebabkan kegagalan atau tertundanya suatu pembangunan berencana. Hal ini sesuai dengan pendapat Riggs (1986: 54-56) bahwa permasalahan umum yang sering terjadi dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan meliputi penguatan motivasi, komitmen, peran serta dan

penyelesaian konflik kepentingan individu/kelompok masyarakat yang seharusnya dilibatkan dalam perumusan dan pelaksanaan rencana, serta keterbatasan kemampuan administratif. Hal ini merupakan titik-titik yang biasanya membuat rencana pembangunan nasional tertunda, biaya tinggi, gagal melakukan koordinasi dan pada akhirnya menunda pencapaian target. Kegiatan perencanaan pembangunan berupaya memilih, memutuskan berbagai pilihan yang sekiranya mampu membawa organisasi mampu mencapai tujuan pembangunan dengan memperkirakan berbagai kemungkinan masalah yang akan dihadapi. Hal ini menuntut perencana untuk mampu melihat berbagai aspek yang dapat memunculkan masalah dalam perencanaan, memiliki pemikiran sistemik agar mampu memahami implikasi kebijaksanaan dan memelihara kaitan logika diantara sejumlah kegiatan pemerintahan dan ekonomi. Konsistensi dan ketergantungan yang ada harus dibangun melalui konsep sistem, yang diharapkan cara tersebut mampu memecahkan berbagai persoalan kemajemukan internal maupun persoalan yang ditimbulkan dari luar. Dengan kata lain faktor penghambat yang ada hendaknya dipahami hubungannya sebagai suatu sistem terpadu dari berbagai aspek. Perencanaan pembangunan sedapat mungkin dipandang lebih dari sebuah program/kegiatan yang terdiri dari jadwal teknis pengalokasian sumber daya yang dikontrol sekelompok kecil pejabat dalam hirarki administratif, melainkan memperhatikan pula kemurnian administrasi dalam penerapan rencana tersebut melalui analisa perilaku sosial (konflik kepentingan, koordinasi, partisipasi) dan mengintegrasikannya dengan pendekatan normatif (analisis lingkungan fisik, analisis ilmu ekonomi dengan keilmuan lain, dll).

5.2.5 Rekomendasi rencana pengembangan pertanian organik di Kota Batu

Dari hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah disampaikan maka pengembangan pertanian organik memerlukan keterpaduan dalam berbagai hal agar dapat berkelanjutan. Dukungan dan komitmen pemerintah dalam menjalankan perannya sangat diperlukan terutama untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi upaya pengembangan di semua mata rantai pendukung pertanian organik, dari hulu sampai hilir. Pemerintah Kota Batu diharapkan dapat memberikan stimulan, fasilitasi dan mendorong Bergeraknya berbagai komponen pertumbuhan pembangunan agar dapat berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, faktor kunci yang harus dipegang oleh pihak pemerintah adalah komitmen dan kemauan politik yang kuat untuk mewujudkan hal-hal yang telah direncanakan demi mencapai pertanian organik di Kota Batu. Kemauan politik (*political will*) terutama dari pucuk pimpinan daerah selanjutnya dijabarkan dalam bentuk aturan dan kebijakan yang mampu melindungi terlaksananya pengembangan pertanian organik dalam jangka panjang. Hal pokok yang membutuhkan kemauan politik dari pucuk pimpinan misalnya penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batu secara konsisten sehingga tidak mudah melakukan *review* atau peninjauan kembali. Penataan tata ruang kota secara konsisten sangat penting mengingat lahan pertanian rawan mengalami alih fungsi akibat kepentingan pembangunan non pertanian. Secara nasional hal ini juga diatur dalam UU No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Karena itu dalam melakukan penataan ruang dan wilayah hendaknya benar-benar memperhatikan kesesuaian peruntukan lahan, melakukan pemetaan wilayah secara detil dan berorientasi jangka panjang. RTRW yang dibuat diupayakan memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam agar tidak mudah dilakukan pe-

nyesuaian yang biasanya bersifat ekonomi dan mengutamakan kepentingan pihak-pihak tertentu. Konsep pembangunan berkelanjutan hendaknya benar-benar diterapkan dalam konsep pembangunan secara menyeluruh di Kota Batu, terintegrasi dan saling memberikan manfaat bagi tingkat perekonomian, kehidupan sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya terkait dengan pengembangan pertanian organik yang berkelanjutan di Kota Batu maka perlu disusun sebuah perencanaan strategis dengan pilihan strategi yang diharapkan mampu mendorong serta mengarahkan pencapaian sasaran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Ketepatan kelompok sasaran

Upaya merubah pola pikir dari sistem pertanian konvensional menuju sistem pertanian organik terbukti tidak mudah. Dari segi teknis penerapan, pertanian organik memerlukan jangka waktu minimal tiga tahun untuk masa konversi murni organik, dan jika dilakukan secara bertahap (misalnya melalui pendekatan GAP) maka membutuhkan waktu lebih lama lagi. Karena itu sasaran penyampaian inovasi dan teknologi pertanian organik diberikan kepada pihak yang berpotensi yang terbuka pada perubahan, yaitu generasi muda. Konsep pertanian organik dapat dimasukkan pada kurikulum pendidikan di Kota Batu dari tingkat pendidikan dasar dan menengah. Materi yang diberikan mencakup konsep dasar pertanian organik yang tidak hanya mengutamakan penggunaan masukan organik, melainkan keseimbangan ekologi dan penerapan empat prinsip pertanian organik sebagaimana disampaikan oleh IFOAM, yaitu prinsip ekologi, kesehatan, keadilan dan perlindungan. Pemahaman juga diberikan mengenai keseluruhan mata rantai pendukung pertanian organik dari produksi, pasca panen, hingga ke aspek pengembangan pasar, baik pasar produk organik maupun komponen sa-

rana produksi seperti peluang produsen pupuk organik, pestisida maupun agen hayati. Tujuan utama pemilihan sasaran pada generasi muda adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang professional dan mampu secara kreatif menerapkan konsep pertanian organik secara mandiri.

b. Meningkatkan komitmen dan peran pemerintah

Pengembangan pertanian organik di Kota Batu masih dalam tahap sangat awal sehingga membutuhkan keterlibatan dan campur tangan pihak pemerintah, terutama Pemerintah Daerah. Pemerintah dibutuhkan sesuai perannya sebagai stimulator, innovator, fasilitator, investasi dan promosi produk organik serta mendorong berkembangnya pertanian organik. Pemerintah juga diharapkan mampu menciptakan kondisi kondusif dan mengawali inisiatif perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini pemerintah diperlukan untuk menyusun dan menegakkan kebijakan pendukung untuk menjamin keandalan produk organik. Salah satu contoh yang disarankan sebagai teladan bagi masyarakat adalah menetapkan aturan prosentase minimal penggunaan produk organik/ramah lingkungan bagi kantin dan catering yang ada di lingkungan SKPD. Pengalaman negara Belanda menunjukkan bahwa kebijakan tersebut menjadi salah satu alternatif untuk menampung produk pertanian organik dan merupakan wujud teladan yang baik oleh pemerintah. Hal ini memberi jalur baru bagi pemasaran produk organik yang dihasilkan, sekaligus menjadi sarana pembelajaran dan sosialisasi manfaat produk organik bagi masyarakat. Selain itu beberapa saran kebijakan yang direkomendasikan dijelaskan pada bahasan-bahasan lain dalam tesis ini.

c. Pengorganisasian

Perlu disusun mekanisme koordinasi melalui tim pelaksana yang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Tim dapat terdiri dari perwakilan masing-masing SKPD yang terkait dibawah koordinasi pihak pimpinan puncak (Walikota). Dapat juga dengan mengoptimalkan kinerja SKPD yang paling berkompeten, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Kehutanan karena potensi sumber daya pada SKPD tersebut jika dilihat dari jumlah dan tingkat pendidikan staf yang dimiliki. Namun perlu diperhatikan kekuatan hukum bagi tim yang dibentuk, yaitu ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing anggota. Untuk memperkuat kinerja tim, maka pada beberapa tugas dapat melibatkan perwakilan dari SKPD terkait, misalnya mengenai perluasan kerjasama pembentukan pasar tetap melibatkan Dinas Perdagangan dan Koperasi, serta untuk promosi tetap melibatkan Dinas Informasi dan Komunikasi serta Dinas Pariwisata.

d. Prioritas bidang pengembangan

- Penguatan sumber daya manusia dan edukasi

Penguatan sumberdaya diarahkan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dasar pertanian meliputi tujuan, manfaat, prinsip dasar, teknologi, pengembangan bisnis dan profesionalisme seluruh komponen sumber daya manusia/pelaku mata rantai pertanian organik, yaitu petugas pendamping (PPL, staf teknis), petani dan pelaku usaha, dan masyarakat umum selaku konsumen. Bentuk kegiatan dapat ditempuh melalui sekolah lapang maupun pelatihan. Adapun edukasi mengenai manfaat pertanian organik bagi kesehatan, peningkatan pendapatan dan kelestarian lingkungan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penerapan pertanian organik

dan konsumsi produk organik. Hal ini diharapkan membawa dampak positif pada peningkatan permintaan produk organik dan mendorong produksi secara organik. Edukasi dapat ditempuh melalui kajian kurikulum pertanian organik pada lembaga pendidikan dasar dan menengah di Kota Batu.

- Pengembangan pasar

Keberadaan pasar tidak dapat dipungkiri sebagai faktor penarik pengembangan produk pertanian, termasuk pula produk organik. Kajian dan informasi pemasaran penting dilakukan dengan memperhatikan perbaikan manajemen rantai pasok agar produk yang dipasarkan diterima konsumen dengan kualitas yang baik, serta keuntungan yang proporsional. Hal ini dapat dirintis oleh pemerintah melalui fasilitasi kerjasama antara produsen, pengusaha, dan pemerintah. Untuk menjamin kualitas produk perlu pelabelan yang jelas berdasarkan prosedur sertifikasi. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi upaya sertifikasi. Namun demikian untuk Kota Batu yang masih dalam fase peralihan menuju organik, maka pemerintah dapat memfasilitasi dalam bentuk penetapan surat rekomendasi penerapan menuju organik pada produk yang dihasilkan. Hal ini telah diterapkan pada komoditas padi dan menunjukkan respon positif pada perbaikan harga jual dan peningkatan kerjasama dengan lembaga pemasaran, dalam hal ini koperasi. Selain itu dengan pertimbangan biaya sertifikasi yang tinggi, maka konsep desa wisata dapat digunakan sebagai alternatif pemasaran di tingkat lokal. Konsep ini memberi keuntungan yaitu konsumen dapat melihat secara langsung proses budidaya tanaman yang dilakukan, sehingga kepercayaan konsumen dapat terbentuk meskipun belum ada sertifikasi. Kota Batu merupakan daerah wisata sehingga banyak tumbuh usaha hotel dan restoran yang dapat dimanfaatkan untuk

membuka peluang pemasaran produk organik. Dalam hal ini pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan prosentase minimal bagi hotel dan restoran untuk menggunakan produk organik Kota Batu. Hal ini diharapkan dapat menyeimbangkan adanya produksi dengan permintaan.

- Keterpaduan subsidi input dan subsidi output

Keterpaduan subsidi input dan subsidi output bertujuan untuk memperkuat produksi serta kegiatan pendukung untuk memperlancar penyerapan produk, yaitu dalam hal pasca panen, sarana prasarana dan infrastruktur. Pertumbuhan produksi pertanian organik dapat dipacu dan distimulasi dengan memaksimalkan peran pemerintah dalam hal subsidi. Hal ini diperlukan untuk menjaga kontinuitas produksi dan penyerapannya di pasar. Subsidi *input* meliputi alokasi bantuan pemerintah dalam memperlancar usaha budidaya secara organik, diwujudkan melalui alokasi sarana produksi, modal, prasarana pendukung pertanian organik seperti *screenhouse / greenhouse*, juga bantuan dana untuk sertifikasi. Sedangkan subsidi *output* diperlukan untuk menangani produk / hasil panen (output) agar tetap terjaga kualitasnya dan terjamin pemasarannya. Dalam hal ini pemerintah dapat menginisiasi pembangunan *outlet* produk organik Kota Batu sebagai tempat promosi dan pemasaran produk, serta gudang penyimpanan/pengemasan agar kontaminasi dengan produk anorganik dapat diminimalkan.

- Ilmu pengetahuan dan teknologi terapan

Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi terapan merupakan hal yang penting dalam pengembangan pertanian organik. Pemerintah dapat mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan balai penelitian untuk mengembangkan teknologi pertanian organik yang spesifik lokasi dan spesifik komoditas di Ko-

ta Batu. Teknologi yang dihasilkan dikomunikasikan dengan petani sebagai acuan dalam menyusun SOP. Pengembangan ilmu pengetahuan juga mengkaji hal-hal lain yang mendukung pengembangan pertanian organik, misalnya alternatif pemasaran, dukungan rantai pasokan, mekanisme kelembagaan yang tepat untuk dikembangkan dan sebagainya.

- Pengembangan kawasan/klaster

Perluasan areal pertanian organik penting untuk memperkuat produksi organik. Hal ini dapat dilakukan secara lebih efisien melalui pendekatan kawasan/klaster. Melalui klaster maka akan lebih mudah menarik dan mengarahkan rantai ekonomi, memudahkan teknis pemeliharaan/pengelolaan tanaman, serta mempermudah konsep perencanaan. Peran pemerintah dalam kawasan organik adalah sebagai fasilitator dalam investasi penelitian, terutama untuk mengembangkan SOP pertanian organik dan efektivitas konsep kawasan, serta menginisiasi kerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama pihak swasta.

Untuk mendukung bekerjanya konsep kawasan, maka dapat dilakukan rekayasa sosial melalui penguatan kelembagaan petani, penyuluhan, dan pengembangan SDM; serta rekayasa ekonomi dengan mengembangkan akses permodalan untuk pengadaan sarana prasarana produksi dan akses pasar. Pengalaman pengembangan kawasan/klaster agropolitan di Lumajang pada penelitian Budiyanto (2011: 173) menyebutkan bahwa rekayasa sosial melalui pengembangan kelembagaan kelompok tani dapat ditempuh dengan cara: 1) penguatan manajerial kelompok; 2) peningkatan *knowledge skill* meliputi penguasaan sistem usaha produksi-distribusi-pemasaran-konsumsi; 3) pengembangan pusat informasi petani dan 4) pengembangan semua *supporting system (hardware, software, brainware, fund, networking)*. Selanjutnya sebagai lokomotif dan koordina-

tor peningkatan produksi dan pemasaran adalah gapoktan. Pada tahap awal pendampingan dan fasilitasi input-output oleh pemerintah diharapkan dapat memacu berkembangnya kegiatan produksi dan distribusi produk organik di kawasan. Namun demikian segala bentuk fasilitasi oleh pemerintah tersebut secara bertahap dikurangi agar pertanian organik dapat tumbuh berkembang secara mandiri, tentunya dengan mempertimbangkan perkembangan dan kesiapan kawasan. Bekerjanya berbagai alternatif strategi pengembangan kawasan tersebut sekali lagi membutuhkan kemauan politik pimpinan daerah dan komitmen yang kuat dari para pihak yang terkait agar dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya maka dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu telah dimulai sejak awal berdirinya Kota Batu yaitu sekitar tahun 2002, namun tidak berkesinambungan karena seringnya terjadi pergantian pejabat struktural dan pimpinan SKPD yang berimbas pada perubahan prioritas dan rencana pembangunan pertanian;
 - b. Pemahaman yang baik terhadap kondisi wilayah perencanaan, meliputi permasalahan dan potensi menjadi modal dasar dalam menentukan tujuan rencana pembangunan dan dasar penentuan strategi. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan berusaha memahami kondisi pertanian di Kota Batu dengan cara mengamati realitas masalah pertanian yang terjadi melalui peran serta PPL; memperjelas kondisi masalah melalui pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap beberapa masalah utama seperti status kesuburan tanah serta tingkat residu pestisida pada tanah dan produk pertanian; melakukan analisis data statistik pertanian;

- c. Penentuan strategi pada perencanaan pengembangan pertanian organik diawali dengan memahami permasalahan dan kondisi yang terjadi di lapangan untuk selanjutnya ditentukan tujuan yang ingin dicapai. Kondisi tentang tujuan yang ingin dicapai menjadi dasar menentukan bentuk strategi yang akan dijalankan. Adapun strategi yang digunakan dalam upaya pengembangan pertanian organik tersebut pada intinya adalah memasyarakatkan penerapan cara bertani yang mengarah pada pertanian organik serta menginisiasi pembentukan kawasan organik sebagai *pilot project*;
- d. Dalam mekanisme atau tahap perencanaan pengembangan pertanian organik diketahui hal-hal sebagai berikut:
- Secara keseluruhan perencanaan pembangunan bidang pengembangan pertanian organik yang dilakukan mengarah pada tiga tahap fase pembangunan. Fase pertama adalah jangka pendek dengan tujuan merealisasikan upaya sosialisasi penerapan pertanian organik di Kota Batu; jangka menengah dengan tujuan yang ingin dicapai adalah perbaikan kondisi tanah lahan pertanian di Kota Batu dan peningkatan mutu produksi hortikultura; fase ketiga adalah jangka panjang dengan tujuan terbentuknya kawasan pertanian organik yang berkonsep agrowisata. Namun tidak ada rentang waktu perencanaan secara pasti pada masing-masing fase pembangunan.
 - Upaya pengembangan dilakukan dengan berusaha mengakomodir seluruh kebutuhan penunjang pertanian organik yang memerlukan kontribusi seluruh bidang teknis di lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dari berbagai sumber pembiayaan. Karena itu alokasi kegiatan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing bidang dengan mekanisme

menyesuaikan sumber dana dan tetap memperhatikan usulan masyarakat. Khusus untuk kegiatan pengembangan kawasan organik dilakukan melalui tiga tahap perencanaan, yaitu tahap persiapan rencana, tahap pelaksanaan dan tahap monitoring evaluasi.

- Perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu dilakukan melalui pendekatan perencanaan secara politis, teknokratis, partisipasi serta *top down* dan *bottom up*. Masing-masing pendekatan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan konteks perencanaan, yaitu: 1) pendekatan politis terkait dengan ide awal perencanaan yang mengacu pada visi dan misi kepala daerah terpilih, serta dukungan kepala daerah terhadap pelaksanaan rencana; 2) pendekatan teknokratis berperan dalam teknis dan substansi perencanaan; 3) gabungan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dilaksanakan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan mensinkronkan program kegiatan dari tingkat pusat yang dapat mendukung upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu; 4) pendekatan partisipatif berperan dalam menjaring aspirasi dari *stakeholder* sebagai dasar perencanaan teknokratis, serta untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat tentang terlaksananya rencana yang disusun.

2. Peran *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan bidang pengembangan pertanian organik di Kota Batu

a. Identifikasi *stakeholder*

- Jika dikelompokkan maka terdapat tiga kategori *stakeholder* yang terlibat dalam perencanaan ini, yaitu 1) *stakeholder* utama yang terdiri dari petani, kelompok tani, gapoktan; 2) *stakeholder* penunjang yang terdiri dari

pelaksana kegiatan yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan, perguruan tinggi, PPL, POPT, praktisi dan pengusaha organik, aparat desa, media massa; 3) *stakeholder* kunci yaitu Walikota Batu dan DPRD Kota Batu;

- Masih ada *stakeholder* yang belum dilibatkan dalam perencanaan pembangunan bidang pertanian tersebut. Dari *stakeholder* utama misalnya pedagang pupuk kimia, pihak hotel dan restoran; *stakeholder* penunjang diantaranya SKPD lain yang terkait
- b. Peran *stakeholder* yang terlibat diuraikan sebagai berikut:
- *Stakeholder* utama berperan sebagai penerima manfaat dari perencanaan pengembangan pertanian organik. Khusus untuk petani berperan secara langsung sebagai sumber daya pelaksana di lapangan;
 - *Stakeholder* penunjang berperan sebagai perantara, yaitu aparat pemerintah meliputi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sebagai fasilitator sarana produksi, dukungan infrastruktur, serta inisiator dalam perencanaan pertanian organik; POPT dan PPL berperan dalam pendampingan dan transfer ilmu pengetahuan; perguruan tinggi berperan dalam pemberian paket-paket teknologi sekaligus sebagai pihak konsultan ahli yang berwenang untuk memberikan saran-saran akademis terkait permasalahan teknis yang ditemui di lapangan; swasta dalam hal ini pengusaha organik juga dilibatkan sebagai konsultan dalam perencanaan;
 - *Stakeholder* kunci merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini terkait dengan perannya sebagai penentu dan pembuat kebijakan yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan suatu program pembangunan.

3. Strategi untuk mewujudkan keberlanjutan perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu
 - a. Berdasarkan prinsip interaktif pada perencanaan yang meliputi prinsip partisipasi, kesinambungan, dan holistik, maka proses perencanaan pengembangan pertanian organik yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kota Batu belum ideal karena hanya memenuhi prinsip partisipasi dan prinsip kesinambungan meskipun masih ada kekurangan. Sedangkan prinsip holistik tidak dilakukan;
 - b. Strategi untuk mewujudkan keberlanjutan pertanian organik di Kota Batu dilakukan dengan membentuk kawasan organik di beberapa desa sebagai *pilot project*. Beberapa konsep pemikiran dalam kawasan ditujukan untuk mengarahkan petani supaya mampu melanjutkan penerapan pertanian organik secara mandiri. Namun masih ada kelemahan dalam konsep kawasan yang dibentuk, yaitu masih difokuskan pada penguatan sektor hulu (produksi di lapang) saja. Belum ada keterpaduan/integrasi dengan sektor lain.
4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat perencanaan pembangunan bidang pengembangan pertanian organik di Kota Batu
 - a. Faktor yang mendukung perencanaan maupun pengembangan pertanian organik di Kota Batu saat ini maupun dimasa mendatang secara internal berupa potensi sumber daya alam, potensi ekonomi, dukungan sosial kemasyarakatan, dukungan pemerintah Kota Batu, dukungan kelembagaan, dan faktor pendukung lainnya seperti potensi peternakan dan dukungan media massa. Sedangkan faktor pendukung eksternal meliputi wisatawan yang mengunjungi Kota Batu, lokasi perguruan tinggi yang cukup dekat

dari Kota Batu, peraturan nasional yang mendukung penerapan pertanian organik, sumber dana dari luar Kota Batu, serta adanya lembaga sertifikasi organik.

- b. Faktor yang menghambat dalam perencanaan ini secara internal maupun eksternal meliputi kendala teknis di lapangan; kendala sumber daya terutama pola pikir petani yang cenderung konvensional; serta kendala administrasi yaitu tidak ada dokumen rencana teknis dan kurangnya koordinasi.

6.2 Saran

1. Teoritis/akademis

- a. Perencanaan pembangunan pertanian berkelanjutan dapat diwujudkan salah satunya melalui pengembangan pertanian organik di suatu daerah. Perencanaan yang dilakukan harus terpadu dan menyeluruh (holistik) dengan mempertimbangkan keterkaitan sektor hulu-hilir secara berkesinambungan yang berarti melibatkan beberapa institusi lain yang terkait serta pertimbangan kerjasama dengan daerah (kota/kabupaten) lain agar keberlanjutan dapat dicapai. Penguatan sektor hulu dan hilir dilakukan secara bersama-sama dari perencanaan awal dengan dikoordinir oleh sektor terkait dalam satu payung perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pendekatan kawasan merupakan salah satu alternatif strategi yang tepat dalam perencanaan pengembangan pertanian organik karena bersifat lokalitas, mampu mendorong terciptanya inovasi, serta sinergitas diantara pelaku-pelaku terkait;
- c. Komitmen dan *political will* yang kuat menjadi salah satu kunci utama dalam kegiatan pembangunan terkait dengan ketepatan penetapan kebijakan-

kebijakan pendukung dan penegakan pelaksanaannya, termasuk dalam pengembangan pertanian organik,

2. Praktis

- a. Perlu melakukan perencanaan yang disusun secara lebih cermat, holistik, dengan memperhitungkan kebutuhan biaya, waktu pencapaian target, dan indikator keberhasilan yang terukur dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mendukung maupun menghambat perencanaan. Rencana yang dibuat hendaknya diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan dan ditetapkan secara legal;
- b. Perlu meningkatkan koordinasi internal maupun eksternal dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan yang diwujudkan melalui pembentukan tim teknis pelaksana kegiatan. Tim teknis dapat mengintensifkan kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan dukungan penetapan SK dari Walikota dan mengatur secara jelas pembagian hak dan kewajiban anggota; atau dapat pula terdiri dari perwakilan SKPD terkait yang dikoordinasi oleh Bappeda dan diketuai secara langsung oleh Walikota;
- c. Melanjutkan kegiatan pengembangan pada kawasan organik yang sudah dibentuk dengan fokus memperkuat motivasi petani yang telah muncul, melanjutkan pendampingan petani kearah kemandirian dan merintis pemasaran yang pada perencanaan sebelumnya belum dilakukan;
- d. Perlu ditetapkan SK Walikota mengenai lokasi-lokasi kawasan organik agar terlindungi secara legal, dan menjamin keberlanjutan pelaksanaan pengembangan kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Adiyoso, Wignyo. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: CV. Media Putra Nusantara.
- Affudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembanguna: Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta.
- Allison, Michael dan Jude Kaye. 2005. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba: Pedoman Praktis dan Buku Kerja*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Breton, Albert. *et al.*, (eds). 2007. *Environmental Governance and Decentralization*. Massachussets: Edward Elgaer Published.
- Bryson, Jhon. M. 2007. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Penerjemah M. Miftahuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Conyers, Diana and Peter Hills. 1990. *An Introduction to Development Planning in the Third World*, Scotland: C.R. Barber & Partners.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Terjemahan oleh: Drs. Susetiawan, S.U. Editor: Dr. Affan Gaffar, M.A. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Daryanto, Y.P. 2006. “ Teknis Pengelolaan Pertanian Organik”. *Membangun karakter Petani Organik Sukses dalam Era Globalisasi*. Editor: Y. Wartaya Winangun. Jakarta: Kanisius.
- Departemen Pertanian RI. 2007. *Road Map Pengembangan Pertanian Organik 2008-2015*. Jakarta.
- Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. 2009. *Laporan Akhir Pengujian Hasil Pertanian terhadap Residu Pestisida di Kota Batu*.
- Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. 2009. *Laporan Akhir Pengujian Kualitas Tanah untuk Lahan Pertanian/Perkebunan di Kota Batu*.
- Dirgantoro, Crown. 2004. *Manajemen Stratejik: Konsep, Kasus dan Implementasinya*. Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarqana Indonesia.

- Faludi, Andreas. 1976. *Planning Theory*. New York: Pergamon Press.
- Hidayat, Kliwon. 2007. *Respon Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Kasus di Daerah ALiran Sungai Brantas Hulu, Jawa Timur)*. Malang: Penerbit Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*. Penerjemah: Julianto Agung. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Indradi, Syamsiar. 2007. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*, Malang: Agritek YPN Malang.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2010. *Pemantauan Persistent Organic Pollutan (POPS) di Indonesia*.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang)*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. 1992. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi R. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Morrissey, George L. 1997. *Morrissey dan Perencanaan: Pedoman Pemikiran Strategis (Membangun Perencanaan Anda)*. Diterjemahkan oleh Gianto Widiyanto. Jakarta: Prenhallindo.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategic Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rangkuti, Freddy. 2005. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis (Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21)*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Riggs, Fred W. (ed). 1986. *Administrasi Pembangunan: Batas-batas Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Riyadi dan Dedi Supriadi Bratakusumah, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salikin, Karwan A. 2003. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Cetakan ketujuh. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugandhi, Acha dan Rustam Hakim. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Sutanto, Rachman. 2006. *Pertanian Organik: menuju Pertanian Alternatif dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Syamsi, Ibnu. 1983. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. *Perencanaan Pembangunan*. Cetakan kesepuluh. Jakarta: CV. CV. Haji Masagung.
- , Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Cetakan ketujuh belas. Jakarta: LP3ES.
- Wahyudi, Isa. 2006. *Metodologi Perencanaan Partisipatif*. Penerbit Kerjasama Malang Corruption Watch dan YAPPIKA. Jakarta.
- Waldo, Dwight. 1986. *Pengantar Studi Public Administration*. Terjemahan oleh: Slamet W. Admosoedarmo. Jakarta: Penerbit Pt. Aksara Baru.
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho D. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Tesis/Disertasi

- Azis, Abdul. 2001. *Kajian Perencanaan Pengembangan Penyuluhan Pertanian Berorientasi Agribisnis*. Tesis Magister Ilmu Administrasi Publik. Universitas Brawijaya, Malang.
- Dewi, Ni Komang Yustitia. 2010. *Evaluasi Perencanaan Penataan Kawasan Pasca Galian Pasir (Galian C) berdasarkan Prinsip Pembangunan*

Berkelanjutan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. Tesis Magister Ilmu Administrasi Publik. Universitas Brawijaya, Malang.

Hartanti. 2010. *Perencanaan Pembangunan Kawasan Minapolitan Kabupaten Malang.* Tesis Magister Administrasi Publik. Universitas Brawijaya, Malang.

Irianto, Purnama. 2010. *Identifikasi Komoditas Hortikultura Unggulan di Kota Batu.* Tesis Magister Agribisnis Pertanian. Universitas Muhammadiyah Malang.

Putri, Fitriana S. 2010. *Pengembangan Panduan Penerapan Sustainable Agriculture di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.* Tesis. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Santoso, Eko Budi. 2011. *Analisis Daya Saing Daerah dan Implikasinya terhadap Pembangunan Wilayah di Jawa Timur.* Disertasi. Universitas Brawijaya, Malang.

Suwantoro, Andreas Avelinus. 2008. *Analisis Pengembangan Pertanian di Kabupaten Magelang (Studi Kasus di Kecamatan Sawangan).* Tesis Magister Ilmu Lingkungan. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Jurnal Penelitian

Arief, Lukman. 2006. "Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial.* Vol.6 No.2. Hal. 108-115.

Budiyanto, M. Agus Krisno. 2011. "Optimasi Pengembangan Kelembagaan Industri Pangan Organik di Jawa Timur". *Jurnal Teknik Industri.* Vol. 12. No. 2. Hal. 169-176.

Iqbal, Muhammad. 2007. "Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian.* Vol. 26. No. 3. Hal. 89-99.

Iryanto. 2006. "Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Melalui Pendekatan Wilayah dan Kerjasama Antar Daerah". *Wahana Hijau: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.* Vo. 1. No. 3. Hal. 95-102.

Kadir, Abdul. 2005. "Strategi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah Menuju Otonomi Daerah". *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau.* Vol. 1. No. 2. Hal. 75-83.

Mawardi, Ikhwanuddin. 2007. "Perencanaan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Konsep Produktifitas Unggulan". *Jurnal Teknologi Lingkungan* Vol. 8 No.2. Hal. 181-187.

Peters A. Michael and Rodrigo Britez. 2010. "Ecopolitics Of 'Green Economy',

Environmentalism And Education". [Economics, Management and Financial Markets](#). Vol. 4. No.4 (Dec 2009): 9-28.

Rozman, Crtomir. *et al.* 2012. "System Dynamics Model for Policy Scenarios of Organic Farming Development". *Organizacija*. Vol. 45. No. 5. Hal. 212-218.

Saptana dan Ashari, 2007. "Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Kemitraan Usaha". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Vol. 26. No. 4. Hal. 123-130.

Setiawan, Budi dan Carolina L. B.2008. "Identifikasi Komoditas Unggulan dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian Kabupaten Malang". *Jurnal Sosial dan Ekonomi Pertanian HABITAT*. Vol. XIX. No. 2. Hal. 149-158.

Zandstra, Margaretha Blom and Herman Van Keulen. 2008. "Innovative Concepts Towards Sustainability in Organic Horticulture: Testing a Participatory Technology Design". *International Journal of Agricultural Sustainability*. Vol 6. No.3. 2008: 195-207.

Makalah / Prosiding

Agustina, Lily, *et al.*, (eds). 2002. "Memasyarakatkan Pertanian Organik Sebagai Jembatan Menuju Pembangunan Pertanian Berkelanjutan". *Prosiding Lokakarya Nasional Pertanian Organik : Memasyarakatkan Pertanian Organik Sebagai Jembatan Menuju Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*. Universitas Brawijaya, 7-9 Oktober 2002.

_____, 2002. "Keterpaduan di dalam Sistem Pertanian Organik". *Prosiding Lokakarya Nasional Pertanian Organik : Memasyarakatkan Pertanian Organik Sebagai Jembatan Menuju Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*. Universitas Brawijaya, 7-9 Oktober 2002. Hal. 68-80.

Naik, Gopal dan Vishnuprasad Nagadevara. 2010. "Spatial Clusters in Organic Farming (A Case Study of Pulses Cultivation in Karnataka)". *Indian Institute of Management Bangalore*. Hal. 1-19.

Prihandarini, Ririen. 2002. " Sosialisasi Pembinaan Pertanian Organik Melalui Network MAPORINA". *Prosiding Lokakarya Nasional Pertanian Organik : Memasyarakatkan Pertanian Organik Sebagai Jembatan Menuju Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*. Universitas Brawijaya, 7-9 Oktober 2002. Hal. 61-67.

Soemarno. 2004. "Pembangunan Pertanian dalam Perspektif Otonomi Daerah: Perencanaan Pembangunan Pertanian dalam Pembangunan Daerah". *Model-model Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat (Kumpulan Makalah Ilmiah)*. Pusat Penerbitan Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang. Hal. 1007-1043.

Sugito, Yogi. 2002. "Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia Prospek dan Permasalahannya". *Prosiding Lokakarya Nasional Pertanian Organik : Memasyarakatkan Pertanian Organik Sebagai Jembatan*

Menuju Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Universitas Brawijaya, Malang. Hal. 1-11.

Tandisau, Peter dan Herniwati. 2009. "Prospek Pengembangan Pertanian Organik di Sulawaesi Selatan". *Prosiding Seminar Serealia 2009*. Hal 232-239.

Utama, I Made Supartha. 2010. "Pembangunan Pertanian Menuju Bali Organik". Hasil Diskusi Berbagi Visi Diselenggarakan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Bali, 25 April 2010.

Wilopo. 2006. "Perencanaan Strategik Pembangunan Daerah". Makalah disampaikan pada Kursus Singkat *Capacity Building* untuk DPRD dengan tema: "Sistem Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian", tanggal 16-17 Maret 2006.

Buletin/Majalah/Koran

Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. 2005. "Strategi Mengembangkan Kawasan Guna Mempercepat Peningkatan Daya Saing Daerah". *Info Kajian BAPPENAS*. Vol. 2. No. 1. Hal.41-53.

Jawa Pos. 2012. "Ketika Para Petani di Batu "Merevolusi" Cara Bertaninya: Pupuk Kimia No, Organik Yes". *Jawa Pos*, 11 Januari 2012.

_____ 2012. "Siap Kembalikan Kejayaan Apel". *Jawa Pos*, 11 Januari 2012

Kuswantojo. 2005. "Peranan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Asas Pembangunan Berkelanjutan". *Infourdi*. Volume 18, Januari-April 2005.

Pasaribu, Maurits. 2006. "Perencanaan Pembangunan Daerah: Dimensi Sosial-Ekonomi, Tata Ruang dan Infrastruktur". *Infourdi*. Volume 21, Mei-November 2006.

Soegijoko, Budhy Tjahjati S. 2005. "Pembangunan Kota yang Berkelanjutan". *Infourdi*, Volume 18, Januari-April 2005.

Suara Media Nasional. 2012. "Launching Pengembangan Kawasan Organik". *Suara Media Nasional*, Edisi 67/IV/16-31 Januari 2012.

Warastri, Aufrida Wismi. 2012. "Siborong-Borong Jadi Sentra Sayur Organik". *Kompas*, 21 Mei 2012.

Multimedia

Apriantono, Anton. 2007. "Pertanian Organik dan Revitalisasi Pertanian". Pidato Menteri Pertanian RI disampaikan Pada Workshop dan Kongres II Maporina. Melalui <http://www.biotama.com> [diakses tanggal 03-10-2011].

Handoko, Agustinus. 2009. "Ujang Anak kemarin Sore dan Pertanian Organik". melalui www.kompas.com [diakses tanggal 26-5-2012].

- IFOAM. 2009. "Prinsip-prinsip Pertanian Organik". Melalui <http://www.ifoam.org/organic.facts> [diakses tanggal 29-9-2011].
- Liu, Pascal. 2007. *Peraturan, Standard dan Sertifikasi Untuk Ekspor Produk Pertanian*. Diterjemahkan oleh Diandra Language Services – Jakarta. Melalui <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/> [diakses tanggal 28-9-2011].
- Muluk, Khairul. 2007. "Kegagalan Dalam Pembangunan: Pelajaran Bagi Perencanaan Pembangunan Daerah". melalui <http://isjd.pdii.lipi.go.id> [diakses tanggal 7-3-2012].
- Pitono, Djoko. Tanpa Tahun. *Indikator Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan*. melalui www.elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/.../4046.pdf [diakses tanggal 30-6-2012].

Peraturan

- Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K).
- Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (*Good Agriculture Practices For Fruit And Vegetables*)